



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN AGAM



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
LPPD 2025**

2026



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran sebagai bahan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat.

LPPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 memuat informasi mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak, khususnya seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang telah memberikan data, informasi, serta dukungan dalam proses penyusunan LPPD ini. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini.

kami berharap agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah serta menjadi bahan

evaluasi bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Lubuk Basung, 20 Maret 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR GRAFIK xvi

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.1.1 Penjelasan Umum I-2

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah..... I-2

b. Data Geografis Wilayah..... I-3

c. Jumlah Penduduk..... I-8

d. Jumlah Kecamatan dan Nagari I-9

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai I-11

f. Realisasi APBD I-15

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah..... I-40

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah..... I-40

b. Visi dan Misi Kepala Daerah I-41

c. Kegiatan Pembangunan Daerah I-56

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... I-60

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.... II-1

2.1 Capaian Kinerja Makro..... II-1

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... II-3

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah II-3

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... III-1

3.1 Dasar Hukum III-1

3.2 Gambaran Umum..... III-6

3.3 Capaian Kinerja..... III-6

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL... IV-1

4.1 Bidang Urusan Pendidikan IV-1

4.2 Bidang Urusan Kesehatan..... IV-9

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum IV-25

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat IV-31

4.5 Bidang Urusan Sosial.....	IV-37
4.6 Bidang Urusan Trantibum Linmas	IV-49
4.7 Program dan Kegiatan	IV-68
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	
LAMPIRAN I PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH	
LAMPIRAN II CAPAIAN KINERJA IKK OUTCOME URUSAN PEMERINTAHAN	
LAMPIRAN III LAIN – LAIN	

DAFTAR TABEL

1.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam	I-3
1.2	Bencana Gerakan Tanah/Longsor di Kabupaten Agam	I-6
1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	I-8
1.4	Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Agam	I-9
1.5	Jumlah PNS berdasarkan Golongan.....	I-11
1.6	Jumlah PNS berdasarkan usia Tahun 2025.....	I-12
1.7	Jumlah PNS berdasarkan Golongan.....	I-14
1.8	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan	I-14
1.9	Anggaran, Realisasi, dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024-2025	I-15
1.10	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.....	I-16
1.11	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.....	I-17
1.12	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Komponen Pajak Daerah Kabupaten Agam	I-18
1.13	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Retribusi daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025	I-19
1.14	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Komponen Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025	I-20
1.15	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.....	I-21
1.16	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.....	I-22
1.17	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025	I-23
1.18	Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025	I-26
1.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025.....	I-27
1.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	I-28
1.21	Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun Anggaran 2025	I-29
1.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025	I-35
1.23	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	I-40
1.24	Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah	I-41
1.25	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi 1	I-56
1.26	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025-2029.....	I-62
1.27	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025-2029	I-62
1.28	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.....	I-63
1.29	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029.....	I-64
1.30	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025-2029.....	I-65
1.31	Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025-2029	I-66
2.1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Agam Tahun 2024 dan 2025	II-1
2.2	Predikat Kinerja	II-5
2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025.....	II-6
2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintahan Kabupaten Agam Tahun 2025	II-10
2.5	Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan	

	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-13
2.6	Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan Target Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	II-20
2.7	Realisasi Indikator Misi I Tahun 2025 Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani	II-24
2.8	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan LKE KEMENPANRB	II-27
2.9	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel.....	II-42
2.10	Nilai SAKIP Kabupaten Agam Tahun 2025	II-43
2.11	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025	II-45
2.12	Indeks Evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	II-46
2.13	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 .	II-48
2.14	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Agam Beberapa Tahun Terakhir.....	II-48
2.15	Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	II-50
2.16	Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dan 2025	II-57
2.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggarannya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026	II-59
2.18	Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2025	II-60
2.19	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2025.....	II-51
2.20	Tingkat Efektivitas Program	II-62
2.21	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Terlaksananya Birokrasi yang Bersih dan Akutabel	II-62
2.22	Realisais Indikator Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel...	II-64
2.23	Kelemahan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah dan Upaya Penyelesaiannya	II-66
2.24	Permasalahan Dalam Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dan Upaya Penyelesaiannya	II-67
2.25	Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Agam Tahun 2025.....	II-69
2.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	II-70
2.27	Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2025	II-70
2.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026.....	II-71
2.29	Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang Kapabel Tahun 2025.....	II-72
2.30	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel Tahun 2025	II-74
2.31	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel	II-75
2.32	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025	II-76
2.33	Kendala dan Solusi Permasalahan Pelayanan Publik	II-77
2.34	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-79
2.35	Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Targer Periode Akhir RPJMD Tahun 2021-2026	II-80
2.36	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	II-80
2.37	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	II-81

2.38	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025	II-82
2.39	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Nagari tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-83
2.40	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintah Nagari Pembangunan Jangka Menengah	II-83
2.41	Program dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025.....	II-84
2.42	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari.....	II-84
2.43	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025..	II-85
2.44	Realisasi Indikator Kinerja Misi II Menngkatnya Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2025	II-87
2.45	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Dan Usaha Mikro Tahun 2025	II-88
2.46	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-90
2.47	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	II-91
2.48	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan Tahun 2025	II-92
2.49	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Tahun 2025.....	II-94
2.50	Tingkat Efektivitas Program	II-96
2.51	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro	II-96
2.52	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah.....	II-99
2.53	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah tahun 2024 dan Tahun 2025.....	II-100
2.54	Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026	II-102
2.55	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2025.....	II-102
2.56	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2025.....	II-103
2.57	Perbandingan Capaian Kinerja dengan capaian Program Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2025.....	II-104
2.58	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kawasan Tahun 2025	II-104
2.59	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2025 dengan Tahun 2024	II-104
2.60	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026	II-104
2.61	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2025.....	II-104
2.62	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2025.....	II-104
2.63	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran	

	Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan.....	II-105
2.64	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025.....	II-107
2.65	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2025	II-108
2.66	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan Target Akhir RPJM Tahun 2021- 2026	II-108
2.67	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025.....	II-109
2.68	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025.....	II-110
2.69	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	II-111
2.70	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi III Tahun 2025 Mewujudkan Pembangunan Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana.....	II-112
2.71	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	II-113
2.72	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-114
2.73	Matriks Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	II-115
2.74	Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-115
2.75	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026	II-117
2.76	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Tahun 2025	II-117
2.77	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025	II-119
2.78	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup	II-119
2.79	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang.....	II-121
2.80	Kendala / Permasalahan Penataan Ruang	II-122
2.81	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-123
2.82	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026	II-123
2.83	Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2025.....	II-124
2.84	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2025.....	II-124
2.85	Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang.....	II-125
2.86	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 Berkurangnya Risiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan	II-125
2.87	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Risiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 ...	II-126
2.88	Kendala / Permasalahan Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi...	II-127
2.89	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026	II-128
2.90	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Risiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan	

	Tahun 2025	II-128
2.91	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan Tahun 2025.....	II-129
2.92	Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan.....	II-130
2.93	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2025 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter	II-131
2.94	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2025.....	II-132
2.95	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-134
2.96	Kendala dan Permasalahan dalam Pemenuhan Harapan lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah Tahun 2025	II-134
2.97	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter dalam Pembangunan Jangka Menengah....	II-135
2.98	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2025	II-136
2.99	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2025	II-136
2.100	Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter.....	II-137
2.101	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas.....	II-138
2.102	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-139
2.103	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026.....	II-140
2.104	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2025	II-141
2.105	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2025	II-142
2.106	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas	II-142
2.107	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2025 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing	II-144
2.108	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat	II-144
2.109	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-145
2.110	Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya pada Tingkat Pengangguran Terbuka	II-146
2.111	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029.....	II-147
2.112	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025....	II-147
2.113	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025	II-148
2.114	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025....	II-148
2.115	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2025	II-149

2.116	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	II-151
2.117	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	II-151
2.118	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2025	II-152
2.119	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2025	II-153
2.120	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.....	II-154
2.121	Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan Daerah	II-155
2.122	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025	II-156
2.123	Kendala Ketahanan Pangan dan Upaya Penyelesaiannya	II-156
	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029	II-158
2.124	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2025.....	II-158
2.125	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2025.....	II-159
2.126	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2025.....	II-159
2.240	Kendala Ketahanan Pangan dan Upaya Penyelesaiannya.....	II-301
2.241	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-302
2.242	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah Tahun 2025.....	II-303
2.243	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025.....	II-304
2.244	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah Tahun 2025.....	II-304
2.245	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja.....	II-305
2.246	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	II-308
2.247	Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya pada Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-308
2.248	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-309
2.249	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja Daerah Tahun 2025..	II-310
2.250	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024.....	II-311
2.251	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja Tahun 2024.....	II-311

2.252	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial.....	II-313
2.253	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	II-314
2.254	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-314
2.255	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya perlindungan sosial Tahun 2025.....	II-315
2.256	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Meningkatnya perlindungan sosial Tahun 2025.....	II-316
2.257	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Sasaran Meningkatnya perlindungan sosial Tahun 2025.....	II-316
2.258	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2025 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana.....	II-317
2.259	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.....	II-318
2.260	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	II-319
2.261	Matriks Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	II-319
2.262	Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	II-320
2.263	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-321
2.266	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2025.....	II-322
2.267	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	II-323
2.268	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.....	II-324
2.269	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya ketahanan daerah.....	II-326
2.270	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Ketahanan Daerah Tahun 2025 Dengan Tahun 2026.....	II-327
2.271	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-328
2.272	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Meningkatnya ketahanan daerah Tahun 2025.....	II-328
2.273	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah Tahun 2025.....	II-329

2.274	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah.....	II-329
2.275	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2025 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata.....	II-330
2.276	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar.....	II-331
2.277	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar Tahun 2024 Dengan Tahun 2025.....	II-332
2.278	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-333
2.279	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar Tahun 2025.....	II-334
2.280	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar Tahun 2025.....	II-336
2.281	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar.....	II-337
2.282	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya konektivitas wilayah.....	II-339
2.283	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya konektivitas wilayah Tahun 2024 Dengan Tahun 2025.....	II-340
2.284	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya konektivitas wilayah Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-341
2.285	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Meningkatnya konektivitas wilayah Tahun 2025.....	II-341
2.286	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya konektivitas wilayah Tahun 2025.....	II-342
2.287	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya konektivitas wilayah.....	II-343
2.288	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya pemukiman rumah layak huni.....	II-343
2.289	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Tahun 2024 Dengan Tahun 2025.....	II-344
2.290	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029.....	II-345
2.291	Program Dan Anggaran Yang Mendukung Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Tahun 2025.....	II-345
2.292	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Tahun 2025.....	II-346
2.293	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya pemukiman rumah layak huni.....	II-347
2.294	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2025 Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari.....	II-349

2.295 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya kemandirian desa.....II-350

2.296 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kemandirian desa Tahun 2024 Dengan Tahun 2025.....II-350

2.297 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kemandirian desa Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026.....II-351

2.298 Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya kemandirian desa Tahun 2025.....II-351

2.299 Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2024.....II-352

3.1 Sebaran Konstruksi Optimasi Lahan di Kabupaten Agam..... III-3

3.2 Realisasi Olah Lahan di Kabupaten Agam..... III-4

3.3 Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian..... III-5

4.1 Target, Realisasi, dan Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025 V-1

4.2 Alokasi Anggaran dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025 IV-3

4.3 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025 IV-7

4.4 Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025..... IV-7

4.5 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 V-12

4.6 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025..... IV-20

4.7 Dukungan Personil Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025..... IV-22

4.8 Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 IV-22

4.9 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 IV-25

4.10 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 IV-29

4.11 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum IV-29

4.12 Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025..... IV-30

4.13 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 IV-32

4.14 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Agam Tahun 2025 IV-33

4.15 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 IV-35

4.16 Permasalahan dan Solusi Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 IV-35

4.17 Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025.. IV-38

4.18 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025..... IV-41

4.19 Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025..... IV-43

4.20	Permasalahan dan Solusi Penerpaan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025.....	IV-44
4.21	Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025	IV-49
4.22	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025	IV-58
4.23	Dukungan Personil Personil Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Agam Tahun 2025	IV-62
4.24	Permasalahan dan Solusi Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025	IV-63
4.25	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025.....	IV-67
4.26	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan KesehatanTahun 2025	IV-74
4.27	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	IV-80
4.28	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	IV-82
4.29	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025	IV-84
4.30	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Tantribum Linmas Tahun 2025.....	IV-10

DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Agam	I-4
1.2	Penjabaran Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.....	I-43
1.3	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi I	I-43
1.4	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi II	I-44
1.5	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi III	I-45
1.6	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi IV	I-46
1.7	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi V.....	I-47
1.8	Penjabaran Visi dan Misi RPJMD 2025-2029.....	I-49
1.9	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi I	I-50
1.10	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi II	I-51
1.11	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi III	I-52
1.12	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi IV	I-53
1.13	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi V.....	I-54
1.14	Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi VI.....	I-56
3.1	Konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa	III-3

DAFTAR GRAFIK

2.1	Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.....	II-132
2.2	Perbandingan Angka Harapan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2025	II-139
2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam dan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2025.....	II-145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan ini disusun sebagai salah satu kewajiban daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya secara teknis dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini sebagaimana dituangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian penerapan standar pelayanan minimal dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta gambaran umum upaya pencapaian indikator-indikator tersebut. Ketentuan terkait teknis penyusunan LPPD diatur dalam pedoman penyusunan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dasar hukum penyusunan LPPD Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Regulasi ini berisi tentang pembentukan 14 (empat belas) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah, yang salah satunya adalah Kabupaten Agam.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lubuk Basung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021- 2041, secara astronomis wilayah Kabupaten Agam terletak antara 00° 01' 34"- 00° 28' 43" Lintang Selatan dan 99° 46' 39"- 100° 32' 50" Bujur Timur, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota

- Sebelah : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Selatan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Disamping itu wilayah Kabupaten Agam merupakan *enklave* yang mengelilingi wilayah kota Bukittinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan, 92 nagari dan 518 jorong. Hal ini berarti terjadi pemekaran administrasi pemerintahan nagari di Kabupaten Agam dari semula berjumlah 82 nagari menjadi 92 nagari.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, dijelaskan juga bahwa Luas wilayah Kabupaten Agam adalah 2.226.270 Km² atau 5,29% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu seluas 42.119.542 Km². Wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Agam adalah Kecamatan Palembayan dengan luas 349,77 Km² atau 15,71% dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Banuhampu dengan luas wilayah 28.48 Km² atau 1,27%. Luas wilayah Kabupaten Agam per kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam

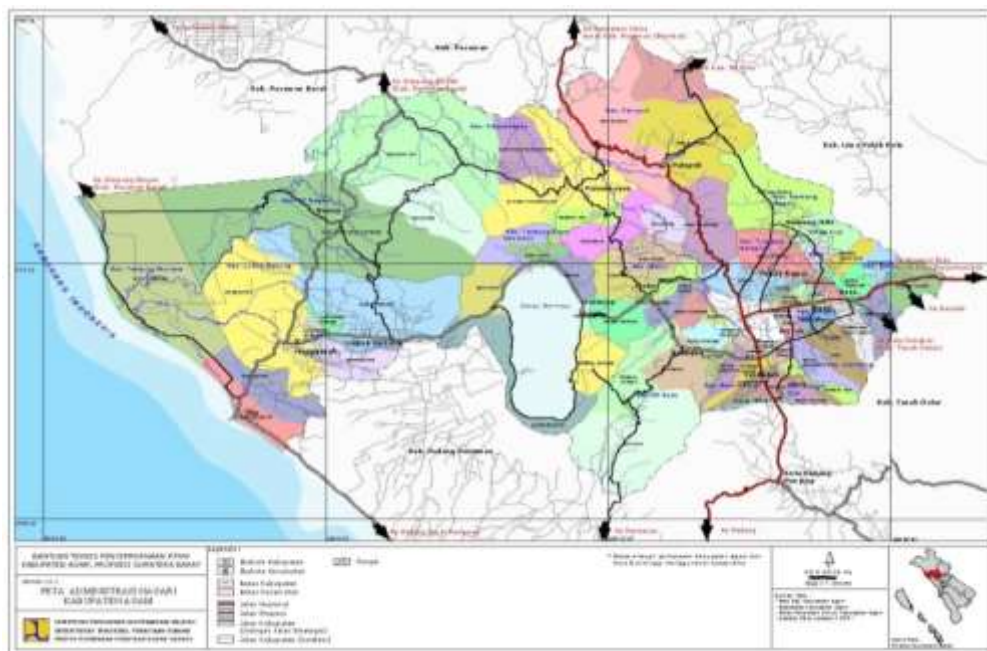
No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Tanjung Mutiara	205,73	9,24
2	Lubuk Basung	278,40	12,50
3	Ampek Nagari	268,69	12,06
4	Tanjung Raya	244,03	10,96
5	Matur	93,69	4,20
6	IV Koto	68,72	3,08
7	Malalak	104,49	4,69
8	Banuhampu	28,48	1,27
9	Sungai Pua	37,83	1,69
10	Ampek Angkek	30,66	1,37
11	Canduang	52,29	2,35
12	Baso	70,30	3,15
13	Tilatang Kamang	95,86	4,30
14	Kamang Magek	99,60	4,47
15	Palembayan	349,77	15,71
16	Palupuh	236,34	10,61
	Jumlah	2.226,27	100,00

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Secara umum, wilayah Kabupaten Agam terbentang dari barat ke timur pada ketinggian 0-2.891 meter diatas permukaan laut dengan rupa bumi berupa dataran rendah hingga dataran tinggi. Daerah ini memiliki kondisi iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22°C, curah hujan rata-rata per tahun berkisar 2.983,9 mm/tahun, dengan kelembaban udara sekitar 80,7% dan kecepatan angin rata-rata 1,3 Km/jam.

Wilayah Kabupaten Agam memiliki bentang alam yang bervariasi, terdiri dari pantai dengan panjang garis pantai 43 Km dengan 2 (dua) buah pulau yaitu Pulau Tengah (1 Km²) dan Pulau Ujung (1 Km). Disamping itu Kabupaten Agam juga memiliki 2 (dua) buah gunung yaitu Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 meter, serta 1 (satu) buah danau yaitu Danau Maninjau dengan luas sebesar 9.950 ha dan 3 (tiga) Sistem Wilayah Sungai (SWS) dengan 8 Daerah Aliran Sungai (DAS). Lebih jelasnya, gambaran wilayah Kabupaten Agam dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Agam



Sumber : RTRW Kab.Agam Tahun 2010-2030

Kabupaten Agam didukung oleh kondisi iklim yang baik, lahan yang subur, ketersediaan sumber daya air yang melimpah, serta curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian daerah, yang meliputi subsektor perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, hortikultura, dan peternakan.

Di sisi lain, Kabupaten Agam juga merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Daerah ini berpotensi mengalami berbagai jenis bencana alam, antara lain gempa bumi, abrasi, gerakan tanah atau longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan

tsunami. Berdasarkan Profil Rawan Bencana Tahun 2008, jenis-jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Agam meliputi:

- 1) **Sesar Aktif**, merupakan struktur patahan pada kerak bumi yang masih menunjukkan aktivitas pergerakan tektonik hingga saat ini. Keberadaan sesar aktif dicirikan oleh kelurusan morfologi permukaan, pergeseran lapisan batuan, serta keterkaitan spasial dengan sebaran pusat gempa bumi. Di Kabupaten Agam, jalur sesar aktif teridentifikasi melintasi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Palupuh, Palembayan, Matur, IV Koto, Banuhampu, dan Sungai Pua.
- 2) **Seismisitas Gempa**, merupakan potensi bencana yang disebabkan oleh pelepasan energi tektonik pada kerak bumi akibat aktivitas struktur geologi aktif. Di Kabupaten Agam, wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi berada pada jalur Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari kawasan Danau Singkarak, Kota Bukittinggi, hingga wilayah sekitar Bonjol di bagian barat laut.
- 3) **Tsunami**, merupakan gelombang laut besar yang terbentuk akibat perpindahan mendadak massa air, umumnya dipicu oleh gempa bumi tektonik bawah laut, longsoran dasar laut, atau letusan gunung api. Di Kabupaten Agam, potensi tsunami terutama berasal dari aktivitas subduksi lempeng di wilayah lepas pantai Sumatera Barat, di mana pergeseran vertikal dasar laut akibat gempa dapat menghasilkan gelombang yang merambat menuju pesisir. Wilayah pesisir dengan elevasi rendah yang berpotensi terdampak meliputi Jorong Subang-Subang, Jorong Labuhan, Jorong Muaro Putuih, Jorong Masang, Nagari Tiku Selatan, dan sebagian Nagari Bawan di Kecamatan Ampek Nagari, di mana gelombang tsunami dapat menembus lebih jauh ke daratan karena morfologi pesisir dan kemiringan topografi yang landai.
- 4) **Letusan Gunung Api**, merupakan proses pelepasan magma, gas, dan material piroklastik dari dapur magma ke permukaan bumi yang dapat menimbulkan aliran lava, awan panas, hujan abu, dan material vulkanik lain yang berdampak pada lingkungan sekitar. Di Kabupaten Agam, terdapat dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikek. Arah sebaran material letusan Gunung Marapi cenderung ke tenggara, sehingga wilayah yang perlu diwaspadai meliputi aliran Batang Sarik, Limo Kampuang, Tabek Kapalo Koto, Lukok Satu, Surau Baru, Padang Laweh, Lubuk, dan Pulungan. Sementara itu, potensi bahaya dari Gunung Tandikek relatif terbatas, hanya berisiko di sekitar Toboh, karena arah sebaran letusannya ke selatan dan aktivitasnya lebih kecil.
- 5) **Gerakan Tanah/Longsoran**, merupakan perpindahan massa tanah dan batuan akibat gaya gravitasi, dipicu oleh kemiringan lereng, sifat tanah/batuan, curah hujan, tutupan vegetasi, dan aktivitas manusia. Jenis utama di Kabupaten Agam meliputi:

- Jatuhan (*Falls*): Massa batuan atau tanah terlepas dari lereng curam, umumnya pada batuan tufa Kuarter di Ngarai Sianok. Pemicu utama adalah infiltrasi air hujan yang menambah berat dan melemah ikatan batuan.
- Gelinciran (*Slides*): Pergerakan cepat massa tanah/batuan sepanjang lereng akibat penurunan kohesi dari peningkatan kejenuhan air. Massa bergerak mulai dari pasir hingga bongkah >5 m, ditemukan di Jorong Galapuang, Sungai Lintabung.
- Nendatan (*Slumps*): Longsoran berbentuk lingkaran/tapal kuda dengan retakan permukaan, terjadi di lereng luar Gunung Singgalang (jalan Koto Tuo–Balingka dan Matur–Palembayan).

Untuk informasi lebih lengkap mengenai jenis gerakan tanah dan lokasinya, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Bencana Gerakan Tanah/Longsor di Kabupaten Agam

Keterangan	Kecamatan	Nagari
Jatuhan (<i>Debris Falls</i>)	Tanjung Raya	• Tanjung- Sani • Sungai Batang • Maninjau
	Palembayan	• Baringin • Ampek Koto Palembayan • Tigo Koto Silungkang
	Lubuk Basung	• Lubuk Basung
	Ampek Nagari	• Batu Kambiang
	Matur	• Matua Hilia
	IV Koto	• Balingka • Koto Gadang
	Malalak	• Malalak Timur
	Palupuh	• Koto Rantang • Pasia Laweh • Pagadih
Nendatan (<i>Slumps</i>)	Matur	• Tigo Balai
	Palembayan	• Baringin • Sungai Pua
	IV Koto	• Balingka
	Malalak	• Malalak Utara
Gelinciran (<i>Sliding</i>)	Palembayan	• Baringin • Ampek Koto Palembayan • Tigo Koto Silungkang
	Lubuk Basung	• Lubuk Basung
	Ampek Nagari	• Batu Kambing
	Matur	• Matua Hilir
	Palupuh	• Koto Rantang • Pasia Laweh

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2011-2030

- 6) Banjir**, banjir terjadi ketika debit air melebihi kapasitas penampang sungai atau sistem penampungan alami seperti rawa, danau, atau bendungan, sehingga air meluap ke daratan sekitarnya. Di Kabupaten Agam, fenomena ini umumnya terjadi pada sungai-

sungai primer seperti Batang Tiku, Batang Pingai, Batang Kalulutan, Batang Dareh, Batang Bawan, Batang Sitanang, bagian hilir Batang Simpang Jernih dan Simpang Keruh, serta Batang Layah, terutama pada dataran banjir (flood plain) dengan kemiringan topografi rendah. Selain itu, banjir juga terjadi di daerah rawa pesisir yang terhubung dengan aliran sungai hilir, di mana akumulasi air tertahan dan aliran balik (*backwater*) memperparah luapan. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain: Nagari Salareh Aia (Kec. Palembayan), Nagari Lubuk Basung (Kec. Lubuk Basung), Nagari Bawan, Batu Kambiang, dan Sitalang (Kec. Ampek Nagari), Nagari Tiku V Jorong (Kec. Tanjung Mutiara), Nagari Balingka (Kec. IV Koto), serta Nagari Pasia Laweh (Kec. Palupuah).

- 7) **Abrasi**, merupakan proses terkikisnya garis pantai sehingga daratan mundur ke laut, bagian dari perubahan muka air laut (Relative Sea Level Change – RSLC). Proses ini dipengaruhi oleh kondisi geologi, morfologi, jenis sedimen, tutupan vegetasi, iklim, dan dinamika laut, dengan gelombang dan arus laut sebagai faktor utama. Gelombang menghancurkan sedimen pantai, sedangkan arus mengangkut material yang terlepas. Di Kabupaten Agam, wilayah yang berpotensi terkena abrasi meliputi: Masang (± 800 m), Ujung Masang (± 1.100 m), Muaro Putuih (± 300 m), Ujung Labung (± 500 m), Pasia Paneh (± 200 m), dan Pelabuhan Tiku (± 100 m). Kerentanan tiap lokasi dipengaruhi kemiringan pantai, jenis sedimen, dan paparan gelombang.

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data agregat Semester II Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah 534,173 jiwa, dengan komposisi yang cukup berimbang yakni penduduk laki laki berjumlah 267,337 jiwa atau sebesar 50,04%, dan penduduk perempuan berjumlah 266,836 jiwa (49,95%). Ditinjau dari sebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Banuhampu. Selengkapnya sebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin pada Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (orang/km ²)
1	Tanjung Mutiara	17.789	16.949	34.738	205,73	168,85
2	Lubuk Basung	42.902	42.732	85.634	278,4	307,59
3	Tanjung Raya	19.350	19.477	38.827	244,03	159,11
4	Matur	9.790	9.880	19.670	93,69	209,95
5	IV Koto	13.295	13.595	26.890	68,72	391,30
6	Banuhampu	19.430	19.672	39.102	28,48	1.372,96
7	Ampek Angkek	22.800	22.969	45.769	30,66	1.492,79
8	Baso	18.760	19.114	37.874	70,3	538,75
9	Tilatang Kamang	18.550	19.009	37.559	95,86	391,81
10	Palupuh	7.763	7.510	15.273	236,34	64,62
11	Palembayan	17.832	17.219	35.051	349,77	100,21
12	Sungai Pua	14.200	13.859	28.059	37,83	741,71
13	Ampek Nagari	15.752	15.148	30.900	268,69	115,00
14	Candung	12.829	13.063	25.892	52,29	495,16
15	Kamang Magek	10.993	11.222	22.215	99,6	223,04
16	Malalak	5.302	5.418	10.720	104,49	102,59
	AGAM	267.337	266.836	534.173	2.226,27	239,94

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Agregat semester II Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Agam sangat bervariasi. Kecamatan Lubuk Basung memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 16.03% dari jumlah penduduk Kabupaten Agam, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Malalak yaitu sebesar 2%. Demikian halnya kepadatan penduduk antar kecamatan juga cukup bervariasi, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ampek Angkek dengan tingkat kepadatan sebesar 1.492,79 jiwa/Km² dan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Palupuh dengan tingkat kepadatan sebesar 64,62 jiwa/Km². Kepadatan penduduk ini sangat dipengaruhi oleh geografis daerah, dimana kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi ada disekitar Kota Bukittinggi yang merupakan pusat kegiatan ekonomi untuk Sumatera Barat bagian utara. Sementara kecamatan dengan kepadatan rendah umumnya berada pada kecamatan yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan atau pegunungan. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan penduduk pada 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Agam cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata rata tingkat pertumbuhan sebesar 0,44%.

D. Jumlah Kecamatan dan Nagari

Secara administrasi, Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan, 92 nagari dengan rincian sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Agam

NO	Kecamatan	Nagari	
1	Tanjung Mutiara	1	Tiku Selatan
		2	Tiku Utara
		3	Tiku V Jorong
		4	Durian Kapeh Darussalam
2	Lubuk Basung	5	Lubuk Basung
		6	Geragahan
		7	Kampung Pinang
		8	Kampung Tengah
		9	Manggopoh
3	Tanjung Raya	10	Tanjung Sani
		11	Sungai Batang
		12	Bayua
		13	Koto Kaciak
		14	Duo Koto
		15	Koto Gadang
		16	Anam Koto
		17	Koto Malintang
		18	Paninjauan
		19	Dalko
4	Matur	20	Matua Hilia
		21	Matua Mudiak
		22	Tigo Balai
		23	Lawang
		24	Parik Panjang
		25	Panta Pauh
5	Iv Koto	26	Sungai Landia
		27	Balingka
		28	Koto Tuo
		29	Guguk Tabek Sarajo
		30	Koto Panjang
		31	Sianok Anam Suku
		32	Koto Gadang
6	Banuhampu	33	Padang Lua
		34	Taluak Ampek Suku
		35	Pakan Sinayan
		36	Kubang Putih
		37	Ladang Laweh
		38	Cingkariang
		39	Sungai Tanang
7	Ampek Angkek	40	Batu Taba

		41	Biaro Gadang
		42	Lambah
		43	Panampung
		44	Ampang Gadang
		45	Pasia
		46	Balai Gurah
8	Baso	47	Koto Tinggi
		48	Tabek Panjang
		49	Simarasok
		50	Padang Tarok
		51	Salo
		52	Koto Baru
		53	Syngai Cubadak
		54	Koto Gadang
9	Tilatang Kamang	55	Koto Tengah
		56	Gadut
		57	Kapau
10	Palupuh	58	Koto Rantang
		59	Pasia Laweh
		60	Pagadih
		61	Nan Tujuh
		62	Nan Limo
11	Palembayan	63	Baringin
		64	Sipinang
		65	Sungai Puar
		66	Ampek Koto Palembayan
		67	Tigo Koto Silungkang
		68	Salareh Aia
		69	Salareh Aia Timur
		70	Salareh Aia Utara
		71	Salareh Aia Barat
12	Sungai Pua	72	Padang Laweh
		73	Sungai Pua
		74	Batagak
		75	Batu Palano
		76	Sariak
13	Ampek Nagari	77	Batu Kambing
		78	Sitalang
		79	Bawan
		80	Sitanang
14	Canduang	81	Canduang Koto Laweh
		82	Lasi
		83	Bukik Batabuah
15	Kamang Magek	84	Magek
		85	Kamang Hilia
		86	Kamang Mudiak
		87	Pauh Kamang Mudiak
		88	Kamang Tengah Anam Suku

16	Malalak	89	Malalak Utara
		90	Malalak Timur
		91	Malalak Selatan
		92	Malalak Barat

Sumber: Data DPMN Kabupaten Agam Tahun 2025 (diolah)

E. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai

Pemerintahan Kabupaten Agam memiliki 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 1 Badan Usaha Layanan Daerah (BULD), dan 16 Unit Kerja Kecamatan, dengan sebaran pegawai negeri sipil (PNS) tercantum pada tabel berikut. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada Tahun 2025 Kabupaten Agam memiliki jumlah PNS sebanyak 4.780 orang, yang mayoritas terdiri dari PNS Fungsional tertentu dengan jumlah 4.425 orang atau 92,57%. Ditinjau dari jenis kelamin PNS kondisi tahun 2025 didominasi oleh PNS Perempuan dengan jumlah 3.538 (74,02%) dari jumlah PNS yang ada. Kondisi ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fungsional tertentu	651	3116	3767
2	Fungsional umum	381	277	658
3	Struktural			
	Eselon II	25	5	30
	Eselon III	110	56	166
	Eselon IV	75	84	159
JUMLAH		1242	3538	4780

Sumber: Data BKPSDM Kabupaten Agam Tahun 2025 (diolah)

Faktor usia mempengaruhi pola kerja serta sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pencapaian target kinerja daerah. Usia PNS di Kabupaten Agam rata-rata berumur > 40 tahun yakni sebesar 3.776 orang atau 79%, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan usia Tahun 2025

No	Nama OPD	Usia >40	Usia <40	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	65	40	105
2	Sekretariat DPRD	16	5	21
3	Inspektorat	42	14	56
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	12	28
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	4	17
6	Badan Keuangan Daerah	19	5	24
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20	7	27
8	Badan Pendapatan Daerah	18	2	20
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	14	10	24
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15	6	21
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	2	21
12	Dinas Kesehatan	634	420	1054
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	15	6	21
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	10	21
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5	4	9
16	Dinas Lingkungan Hidup	19	9	28
17	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	26	5	31
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	51	12	63
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	11	8	19
20	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Ketenagakerjaan	13	4	17
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2338	314	2652
22	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23	5	28
23	Dinas Perhubungan	24	15	39
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	20	5	25
25	Dinas Pertanian	79	19	98

No	Nama OPD	Usia >40	Usia <40	JUMLAH
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19	6	25
27	Dinas Sosial	16	5	21
28	satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66	5	71
29	Kecamatan Ampek Angkek	11	1	12
30	Kecamatan Ampek Nagari	10	5	15
31	Kecamatan Banuhampu	7	4	11
32	Kecamatan Baso	10	2	12
33	Kecamatan Canduang	9	0	9
34	Kecamatan IV Koto	6	4	10
35	Kecamatan Kamang Magek	12	3	15
36	Kecamatan Lubukbasung	10	4	14
37	Kecamatan Malalak	7	5	12
38	Kecamatan Matur	10	4	14
39	Kecamatan Palembayan	7	4	11
40	Kecamatan Palupuh	7	3	10
41	Kecamatan Sungai Pua	9	1	10
42	Kecamatan Tanjung Mutiara	10	2	12
43	Kecamatan Tanjung Raya	11	2	13
44	Kecamatan Tilatang Kamang	13	1	14
JUMLAH		3.776	1.004	4.780

Sumber: Data BKPSDM Kabupaten Agam Tahun 2025 (diolah)

PNS di Kabupaten Agam rata-rata memiliki golongan ruang III dengan jumlah 2.987 orang atau 62,49% dari jumlah PNS yang ada. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	306	1060	1366
2	Golongan III	723	2264	2987
3	Golongan II	193	214	407
4	Golongan I	20	0	20
	JUMLAH	1242	3538	4780

Sumber: Data BKPSDM Kabupaten Agam Tahun 2025 (diolah)

Tingkat pendidikan ASN mempengaruhi indeks profesionalitas ASN. Rata-rata PNS di Kabupaten Agam berpendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 3.348 orang atau 70,04% dari total jumlah PNS yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sampai dengan SD	13	0	13
2	SMP/Sederajat	46	3	49
3	SLTA/Sederajat	196	100	296
4	Diploma I		4	4
5	Diploma II	10	16	26
6	Diploma III	84	453	537
7	Strata 1 (S1) /Sederajat	721	2627	3348
8	Strata 2 (S2)/Sederajat	171	334	505
9	Strata 3 (S3)/Sederajat	1	1	2
	Jumlah Total	1242	3538	4780

Sumber: Data BKPSDM Kabupaten Agam Tahun 2025 (diolah)

F. Realisasi APBD

1) Pendapatan Daerah

a) Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Agam yang dianggarkan dan disajikan pada APBD Kabupaten Agam, bersumber dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Dana Transfer; dan
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Tahun 2025, Pendapatan Daerah secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.1.572.035.369.949,78 atau 102,13% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, realisasi pendapatan daerah meningkat sebesar Rp.45.364.496.145,07 atau 2,97%. Berikut tergambar realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Agam dan pertumbuhannya selama tahun 2025 s.d tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9
Anggaran, Realisasi, dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran : 2024 dan 2025

NO	Uraian	2024			2025*			Pertumbuhan Realisasi (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.618.685.458,00	164.717.557.879,71	75,00	205.074.782.436,00	202.739.875.120,78	98,86	23,08
	Pajak Daerah	76.257.322.185,00	46.865.864.045,00	61,46	86.734.345.026,00	82.630.688.214,00	95,20	76,31
	Retribusi Daerah	85.692.286.273,00	93.339.107.790,00	109,62	96.151.303.597,00	99.084.402.933,00	103,05	5,48
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.275.591.000,00	13.729.582.467,00	67,69	13.807.124.697,00	13.807.124.697,00	100,00	0,61
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.393.486.000,00	10.189.003.577,71	27,25	8.321.409.176,00	7.217.659.276,78	86,74	(29,16)
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.413.582.342.506,00	1.361.215.315.925,00	96,30	1.330.080.359.258,46	1.365.295.494.829,00	102,65	0,30
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.193.585.646.762,00	1.179.461.441.857,00	98,82	1.162.999.457.949,00	1.196.484.684.057,00	102,88	1,44
	Dana Bagi Hasil Pajak	10.437.798.000,00	12.317.757.000,00	118,01	13.874.758.000,00	14.683.527.000,00	105,83	19,21
	Dana Bagi Hasil SDA	10.342.274.000,00	10.837.882.000,00	104,79	1.854.983.000,00	1.962.656.000,00	105,80	(81,89)
	DBH Lainnya	-	-	-	3.307.702.000,00	3.307.702.000,00	100,00	100,00
	Dana Alokasi Umum	864.219.315.000,00	860.911.170.294,00	99,62	863.326.777.000,00	893.639.603.361,00	103,51	3,80
	Dana Alokasi Khusus	308.586.259.762,00	295.394.632.563,00	95,73	280.635.237.949,00	282.891.195.096,00	100,80	(4,23)
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	101.679.525.000,00	101.679.525.000,00	100,00	100.339.408.000,00	98.028.894.550,00	97,12	(3,59)
	Dana Penyesuaian (Dana Desa, Dana Insentif Fi	101.679.525.000,00	101.679.525.000,00	100,00	100.339.408.000,00	98.028.894.550,00	97,12	(3,59)
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	67,68	66.141.493.309,46	70.781.916.222,00	107,02	(11,60)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	67,68	63.741.493.309,46	64.881.946.222,00	101,79	(18,97)
	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.400.000.000,00	5.899.970.000,00	245,83	100,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	442,01
	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	0,00	0,00	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	100,00
	PENDAPATAN DAERAH	1.633.951.027.964,00	1.526.670.873.804,71	93,43	1.539.155.141.754,46	1.572.035.369.949,78	102,13	2,97

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Agam

Anggaran, realisasi dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.10
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025		Realisasi		Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
	Awal (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah	207.819.815.431,00	205.074.782.496,00	202.739.875.120,78	98,86	12,90
Pendapatan Transfer	1.365.498.227.740,00	1.330.080.359.258,46	1.365.295.494.829,00	102,64	86,85
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,25
Jumlah	1.573.318.043.171,00	1.539.155.141.754,46	1.572.035.369.949,78	102,13	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APD Awal tahun anggaran 2025, PAD ditargetkan sebesar Rp.207.819.815.431,00, dan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 berkurang sebesar Rp.2.745.032.935,00 menjadi Rp.205.074.782.496,00.

Selama tahun 2025, PAD terealisasi sebesar Rp. 202.739.875.120,78 atau 98,86% dari target yang telah ditetapkan. Adapun target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD selama Tahun Anggaran 2025, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.11
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Komponen
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025		Realisasi		Kontribusi terhadap PAD (%)
	Awal (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pajak Daerah	91.558.350.536,00	86.794.945.026,00	82.630.688.214,00	95,20	40,76
Retribusi Daerah	94.860.860.488,00	96.151.303.597,00	99.084.402.933,00	103,05	48,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.000.000.000,00	13.807.124.697,00	13.807.124.697,00	100,00	6,81
Lain-lain PAD Yang Sah	7.400.604.407,00	8.321.409.176,00	7.217.659.276,78	86,73	3,56
Jumlah PAD	207.819.815.431,00	205.074.782.496,00	202.739.875.120,78	98,86	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

(a) Pajak Daerah

Komponen pertama dari PAD adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan pengaturan nomenklatur pajak daerah yang mengacu pada surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2023 Hal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF, sehingga pada APBD tahun anggaran 2025, telah dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur pajak daerah, dimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan serta Pajak Parkir disajikan pada jenis **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**.

Selama tahun 2025, Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp82.630.688.214,00 atau 95,20% atas target yang telah ditetapkan. Adapun anggaran, realisasi dan kontribusi dari masing-masing rincian Pajak Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Komponen
Pajak Daerah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2025		Kontribusi untuk Pajak Daerah (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Reklame	1.026.500.000,00	997.888.322,00	97,21	1,21
2	Pajak Air Tanah	450.000.000,00	514.128.154,00	114,25	0,62
3	Pajak Sarang Burung Walet	2.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.357.399.593,00	733.917.479,00	21,86	0,89
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.000.000.000,00	5.552.631.653,00	50,48	6,72
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT)	8.955.203.933,00	9.489.447.730,00	105,97	11,48
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	28.130.000.000,00	30.418.860.794,00	108,14	36,81
a	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.000.000.000,00	5.936.481.066,00	118,73	7,18
b	PBJT-Tenaga Listrik	21.550.000.000,00	22.085.127.869,00	102,48	26,73
c	PBJT-Jasa Perhotelan	1.500.000.000,00	2.312.421.071,00	154,16	2,80
d	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000,00	20.586.293,00	102,93	0,02
e	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	60.000.000,00	64.244.495,00	107,07	0,08
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	21.459.046.658,00	24.796.528.682,00	115,55	30,01
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.666.794.842,00	10.127.285.400,00	104,76	12,26
	Jumlah	86.794.945.026,00	82.630.688.214,00	95,20	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah yang tertinggi adalah PBJT-Jasa Perhotelan (154,16%) yang diikuti oleh PBJT-Makanan dan/atau Minuman (118,73%), dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (115,55%). Sementara capaian realisasi pajak daerah yang terendah adalah Pajak Sarang Burung Walet yang tidak terealisasi sama sekali, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (21,86%) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) (50,48%). Untuk kontributor tertinggi terhadap realisasi pajak daerah adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Pajak Penerangan Jalan yakni sebesar 30,01% yang diikuti oleh PBJT-Tenaga Listrik sebesar 26,73%.

(b) Retribusi Daerah

Selanjutnya komponen Pendapatan Daerah berikutnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selama tahun 2025, retribusi daerah terealisasi sebesar Rp99.084.402.933,00 (103,05%) dari target sebesar Rp96.151.303.597,00, yang terdiri dari 3 jenis retribusi dengan realisasi masing-masing adalah sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum, dengan realisasi sebesar Rp97.599.739.623,00 atau 103,22% dari anggarannya,
- Retribusi Jasa Usaha, dengan realisasi sebesar Rp993.066.400,00 atau 82,60% dari anggarannya, dan
- Retribusi Perizinan Tertentu, dengan realisasi sebesar Rp491.596.910,00 atau 122,89% dari anggarannya.

Untuk lebih rincinya anggaran, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Anggaran, Realisasi, dan
Kontribusi Rincian Retribusi Daerah
Berdasarkan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025		Kontribusi rincian untuk Retribusi berdasarkan Jenis Retribusi Daerah (%)	Kontribusi untuk Retribusi Daerah (%)
		(Rp)	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
I	Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	93.684.139.597,00	96.737.341.833,00	103,26	99,12	97,63
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	732.128.000,00	732.270.790,00	108,21	0,81	0,80
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	12.750.000,00	25,50	0,01	0,01
4	Retribusi Pelayanan Pasar	52.896.000,00	46.952.000,00	88,76	0,05	0,05
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	30.000.000,00	10.425.000,00	34,75	0,01	0,01
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	94.549.163.597,00	97.599.739.623,00	103,23		98,50
II	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	199.800.000,00	202.550.000,00	101,38	20,40	0,20
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.200.000,00	26.880.000,00	106,67	2,71	0,03
3	Retribusi Terminal	21.000.000,00	13.978.000,00	66,56	1,41	0,01
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	83.800.000,00	38.474.000,00	45,91	3,87	0,04
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	25,12	0,25
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	235.000.000,00	172.359.000,00	73,34	17,36	0,17
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.340.000,00	13.058.000,00	64,20	1,31	0,01
8	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	362.000.000,00	276.267.400,00	76,32	27,82	0,28
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	1.202.140.000,00	993.066.400,00	82,61		1,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	491.596.910,00	122,90	100,00	0,50
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	491.596.910,00	122,90		0,50
	Jumlah Retribusi	96.151.303.597,00	99.084.402.933,00	103,05		

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa jenis retribusi yang memberikan kontribusi tertinggi untuk retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Umum sebesar 98,50%.

Untuk Retribusi jenis Retribusi Jasa Umum, capaian dan realisasi tertinggi adalah pada Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan capaian sebesar 103,26% dari anggarannya sebesar Rp.93.684.139.597,00 dengan kontribusi sebesar 99,12%. Sementara untuk capaian realisasi terendah adalah Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebesar 25,50% dan memberikan kontribusi sebesar 0,01% untuk Retribusi Jasa Umum.

Selanjutnya untuk jenis Retribusi Jasa Usaha, capaian realisasi tertinggi adalah Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar 106,67% dan diikuti oleh Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 101,38%. Capaian ini tidak dibarengi dengan

persentase kontribusi yang diberikan untuk Retribusi Jasa Usaha. Kontributor tertinggi untuk jenis retribusi ini adalah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 27,82% dengan realisasi Rp276.267.400,00 dan diikuti oleh Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 25,12% dengan realisasi Rp249.500.000,00.

Jenis retribusi daerah yang terakhir adalah Retribusi Perizinan Tertentu, berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dengan capaian realisasi sebesar 122,90%, dan hanya berkontribusi sebesar 0,50% untuk retribusi daerah.

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Untuk PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yakni Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas penyertaan modal pada BUMD (deviden) dari Bank Nagari, terealisasi sebesar Rp13.807.124.697,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

(d) Lain-Lain PAD yang Sah

Komponen PAD selanjutnya adalah Lain-Lain PAD yang Sah, terealisasi sebesar Rp7.217.659.276,78 atau 86,73% selama tahun 2025. Berikut adalah anggaran, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian komponen Lain-Lain PAD yang Sah:

Tabel 1.14
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Komponen
Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2025		Kontribusi rincian untuk Lain-Lain PAD yang Sah (%)
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	540.124.150,00	1.080,25	7,48
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	192.961.000,00	96,48	2,67
3	Jasa Giro	2.128.264.935,00	1.311.217.769,00	61,61	18,17
4	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	480.819.894,00	96,16	6,66
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	1.785.254.170,36	59,51	24,73
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00	159.757.957,00	72,62	2,21
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	297.830.363,00	570.973.679,20	191,71	7,91
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.546.295.230,00	1.576.235.919,22	101,94	21,84
10	Pendapatan BLUD	128.018.648,00	600.314.738,00	468,93	8,32
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.321.409.176	7.217.659.277	86,73	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk komponen Lain-Lain PAD yang Sah, capaian realisasi tertinggi atas anggarannya adalah Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar 1.080,25% dan

dikuti oleh Pendapatan dari Pengembalian sebesar 101,94%. Sementara kontributor tertinggi untuk Lain-Lain PAD yang Sah adalah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar 24,73% dengan realisasi sebesar Rp1.785.254.170,36.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan capaian realisasi masing-masing pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.294.513.578.607,00 (102,41%) dan Rp98.028.894.550,00 (97,11%). Kontribusi tertinggi dari Pendapatan Transfer masih berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yakni 94,82%, Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya berkontribusi sebesar 5,18%. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.15
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Pendapatan Transfer Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontr. Terhadap Pendapatan Transfer %
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.263.938.865.949,00	1.294.513.578.607,00	102,42	94,82
a	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.162.999.457.949,00	1.196.484.684.057,00	102,87	87,64
b	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,11	7,18
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah (dari Pemerintah Provinsi)	66.141.493.309,46	70.781.916.222,00	107,01	5,18
	JUMLAH	1.330.080.359.258,46	1.365.295.494.829,00	102,64	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya. Anggaran dan realisasi rincian komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

Uraian		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Kontr. Terhadap TPP
		Rp	Rp		%
I	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.874.758.000,00	14.683.527.000,00	105,82	1,08
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.854.983.000,00	1.962.656.000,00	105,80	0,14
3	DBH Lainnya	3.307.702.000,00	3.307.702.000,00	100,00	0,24
4	Dana Alokasi Umum	863.326.777.000,00	893.639.603.961,00	103,51	65,45
5	Dana Alokasi Khusus	280.635.237.949,00	282.891.195.096,00	100,80	20,72
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.162.999.457.949,00	1.196.484.684.057,00	102,87	87,64
II	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
1	Dana Desa	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,11	7,18
2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,11	7,18
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat (TPP)	1.263.938.865.949,00	1.294.513.578.607,00	102,41	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan masih memberikan kontribusi tertinggi, yakni 92,06% dengan capaian realisasi sebesar 98,82%.

Selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah, merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Bentuk Bagi Hasil Pajak. Untuk melihat anggaran, realisasi dan kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

Uraian		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Kontr. Terhadap TPP-Dana Perimbangan
		Rp	Rp		%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	24.429.412.397,00	18.872.307.712,00	77,25	23,57
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.705.108.306,00	8.603.716.296,00	73,50	10,74
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.402.525.919,00	29.085.373.814,00	57,71	36,32
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.076.183.993,00	451.565.111,00	41,96	0,56
5	Bagi hasil pajak rokok	30.703.940.129,00	23.061.386.135,00	75,11	28,80
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	67,68	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontributor tertinggi pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 berasal dari Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yakni 36,32% dengan capaian realisasi sebesar 57,71%. Sementara Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan menjadi kontributor terendah yakni 0,56% dengan capaian realisasi sebesar 41,96%.

c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp750.000.000,00 pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dan tidak berubah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan capaian realisasi sebesar Rp738.000.000,00 (98,40%). Pendapatan ini merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Pendapatan Hibah Sanitasi.

b) Permasalahan dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

- (1) Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang terus diupayakan maksimal mengatasinya sesuai kemampuan sumber daya daerah. Adapun permasalahan yang masih dihadapi saat ini dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

- (a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah
 - (b) Pendataan wajib pajak dan pemutakhiran data pajak daerah serta retribusi daerah belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh.
 - (c) Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih lemah, karena belum diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi
 - (d) Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PAD terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - (e) Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah masih rendah
 - (f) Adanya perubahan ketentuan dan aturan yang harus ditindak lanjuti segera melalui Peraturan Kepala Daerah selama tahun 2025.
 - (g) Adanya perubahan regulasi yang mengurangi atau menghapus beberapa jenis sumber penerimaan PAD.
- (2) Untuk mengatasi permasalahan diatas, arah kebijakan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam untuk masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
- (a) Pendapatan Asli Daerah, adalah dengan:
 - i. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - ii. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam melalui pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan akurasi data base pajak dan retribusi secara bertahap.
 - iii. Revitalisasi sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, berupa pembayaran non tunai dengan pemanfaatan IT dan sistem jemput bola.
 - iv. Mengkaji dan melengkapi regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
 - v. Meningkatkan edukasi kesadaran wajib Pajak dan Retribusi dengan pendekatan persuasif melalui penyuluhan/sosialisasi pajak menggunakan media baliho maupun media elektronik serta jika diperlukan untuk melakukan tindakan represif terhadap penunggak retribusi dan pajak daerah berupa penertiban pemberlakuan sanksi denda, bunga dan atau kenaikan pajak terutang sesuai diatur dalam regulasi.
 - vi. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;
 - vii. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - viii. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD

- ix. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- x. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- xi. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi).
- xii. Menerapkan reward dan punishment kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku.

(b) Pendapatan Transfer

- i. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.
 - ii. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readiness criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat
 - iii. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
 - iv. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib.
 - v. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaran alokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.
- (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan melalui hibah.

A) Belanja Daerah

a) Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2025, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.681.571.356.812,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.534.849.060.997,00 atau 91,27%. Belanja daerah ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer. Rincian anggaran, realisasi dan kontribusi dari masing-masing komponen belanja daerah, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Anggaran, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Belanja Daerah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

Uraian		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Kontr. Terhadap Belanja Daerah
		Rp	Rp		%
I	Belanja				
1	Belanja Operasi	1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	91,03	78,89
2	Belanja Modal	161.100.473.285,00	139.007.975.111,00	86,29	9,06
3	Belanja Tak Terduga	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	89,35	0,21
	Jumlah Belanja	1.494.842.184.491,00	1.353.024.954.397,00	90,51	88,15
II	Transfer				
1	Tranfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari	4.905.065.721,00	-	-	-
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	100,00	11,85
	Jumlah Transfer	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00	97,37	11,85
	Jumlah Belanja Daerah	1.681.571.356.812,00	1.534.849.060.997,00	91,27	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas, untuk komponen belanja, belanja operasi masih menjadi kontributor tertinggi terhadap belanja daerah yakni sebesar 78,89% dengan capaian realisasi sebesar 91,03% terhadap anggarannya. Untuk Tranfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari belum memberikan kontribusi terhadap belanja daerah dengan tidak terealisasinya pada tahun 2025. Ini merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten Agam yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2025.

Adapun rincian **belanja** berdasarkan jenisnya, adalah sebagai berikut:

(1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Selama tahun anggaran 2025, belanja operasi direalisasikan sebesar Rp1.210.861.436.370,00 atau 91,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.330.207.636.340,00. Rincian dari realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kont. terhadap belanja operasi %
5.1.01	Belanja Pegawai	808.312.618.792,00	750.224.137.285,00	92,81	61,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.248.696.185,00	388.176.440.957,00	86,60	32,06
5.1.03	Belanja Hibah	67.527.421.363,00	66.846.534.628,00	57,83	5,52
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	6.118.900.000,00	5.615.000.000,00	91,76	0,46
Jumlah		1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	91,03	

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Pegawai direalisasikan sebesar Rp750.224.137.285,00 atau 92,81%, dan memberikan kontribusi tertinggi terhadap realisasi belanja operasi yakni 61,96%.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Selama tahun anggaran 2025, realisasi belanja modal adalah sebesar Rp139.007.975.111,00 atau 86,29 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp161.100.473.285,00. Rincian dari realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kont. terhadap belanja modal %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.922.582.011,00	29.175.409.504,00	83,54	2,41
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.314.252.065,00	24.250.418.079,00	88,78	61,96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.534.544.165,00	79.222.627.499,00	86,55	32,06
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.379.095.044,00	5.488.641.329,00	86,04	5,52
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	950.000.000,00	870.878.700,00	91,67	0,46
Jumlah		161.100.473.285,00	139.007.975.111,00	86,29	

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing objek belanja modal dapat direalisasikan lebih dari 83% dengan capaian tertinggi realisasi pada belanja modal aset lainnya yakni 91,67%. Belanja modal aset lainnya ini direalisasikan untuk pembelian Software sebesar Rp450.000.000,00 dan Pembuatan Dokumen Amdal Tapian Kualo sebesar Rp420.878.700,00. Sementara kontibutor terhadap belanja modal tertinggi berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 61,96% diikuti oleh Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 32,06%.

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Selama tahun anggaran 2025, realisasi belanja tidak terduga adalah sebesar Rp3.157.818.416,00 atau 89,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.534.074.866,00. Realisasi belanja tidak terduga ini digunakan antara lain untuk Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Lahar Dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam, penanganan bencana alam tanah longsor di Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, dan Penanganan Bencana Alam Banjir di Padang Laweh-Alahan Anggang Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan.

Transfer berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) didefenisikan sebagai **pengeluaran uang oleh entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain**. Selama tahun anggaran 2025, realisasi transfer adalah sebesar Rp181.824.106.600,00 atau 97,37% dari

anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp186.729.172.321,00. Belanja ini direalisasikan untuk belanja bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 92 Nagari yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Disamping realisasi belanja berdasarkan jenisnya, penjabaran anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program kegiatan yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.749.802.200,00	3.238.809.628,00
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.896.550.861,00	10.084.495.574,00
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	249.251.700,00	213.368.641,00
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	208.021.000,00	98.723.172,00
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.214.083.900,00	4.583.740.590,00
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13.899.700,00	7.007.000,00
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	503.831.000,00	475.161.150,00
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	459.559.965,00	397.173.500,00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.766.283.342,00	7.550.597.462,00
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.215.192.701,00	995.028.429,00
13	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	53.080.000,00	17.468.500,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	904.408.100,00	664.908.518,00
15	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	123.613.400,00	30.090.800,00
16	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	197.816.156,00	95.134.400,00

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI (Rp)
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	68.201.800,00	46.923.400,00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00
19	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13.254.300,00	8.025.000,00
20	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.722.500,00	3.580.000,00
21	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	269.968.500,00	230.184.925,00
22	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	169.280.000,00	163.253.000,00
23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	216.140.000,00	214.676.530,00
24	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	369.648.000,00	4.310.000,00
25	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00
26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.690.434.696,00	736.902.085,00
27	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.121.032.000,00	2.591.961.633,00
28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.488.247.299,00	94.208.307.393,00
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	56.509.220,00	54.154.900,00
30	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.837.942.432,00	2.668.512.718,00
31	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.364.100,00	3.096.710,00
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	620.652.493,00	502.332.500,00
33	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	700.000.000,00	677.445.255,00
34	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	958.695.411,00	856.040.708,00
35	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19.934.568.092,00	19.014.390.089,00
37	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.947.166.424,00	2.367.660.358,00

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI (Rp)
38	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	222.370.000,00	181.824.000,00
39	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.698.783.350,00	10.934.487.487,00
40	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	193.108.938.387,00	187.408.238.493,00
41	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	9.097.800,00	3.521.000,00
42	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	525.518.419,00	411.534.056,00
43	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	75.795.000,00	70.612.600,00
44	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	116.487.000,00	104.030.860,00
45	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	746.550.452,00	690.363.825,00
46	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.180.000.000,00	1.129.309.900,00
47	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	734.056.100,00	707.524.600,00
48	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	606.076.200,00	213.646.672,00
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00
50	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.480.225.157,00	1.162.939.805,00
51	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.983.375,00	102.613.550,00
52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.898.709.070,00	65.800.180.851,00
53	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.175.000,00	20.764.800,00
54	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.458.790.362,00	945.039.680,00
55	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.021.000,00	6.195.000,00
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	282.000.000,00	260.158.736,00
57	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	117.947.500,00	79.251.200,00

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI (Rp)
58	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	834.586.910,00	785.598.097,00
59	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	348.366.700,00	303.347.598,00
60	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	279.546.800,00	160.535.174,00
61	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	165.646.000,00	134.116.850,00
62	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	275.928.500,00	123.335.934,00
63	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	111.314.050,00	24.350.000,00
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	3.257.647.998,00	3.074.763.930,00
65	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.164.558.000,00	663.915.424,00
66	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	624.325.000,00	328.418.800,00
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	260.000.000,00	258.890.939,00
68	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	134.029.000,00	127.836.200,00
69	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	222.421.036,00	155.781.600,00
70	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.148.695.900,00	996.430.370,00
71	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	393.668.300,00	340.545.660,00
72	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	65.525.838,00	32.214.000,00
73	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.791.970.225,00	25.430.905.081,00
74	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	499.253.600,00	421.521.656,00
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	983.041.914.374,00	898.999.111.874,00
76	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00
77	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100.000.000,00	85.226.200,00
78	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.250.811.058,00	3.860.407.448,00

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI (Rp)
79	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.860.400.148,00	6.791.210.597,00
80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.289.176.843,00	2.058.669.057,00
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.130.327.145,00	962.166.852,00
82	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.490.729.430,00	1.351.142.726,00
83	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.400.000,00	2.309.000,00
84	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	483.418.000,00	288.581.680,00
85	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.086.000,00	23.947.500,00
86	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	35.906.000,00	33.215.900,00
87	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.768.201.617,00	4.125.220.918,00
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.915.429.675,00	1.637.203.720,00
89	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.679.800.000,00	2.660.669.440,00
90	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00
91	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.239.341.125,00	4.609.264.927,00
92	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.262.294.655,00	3.139.712.626,00
93	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	284.751.187,00	264.925.109,00
94	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.512.800,00	1.485.000,00
95	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	365.368.751,00	304.524.876,00
96	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	133.637.800,00	117.188.200,00
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	136.998.820,00	50.289.070,00
98	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6.693.800,00	3.717.550,00
99	PROGRAM PENATAAN DESA	100.502.000,00	98.922.300,00

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI (Rp)
100	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	50.450.000,00	50.414.417,00
101	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	249.960.101,00
102	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	322.021.000,00	274.337.437,00
103	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	951.355.200,00	865.716.535,00
104	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	3.630.669.643,00	3.548.059.220,00
105	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	90.000.000,00	80.731.800,00
106	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	61.016.260,00	60.401.300,00
107	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	694.283.000,00	243.720.700,00
108	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	129.215.790,00	13.512.000,00
109	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.423.481.929,00	3.198.625.350,00
110	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	144.877.200,00	123.625.480,00
111	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	83.605.000,00	57.173.300,00
112	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	83.095.000,00	8.088.900,00
113	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	78.958.025,00	22.774.017,00
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.024.504.100,00	669.071.887,00
115	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.555.433.456,00	1.292.928.480,00
116	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	335.135.000,00	326.171.758,00
117	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00
118	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.695.043.020,00	1.419.814.208,00
120	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.433.225,00	24.567.900,00

NO	NAMA PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI (Rp)
121	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.031.305.025,00	448.296.100,00
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.413.927.724,00	70.291.065.053,00
123	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.314.844.338,00	901.486.624,00
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	402.958.168,00	321.711.450,00
125	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.041.274.600,00	1.607.219.933,00
126	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	17.617.780,00	-
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.500.000,00	12.133.700,00
128	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	68.961.200,00	64.206.400,00
129	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	736.967.592,00	201.235.850,00
	JUMLAH	1.681.571.356.812,00	1.534.849.060.997,00

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Disamping realisasi anggaran berdasarkan program-program yang telah ditetapkan, realisasi belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.22
Anggaran dan Realisasi Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.239.750.770,00	4.585.514.715,00	654.236.055,00	87,51
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	1.132.026.872,00	97,97
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	199.139.843.750,00	192.991.366.082,00	6.148.477.668,00	96,91
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.989.397.859,00	4.568.824.075,00	2.420.573.784,00	65,37
5	Badan Pendapatan Daerah	11.184.585.833,00	9.501.892.163,00	1.682.693.670,00	84,96

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.114.758.409,00	6.154.386.859,00	960.371.550,00	86,50
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.044.326.251,00	4.577.074.847,00	467.251.404,00	90,74
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.603.569.811,00	4.820.708.430,00	782.861.381,00	86,03
9	Dinas Kesehatan	307.674.379.835,00	278.615.256.591,00	29.059.123.244,00	90,56
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.525.570.587,00	9.786.677.263,00	738.893.324,00	92,98
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.109.009.158,00	6.122.093.665,00	986.915.493,00	86,12
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.739.980.521,00	2.190.566.432,00	549.414.089,00	79,95
13	Dinas Lingkungan Hidup	16.267.427.182,00	14.991.077.508,00	1.276.349.674,00	92,15
14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	15.969.752.199,00	12.927.224.757,00	3.042.527.442,00	80,95
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	119.451.989.276,00	103.905.502.395,00	15.546.486.881,00	86,99
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	6.862.611.275,00	6.305.498.526,00	557.112.749,00	91,88
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.791.168.094,00	3.066.774.380,00	724.393.714,00	80,89
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	641.917.699.627,00	591.447.039.644,00	50.470.659.983,00	92,14
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.790.162.947,00	11.891.557.103,00	898.605.844,00	92,97
20	Dinas Perhubungan	25.544.423.648,00	24.350.904.445,00	1.193.519.203,00	95,33
21	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	6.566.946.993,00	4.806.513.472,00	1.760.433.521,00	73,19
22	Dinas Pertanian	34.889.684.491,00	27.947.453.076,00	6.942.231.415,00	80,10
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.907.485.421,00	6.610.730.703,00	3.296.754.718,00	66,72
24	Dinas Sosial	5.229.909.843,00	4.726.423.063,00	503.486.780,00	90,37
25	Inspektorat Daerah	10.781.827.427,00	9.425.370.561,00	1.356.456.866,00	87,42
26	Kecamatan Ampek Angkek	2.247.703.180,00	2.100.721.091,00	146.982.089,00	93,46
27	Kecamatan Ampek Nagari	2.146.228.824,00	1.873.690.264,00	272.538.560,00	87,30

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
28	Kecamatan Banuhampu	2.146.563.998,00	1.877.761.708,00	268.802.290,00	87,48
29	Kecamatan Baso	1.902.226.702,00	1.772.846.292,00	129.380.410,00	93,20
30	Kecamatan Candung	1.959.132.020,00	1.758.871.301,00	200.260.719,00	89,78
31	Kecamatan IV Koto	1.632.226.690,00	1.521.828.566,00	110.398.124,00	93,24
32	Kecamatan Kamang Magek	1.961.047.970,00	1.817.788.735,00	143.259.235,00	92,69
33	Kecamatan Lubuk Basung	2.244.097.189,00	2.093.489.767,00	150.607.422,00	93,29
34	Kecamatan Malalak	1.686.862.928,00	1.577.335.598,00	109.527.330,00	93,51
35	Kecamatan Matur	1.598.564.658,00	1.527.585.847,00	70.978.811,00	95,56
36	Kecamatan Palembayan	1.745.499.633,00	1.555.577.599,00	189.922.034,00	89,12
37	Kecamatan Palupuh	1.856.612.055,00	1.721.759.643,00	134.852.412,00	92,74
38	Kecamatan Sungai Pua	2.003.035.646,00	1.780.554.866,00	222.480.780,00	88,89
39	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.014.839.742,00	1.791.740.217,00	223.099.525,00	88,93
40	Kecamatan Tanjung Raya	2.461.323.977,00	2.122.934.602,00	338.389.375,00	86,25
41	Kecamatan Tilatang Kamang	2.261.616.504,00	2.019.387.465,00	242.229.039,00	89,29
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.530.950.032,00	13.967.532.954,00	1.563.417.078,00	89,93
43	Sekretariat Daerah	47.872.289.635,00	42.378.850.728,00	5.493.438.907,00	88,52
44	Sekretariat DPRD	52.146.414.803,00	48.588.815.952,00	3.557.598.851,00	93,18
	Total Belanja	1.681.571.356.812,00	1.534.851.336.497,00	146.720.020.315,00	91,27

*Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah*

b) Arah kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketentuan Belanja *Mandatory* serta urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan

pilihan sesuai potensi daerah. Dalam pengalokasian belanja daerah, substansi kegiatan yang dibiayai wajib mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, serta dalam penganggarannya berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain wajib mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, alokasi belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Agam adalah dengan melakukan Rasionalisasi Belanja tanpa mengganggu Belanja Wajib Tampung, antara lain Belanja Gaji dan Tunjangan, belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya, belanja yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Agam, P1 Musrenbang RKPD 2025 tingkat Kecamatan dan pembayaran untuk Penerangan Jalan Umum

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2025 pada masing-masing jenis belanja daerah, adalah sebagai berikut:

- (1) Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD).
- (2) Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- (3) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintahan Nagari dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nagari dengan ketentuan:

- i. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA) dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi SiLPA mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun 2023 dan memperhatikan tren SiLPA 3 tahun anggaran sebelumnya. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah selama Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.23
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	1.633.951.027.964,00	1.526.673.825.804,71	93,43
2.	Belanja	1.681.571.356.812,00	1.534.851.336.497,00	91,27
	Surplus/(Defisit)	(47.620.328.848,00)	(8.177.510.692,29)	17,17
3.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	100,00
	SiLPA Tahun 2023	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	100,00
4.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (Bank Nagari)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5.	Pembiayaan Netto	47.620.328.848,00	47.620.328.848,02	100,00
	Koreksi SiLPA	0,00	136.494.530,00	
6.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025	0,00	39.579.312.685,73	

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Agam mengalami Defisit sebesar Rp8.177.510.692,29 atau 17,17% dari defisit yang telah dianggarkan. Untuk menutupi defisit ini maka digunakan SiLPA tahun sebelumnya (2023) sebesar Rp48.620.328.848,02 yang dianggarkan dan direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan. Selain penerimaan pembiayaan, pada tahun 2025 juga dianggarkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan 100%.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (existing) dengan kondisi yang diharapkan “gap expectation”. Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen

sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Agam melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa sektor pembangunan, sebagai berikut.

Tabel 1.24
Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah 2025

Permasalahan	Isu Strategis
❖ Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah ❖ Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah ❖ Belum optimalnya pengelolaan sumber daya aparatur	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan baik
❖ Belum Optimalnya Gerakan Nagari Madani ❖ Belum kuatnya sinergitas pemerintah daerah dengan perantau dalam pembangunan daerah	Belum semua nagari mencapai Nagari Madani Level
❖ Masih rendahnya produktifitas komoditi pertanian ❖ Masih rendahnya nilai tambah produk pertanian	Sektor pertanian belum optimal memberi daya ungkit terhadap perekonomian
❖ Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro ❖ Nilai tambah produk usaha mikro belum berkembang	Melambatnya Pertumbuhan Usaha Mikro
❖ Destinasi pariwisata belum berkembang ❖ Promosi wisata belum maksimal	Sektor Pariwisata belum optimal berperan sebagai penggerak ekonomi
❖ Rendahnya pengelolaan lingkungan hidup ❖ Pembangunan infrastruktur dasar belum menyeluruh ❖ Tingginya resiko bencana	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rendahnya Infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana
❖ Belum optimalnya mutu layanan kesehatan dan capaian SPM ❖ Belum optimalnya mutu layanan pendidikan ❖ Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak ❖ Belum optimalnya daya saing pemuda	Masih rendahnya kualitas pendidikan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi merupakan penjabaran dari visi yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Pada Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis serta isu pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan diatas, sehubungan Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, maka dalam LKPJ Tahun 2025 ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yang dijelaskan lebih

lanjut dalam sub bab berikut :

1.1.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

Rumusan Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

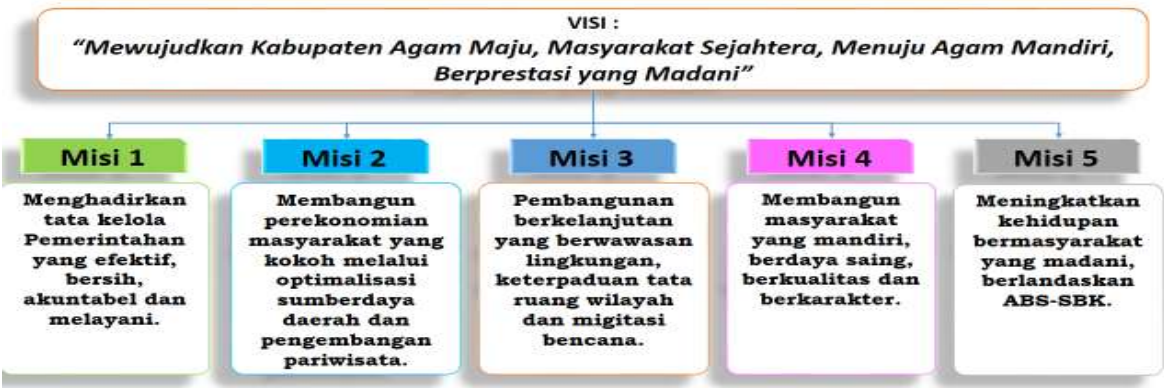
“Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”

Dalam kalimat visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang akan dicapai untuk mewujudkan Visi RPJP Kabupaten Agam Tahun 2005-2025 yaitu Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani. Kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. **Agam Maju**, selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Perubahan kearah yang lebih baik melingkupi semua aspek, yaitu lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, lebih baik dalam membangun ekonomi, lebih baik dalam membangun sumber daya manusia, lebih bijak memanfaatkan sumber daya alam.
2. **Masyarakat Sejahtera**, dimaknai sebagai situasi masyarakat Agam yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok
3. **Agam Mandiri**, mengandung arti kemandirian yang mengakar dari nilai agama, sosial budaya dan potensi daerah di segala bidang dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan kemitraan dengan semangat persatuan dan kesatuan “Barek Sapikua Ringan Sajinjiang didukung oleh Tali Tigo Sapilin”.
4. **Berprestasi**, mengandung makna adanya suatu dorongan, bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan terbaik. Untuk terwujudnya hal tersebut dituntut kreativitas, inovasi dan proaktif dari setiap lapisan masyarakat dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada serta mengatasi tantangan sehingga mampu berkompetisi di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan misi pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Penjabaran Visi dan Misi RPJMD 2021-2026



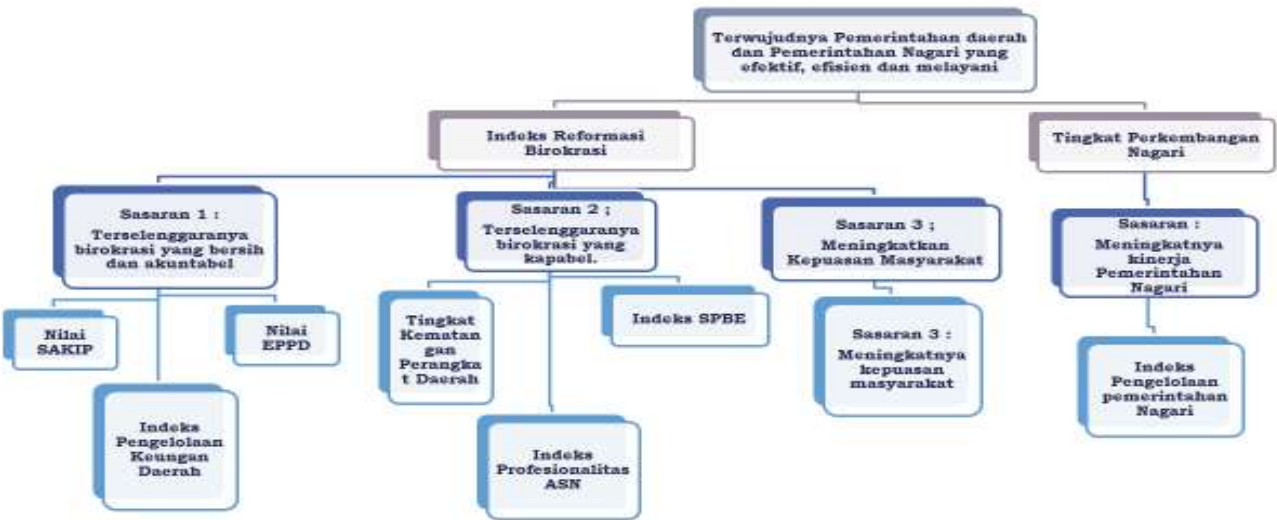
Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2021-2026

Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, diuraikan dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada periode 2021 -2026 yakni:

Misi 1, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.

Misi ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal, demikian halnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat, jauh dari tindakan yang merugikan daerah, dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Tujuan dan sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani sebagaimana digambarkan dalam kerangka logis sebagai berikut :

Gambar 1.3
Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi I

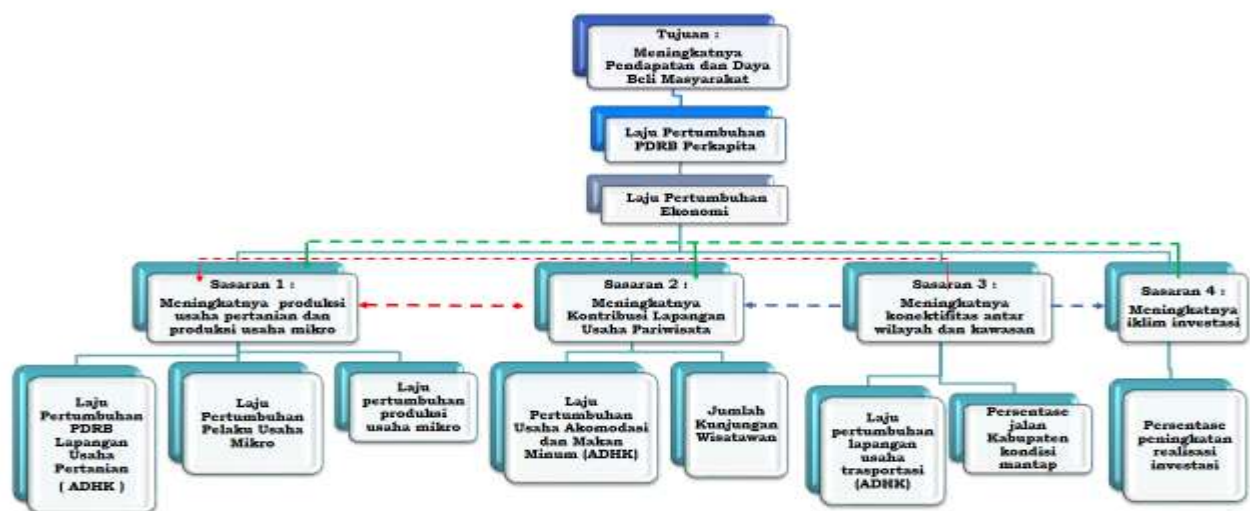


Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2021-2026

Misi II, Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.

Misi ini merupakan salah satu unsur utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera secara lebih merata, yaitu dengan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan dan daya beli masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha mikro. Tujuan dan sasaran mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata sebagaimana digambarkan dalam kerangka logis sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi II



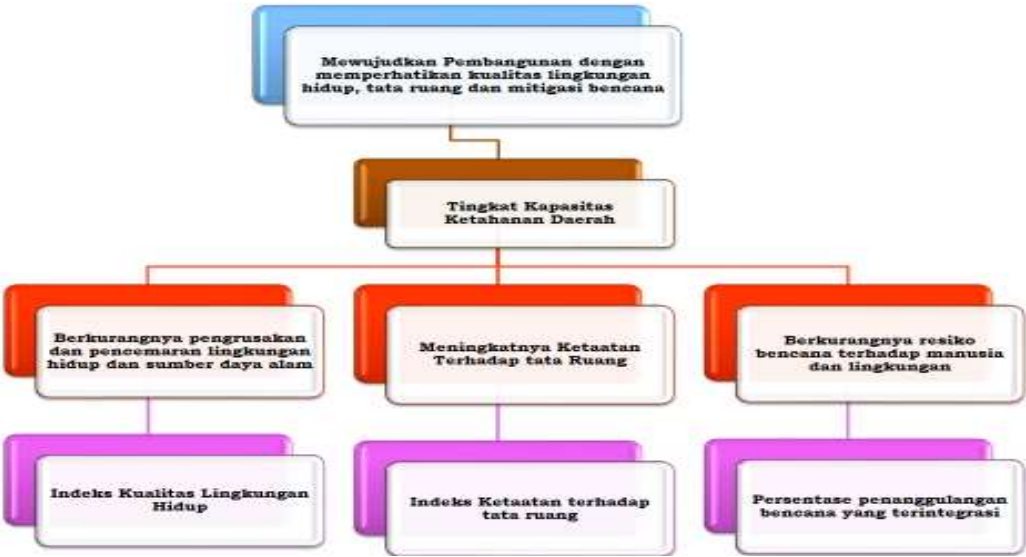
Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2021-2026

Memperhatikan kerangka logis tersebut terdapat tiga fokus pembangunan ekonomi yang ditetapkan berdasarkan potensi dan kondisi eksisting Kabupaten Agam yaitu pariwisata, pertanian dan sektor Usaha Mikro/industri pengolahan, hal ini karena ketiga sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja. Fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Agam ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Propinsi untuk memajukan usaha pertanian dan menumbuhkan wirausahawan baru pada usaha mikro, kecil dan menengah di berbagai sektor.

Misi III, Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menerapkan tata ruang dengan konsisten. Walaupun Kabupaten Agam rawan bencana, namun dampak bencana terhadap alam dan manusia harus diminimalisir. Kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat harus dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, taat pada asas tata ruang dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup, ketaatan terhadap tata ruang dan mitigasi bencana. Tujuan dan sasaran Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana sebagai disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.5
Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi III



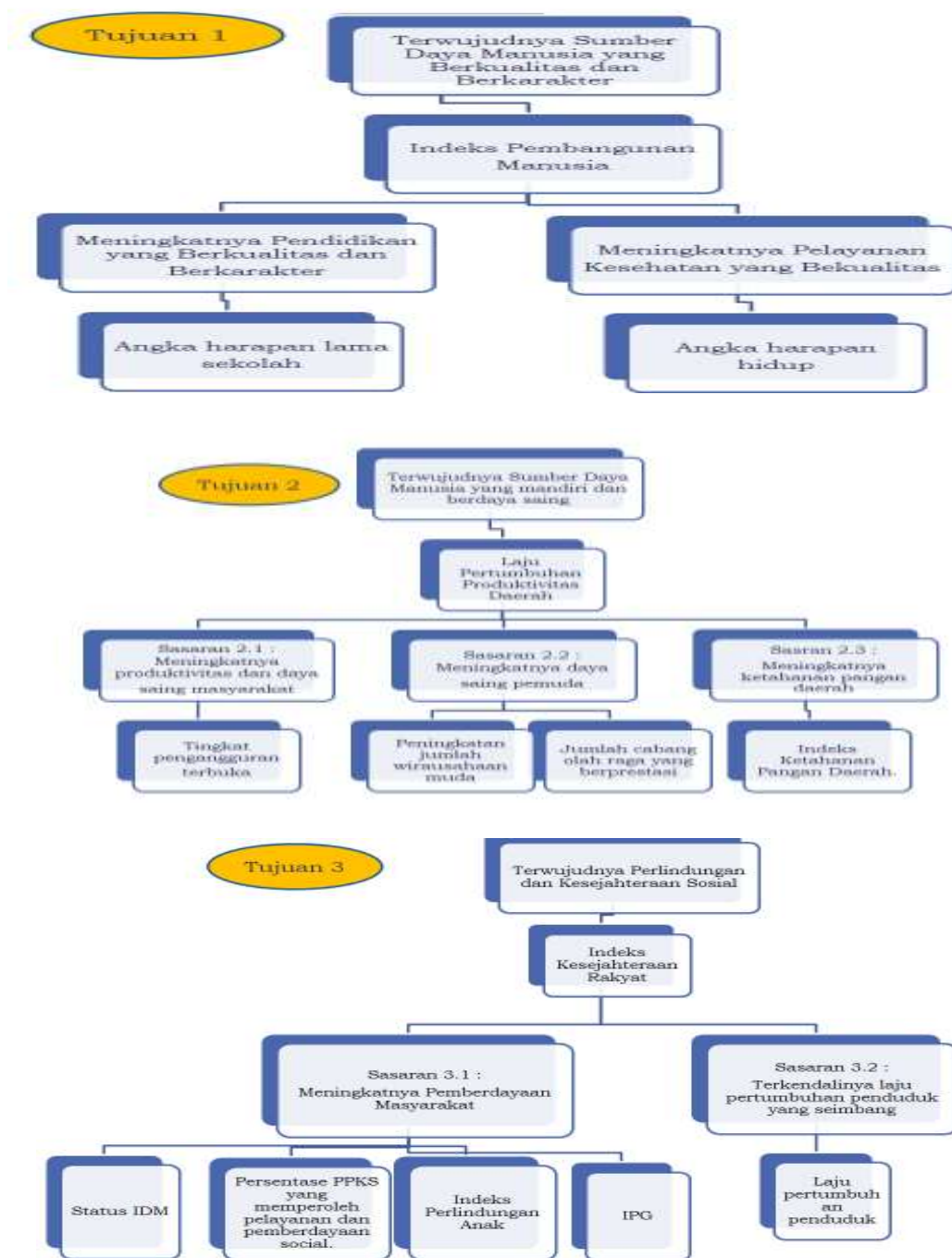
Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2021-2026

Misi IV, Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.

Misi ini merupakan upaya untuk membangun masyarakat Kabupaten Agam, utamanya generasi muda agar lebih berdaya saing, kreatif, inovatif, produktif dengan kepribadian kuat dan baik, sehingga mampu menghadapi tantangan kemajuan zaman, era digitalisasi dan industrialisasi. Untuk itu pendidikan dan kesehatan berkualitas dan unggul harus dapat diakses dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan gender, ketahanan keluarga, merupakan arus utama dalam mendukung pelaksanaan misi ini.

Tujuan dan sasaran membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter adalah sebagai berikut :

Gambar 1.6
Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi IV



Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2021-2026

Misi V, Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK

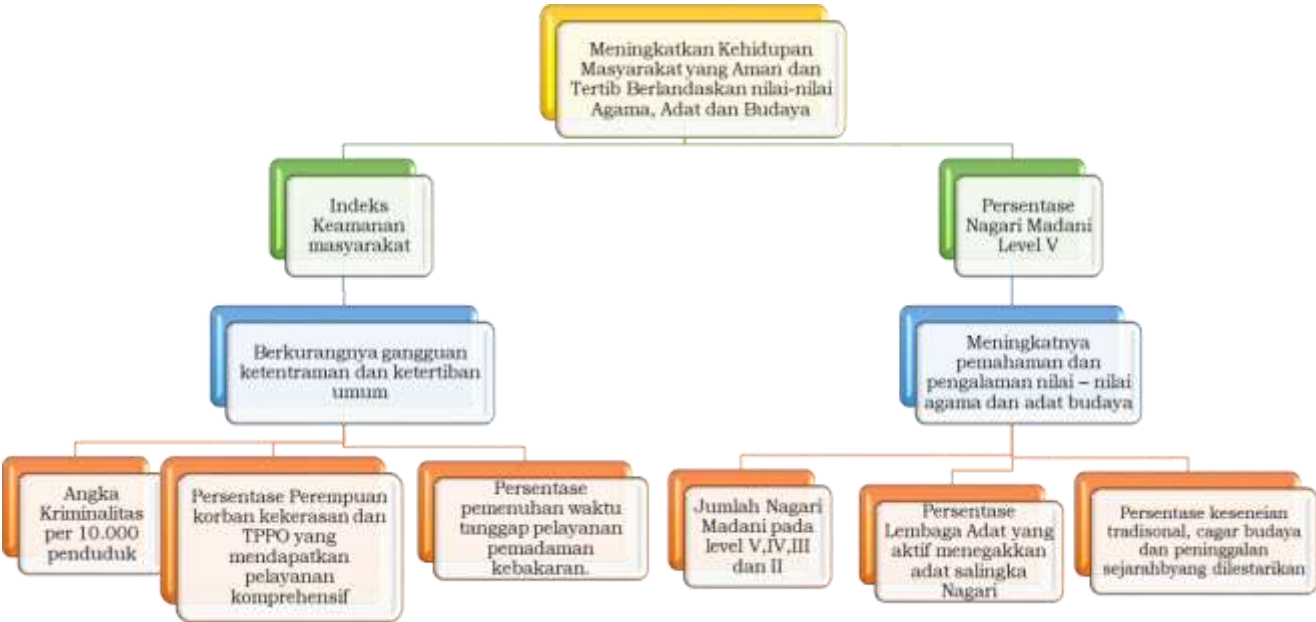
Kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Agam menjunjung tinggi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, artinya bahwa nilai-nilai adat sebagai kebiasaan orang Minang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Adat mengatur hubungan manusia sesama manusia, baik perseorangan maupun bermasyarakat dan berbangsa. Tujuannya adalah membentuk individu yang berbudi luhur, berbudaya dan beradab. Dengan demikian diharapkan

akan melahirkan suatu masyarakat yang aman dan damai, sehingga memungkinkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia, dunia dan akhirat.

Kehidupan masyarakat yang madani telah menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Agam yang secara eksplisit diuraikan dan disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Secara operasionalnya dalam setiap perencanaan lima tahunan dan tahunan kehidupan madani selalu menjadi tujuan pembangunan Kabupaten Agam dan dicanangkan sebagai sebuah gerakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lebih konkretnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Nagari Madani adalah nagari yang religius/islami, yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis dan terbuka (inklusi), gotong royong dan kekeluargaan.

Pada RPJMD Tahun 2021–2026, Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 tersebut tetap digunakan dan menjadi pedoman untuk mengukur ketercapaian Misi 5 ini, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Gambar 1.7
Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi V



Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2021-2026

Selanjutnya pencapaian Visi, misi beserta tujuan dan sasaran di Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 diatas, menjadi pondasi dasar untuk melanjutkan pembangunan daerah pada tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025 -2029 yang telah dimulai pada RKPD Perubahan Tahun 2025.

1.1.2. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

Rumusan Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran periode pertama Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Tahun 2025 -2045 dan merupakan janji Kepala Daerah/Wakil Kepala yang hendak diwujudkan pada periode masa jabatannya, yakni sebagai berikut:

“Agam Madani Yang Maju, Adil Dan Sejahtera”

Visi diatas mengandung kata kunci yaitu : Agam Madani, Maju, Adil dan Sejahtera, yang merupakan cita-cita yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi diatas mengandung makna:

- 1. Agam Madani**, mengandung makna cita cita untuk mewujudkan masyarakat Agam yang religius dan berperadaban maju, berbasiskan pada nilai–nilai, norma–norma, hukum dan moral Agama, dan ‘Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai’. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis, terbuka (inklusif), gotong royong dan kekeluargaan. Masyarakat yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, bahu membahu dalam mensejahterakan masyarakat dan menguatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah SWT. Masyarakat yang bahu membahu melindungi kampung dan masyarakat dari segala ancaman penyakit masyarakat (narkoba, minuman keras, perjudian, pornografi/ pornoaksi, asusila, kriminalitas dan lainnya), menghidupkan budaya produktif dan mencerdaskan kehidupan anak nagari.
- 2. Maju**, terwujudnya Kabupaten Agam yang berkembang secara terpadu, mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhanarganya secara berkelanjutan.
- 3. Adil**, tercapainya keseimbangan pembangunan sebagai upaya pemerataan hasilnya. Adil dalam artian proporsional dan profesional. Adil dalam arti kewilayahan dan seluruh dimensi sektor kehidupan. Menyentuh semua sisi secara proporsional dan profesional setiap nagari, setiap segmen kehidupan, setiap kelompok sosial masyarakat, baik aspek jasmani maupun rohani.
- 4. Sejahtera**, Pemenuhan kebutuhan dasar lahir dan batin manusia seperti pangan, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang sehat dan damai. Lebih dari itu, kesejahteraan juga mencakup perasaan aman, nyaman dan puas dalam kehidupan sehari–hari, serta adanya peluang untuk berkembang dan mencapai potensi penuh dalam kehidupan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi “Agam Madani Yang Maju Adil dan Sejahtera” ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025- 2029, yakni :

Gambar 1.8
Penjabaran Visi dan Misi RPJMD 2025-2029



Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Tahun 2025 – 2029, diuraikan dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada periode 2025 -2029, sebagai berikut:

Misi I, Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”

Misi ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan karakter masyarakat Kabupaten Agam yang religius, menjunjung tinggi adat istiadat, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” mencerminkan keterpaduan antara nilai agama Islam dan adat Minangkabau sebagai dasar dalam membentuk tatanan sosial masyarakat yang harmonis, adil, dan berakhlak.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan misi pembangunan sosial budaya melalui **Gerakan Penguatan ABS-SBK Berbasis Nagari** dengan tagline *Bangkik dari Surau*, sebagai bagian dari strategi menjaga dan memperkuat identitas daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Program Unggulan Agam Religius dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu :

- a) Gerakan Nagari Madani;
- b) Insentif bagi Pondok Pesantren, Garin, Penyuluh, Guru TPA/MDTA, guru Tahfiz dan Imam Masjid serta Beasiswa ke Timur Tengah;
- c) Menciptakan Nagari *Creative Hub* berbasis Masjid.

Melalui pendekatan holistik dan berbasis kearifan lokal, diharapkan terbangun masyarakat Agam yang tangguh secara spiritual, kokoh dalam budaya, dan siap menghadapi dinamika zaman secara bermartabat dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai*” sebagaimana tergambar dalam kerangka logis sebagai berikut :



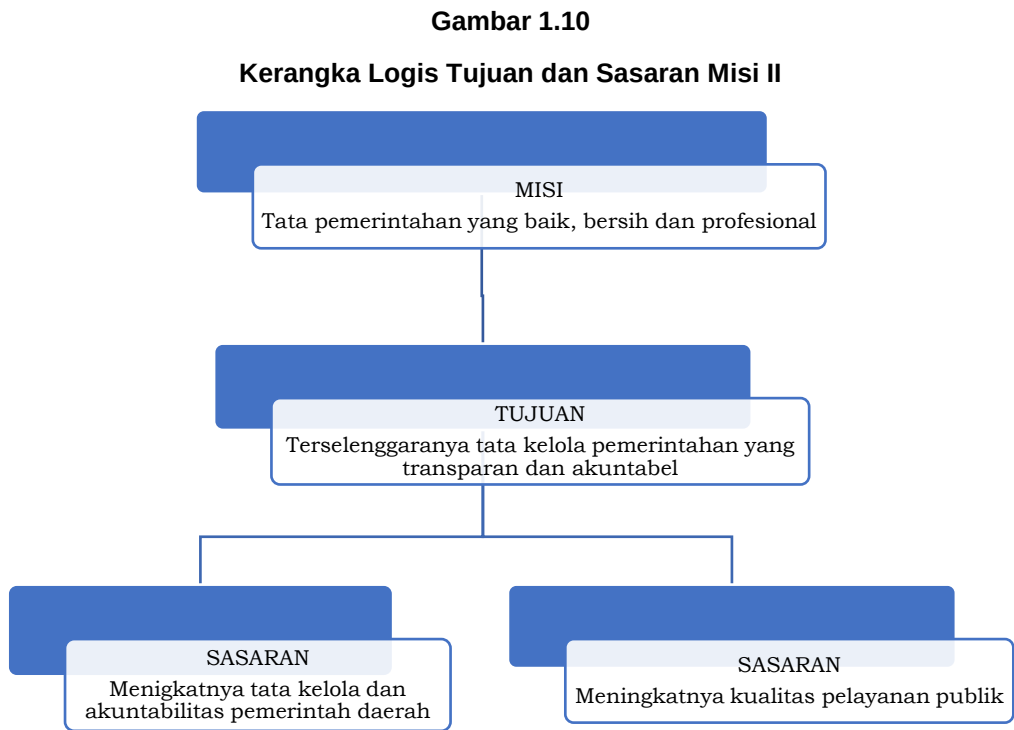
Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2025-2029

Misi II, Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

Misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintahan yang bersih (*clean government*) berarti terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan integritas tinggi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, pemerintahan profesional mengutamakan kompetensi aparatur, etos kerja yang tinggi, serta sistem birokrasi yang modern dan adaptif terhadap perubahan.

Sebagai bentuk konkret dari upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan Program Unggulan Agam Melayani, yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berfokus pada kepuasan publik. Program ini dilaksanakan melalui percepatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta pembangunan fasilitas layanan terpadu di tingkat kecamatan. Inisiatif ini diperkuat melalui **Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi**, yang mendorong transformasi kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dan sasaran mewujudkan Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional sebagaimana tergambar dalam kerangka logis sebagai berikut :



Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2025-2029

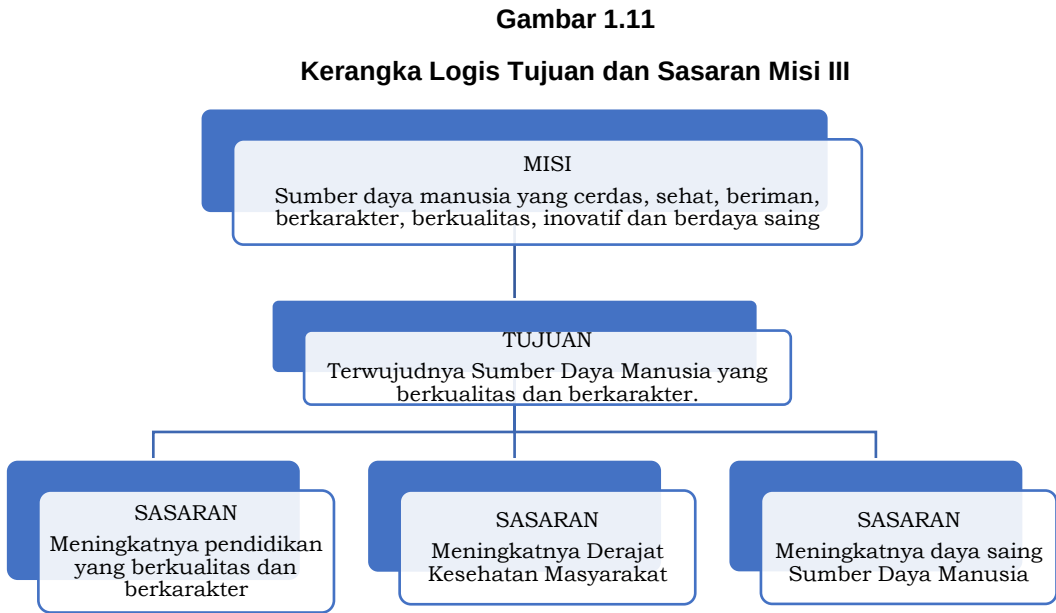
Misi III, Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pondasi utama dalam mewujudkan kemajuan daerah. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan pendidikan berkarakter, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, pengembangan keterampilan vokasional yang relevan dengan dunia usaha dan industri, serta penciptaan ekosistem inovasi dan kewirausahaan muda. Melalui pendekatan ini, diharapkan Kabupaten Agam mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga sehat, berintegritas, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam mendukung misi ini, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan Program Unggulan **Agam Cerdas** dan **Agam Sehat**. Program Agam Cerdas diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan berbasis karakter dan pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Agam Sehat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk di dalamnya perluasan cakupan jaminan kesehatan dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage* (UHC). Pelaksanaan prioritas ini diperkuat melalui *Gerakan Terpadu Pengembangan SDM* dan *Gerakan Terpadu Hidup Bersih dan Sehat*

sebagai upaya bersama lintas sektor dalam membangun manusia Agam yang unggul secara menyeluruh.

Tujuan dan sasaran mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing sebagaimana tergambar dalam kerangka logis sebagai berikut :



Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2025-2029

Misi IV, Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan struktur ekonomi Kabupaten Agam yang kuat, inklusif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar daerah, dengan menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi berbasis nagari, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor.

Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Unggulan **Agam Sejahtera** yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, mencakup dukungan permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pemutakhiran dan pengembangan aplikasi E-KUMKM untuk memperluas akses pasar. Di samping itu, revitalisasi pasar rakyat juga menjadi fokus penting sebagai upaya menciptakan ruang perdagangan yang lebih layak, modern, tertata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

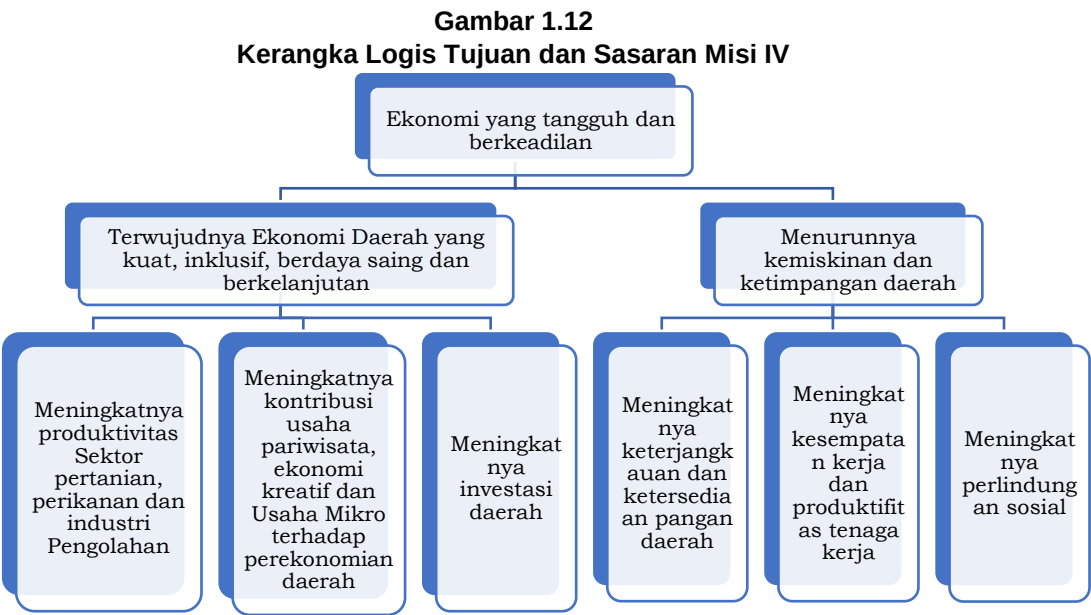
Melalui Program Unggulan **Agam Sejahtera**, Pemerintah Kabupaten Agam juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan, dengan mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai penyangga utama ekonomi daerah. Berbagai upaya dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan Program Sawah Pokok Murah (SPM), penyediaan asuransi pertanian, penataan jaringan irigasi, serta

penguatan sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani.

Selain itu, Gerakan Pensejahteraan Kawasan Pesisir dikembangkan sebagai inisiatif strategis yang menysasar perbaikan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pendekatan yang holistik. Fokus kegiatan mencakup pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, wisata bahari, dan kerajinan laut, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih dan sanitasi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

Keseluruhan strategi ini didukung melalui pelaksanaan berbagai gerakan terpadu, antara lain: **Gerakan Terpadu Kemandirian Pangan Berbasis Keluarga dan Nagari, Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Gerakan Terpadu Pengembangan Pariwisata, Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir, serta Gerakan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Miskin.** Dengan sinergi berbagai sektor dan pendekatan berbasis wilayah, diharapkan terwujud kemandirian ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Agam secara menyeluruh dan berkeadilan.

Tujuan dan sasaran mewujudkan Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan sebagaimana tergambar dalam kerangka logis sebagai berikut :



Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2025-2029

Misi V, Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana

Misi ini menggambarkan komitmen Kabupaten Agam dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap risiko bencana, hal ini mengingat Kabupaten Agam merupakan daerah yang rawan bencana (seperti longsor, banjir, dan gempa bumi), dengan fokus pada penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, sistem sanitasi, serta fasilitas pelayanan publik yang adaptif terhadap risiko lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Pemerintah Kabupaten Agam mengembangkan Program Unggulan Agam Sehat melalui inisiatif pengelolaan sampah dari sumbernya dengan pendekatan partisipatif dalam bentuk gerakan **“Buang Sampah Beli Sampah”**. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan Perda Pengelolaan Sampah di seluruh kecamatan, penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah, pembentukan kemitraan koperasi dengan bank sampah di seluruh nagari, serta peningkatan pengelolaan fasilitas TPA dan TPST Sei Jariang. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana pengangkutan serta pemeliharaan armada sampah menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

Seluruh inisiatif ini diperkuat melalui Gerakan Terpadu Kebersihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, sebagai bentuk integrasi antara pembangunan infrastruktur dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang bersih, sehat, tangguh, dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran mewujudkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana sebagaimana tergambar dalam kerangka logis sebagai berikut :



Sumber : RPJMD Kab. Agam Tahun 2025-2029

Misi VI, Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

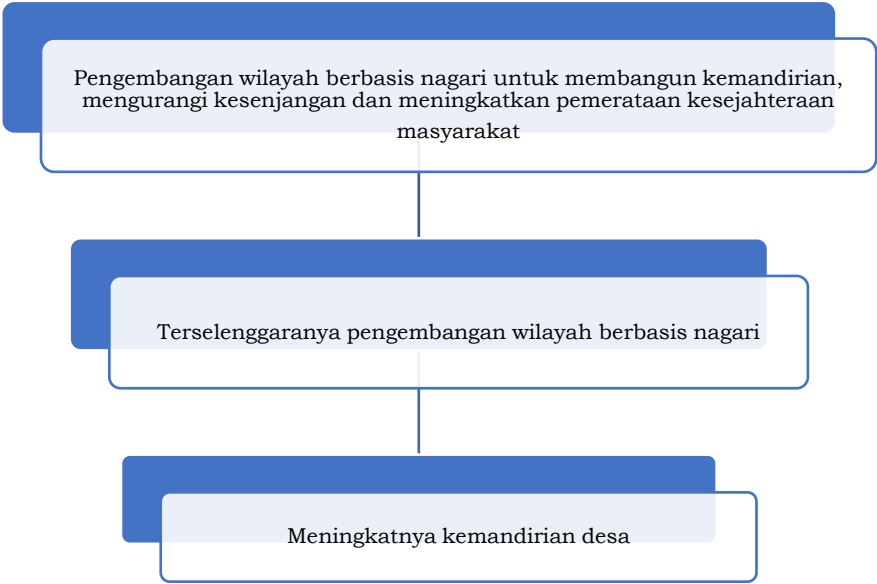
Misi ini menekankan pengembangan wilayah yang berpusat pada nagari sebagai unit pemerintahan terdepan untuk mendorong kemandirian, memperkuat potensi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui penguatan kapasitas nagari dan pemerataan pembangunan, diharapkan kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara adil dan berkelanjutan.

Implementasi pembangunan berbasis nagari di Kabupaten Agam masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dan kelembagaan nagari dalam aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan belum merata dan memerlukan peningkatan baik dari segi kompetensi maupun tata kelola yang transparan dan akuntabel, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat nagari, kurangnya kolaborasi antar-nagari dalam pengembangan kawasan, terbatasnya ketersediaan data spasial dan sosial ekonomi yang akurat, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat nagari menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan pengembangan wilayah berbasis nagari sebagai arah kebijakan prioritas pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat posisi nagari sebagai basis utama pembangunan daerah. Melalui strategi pembangunan dari tingkat akar rumput, Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian wilayah, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan

Tujuan dan sasaran Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tergambar dalam kerangka logis sebagai berikut :

Gambar 1.14
Kerangka Logis Tujuan dan Sasaran Misi VI



Sumber : RPJM Kab. Agam Tahun 2025-2029

Selanjutnya setiap tujuan dan sasaran jangka menengah diatas, ditetapkan indikator dan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk periode Tahun 2025 ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahannya, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 23 Tahun 2024 dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 18 Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 dan perubahannya menjadi dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025. Hasil penganggaran dan pelaksanaan rencana kerja inilah yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2025.

C. Kegiatan Pembangunan Daerah

Rumusan Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran periode pertama Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 dan merupakan janji Kepala Daerah/Wakil Kepala yang hendak diwujudkan pada periode masa jabatannya

Tabel 1.25
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi 1

Prioritas RKPD	Sasaran RKPD 2025	Program Kegiatan
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian 2. Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	1. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. 2. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. 3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Prioritas RKPD	Sasaran RKPD 2025	Program Kegiatan
	3. Meningkatnya Pendapatan Petani	4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Perizinan usaha pertanian 7. Program Pengelolaan perikanan tangkap 8. Program Pengelolaan perikanan Budidaya 9. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan 10. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 11. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 12. Program Penanganan Kerawanan Pangan 13. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 14. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Mikro 2. Meningkatnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Agam 3. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program perencanaan dan pembangunan kawasan industri 2. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional 3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pengembangan UMKM 6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 7. Program standarisasi dan perlindungan konsumen 8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 9. Program Pengembangan ekspor 10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 11. Program Pelayanan Penanaman Modal 12. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 13. Program Promosi Penanaman Modal 14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 15. Program pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja 16. Program pengembangan jasa konstruksi 17. Program penempatan tenaga kerja 18. Program hubungan industrial
Peningkatan Kepariwisata melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas	1. Meningkatnya laju pertumbuhan pariwisata, transportasi dan akomodasi di Kabupaten Agam 2. Meningkatnya pertumbuhan usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Agam	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 5. Program Penyelenggaraan Jalan 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengembangan UMKM 8. Program Pengembangan Kebudayaan 9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi 2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas 4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase 4. Program Pengembangan Permukiman 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Prioritas RKPD	Sasaran RKPD 2025	Program Kegiatan
	dasar, bangunan strategis dan pertanian 5. Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) 9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 12. Program Pengelolaan Persampahan 13. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 14. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase 15. Program penyelenggaraan penataan ruang 16. Program Penanggulangan Bencana 17. Program Penanganan Bencana 18. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 19. Program Pengembangan Permukiman 20. Program Pengembangan Perumahan 21. Program Kawasan Permukiman 22. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh 23. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 24. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta Daya Saing Pemuda	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan 2. Meningkatnya kesehatan masyarakat 3. Menurunnya Prevalensi Stunting 4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal) 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 6. Program Pembinaan Perpustakaan 7. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 8. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 9. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 10. Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 11. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum 13. Perogram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 15. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 16. Program Perlindungan Perempuan 17. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 18. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak 19. Program Pemenuhan Hak Anak 20. Program Perlindungan Khusus Anak 21. Program Pengendalian Penduduk 22. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 23. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Prioritas RKPD	Sasaran RKPD 2025	Program Kegiatan
		24. Program Perlindungan Perempuan 25. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 26. Program Pemberdayaan Sosial 27. Program Rehabilitasi Sosial 28. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau	1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian nagari sebagai episentrum pembangunan 2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya 3. Meningkatnya sosial budaya yang berlandaskan ABS SBK	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 4. Program Peningkatan Partai Politik dan Tenaga Pendidik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial 8. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. 9. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 10. Program Pengembangan Kebudayaan Daerah 11. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 12. Program Pembinaan Sejarah 13. Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya 14. Program Pengelolaan Permuseuman
Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi 3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Program penelitian dan pengembangan daerah 5. Program penyelenggaraan pengawasan 6. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 7. Program pengelolaan keuangan daerah 8. Program pengelolaan barang milik daerah 9. Program pengeloaan pendapatan daerah 10. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 11. Program kepegawaian 12. Program aplikasi informatika 13. Program Informasi dan komunikasi publik 14. Program penyelenggaraan statistik sektoral 15. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 16. Semua program di perangkat daerah pelayanan publik, program di kecamatan, program pada sekretariat DPRD 17. Program Pelayanan Penanaman Modal 18. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 19. Program Administrasi Pemerintahan Desa 20. Program Penataan Desa

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

SPM merupakan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintah daerah wajib memperhatikan prioritas program/kegiatan yang mengakomodir penerapan SPM dengan prinsip sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

SPM juga menjadi jawaban untuk isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apayang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Agam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Memprioritaskan penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana, serta faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu mensiasati penerapan SPM supaya pelayanan dasar yang minimal harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tetap terpenuhi.

Regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan;
10. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam merumuskan strategi pembangunan daerah memprioritaskan optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang indikatornya termuat dalam SPM. Rencana penerapan dan pencapaian SPM disinergikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Sasaran capaian SPM yang mendukung aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah menjadi tolok ukur rencana pembangunan yang termuat dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan diakomodir dalam renja OPD serta diterjemahkan secara operasional dalam program/kegiatan.

Penerapan SPM tahun 2025, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta regulasi dari kementerian teknis masing-masing urusan, mengatur jenis dan mutu pelayan dasar yang mengamanatkan capaian terhadap indikator kinerja utama Pemerintahan Daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam merumuskan kebijakan yang memuat strategi-strategi untuk pencapaian indikator SPM yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas.

Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yang termuat pada Misi ke-1 “Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”, Misi ke-3 “Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing” dan Misi ke-5 yakni “Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana”. Kemudian diterapkan melalui Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui Renstra OPD pelaksana SPM Tahun 2025-2029 seperti termuat dalam tabel berikut:

A. Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 1.26
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025-2029

VISI : Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi ke-3 : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing			
No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan daya saing peserta didik	1. Penguatan kurikulum berbasis nilai kearifan lokal 2. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana Pendidikan
2.	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang inklusif melalui pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender.	4. Akses Pendidikan dan Pelatihan yang Merata dan Berkeadilan Gender 5. Pemberdayaan Pemuda dan Partisipasi Aktif dalam aspek ekonomi, organisasi dan olahraga 6. Mendorong Lingkungan yang Inklusif dan Mendukung Kesetaraan Gender

Sumber: RPJMD Kab.Agam Tahun 2025-2029

B. Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 1.27
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025-2029

VISI : Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi ke-3 : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing			
No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan responsif melalui pendekatan promotif dan preventif	1. Pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan sosial budaya

			4. Penguatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat 5. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda) 6. Percepatan pencegahan dan penuntasan stunting) 7. Peningkatan gizi masyarakat dan fasilitas Makan Bergizi Gratis

Sumber: RPJMD Kab.Agam Tahun 2025-2029

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 1.28
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

Visi : Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi ke-5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana			
No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 2. Peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dan peningkatan pengelolaan limbah. 3. Rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penyelamatan Danau Maninjau 4. Pemberdayaan hutan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga hutan dengan memanfaatkan nilai ekonomi hutan bagi masyarakat 5. Pengelolaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan air, pangan, dan energi.

2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1. Peningkatan akses dan layanan air minum 2. Penguatan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan limbah domestik 3. Peningkatan infrastruktur drainase 4. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Meningkatnya konektivitas wilayah	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan 2. Peningkatan Layanan dan penguatan keselamatan sarana transportasi 3. Peningkatan akses jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah blank spot
		Peningkatan pemukiman rumah layak huni	1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau 2. Penataan Kawasan permukiman yang aman dan berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kab.Agam Tahun 2025-2029

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 1.29
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM

Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029			
Visi : Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi ke-5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana			
No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata.	Peningkatan pemukiman rumah layak huni	1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau 2. Penataan Kawasan permukiman yang aman dan berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kab.Agam Tahun 2025-2029

E. Bidang Urusan Sosial

Tabel 1.30
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2025-2029

Visi : Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi ke-1 : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai			
No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya pengetahuan dan pengalaman nilai-nilai agama	Penguatan pendidikan keagamaan, kelembagaan keagamaan dan kehidupan sosial religius masyarakat	1. Sosialisasi dan implementasi gerakan nagari madani 2. Peningkatan pemahaman agama dan Peningkatan kualitas serta akses pendidikan keagamaan 3. Penguatan peran kelembagaan keagamaan dan Pemberdayaan pemuda dalam pelestarian adat dan agama
2.	Meningkatnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal	Penguatan dan plestarian nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	1. Penguatan peran kelembagaan dan tokoh adat 2. Integrasi nilai-nilai adat dan budaya dalam sistem pendidikan formal dan non formal 3. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda dan benda serta Penyelenggaraan event budaya daerah secara berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kab.Agam Tahun 2025-2029

F. Bidang Urusan TrantibumLinmas

Tabel 1.31
Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibumlimas Tahun 2025-2029

Visi : Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera			
Misi ke-1 : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai			
No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan

Sumber : RPJMD Kab.Agam Tahun 2025-2029

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan mengukur tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi dan sosial. Indikator ini menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Indikator Makro Kabupaten Agam pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Kabupaten Agam Tahun 2024 dan 2025

No.	Indikator Makro Pembangunan	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,12	2,99
2	PDRB Perkapita (Juta)	50,02	50,052
3	Indeks Gini /Gini Rasio	0,249	0,232
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,83	5,97
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,73	4,71
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,08	76,04

Sumber : Data BPS Kabupaten Agam Tahun 2025

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah atau disebut sebagai Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). Pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam di tahun 2024 sebesar 4,12 persen, sedikit turun dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 4,52 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi. Perlambatan tersebut terjadi pada beberapa sektor-sektor lapangan usaha utama, seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB dengan nilai mencapai 7,9 triliun rupiah atau secara persentase sebesar 28,26 persen. Pertumbuhan sektor ini turun ditahun 2024 menjadi 1,79 persen, dari sebelumnya sebesar 3,10 persen ditahun 2023. Perlambatan ini tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan mengingat sektor ini merupakan sektor yang sangat dominan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah terjadinya bencana

alam yang mengakibatkan kerusakan lahan dan infrastruktur jalan sehingga terganggunya rantai pasok dan logistik produk pertanian. Selanjutnya sektor dominan yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor Industri Pengolahan turun dari 6,6 persen ditahun 2023 menjadi 3,43 persen ditahun 2024. Sektor Konstruksi turun dari 6,02 persen ditahun 2023 menjadi 3,09 persen ditahun 2024. Untuk capaian tahun 2025, mengalami penurunan menjadi 2,99 persen.

1) PDRB Perkapita

PDRB per kapita dihitung dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk. Nilai PDRB per kapita Agam tahun 2024 mencapai 50,02 juta rupiah, meningkat dari tahun 2023 yang mencapai 47,41 juta rupiah. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai PDRB (ADHB) dari 26,16 triliun menjadi 27,97 triliun. Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi ditahun 2024, namun secara nilai terjadi peningkatan sebesar 1,83 triliun rupiah. Untuk capaian tahun 2025, terjadi peningkatan sebesar 0,06 persen dengan capaian 50,052 persen.

2) Gini Rasio

Gini rasio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai gini rasio berkisar antara 0 hingga 1. Angka gini rasio yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan semakin melebar dan mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata. Tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten Agam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dimana angka gini rasio semakin turun. Angka gini rasio tahun 2024 tercatat sebesar 0,249, turun dari tahun 2023 sebesar 0,255 dan tahun 2022 sebesar 0,298. Tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten Agam berada pada skala rendah. Untuk capaian tahun 2025, terjadi penurunan sekitar 6,83 persen dengan capaian 0,232 persen.

3) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung dengan pendekatan garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Agam mengalami penurunan dari 6,83 persen di tahun 2024 menjadi 5,97 persen pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, penduduk miskin meningkat dari 33,41 ribu menjadi 34,82 ribu jiwa. Sementara garis kemiskinan meningkat dari Rp 530.290 ditahun 2023

menjadi Rp 558.963 pada tahun 2024. Meningkat angka kemiskinan tersebut disebabkan banyak faktor, diantaranya meningkatnya angka inflasi ditahun 2024 yang tidak diiringi peningkatan pendapatan pada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran kabupaten Agam turun dari 4,73 persen di tahun 2024 menjadi 4,71 persen pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran terbuka di dominasi tamatan pendidikan tinggi dan SLTA sederajat. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketidaksesuaian antara keterampilan atau pendidikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kualitas pembangunan manusia disuatu wilayah. Angka IPM kabupaten Agam mengalami peningkatan dari 75,08 ditahun 2024 menjadi 76,04 pada tahun 2025. Meningkatnya angka IPM Agam sejalan dengan peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan. Angka harapan lama sekolah meningkat dari 14,16 tahun menjadi 14,26 tahun , angka rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,23 tahun menjadi 9,57 tahun dan angka harapan hidup meningkat dari 74,39 tahun menjadi 74,63 tahun.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta urusan penunjang. Capaian kinerja urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Agam pada Tahun 2025 secara rinci termuat dalam lampiran II tentang Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome/hasil dan output/ keluaran Urusan Pemerintahan Konkuren serta IKK urusan penunjang.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah

diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada bagian ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya disajikan secara rinci dan jelas. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

2.3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kerjanya

dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Agam serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kriteria peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Predikat Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017

2.3.2 Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah, serta untuk penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Agam, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025. Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan yaitu penetapan RPJMD Tahun 2025 – 2029, sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang dapat diakomodir pada penyusunan pelaporan kinerja 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, karena Kabupaten Agam telah melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja terhadap dokumen perencanaan yang baru, maka LKjIP Tahun 2025 memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode 2021 – 2026 dan perencanaan

periode 2025 - 2029.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yang mengacu kepada Dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani			
Tujuan 1.1 Terwujudnya Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efesien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71 (BB)
Sasaran 1.1.1 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	Nilai	77 (BB)
	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	84(baik)
	3. Nilai EPPD	Nilai	3,5
Sasaran 1.1.2 Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tingkat	46 (tinggi)
	2. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66 (tinggi)
	3. Indeks SPBE	Indeks	3,1 (baik)
Sasaran 1.1.3 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	85
	Persentase nagari dengan kategori cepat berkembang	Persen	53,2
Sasaran 1.1.4 Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari.	Indeks	464
Misi 2 Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata			
Tujuan 2.1 Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Angka	3,98
	Laju pertumbuhan Ekonomi	Angka	4,89

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro	1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	Angka	2,75
	2. Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	Angka	2,6
	3. Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro (%)	Angka	2
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	Angka	8,56
	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah	936.752
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	Angka	5,94
	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	86
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya nilai realisasi investasi	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	%	43,50
Misi 3 Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana			
Tujuan 3.1 Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	Tingkat kapasitas ketahanan daerah	Angka	tinggi
Sasaran 3.1.1 Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	76,87
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	1. Indeks kualitas terhadap tata ruang	Indeks	99,98
Sasaran 3.1.3 Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	1. Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	persen	87
Misi 4 Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter			

Tujuan 4.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,75

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran 4.1.1 Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	14,39
	2. Rata-rata lama sekolah	Angka	9,75
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	Angka	74,51
Tujuan 4.2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	Nilai produktivitas total daerah	nilai	96,52
Sasaran 4.2.1 Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat	1. Tingkat pengangguran terbuka	Angka	4,88
Sasaran 4.2.2 Meningkatkan daya saing pemuda	3. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Angka	94
Sasaran 4.2.3 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	94
Tujuan 4.3 Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan rakyat	Indeks	80,35
Sasaran 4.3.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah nagari dengan status IDM:		
	Mandiri	Jumlah	34
	Maju	Jumlah	48
	Berkembang	Jumlah	10
	2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	persen	90,35
	3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	98,1
	4. Indeks perlindungan anak	indeks	72

Sasaran 4.3.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	1. Total Fertility Rate	Angka	2,27
Misi 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS - SBK			
Tujuan 5.1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan	Indeks Keamanan Masyarakat	Indeks	91,5

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya			
Sasaran 5.1.1 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	2,90
	2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	%	100
	3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	%	100
	Persentase Nagari Madani pada Level V	%	18,48
Sasaran 5.1.2 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	1. Jumlah nagari Madani pada level:		
	Level V	Jumlah	17
	Level IV	Jumlah	42
	Level III	Jumlah	32
	Level II	Jumlah	1
	2. Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	%	100
	3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Awal Bupati Agam Tahun 2025

Masa transisi perencanaan jangka menengah yang terjadi pada Tahun 2025 di Kabupaten Agam menyebabkan adanya beberapa data, indikator kinerja utama dan target kinerja daerah yang perlu disesuaikan. Dengan ditetapkannya Dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 pada Bulan Agustus 2025, dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, indikator dan

target kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan. Tabel berikut menjelaskan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1: Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai”			
Tujuan 1.1 Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	Persen	18,48
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Tingkat penerapan nilai-nilai agama	persen	76,53
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal	Tingkat penerapan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal	persen	63,70
Sasaran 1.1.3 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks keamanan daerah	indeks	79,45
Misi 2 : Tata Pemerintahan yang Baik, bersih dan profesional			
Tujuan 2.1 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	79 (BB)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	1. Maturitas SPIP	level	3,16
	2. Nilai SAKIP	nilai	68,61 (B)
	3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	nilai	77,50
	4. Indeks SPBE	indeks	2,66

	5. Indeks sistem merit	indeks	270
	6. EPPD	nilai	3,581
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	3,50
Misi 3 : Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing			
Tujuan 3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,75
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	4. Rata-rata lama sekolah	tahun	9,75
	5. Harapan lama sekolah	tahun	14,4
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	74,51
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks ketimpangan gender	Indeks	0,33
	2. Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	indeks	39,49
Misi 4 : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan			
Tujuan 4.1 Terwujudnya ekonomi daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,41
	2. Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,64

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan	1. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/angka	82,61
	2. Rasio PDRB industri pengolahan	persen	10,44
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha mikro terhadap perekonomian daerah	1. Rasio kewirausahaan	persen	3,89
	2. Rasio PDRB Akomodasi makan minum	persen	0,96
	3. Rasio PDRB ekonomi kreatif (jasa lainnya)	persen	0,93
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan modal tetap bruto (%PDRB)	persen	30,02

Tujuan 4.2 Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	1. Gini rasio	angka	0,248
	2. Pendapatan per kapita (ribu)	angka	57,850
	3. Angka kemiskinan	persen	6,50
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	angka	86,93
Sasaran 4.2.2 Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,71
	2. Produktivitas tenaga kerja (juta)	Rp.	98,35
Sasaran 4.2.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	nilai	50,50
Misi 5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan. Berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana			
Tujuan 5.1 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	angka	200,28
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	71,93
Sasaran 5.1.2 Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks ketahanan daerah	indeks	0,55 (C) rendah
Tujuan 5.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata	Indeks pembangunan infrastruktur	indeks	41,52
Sasaran 5.2.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	persen	15,40
	2. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum aman (perpipaan)	persen	19,25
	3. Jalan dalam kondisi mantap	persen	60
Sasaran 5.2.2 Meningkatnya konektivitas wilayah	1. Rasio konektivitas	persen	69

Sasaran 5.2.3 Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunia layak dan terjangkau	Persen	73,75
Misi 6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan 6.1 Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari	Persentase nagari mandiri	persen	46,37
Sasaran 6.1.1 Meningkatnya kemandirian nagari	Jumlah nagari mandiri	jumlah	43

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.3 dan tabel 2.4, terdapat beberapa perubahan Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh adanya perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun perubahan tersebut antara lain :

- Tujuan pada PK awal berjumlah 7 tujuan dengan 10 indikator, sedangkan tujuan pada PK perubahan berjumlah 8 tujuan dengan 11 indikator.
- Sasaran pada PK awal berjumlah 20 sasaran dengan 36 indikator, sedangkan sasaran pada PK perubahan berjumlah 20 sasaran dengan 33 indikator.
- Pada PK perubahan terdapat 28 indikator kinerja yang baru, 7 di antaranya adalah indikator tujuan sedangkan 21 lainnya merupakan indikator kinerja sasaran.
- Sebanyak 6 indikator tujuan dan 24 indikator sasaran pada PK awal tidak digunakan lagi dan diganti dengan indikator yang lebih relevan dengan tujuan dan sasaran yang baru.

2.3.3 Hasil Pengukuran Target Kinerja

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Tahun 2025 merupakan tahun transisi periode perencanaan sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara Perjanjian Kinerja Awal yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025 - 2029. Sehingga evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja juga harus dilakukan terhadap kedua Perjanjian Kinerja dimaksud.

Hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

**Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan Target
Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Misi 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani					
Tujuan 1.1 Terwujudnya Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efesien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	71 (BB)	81,20 (A)	114,37	sangat tinggi
Sasaran 1.1.1 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	77 (BB)	67,45 (B)	87,59%	Tinggi
	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84 (baik)	69,70 (B)	82,98	Tinggi
	3. Nilai EPPD	3,581	3,5771	99,72%	Sangat Tinggi
Sasaran 1.1.2 Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	46 (tinggi)	40,14 (tinggi)	87,26	Tinggi
	2. Indeks Profesionalitas ASN	66 (tinggi)	78,81 (sedang)	119,41	Sangat tinggi
	3. Indeks SPBE	3,1 (baik)	2,96 (baik)	95,48	Sangat tinggi
Sasaran 1.1.3 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85	88,45	104,06	Sangat Tinggi
	Persentase Nagari dengan Kategori Cepat Berkembang	53,2	84,78	159,36	Sangat Tinggi
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	464	469	101,07	Sangat Tinggi
Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata					
Tujuan 2.1 Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	3,98	6,75	169,59	Sangat Tinggi

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
	Laju pertumbuhan Ekonomi	4,89	2,99	61,51	Sedang
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro	1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,75	2,33	84,73	Sedang
	2. Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,6	18	692,31	Sangat Tinggi
	3. Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro (%)	2	3,08	154	sangat tinggi
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	8,56	2,64	30,84	Rendah
	2. Jumlah kunjungan wisatawan	936.752	1.173.007	125,22	Sangat Tinggi
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	1. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	5,94	1,54	25,93	Rendah
	2. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	86	58,37	67,87	Sedang
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya nilai realisasi investasi	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	43,50	-39,60	-91,03	Sangat Rendah

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
Misi 3 Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana					
Tujuan 3.1 Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	Tingkat kapasitas ketahanan daerah	Sedang (0,55)	0,34	61,82	Sedang
Sasaran 3.1.1 Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,87	78,96	102,72	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,98	99,98	100	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.3 Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	87	100	114,95	Sangat Tinggi
Misi 4 Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter					
Tujuan 4.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	75,75	76,04	100,39	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.1 Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	1. Angka Harapan Lama Sekolah	14,39	14,26	99,09	Sangat Tinggi
	2. Rata-rata lama sekolah	9,75	9,57	98,15	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	74,51	74,63	100,16	Sangat Tinggi
Tujuan 4.2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	Nilai produktivitas total daerah	96,52	96,17	99,64	Sangat Tinggi
Sasaran 4.2.1	Tingkat pengangguran terbuka	4,88	4,71	96,52	Sangat Tinggi

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat					
Sasaran 4.2.2 Meningkatkan daya saing pemuda	1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	94	93,59	99,56	Sangat Tinggi
Sasaran 4.2.3 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	94	71,60	76,17	Sedang
Tujuan 4.3 Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan daerah	Indeks Kesejahteraan rakyat	80,35	91,26	113,58	Sangat Tinggi
Sasaran 4.3.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah nagari dengan status IDM:				
	Mandiri	34	54	158,82	Sangat Tinggi
	Maju	48	26	54,17	Rendah
	Berkembang	10	12	120	Sangat Tinggi
	2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,35	92,88	102,80	Sangat Tinggi
	3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,90	97,49	98,57	Sangat Tinggi
	4. Indeks perlindungan anak	72	68,21	94,73	Sangat Tinggi
Sasaran 4.3.2 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate	2,27	2,41	106,17	Sangat Tinggi
Tujuan 5.1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman	Indeks Keamanan Masyarakat	91,5	76,50	83,61	Tinggi

dan tertib berlandaskan					

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
nilai-nilai agama, adat dan budaya					
Sasaran 5.1.1 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Angka Kriminalitas per 10.000penduduk	2,90	9.24	-118,62	Sangat Rendah
	2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	100	100	100	Sangat tinggi
	3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	100	91	91	Sangat tinggi
	Persentase Nagari Madani pada Level V	18,48	22,82	123,48	Sangat Tinggi
Sasaran 5.1.2 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	1. Jumlah nagari Madani pada level:				
	Level V	17	21	123,53	Sangat Tinggi
	Level IV	42	70	166,66	Sangat Tinggi
	Level III	32	1	196,87	Sangat Tinggi
	Level II	1			
	2. Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	100	100	Sangat Tinggi

	3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100	100	100	sangat Tinggi

Sumber : Hasil Evaluasi Tahun 2025

Hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan Target Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Misi 1: Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai”					
Tujuan 1.1 Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	18,48	21,00	113,64	Sangat tinggi
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Tingkat penerapan nilai-nilai agama	76,53	77,04	100,67	Sangat tinggi
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal	Tingkat penerapan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal	63,70	62,42	97,99	Sangat tinggi
Sasaran 1.1.3 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks keamanan daerah	79,45	64,63	81,35	Tinggi
Misi 2 : Tata Pemerintahan yang Baik, bersih dan profesional					

Tujuan 2.1 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	79 (BB)	81,2 (A)	102,78	sangat tinggi

Sasaran 2.1.1 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	1. Maturitas SPIP	3,16	2,74	86,71	Tinggi
	2. Nilai SAKIP	68,61 (B)	67,45 (B)	98,31	Sangat Tinggi
	3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77,50	69,7 (B)	89,94	Tinggi
	4. Indeks SPBE	2,66	2,96	111,28	Sangat Tinggi
	5. Indeks sistem merit	270	278	102,96	Sangat Tinggi
	6. EPPD	3,581	3,571	99,72	Sangat tinggi
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,78	108	Sangat Tinggi

Misi 3 : Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

Tujuan 3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	75,75	76,04	100,38	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	6. Rata-rata lama sekolah	9,75	9,57	98,15	Sangat Tinggi
	7. Harapan lama sekolah	14,40	14,26	99,03	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,51	74,63	100,16	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks ketimpangan gender	0,33	*		
	2. Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	61,62	53,92	87,50	Tinggi

Misi 4 : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

Tujuan 4.1 Terwujudnya ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,41	2,99	67,77	Sedang

daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan	2. Indeks Daya Saing Daerah	39,49	3,70	101,79	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan	1) Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	82,61	88,51	107,14	Sangat Tinggi
	2. Rasio PDRB industri pengolahan	10,44	10,57	101,16	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha mikro terhadap perekonomian daerah	1. Rasio kewirausahaan	3,89	5,23	134,45	Sangat Tinggi
	2. Rasio PDRB Akomodasi makan minum	0,96	0,90	94,05	Sangat Tinggi
	3. Rasio PDRB ekonomi kreatif (jasa lainnya)	0,93	0,96	103,38	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan modal tetap bruto (%PDRB)	30,02	28,34	94,40	Sangat Tinggi
Tujuan 4.2 Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	- Gini rasio	0,248	0,232	106,68 1	Sangat tinggi
	- Pendapatan per kapita (ribu)	57.850	52.370	91	Sangat Tinggi
	- Angka kemiskinan	6,50	5,97	108,93	Sangat Tinggi
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	86,93	71,60	82,37	Tinggi
Sasaran 4.2.2 Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	- Tingkat pengangguran terbuka	4,71	4,71	100	Sangat Tinggi
	- Produktivitas tenaga kerja (juta)	98,35	96,17	97,78	Sangat Tinggi
Sasaran 4.2.3 Meningkatnya kesejahteraan	Indeks Kesejahteraan Sosial	50,50	*		

sosial					
Misi 5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan. Berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana					
Tujuan 5.1 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	200,28	240,30	119,98	Sangat Tinggi
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,93	78,96	109,77	Sangat Tinggi
Sasaran 5.1.2 Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks ketahanan daerah	0,55 (C) rendah	0,34	61,82	Rendah
Tujuan 5.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata	Indeks pembangunan infrastruktur	41,52	36,02	86,75	Tinggi
Sasaran 5.2.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	15,40	5,45	35,39	Sangat Rendah
	2. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum aman (perpipaan)	19,25	13,35	69,35	Rendah
	3. Jalan dalam kondisi mantap	60	58,37	97,28	Sangat Tinggi
Sasaran 5.2.2 Meningkatnya konektivitas wilayah	1. Rasio konektivitas	69	68,50	99,28	Sangat Tinggi
Sasaran 5.2.3 Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunia layak dan terjangkau	73,75	65,82	89,25	Tinggi
Misi 6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat					
Tujuan 6.1 Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari	Persentase nagari mandiri	46,37	58,69	126,57	Sangat Tinggi

Sasaran 6.1.1 Meningkatnya kemandirian nagari	Jumlah nagari mandiri	43	54	126	Sangat Tinggi

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Agam Tahun 2025

Ket : *Data belum dirilis

Untuk analisa lebih dalam, dapat dijelaskan melalui analisis pengukuran kinerja per sasaran yang dikelompokkan berdasarkan Misi yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Agam periode 2021 – 2026 maupun RPJMD periode 2025 - 2029, yang disajikan sebagai berikut :

2.3.3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi I (Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Melayani)

Misi I pada RPJMD Tahun 2021 - 2026 memiliki tujuan “ Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efesien dan Melayani”. Tujuan ini memiliki 2 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi I Tahun 2025 Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efesien dan Melayani

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71 (BB)	81,20	114,37
2.	Persentase Nagari dengan kategori cepat berkembang	Persen	53,2	84,78	159,36

Sumber : Hasil Evaluasi Capaian IKU Tahun 2025

Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Peraturan tersebut memuat adanya perubahan tata cara penilaian / evaluasi serta

implementasi reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, dimana mulai tahun 2023 terjadi penajaman dan penyesuaian fokus pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi 2 yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

RB General berfokus kepada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaksanaan RB General berada pada level mikro yang merupakan implementasi kebijakan/ program yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso. Pelaksanaan RB General pada level mikro harus didasari pada dua dimensi yaitu :

1. Dimensi prioritas nasional, yang sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang ditetapkan pada level makro dan meso yang bersifat *mandatory*.
2. Dimensi prioritas instansional, merupakan kegiatan utama inisiatif yang mengakomodir pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih ditemui dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Terdapat 5 tematik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2025, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Walaupun secara umum, instansi pemerintah diberi keleluasaan untuk memilih satu atau lebih tema dari lima tema yang diangkat sebagai fokus RB tematik, namun Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan seluruh tema tersebut untuk ditetapkan dalam RB Tematik Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan karena seluruh tema tersebut relevan dengan persoalan dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Adapun 5 tema dimaksud adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan nilai investasi
3. Digitalisasi pemerintahan fokus penanganan stunting
4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
5. Pengendalian laju inflasi

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator Nasional, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah 81,20 dengan kategori A. Nilai ini adalah nilai sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB yang untuk selanjutnya menunggu jika ada sanggahan terhadap nilai indikator pembentuk Indeks RB yang telah dikeluarkan oleh kementerian / lembaga terkait. Capaian realisasi sementara ini telah melebihi target

yang ditetapkan sebesar 10,2 poin dengan tingkat capaian sebesar 114,37%. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi RB General dan Tematik
2. Capaian beberapa indikator penilaian RB sudah menunjukkan kemajuan yg signifikan dalam pelaksanaannya seperti indikator tindak lanjut pengaduan masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Pelayanan Publik, Opini BPK, Indeks Kualitas Kebijakan dan TL rekomendasi.
3. Telah menginput dan melampirkan bukti dukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik pada aplikasi Portal RB tepat waktu.

Berikut disampaikan hasil evaluasi Tim Evaluator Pusat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Agam sesuai dengan LKE sebagai berikut :

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan LKE
KEMENPANRB

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi
	RG GENERAL					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.30	76,67	1. Rencana aksi yang disusun belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama 2. Indikator Output atas Rencana Aksi sudah relevan, namun belum cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan 3. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 4. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai	1. Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama 2. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran 3. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 4. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi
2.	Tingkat capaian Sistem Kerja RB General	7	100	76,67	Total Rata Rata Capaian Output Rencana Aksi RB General sebesar 100%.Capaian Tingkat Implementasi dipengaruhi oleh Capaian Kualitas Rencana Aksi RB General	
3.	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	3	2	1,2		Segera melakukan penetapan pengaturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan

					penyederhanaan birokrasi
4.	Tingkat maturitas SPIP	4	3,15	2,52	1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Agam berada pada Level 2 (Berkembang). Tingkat maturitas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam secara umum telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun hal tersebut belum didukung strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. 2. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kabupaten Agam belum sepenuhnya memadai. Masih terdapat kelemahan dimana proses manajemen risiko belum sepenuhnya melekat pada proses bisnis pemerintah Kabupaten Agam dan belum dilakukan pengukuran efektivitas pengendalian intern dalam pencapaian tujuan organisasi. c. Hasil evaluasi menunjukkan pengendalian korupsi di Pemerintah Kabupaten Agam belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Kabupaten Agam Bupati Agam agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam untuk menyusun rencana aksi, yang di dalamnya menugasi: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan reviu dan perbaikan atas dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas konstruksi perencanaan OPD. 2. Inspektur Kabupaten Agam melaksanakan penilaian efektivitas pengendalian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dibangun. 3. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam untuk meningkatkan penerapan SPIP dan manajemen risiko melalui penguatan komitmen pimpinan, pengukuran efektivitas pengendalian intern, serta peningkatan koordinasi dan monitoring antar OPD.

					telah berupaya untuk menunjukkan keseriusannya dalam pembelajaran dan edukasi antikorupsi namun belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, sumber daya untuk pengelolaan risiko anti korupsi belum sepenuhnya memadai	
5.	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	14,29		
6.	Nilai SAKIP	4	67,45	67,50	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2025 dapat diakses pada portal rb nasional dengan menggunakan akun instansi	
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	60,01	68,40	Instansi sudah menyusun Arsitektur SPBE To-Be sesuai standar	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	68,36	68,40	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI
9.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikandeks	2.5	3,00	60,00	Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu: • Jumlah pengaduan yang diterima melalui aplikasi SP4N LAPOR! relatif sedikit selama periode evaluasi. • Belum terdapat laporan yang diberikan penilaian (rating) oleh pelapor.	Sehubungan dengan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, sebagai berikut: • Meningkatkan sosialisasi dan kampanye kanal SP4N-LAPOR! kepada pengguna layanan instansi serta mendorong digitalisasi pengaduan ke dalam aplikasi

						SP4N-LAPOR!. • Meningkatkan kualitas tindak lanjut pengaduan sesuai substansi laporan guna mendorong pelapor memberikan penilaian (rating) atas laporan yang telah direspons.
10.	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	74,31	74,40	Fully Participant (Baik)	Peningkatan kualitas kebijakan pada dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan transparansi dan partisipasi publik
11.	Indeks Reformasi Hukum	2.5	88,88	88,80	Melebihi target	
12.	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2,75	55,20	• Penerapan Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas, dan Kode Referensi dan/ atau data induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data yang diatur dalam surat Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2000 tentang Satu Data Kabupaten Agam. • Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data yang diatur dalam SOP Diskominfo Nomor 2.20.2023.4 Tentang Diseminasi Data Sektoral ke Sosial Media, SOP Nomor 2.20.2023.5 Tentang Diseminasi Data Statistik Sektoral ke Portal Satu Data, dan SOP Nomor 2.20.2023.6 Tentang Diseminasi Melalui Buku Publikasi Statistik • Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten Agam terkait perencanaan pembangunan statistik telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Agam 2024-2028. • Penerapan	

					Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Keterbandingan dan Konsistensi Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, namun masih merujuk pada pedoman di unit kerja produsen masing masing. • Penerapan Aspek SDM yang memadai dan kapabel sudah dilaksanakan oleh setiap produsen data, namun belum ada pemenuhan kompetensi SDM nya.	
13.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	74,87	74,80	(1) Tingkatkan pemanfaatan sistem pada Non e Tendering/Non e Purchasing, e-Katalog, Toko Daring. (2) Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% bahkan belum lebih dari 60%. (3) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif). Selanjutnya, persiapan untuk mengusulkan penilaian PKP Proaktif.	Lakukan persiapan penilaian ITKP 2026 sesuai metode penilaian baru
14.	Indeks Sistem Merit	4	278,00	67,75	2023	
15.	Indeks Pelayanan Publik	2	3,78	75,50		Disampaikan melalui LHE yang disampaikan deputi pelayanan publik.
16.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	95,48	95,50		
17.	Indeks SPBE	2	2,96	59,22		
18.	Opini BPK	5	3,00	100,00		
19.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	83,71	83,75		
20.	Indeks BerAkhlak	4	69,98	70,00	Kategori cukup	
21.	Survei Penilaian Integritas	10	78,02	78,00		Pemerintah Kabupaten Agam perlu memperhatikan kejelasan informasi layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pengemasan informasi prosedur layanan

						secara jelas dan interaktif melalui inovasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan juga harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat meningkat. Selanjutnya, kemudahan dalam memahami prosedur layanan juga menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Pengemasan informasi prosedur layanan yang jelas dan bersifat interaktif harus terus diupayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Evaluasi melalui survei kepuasan layanan juga akan memberikan masukan berharga untuk perbaikan di masa mendatang, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih

						efektif dan efisien. Dalam aspek pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Agam perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. SOP ini harus mencakup seluruh proses pengadaan, mulai dari tender hingga evaluasi dan pengelolaan kontrak. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP baru dan standar harga juga sangat penting untuk memastikan keseragaman dalam implementasi. Dengan demikian, diharapkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh dapat sesuai dengan harga yang dibayarkan, serta mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan. Pemerintah Kabupaten Agam juga harus memperhatikan hubungan kedekatan antara penyedia barang/ jasa dengan pejabat dalam proses pengadaan. Edukasi dan kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan integritas dalam pengadaan. Melakukan due diligence terhadap vendor dan

						memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam juga merupakan langkah yang perlu diambil. Dengan membuka ruang pengadaan yang lebih luas dan melibatkan masyarakat secara efektif, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan dan adil. Dalam hal pengelolaan gratifikasi, Pemerintah Kabupaten Agam perlu mengimplementasikan dan menginternalisasi kebijakan serta regulasi yang ada. Mekanisme pelaporan dan pengelolaan gratifikasi harus diperkuat untuk mencegah praktik korupsi. Selain itu, sosialisasi mengenai larangan menerima gratifikasi juga perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan langkah langkah ini, diharapkan pengaruh negatif gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir. Pemerintah Kabupaten Agam juga perlu mewajibkan survei kebutuhan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diadakan benar-benar sesuai dengan

						kebutuhan masing masing divisi atau direktorat. Selain itu, pengembangan sistem aplikasi e-catalog atau e-procurement dapat memfasilitasi input data kebutuhan secara lebih terstruktur. Dengan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat, serta memberikan sanksi kepada vendor yang tidak memenuhi kualifikasi, kualitas pengadaan dapat terjaga. Dalam menghadapi pengaruh pihak lain dalam pengambilan keputusan, sosialisasi dan pelatihan mengenai standar prosedur operasional dalam pelaksanaan sanksi atau denda perlu dilakukan. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keputusan yang diambil dapat lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah Kabupaten Agam perlu membuat kebijakan yang melarang penggunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

						Penerapan sanksi terhadap pelanggar juga harus dilakukan secara adil dan konsisten. Selain itu, pengawasan internal yang ketat perlu diterapkan untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor. Dengan langkah langkah ini, diharapkan integritas pegawai dalam menggunakan fasilitas kantor dapat terjaga dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam hal pengaruh nepotisme dalam promosi dan mutasi pegawai, Pemerintah Kabupaten Agam harus menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Larangan perdagangan pengaruh perlu diterapkan secara tegas, disertai dengan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Penguatan mekanisme pengawasan internal juga penting untuk mendeteksi adanya praktik nepotisme. Dengan meningkatkan integritas calon pimpinan dan melakukan deklarasi konflik kepentingan, diharapkan proses promosi dan mutasi pegawai dapat berlangsung secara adil dan transparan. Terakhir, dalam menghadapi perintah atasan yang tidak sesuai

						aturan, sosialisasi mengenai gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap perlu dilakukan secara rutin. Penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan komitmen pimpinan dalam penegakan aturan harus diperkuat. Dengan menerapkan sistem manajemen kepatuhan yang sesuai dengan standar internasional, diharapkan seluruh pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
22.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,45	88,50		Mempertahankan kualitas pelayanan publik serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, Mengoptimalkan data hasil SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan
23.	Capaian IKU Makro	4	90,33	90,25		
24.	Capaian IKU Non Makro	6	91,67	61,83		
RB TEMATIK						
25.	Pentasan Kemiskinan (strategi Pembangunan)	1	0,51	51,00	-Rencana aksi yang disusun sudah cukup baik dengan hasil realisasi indikator sasaran yang memenuhi target. Namun demikian keseluruhan rencana aksi yang disusun masih cenderung business as usual tanpa adanya inovasi/ perbaikan dalam menjawab permasalahan utama - Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi	-Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait dan memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix

					pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan	lain
26.	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,53	53,00	- Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan	-Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait dan memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
27.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,58	58,00	(1) Sebagian sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. (2) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya menunjukkan adanya percepatan/inovasi untuk menyelesaikan masalah (masih cenderung business as usual). (3) Rencana aksi belum memuat kolaborasi nyata dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan. (4) Rencana aksi yang disusun pada tema "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting" belum memuat unsur digitalisasi.	
29.	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0,63	63,00	1. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek	

					perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan	
30.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2,36	78,67	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2025, sumber data BPS	
31.	Reealisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,00	33,33	Data Realisasi Investasi Menggunakan Data Per Desember 2025	
32.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	1,13	37,67	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/ A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	
33.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,85	95,00	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada Kepmen PANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2073	
34.	Pengendalian Inflasi	3	0	0,00	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	
35.	Percepatan Hilirisasi	0,01				

36.	Ketahanan Pangan	0,01				
37.	Peningkatan KUalitas dan Akses Layanan Kesehatan	0,01				
38.	Peningkatan Akses, Kualitas dan mutu layanan pendidikan	0,01				

Sumber : Hasil Evaluasi RB Pemerintah Daerah Kab. Agam Tahun 2025

Indikator tujuan kedua pada Misi I RPJMD 2021 - 2025 adalah Persentase Nagari dengan Kategori Cepat Berkembang, diukur berdasarkan hasil evaluasi perkembangan nagari. Nagari dengan kategori cepat berkembang menunjukkan bahwa nagari/desa tersebut memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur memadai serta pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah yang sangat baik. Evaluasi perkembangan desa/nagari merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa/nagari. Adapun bidang urusan yang dievaluasi adalah :

- Bidang pemerintahan (pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat, desa berbasis teknologi informasi serta pelestarian adat dan budaya).
- Bidang kewilayahan (identitas, batas, inovasi, tanggap dan siaga bencana, pengaturan investasi).
- Bidang kemasyarakatan (partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat).

Tingkat perkembangan nagari terdiri atas 3 tingkatan, yaitu :

- Kategori kurang berkembang dengan skor ≤ 300 .
- Berkembang dengan skor 301 - 450.
- Kategori cepat berkembang dengan skor ≥ 451 .

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025, tidak ada lagi nagari di Kabupaten Agam yang masuk dalam kategori kurang berkembang, nagari kategori berkembang sebanyak 15 nagari (16,30%) sedangkan nagari dengan kategori cepat berkembang sebanyak 77 nagari (83,69%). Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan nagari adalah tingginya partisipasi masyarakat, kinerja pemerintahan, inovasi, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Walaupun capaian Tahun 2025 telah melebihi target, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, antara lain :

- Beberapa nagari masih belum sepenuhnya melakukan peningkatan kapasitas aparatur
- Masih ada beberapa nagari yang belum memahami konsep evaluasi tingkat perkembangan desa/nagari, sehingga penginputan data nagari sering

terlambat.

- Pergantian penanggung jawab aplikasi

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari selaku Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan nagari selalu melakukan pendampingan dalam pemenuhan indikator – indikator penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Adapun bentuk pendampingan antara lain bimbingan teknis, workshop serta monitoring dan evaluasi.

Adapun pencapaian tujuan pada misi I ini, didukung melalui 4 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

A. Pengukuran Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

Kinerja sasaran strategis “ terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel “ tergambar pada capaian 3 indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP	Nilai	77 (BB)	67,45 (B)	87,59
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	84 (Baik)	69,70	82,98
3.	Nilai EPPD	Nilai	3,5810	3,5771	99,89

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

1) Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Nilai SAKIP daerah didapatkan berdasarkan hasil evaluasi Tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi SAKIP pada lembaga/instansi yang ada. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/257/AA.05/2025 tanggal 28 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Nilai SAKIP Kabupaten Agam tahun 2025 adalah 67,45 dengan predikat "B", sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 67,11. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", artinya implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Terdapat sedikit perbedaan penilaian Tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya nilai SAKIP daerah hanya berdasarkan komponen penilaian SAKIP saja, namun Tahun 2025 penilaian SAKIP juga memperhatikan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Adapun rincian komponen penilaian SAKIP Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Nilai SAKIP Kabupaten Agam Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	21,95
B	Pengukuran Kinerja	30	18,74
C	Pelaporan Kinerja	15	10,66
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,10
	Nilai hasil evaluasi	100	67,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa kelemahan yang masih ditemui dalam penerapan SAKIP di Kabupaten Agam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja;
2. Belum terdapat identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak terkait;
3. terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum berorientasi outcome atau bersifat kegiatan/ output;
4. terdapat ketidakselarasan indikator kinerja pada dokumen indikator kinerja

utama (IKU) dan PK PD;

5. Aplikasi E sakip Kab. Agam belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja secara optimal;
6. terdapat dokumen IKU yang belum dilengkapi definisi operasional dan formulasi perhitungan;
7. hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja;
8. Laporan kinerja yang disusun sebagian PD tidak selaras dengan PK tahun 2025 yang telah ditetapkan;
9. sebagian besar laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai;
10. laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
11. laporan hasil evaluasi belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
12. sebagian rekomendasi atas hasil evaluasi internal belum ditindaklanjuti oleh PD;
13. belum terdapat kebijakan terkait reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, beberapa rekomendasi yang disarankan dilakukan adalah :

1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/ cascading kinerja pada seluruh PD dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
2. melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
3. melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART
4. menetapkan Iku pada level PD dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat;
5. memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi dan mengintegrasikan dengan pengukuran kinerja individu yang

telah ada;

6. mendorong PD untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan menerapkan reward dan punishment;
7. meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja;
8. melakukan reviu terhadap laporan kinerja PD;
9. meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluais internal;
10. meningkatkan kualitas LHE AKIP;
11. melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP;
12. membuat kebijakan reward dan punishment.

2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan di daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat 6 dimensi yang dinilai yaitu : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah serta Opini BPK terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 040-806-2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat tahun Anggaran 2024, Dengan Tahun Ukur 2025, IPKD Kabupaten Agam adalah 69,7048 dengan kategori cukup baik (B). Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Dimensi	Bobot (%)	Indeks (%)	Tingkat Capaian (%)
1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D1)	15	13,1010	87,34
2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D2)	20	8,5420	42,71
3.	Transparansi pengelolaan keuangan (D3)	15	14,0630	93,75
4.	Penyerapan anggaran (D4)	20	20	100
5.	Kondisi keuangan daerah (D5)	20	4	20
6.	Opini BPK (D6)	10	10	100

	TOTAL		69,7048	
	Nilai		B	

Sumber : SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 040-806-2025 Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 dimensi penilaian IPKD yang memiliki nilai rendah yaitu kondisi keuangan daerah serta pengalokasian belanja pada APBD, sedangkan nilai tertinggi adalah dimensi penyerapan anggaran dan Opini BPK terhadap laporan keuangan yang mencapai 100%. Adapun beberapa permasalahan dan kendala yang masih perlu diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Indeks Evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terdapat ketidaksesuaian beberapa pagu program pada RKPD dengan pagu program pada KUA PPAS.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2.	Terdapat ketidaksesuaian beberapa pagu program pada KUA PPAS dengan pagu program pada APBD.	2. Mengawal keselarasan program dan kegiatan serta penganggaran mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran. 3. Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
3.	Tidak tercapainya alokasi <i>mandatory spending</i> dana kesehatan minimal 10%.	1. Menyusun prioritas penganggaran
4.	Tidak tercapainya alokasi <i>mandatory spending</i> dana infrastruktur minimal 20%.	2. Melakukan pengawalan terhadap pemenuhan alokasi belanja SPM dan <i>mandatory spending</i>
5.	Alokasi belanja pemenuhan SPM yang belum sesuai.	
6.	Terdapat 1 dokumen pemerintah daerah yang tidak publish tepat waktu.	Memastikan publish dokumen pemerintah daerah tepat waktu
7.	Rendahnya indeks kemandirian keuangan daerah	4. Melakukan kajian terkait potensi pajak dan retribusi serta melakukan updating potensi pajak dan retribusi. 5. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak

		dalam pemungutan pajak dan retribusi. 6. Penguatan regulasi, kapasitas SDM dan kelembagaan pemungut pajak dan retribusi
8.	Rendahnya indeks fkesibilitas keuangan	
9.	Rendahnya indeks solvabilitas operasional	
10.	Rendahnya indeks solvabilitas jangka pendek	

Sumber : Hasil Evaluasi IPKD kabupaten Agam, 2025

3) Nilai EPPD

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah baik secara keseluruhan (makro) maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nilai EPPD ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan setiap tahunnya. Untuk penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2025 belum dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 yang disampaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2022, nilai EPPD Kabupaten Agam adalah 3,5771 (tinggi).

Capaian ini sedikit lebih rendah dibanding target (3,5810) dengan capaian sebesar 99,98%. Jika dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten lain di Indonesia, capaian Nilai EPPD Kabupaten Agam cukup membanggakan karena berada pada peringkat 24 nasional. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan upaya yang keras dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kondisi ini dapat dicapai karena adanya peningkatan kinerja OPD serta keseriusan OPD dalam melengkapi data dukung.

Di samping itu, capaian tahun 2025 juga didukung oleh oleh capaian

kinerja indikator makro yang sudah berada pada kategori baik. Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya
Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP	75 (BB)	67,11 (B)	89,48	77 (BB)	67,45 (B)	87,59
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82 (baik)	74,03 (perlu perbaikan)	90,28	84 (baik)	69,70	82,98
3.	Nilai EPPD	3,5000	3,5771	102,20	3,5810	3,5771	99,98

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Realisasi kinerja Nilai SAKIP tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 walaupun tidak signifikan sebanyak 0,34 poin. Namun tingkat capaian kinerja mengalami penurunan, dimana 89,48% pada tahun 2024 menjadi 87,59% pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena peningkatan target setiap tahun tidak sebanding dengan peningkatan nilai realisasi. Nilai SAKIP B sudah dicapai sejak tahun 2016, walaupun ada peningkatan nilai setiap tahunnya, namun tetap berada pada kategori B. Berikut data capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Agam sejak Tahun 2016

Tabel 2.14
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Agam Beberapa Tahun Terakhir

TAHUN	KATEGORI	NILAI	PENINGKATAN
2016	Baik	61,80	-
2017	Baik	62,04	0,24
2018	Baik	63,82	1,78
2019	Baik	64,38	0,56
2020	Baik	65,65	1,27

2021	Baik	65,92	0,27
2022	Baik	66,43	0,51
2023	Baik	66,91	0,48
2024	Baik	67,11	0,20
2025	Baik	67,45	0,34

Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

Berdasarkan matriks di atas terlihat adanya kecenderungan peningkatan kinerja SAKIP setiap tahunnya, walaupun hanya sedikit peningkatan yang diperoleh. Berikut disampaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Agam Tahun 2025 yang telah dilaksanakan. Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan sebagai upaya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab. Agam tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Matrik Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja						
	Sebagian PD belum menyampaikan dokumen PK tahun 2024 hingga ke level Eselon IV/ subkoordinator melalui esr.menpan.go.id, sehingga tidak diketahui kualitas perencanaannya	Menyampaikan PK tahun berjalan pada setiap PD dari level tertinggi sampai level terkecil melalui esr.menpan.go.id agar dapat dipastikan penjenjangan kinerja yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi	Melakukan verifikasi terhadap dokumen fisik Perjanjian kinerja sampai level eselon IV yang sudah dikumpulkan pada Bagian Organisasi	45 dokumen	Januari 2025 dan Oktober 2025	Bagian Organisasi	Sudah selesai
			Melakukan monitoring terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pemda dan Perangkat Daerah yang diunggah pada aplikasi ESR Menpan	1 kegiatan	Februari 2025	Bagian Organisasi	Sudah selesai
	Terdapat indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART dan tidak sesuai pada levelnya	Melakukan reuiu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawak telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja.	Melakukan desk/ asistensi untuk memastikan indikator kinerja yang SMART dan sesuai level pada dokumen perencanaan daerah perubahan tahun 2025 dan dokumen perencanaan awal tahun 2026	2 dokumen	Januari - Juni 2025	Bappeda dan Tim Ad Hoc	Sudah selesai

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
		Dan memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya	Melakukan desk/asistensi untuk memastikan indikator kinerja yang SMART dan sesuai level pada dokumen perencanaan Perangkat daerah perubahan 2025 dan dokumen perencanaan PD awal 2026	2 dokumen	Januari - Juni 2025	Bappeda dan Tim Ad Hoc	Sudah selesai
	Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK	Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Melakukan pendampingan penyusunan rencana aksi	1 kegiatan	Desember 2024/ Januari 2025	Bagian Organisasi dan Tim Ad Hoc	Sudah selesai
	Terdapat ketidakselarasan Indikator kinerja pada dokumen indikator Kinerja Utama (IKU) dan PK PD		Melakukan desk untuk memastikan Perjanjian Kinerja selaras dengan IKU yang ditetapkan	1 kegiatan	Januari 2025	Bagian Organisasi dan Tim Ad Hoc	Sudah selesai
	Pemerintah Kabupaten Agam dan sebagian besar PD telah	Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja dengan	Melakukan pendampingan penyempurnaan	1 kegiatan	Februari 2025	Bappeda dan Tim Ad Hoc	Sudah selesai

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
	menyusun dokumen penjenjangan kinerja (<i>cascade down</i>), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi dan belum berdasarkan <i>logical framework</i>	memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang	terhadap pohon kinerja yang telah disusun PD (Tindak lanjut kegiatan penyusunan penjenjangan kinerja di Balcone dan Nuansa Maninjau)				
	Belum terdapat indentifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya <i>crosscutting</i> antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Melakukan pendampingan penyempurnaan terhadap pohon kinerja yang telah disusun PD (Tindak lanjut kegiatan penyusunan penjenjangan kinerja di Balcone dan Nuansa Maninjau)	1 kegiatan	Februari 2025	Bappeda dan Tim Ad Hoc	Sudah selesai
2.	Pengukuran Kinerja						
	Terdapat dokumen IKU yang belum dilengkapi definisi operasional dan formulasi perhitungan	Menetapkan IKU pada level PD dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja	Melengkapi definisi operasional dan formulasi penghitungan IKU Pemda dan PD (dalam bentuk lampiran)	1 dokumen	Februari 2025	Bappeda dan Tim Ad Hoc	Sudah selesai
	Aplikasi manajemen kinerja yaitu SAKIP	Mengoptimalkan aplikasi E SAKIP Kabupaten Agam diikuti	Melakukan uji coba dan	1 aplikasi	Desember 2024 - Maret	Bagian Organisasi,	Sedang tahap uji coba dan

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
	Agam belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja PD, hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar data yang belum tersedia pada aplikasi tersebut	dengan sosialisasi kepada seluruh PD, serta memantau kepatuhan pengisian seluruh PD diaplikasi tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara <i>real time</i> . Selanjutnya, mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja	penyempurnaan aplikasi E SAKIP		2025	Diskominfo dan Tim Ad Hoc	pengembangan aplikasi
			Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi E SAKIP Pemda	1 kegiatan	April 2025	Bagian Organisasi, Diskominfo dan Tim Ad Hoc	Sedang tahap uji coba dan pengembangan aplikasi
			Memanfaatkan aplikasi E SAKIP Pemda Agam	1 aplikasi	April 2025	Seluruh Perangkat Daerah	Sedang tahap uji coba dan pengembangan aplikasi
			Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi E SAKIP	1 aplikasi	April 2025	Bagian Organisasi dan Tim Ad Hoc	Sedang tahap uji coba dan pengembangan aplikasi
	Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dijadikan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Mendorong PD untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan menerapkan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi	Melakukan evaluasi terhadap capaian IKU, Program dan kegiatan pada PD	1 Laporan	Februari 2025	Bappeda dan Tim Ad Hoc	Sudah dilaksanakan
			Menerapkan pemberian reward dan punishment atas capaian kinerja PD	1 laporan	Februari 2025	Bappeda dan Tim Ad Hoc	Sudah dilaksanakan
3.	pelaporan kinerja						
	Laporan kinerja yang disusun sebagian PD tidak selaras dengan PK tahun 2023 yang telah	Meningkatkan kualitas laporan kinerja terutama pada PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahn dan analis	Melakukan pendampingan penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	1 kegiatan	Desember 2024	Bagian Organisasi dan Tim Ad Hoc	Sudah dilaksanakan

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
	ditetapkan	data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis efesiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, mamastikan laporan kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang diperjanjikan	Melakukan desk LkJIP Perangkat Daerah	1 kegiatan	Januari 2025	Bagian Organisasi dan Tim Ad Hoc	Sudah dilaksanakan
	Terdapat laporan kinerja pada PD yang disusun hanya menjelaskan terkait realisasi anggaran, belum menjelaskan terkait realisasi kinerja yang dicapai	Melakukan revidi terhadap laporan kinerja PD untuk memastikan kualitas dan keselarasan data yang disajikan	Menyusun pedoman Reviu LKjIP Perangkat Daerah	1 dokumen	Desember 2024	Inspektorat Daerah dan Tim Ad Hoc	
			Memastikan hasil revidi LkjiP PD ditindaklanjuti	1 kegiatan	Februari 2025	Inspektorat Daerah dan Tim Ad Hoc	
		Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya	Memastikan bahwa laporan kinerja dijadikan dasar perencanaan berikutnya	1 dokumen	Januari - Juni 2025	Bappeda dan Tim ad hoc	Sudah dilaksanakan
	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan		Menambahkan penjelasan yang memadai terkait	1 dokumen	Januari - Juni 2026	Bappeda dan Tim ad hoc	Sudah dilaksanakan

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
	capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup		penetapan target yang lebih rendah dari capaian sebelumnya				
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
	Laporan evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP di PD	Meningkatkan kualitas LHE AKIP dengan menyajikan temua dan merekomendasikan yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD	Melaksanakan peningkatan kapabilitas APiP dalam melakukan evaluasi internal	1 kegiatan	Desember 2024	Inspektorat Daerah	Sudah dilaksanakan
	Sebagian rekomendasi atas hasil evaluasi internal belum ditindaklanjuti oleh PD	Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD	melakukan monev atas rekomendasi hasil evaluasi internal	1 kegiatan	Maret 2025	Inspektorat Daerah	Belum dilaksanakan
	Belum terdapat kebijakan terkait reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD	Membuat kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level Perangkat Daerah	menyusun kebijakan reward dan punishment terhadap hasil evaluasi internal	1 dokumen	Desember 2024	Inspektorat Daerah	
			Menerapkan reward dan punishment terhadap hasil evaluasi internal	1 dokumen	Maret 2025	Inspektorat Daerah	

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
		Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	Melakukan penyusunan Juknis evaluasi internal	1 dokumen	Desember 2024 - Januari 2025	Inspektorat Daerah	
			Melaksanakan peningkatan kapabilitas APIP dalam melakukan evaluasi internal	1 kegiatan	Februari 2025	Inspektorat Daerah	

Sumber : Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kab.Agam Tahun 2024

Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2025 mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan dibanding Tahun 2024 (sebesar 4,33 poin). Adapun rincian pengukuran IPKD berdasarkan dimensi pengukuran dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Tabel 2.16

Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dan 2025

No	Dimensi	Bobot (%)	2024		Bobot (%)	2025	
			Realisasi	Capaian (%)		realisasi	Capaian (%)
1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D1)	15	8,406	56,04	15	13,1010	87,34
2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D2)	20	19,48 3	97,41 5	20	8,5420	42,71
3.	Transparansi pengelolaan keuangan (D3)	15	12,93 1	86,21	15	14,0630	93,75
4.	Penyerapan anggaran (D4)	20	15	75	20	20	100
5.	Kondisi keuangan daerah (D5)	15	3,21	21,40	20	4	20
6.	Opini BPK (D6)	15	15	100	10	10	100
	TOTAL	100	74,03		100	69,706	

Sumber : Hasil Evaluasi IPKD, 2024 dan 2025

Secara umum, penurunan nilai IPKD hampir terjadi di seluruh kabupaten / kota yang ada di Sumatera Barat. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya perubahan / pembaharuan pengukuran IPKD sehingga mempengaruhi nilai akhir. Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada matrik di bawah ini :

Tabel. Pembaharuan Pengukuran IPKD Tahun 2025

NO	DIMENSI	SEBELUM	SESUDAH
1.	Dimensi 2	Alokasi mandatory spending dana kesehatan minimal 10%	Alokasi mandatory spending belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer kepada daerah
		Alokasi mandatory spending alokasi dana infrastruktur minimal	Mandatory spending alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total

		25%	belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa
		Penilai alokasi belanja pemenuhan SPM, ketika dianggarkan tanpa minimum anggaran diberi nilai 1	Penambahan kriteria penilaian bagi alokasi belanja pemenuhan SPM : 4. Skor pemenuhan alokasi yang dibandingkan antara pengalokasian anggaran dengan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM kesehatan provinsi sesuai dengan ketentuan 5. Skor pemenuhan antara capaian output dengan target output
2.	Dimensi 3	Terdapat 29 dokumen yang harus dipublikasikan dengan kriteria : 3. Ketepatan waktu 4. Keteraksesan	Penyederhanaan dari 29 dokumen menjadi 18 dokumen (untuk tahun 2025) dan penambahan 3 dokumen (tahun 2026), dengan kriteria sama.
3.	Dimensi 4	Terdapat 4 jenis belanja yang menjadi indikator penilaian yaitu belanja operasional, belanja transfer, belanja modal dan belanja tidak terduga	Berubah menjadi 3 jenis belanja dengan indikator penilaian : belanja operasional, belanja transfer, belanja modal.
4.	Dimensi 5	Penilaian dimensi 5 menggunakan sistem kluster berdasarkan pemetaan kapasitas fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun	Penilaian menggunakan sistem scoring
		Terdapat 6 indikator	Terdapat 5 indikator
		Terdapat 13 jenis data pagu realisasi yang harus diinput	Terdapat 17 jenis data pagu realisasi yang harus diinput
		Pengukuran <i>flexibilitas</i> keuangan tidak memperhitungkan besaran dana alokasi umum <i>earmark</i> serta jumlah bantuan yang diterima.	Memperhitungkan dana alokasi umum <i>earmark</i> serta jumlah bantuan yang diterima oleh kab/kota
		Bobot nilai 15	Bobot nilai 20
5.	Dimensi 6	Bobot nilai 15	Bobot nilai 10

Sumber : Hasil Sosialisasi Pengukuran IPKD Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri Kemendagri, 2025

Indikator kinerja Nilai EPPD mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2024, yaitu menurun sebesar 4,324. Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan tingkat capaian juga menurun, pada tahun 2024 tingkat capaian kinerja adalah 90,28% (kategori sangat tinggi) sedangkan tahun 2025 tingkat capaian mencapai 82,98%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu disandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Nilai SAKIP	67,11 (B)	67,45 (B)	BB (80)	84,31
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,03 (perlu perbaikan)	69,70	85 (baik)	82
3.	Nilai EPPD	3,5771 (Tinggi)	3,5771	3,1500	113,56

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Nilai SAKIP tahun 2025 baru memenuhi 84,31% dari target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Masih terdapat 12,55 poin lagi yang harus diupayakan sehingga target akhir periode RPJMD dapat tercapai. Kalau dibandingkan dengan tren peningkatan nilai setiap tahunnya yang tidak pernah mencapai lebih dari 1 poin, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan komitmen yang kuat, kerjasama serta upaya yang keras dalam mewujudkannya.

Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi kinerja tahun 2025 baru memenuhi target akhir periode RPJMD sebesar 82%. Masih terdapat 15,30 poin lagi yang harus diupayakan sehingga target akhir periode RPJMD dapat dipenuhi. Namun karena mulai tahun ini ada perubahan pengukuran IPKD, sehingga target untuk tahun 2026 perlu disesuaikan kembali.

Realisasi indikator kinerja Nilai EPPD tahun 2025 telah melebihi target akhir periode RPJMD tahun 2026, dengan tingkat capaian 113,56%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2024. Walaupun kualitas penyelenggaraan pemerintahan telah menunjukkan kualitas tinggi di tahun 2024, namun hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan

sehingga masyarakat puas karena mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah kabupaten.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun 2025 :

Tabel 2.18
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Nilai SAKIP				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,943,000,707	12,882,897,190	92,39%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	31,605,000	21,597,800	68,34%
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	302,771,300	209,558,900	69,21%
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	913.536.200	799.775.211	87,55%
5.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,603,834,900	1,050,862,619	65,52%
6.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	242,237,000	90,076,610	37,19%
7.	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	23151185900	21,074,354,448	91,03%
	Jumlah	40,188,171,007	36,129,122,778	89,89%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				
8.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	213,789,735,393	199,161,477,944	93,16%
9.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	899,735,100	669,090,098	74,37%
10.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,047,285,430	3,604,085,206	89,05%
	Jumlah	218,736,755,923	203,434,653,248	93,01%
Nilai EPPD				
11.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	184,390,000	80,987,655	43,92%
12.	Program Pengelolaan Arsip	39,083,700	33,679,850	86,17%
	Jumlah	223,473,700	114,667,505	51,31%
TOTAL		259,148,400,630	239,678,443,531	92,49%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab.Agam Tahun 2025

Pencapaian nilai SAKIP didukung oleh 7 program, dengan total pagu anggaran tahun 2025 adalah Rp. 40,188,171,007 . realisasi Rp. 36,129,122,778 atau sebesar 89,89%. Indikator kinerja Nilai IPKD didukung oleh 3 program dengan total anggaran Rp. 218,736,755,923,- realisasi Rp. 203,434,653,248,- atau capaian realisasi sebesar 93,01%. Sedangkan untuk nilai EPPD didukung oleh 2 program dengan total anggaran Rp. 223,473,700,- realisasi Rp. 114,667,505,- dengan capaian realisasi sebesar 51,31%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.19

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Terselenggaranya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2025

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Nilai SAKIP	77 (BB)	67,45 (B)	84,31	40,188,171,007	36,129,122,778	89,89	0,93
IPKD	84 (baik)	69,70	82,98	218,736,755,923	203,434,653,248	93,01	0,89
Nilai EPPD	3,5810	3,5771	99,98	223,473,700	114,667,505	51,31	1,94

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Apabila capaian indikator kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran (>1) maka anggaran tersebut efisien, namun jika capaian indikator kinerja lebih kecil dari capaian realisasi anggaran (<1) maka anggaran tersebut tidak efisien.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk Nilai SAKIP dan IPKD nilai efisiensinya berada di bawah angka 1, sehingga anggaran yang dibelanjakan

dianggap tidak efisien mendukung capaian Nilai SAKIP maupun nilai IPKD. Sedangkan nilai EPPD nilai efisiensinya di atas 1, walaupun sangat efisien, namun hal ini juga menunjukkan bahwa program dan anggaran yang ada kurang relevan dengan sasaran yang ditetapkan.

Di samping menganalisa tingkat efisiensi penggunaan anggaran, sumber daya lainnya yang perlu dianalisa adalah kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauh mana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Adapun tingkat efektifitas dapat ditentukan berdasarkan pengelompokan sebagai berikut :

Tabel 2.20
Tingkat Efektifitas Program

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas **
Dibawah 0,75	Kurang efektif
0,76 - 0,90	Cukup efektif
0,91 - 1,10	Efektif
1,11 - 1,50	Cukup Efektif, capaian kinerja juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar program
>1,50	Kurang efektif, capaian program pengaruhnya kecil. Capaian kinerja sasaran lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan capaian program

** : Tim SAKIP, 2025

Tabel berikut memberikan gambaran efektifitas kinerja program terhadap capaian indikator kinerja sasaran :

Tabel 2.21
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Terlaksananya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas

Nilai SAKIP			84,31		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100	0,84	Cukup Efektif
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	0,84	Cukup Efektif
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	110	0,76	cukup Efektif
4.	Program penelitian dan pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja (%)	91,67	0,92	Efektif
5.	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan (jumlah temuan yang dilanjutkan / total temuan)	100	0,84	Cukup Efektif
6.	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	100	0,84	Cukup Efektif
7.	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100	0,84	Cukup Efektif
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			82,98		
1.	Program pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan daerah (LKPD)	100	0,82	cukup efektif
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan daerah dengan pengelolaan BMD baik	100	0,82	Cukup Efektif
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	98,10	0,85	Cukup Efektif
Nilai EPPD			99,98		
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi kewilayahan dan otonomi dan Kerjasama yang terlaksana	100	0,99	efektif

2.	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Pengguna pelayanan Arsip Berbagai memori kolektif dan jati diri bangsa (orang)	82,67	1,21	cukup efektif

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2025

Indikator Nilai SAKIP didukung oleh 7 program dengan tingkat capaian program tinggi (84,31%) namun tidak semuanya efektif mendukung capaian kinerja indikator Nilai SAKIP. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 program yang ada hanya 1 program yang efektif mendukung capaian Nilai SAKIP dan 6 program cukup efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya relevansi antara capaian program dengan capaian sasaran. Dengan begitu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan setiap Perangkat Daerah terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program sehingga capaian program betul – betul mendukung kepada capaian kinerja Nilai SAKIP.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 3 program dengan capaian kurang dari 100%. 3 program tersebut cukup efektif mendukung kepada capaian kinerja sasaran yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Ke depannya perlu dirumuskan rencana kegiatan yang betul - betul mendukung capaian sasaran.

Nilai EPPD didukung oleh 2 program, yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (capaian program 100%) dan Program Pengelolaan Arsip (capaian program 82,67%). Untuk program pertama terlihat efektif mendukung sasaran kinerja, sedangkan program kedua cukup efektif. Hal ini menunjukkan kurangnya relevansi antara program dengan sasaran kegiatan. Ke depannya agar program lebih efektif, perlu dilakukan evaluasi dan melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program lebih efektif.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel

Kinerja sasaran strategis “ terselenggaranya birokrasi yang kapabel “ tergambar pada capaian 3 indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 2.22
Realisasi Indikator Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian(%)

1.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tingkat	46 (tinggi)	40,14 (tinggi)	87,26
2.	Indeks Profesional ASN	Indeks	66 (rendah)	78,81 (sedang)	119,41
3.	Indeks SPBE	Indeks	3,1 (baik)	2,96 (baik)	95,48

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

1) Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Gambaran kematangan perangkat daerah didapatkan dari hasil penilaian terhadap struktur organisasi, budaya kerja dan inovasi organisasi. Kematangan perangkat daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel indikator. Penilaian tingkat kematangan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 variabel indikator yang merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi pada 4 area perubahan yaitu area akuntabilitas (perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penjaminan mutu layanan dan analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah), area penatalaksanaan (SOP pelayanan), area penataan sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan aparatur, manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur) dan area manajemen perubahan (manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, pengukuran inerja perangkat daerah dan aparatur) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah. Ada 5 kriteria kematangan perangkat daerah yaitu :

- a. Tingkat kematangan sangat rendah dengan skor 10 - 19
- b. Tingkat kematangan rendah dengan skor 19,1 - 28
- c. Tingkat kematangan sedang dengan skor 28,1 - 37
- d. Tingkat kematangan tinggi dengan skor 37,1 - 46
- e. Tingkat kematangan sangat tinggi dengan skor 46,1 - 55

Berdasarkan hasil evaluasi, kematangan perangkat daerah Tahun 2025 adalah sebesar 40,14 dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, realisasi ini baru memenuhi 87,26% dari target yang ditetapkan, namun telah berada pada kategori sangat tinggi. Beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penilaian kematangan perangkat daerah, antara lain :

Tabel 2.23
Kelemahan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah dan Upaya
Penyelesaiannya

NO	KELEMAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
1.	Budaya organisasi perangkat daerah masih berada pada tataran slogan, belum dalam bentuk dokumen budaya organisasi, sehingga internalisasi budaya organisasi tidak berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.	7. Internalisasi budaya kerja melalui sosialisasi di berbagai media 8. Memperbaharui Agen Perubahan dan membentuk agen perubahan setiap Perangkat Daerah 9. Menyusun juknis dan SOP pelaksanaan Budaya Kerja 10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja
2.	Teknologi informasi belum sepenuhnya digunakan sebagai unsur supporting dalam melaksanakan tugas dan kewenangan perangkat daerah, termasuk dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.	11. Meningkatkan kematangan arsitektur SPBE 12. Menyempurnakan aplikasi SAKIP untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PD
3.	Sebagian besar perangkat daerah sudah memiliki inovasi, namun pengembangan dan keberlanjutannya belum terkelola dengan baik.	13. Meningkatkan kesadaran seluruh PD untuk melakukan inovasi melalui regulasi terkait kewajiban berinovasi 14. Meningkatkan kualitas inovasi PD melalui pendampingan dan bimbingan teknis 15. Melakukan monitoring, evaluasi 16. Pemberian penghargaan bagi PD yang mempunyai inovasi
4.	Perangkat daerah sudah memiliki prosedur pengelolaan resiko namun belum dievaluasi secara berkala.	17. Melakukan evaluasi manajemen resiko di setiap Perangkat Daerah secara berkala 18. Melakukan sosialisasi terkait manajemen resiko yang disusun kepada internal PD
5.	Belum semua perangkat daerah berpartisipasi dalam penyediaan data untuk mendukung penilaian kematangan perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi ini belum menggambarkan kematangan perangkat daerah secara keseluruhan.	19. Melakukan sosialisasi terkait penilaian kematangan perangkat daerah 20. Melakukan pendampingan pengisian kuisisioner dan pemenuhan data dukung

Sumber: Hasil Pengolahan Data LKjIP, 2025

2) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang dinilai berdasarkan komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan. Pada tahun 2024 terdapat perubahan pembobotan komponen penilaian yaitu kualifikasi pendidikan formal (55%), kompetensi dan kinerja(40%) serta kedisiplinan pegawai ASN (5%). Terdapat 5 kriteria Indeks Profesionalitas ASN :

- Sangat tinggi dengan nilai 91 - 100
- Tinggi dengan nilai 81 - 90
- Sedang dengan nilai 71 - 80
- Rendah dengan nilai 61 - 70
- Sangat rendah dengan nilai kurang dari 60

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan oleh BKN, namun berdasarkan Surat Kepala BKN indikator ini sudah tidak dikeluarkan lagi, sehingga untuk pengukuran Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Agam menggunakan data capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 78,81 (sedang). Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 66 (rendah), dengan persentase capaian mencapai 119,41%. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh pendidikan formal PNS, pengembangan kompetensi yang diikuti PNS, penilaian prestasi kerja serta hukuman disiplin yang pernah diterima oleh PNS. Walaupun realisasi tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan, masih ditemukan beberapa kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN ini, antara lain :

Tabel 2.24

Permasalahan Dalam Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dan Upaya Penyelesaiannya

NO	KELEMAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
1.	Belum meratanya akses pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN.	1. Secara bertahap berupaya meningkatkan ketersediaan anggaran pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2. Menghimbau kepada ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui bimbingan - bimbingan teknis

		yang dilakukan oleh kementerian / kelembagaan yang dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya.
2.	Masih rendahnya kesadaran ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi untuk melaporkan kegiatannya.	2. Menghimbau kepada seluruh perrangkat daerah untuk menyampaikan laporan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara mandiri. 3. Menerapkan manajemen talenta, sehingga meningkatkan kesadaran ASN untuk melaporkan kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti.
3.	Assesment belum dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh ASN karena keterbatasan anggaran sehingga menyulitkan dalam melakukan penataan ASN	4. Menyusun prioritas pelaksanaan assesment untuk jabatan tertentu

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

3) Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi SPBE yang hasilnya ditetapkan dalam bentuk Indeks SPBE. Indeks SPBE merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik, terdapat 5 predikat Indeks SPBE, yaitu:

- Memuaskan dengan nilai indeks 4,2 - 5,0
- Sangat baik dengan nilai indeks 3,5 - < 4,2
- Baik dengan nilai indeks 2,6 - < 3,5
- Cukup dengan nilai indeks 1,8 - < 2,6
- Kurang dengan nilai indeks < 1,8

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, Indeks SPBE Kabupaten Agam adalah 2,96 (baik), dengan rincian hasil evaluasi berdasarkan domain dan aspek penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.25
Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Agam Tahun 2025

No	Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan SPBE	13	2,60
	4. Kebijakan internal Tata Kelola SPBE	13	2,60
2	Domain Tata Kelola SPBE	25	2,80
	5. Perencanaan Strategis	10	2,75
	6. Teknologi informasi dan komunikasi	10	2,75
	7. Penyelenggaraan SPBE	5	3,00
3	Manajemen SPBE	16,5	2,18
	8. Penerapan Manajemen SPBE	12	2,25
	9. Audit TIK	4,5	2,00
4	Layanan SPBE	45,5	3,43
	10. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	27,5	3,50
	11. Layanan publik berbasis elektronik	18	3,5
	Indeks SPBE		2,96

Sumber : Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2025

Realisasi kinerja Indeks SPBE tahun 2025 sebesar 2,96 (baik) lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 3,1 (baik). Jika dibandingkan dengan Indeks SPBE rata-rata nasional, angka ini juga berada di bawah angka nasional yang mencapai 3,23 (baik). Dari hasil evaluasi yang disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam perlu meningkatkan kematangan beberapa indikator pada domain kebijakan dan manajemen SPBE, antara lain :

1. Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE.
2. Kebijakan internal arsitektur SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, manajemen keamanan informasi, audit TIK.
3. Inovasi proses bisnis SPBE.
4. Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
5. Penerapan manajemen data dan manajemen aset TIK
6. Penerapan kompetensi SDM SPBE
7. Penerapan manajemen pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE
8. Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE
9. Layanan kearsipan dinamis, data terbuka, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.26
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya
Birokrasi Yang Kapabel Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	tinggi (44)	Tinggi (39,88)	90,64	46 (tinggi)	40,14 (tinggi)	87,26%
2.	Indek Profesional ASN	Rendah (66)	Sedang (78,81)	119,41	66 (Rendah)	78,81 (Sedang)	119,41%
3.	Indeks SPBE	Baik (3)	cukup (2,56)	85,33	3,1 (Baik)	2,96 (baik)	95,48%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat walaupun ada peningkatan nilai tingkat kematangan perangkat daerah tahun 2025 dibanding tahun 2024 sebesar 1,06 poin, namun persentase capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 0,26%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja tahun ini tidak sebanding / lebih kecil dibanding peningkatan penetapan target kinerja.

Data capaian Indeks Profesionalitas ASN menggunakan data capaian tahun sebelumnya, karena IP ASN untuk tahun 2025 tidak lagi dikeluarkan oleh BKN. Sehubungan dengan hal tersebut tidak ada perubahan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025.

Kinerja Indeks SPBE mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu sehingga tahun ini Kabupaten Agam masuk dalam kategori baik dalam pengelolaan SPBE. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada beberapa domain yang dinilai, yang dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 2.27
Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	2024	2025
1	Domain Kebijakan SPBE	13	2,60	2,60
	- Kebijakan internal Tata Kelola SPBE	13	2,60	2,60
2	Domain Tata Kelola SPBE	25	1,80	2,80
	- Perencanaan Strategis	10	1,00	2,75
	- Teknologi informasi dan komunikasi	10	2,00	2,75
	- Penyelenggaraan SPBE	5	3,00	3,00
3	Manajemen SPBE	16,5	1,45	2,18
	- Penerapan Manajemen SPBE	12	1,50	2,25
	12. Audit TIK	4,5	1,33	2,00
4	Layanan SPBE	45,5	3,37	3,43
	13. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	27,5	3,50	3,50
	14. Layanan publik berbasis elektronik	18	3,17	3,5
	Indeks SPBE		2,56	2,96

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 domain yang mengalami perbaikan / peningkatan kinerja yaitu Domain Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan peningkatan tertinggi terlihat pada domain tata kelola SPBE. Hal ini menunjukkan Kabupaten Agam telah berupaya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2024.

Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD 2021 – 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel dengan Target Periode Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	39,88 (tinggi)	40,14 (tinggi)	48 (sangat Tinggi)	83,63%
2.	Indeks Profesionalitas ASN	78,81 (sedang)	78,81 (sedang)	70	112,58%

3.	Indeks SPBE	2,56 (cukup)	2,96 (baik)	3,3 (baik)	89,70%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026, tingkat kematangan perangkat daerah baru mencapai 83,63%. Masih terdapat 7,86 poin lagi yang harus dicapai agar target di akhir periode RPJMD terpenuhi. Seluruh Perangkat Daerah harus berupaya lebih keras agar kematangan perangkat daerah dapat ditingkatkan. Di samping itu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah perlu melakukan pendampingan dalam pemenuhan data dukung sehingga perolehan nilai kematangan perangkat daerah betul-betul menggambarkan kondisi rata-rata perangkat daerah yang sebenarnya.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 tidak lagi dikeluarkan oleh BKN sehingga capaian tahun ini tetap menggunakan data tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026, maka capaian tahun ini telah melebihi target akhir periode 2021 – 2026, mencapai 112,58%. Kondisi ini tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar tidak terjadi penurunan pada tahun berikutnya. BKPSDM sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kepegawaian diharapkan tetap mengawal pemenuhan indikator – indikator yang mempengaruhi capaian kinerja ini dan selalu melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah lainnya dalam pelaporannya.

Indeks SPBE tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan 2024, namun jika dibandingkan dengan target 2026 baru mencapai 89,70%. Masih terdapat 0,34 poin lagi yang harus dicapai untuk memenuhi target akhir periode RPJMD. Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai penanggung jawab pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat melakukan terobosan baru sehingga target akhir periode RPJMD 2021 – 2026 dapat dicapai.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun 2025 :

Tabel 2.29

**Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Terselenggaranya birokrasi yang Kapabel Tahun 2025**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.572.659	230.619.713	67,72%
	Jumlah			
Indeks Profesionalitas ASN				
2.	Program Kepegawaian	1,324,739,700	1,019,439,265	76,95%
	Jumlah			
Indeks SPBE				
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,620,641,326.00	515,628,854	31,82%
4.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,054,982,828.00	1,210,990,293	58,93%
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	65,721,400	61,411,370	93,44%
6.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	6,551,000.00	6,410,000	97,85
	Jumlah	3,747,896,554	1,794,440,517	47,88%
TOTAL		5,413,208,913	3,044,499,495	56,24%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 1 program yang mendukung capaian kinerja indikator tingkat kematangan perangkat daerah dengan total anggaran Rp. 340.572.659 realisasi sebesar Rp 230.619.713 dengan persentase capaian realisasi sebesar 67,72%. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN didukung oleh 1 program dengan total anggaran Rp. 1,324,739,700 realisasi Rp. 1,019,439,265 dengan persentase capaian realisasi 76,95%. Sedangkan untuk Indeks SPBE didukung oleh 4 program dengan total anggaran sebesar Rp.3,747,896,554 , realisasi Rp. 1,794,440,517 dan persentase capaian realisasi sebesar 47,88%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.30
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran
Terselenggaranya Birokrasi Yang kapabel Tahun 2025

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	capaian (%)	
Tingkat kematangan PD	46 (tinggi)	40,14 (tinggi)	87,26	340.572.659	230.619.713	67,72	1,29
IP ASN	66 (Renda)	78,81 (Sedang)	119,41	1,324,739,700	1,019,439,265	76,95	1,55
Indeks SPBE	3,1 (Baik)	2,96 (baik)	95,48	3,747,896,554	1,794,440,517	47,88	1,99

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Tingkat Kematangan Perangkat Daerah adalah sebesar 1,29. Anggaran ini masih bisa dikatakan efisien untuk mendukung capaian kinerja Tingkat Kematangan Perangkat Daerah. Walaupun begitu perlu adanya perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga capaian kinerja dan realisasi anggaran lebih selaras.

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN efisiensi penggunaan anggaran melebihi angka 1 yaitu sebesar 1,55. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran, dengan realisasi anggaran yang sedikit namun dapat menghasilkan kinerja yang banyak. Namun gap yang cukup besar antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.

Sama halnya dengan Indeks Profesionalitas ASN, Indikator kinerja Indeks SPBE efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,99, lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan efisien mendukung kinerja Indeks SPBE, dimana capaian realisasi anggaran lebih kecil dibanding capaian kinerja. Namun gap yang cukup besar antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa

terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauh mana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.31
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Terselenggaranya Birokrasi Yang Kapabel

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah			87,26		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100	0,87	cukup efektif
Indeks Profesionalitas ASN			119,41		
1.	Program Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	0	0	kurang Efektif
Indeks SPBE			95,48		
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan proram priolitas pemerintahan daerah	100	0,95	Efektif
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	0,95	Efektif
3.	Program Penyelenggaraan statistik Sektoral	Persentase kebijakan pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	100	0,95	Efektif

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
4.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	113,33	0,84	Cukup Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Tingkat Kematangan Perangkat Daerah didukung oleh 1 program dengan dengan nilai efektifitas 0,87 (Cukup efektif). Walaupun program ini cukup efektif mendukung capaian kinerja sasaran, namun Kematangan Perangkat Daerah juga dipengaruhi oleh program – program lain yang sesuai dengan indikator penilaian. Indeks Profesionalitas ASN memiliki nilai efektifitas 0 (kurang efektif). Hal ini menunjukkan bahwa Program Kepegawaian kurang efektif mendukung kepada capaian kinerja peningkatan profesionalitas ASN. Hal ini disebabkan tahun 2026 berdasarkan Surat BKN No 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 oktober 2025 bahwa BKN sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran IP ASN. Indeks SPBE didukung oleh 4 program, dimana 3 di antaranya efektif mendukung capaian kinerja Indeks SPBE yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Sedangkan 1 program lainnya yaitu Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi nilainya berada di bahwa 0,84 sehingga cukup efektif mendukung capaian Indeks SPBE. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk kinerja Indeks SPBE. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran ke depannya.

C. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Kinerja sasaran strategis “meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik” dapat terlihat pada capaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	Indeks	85	88,44	104,05

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang lazim digunakan oleh lembaga penyedia barang / jasa termasuk Pemerintah Daerah dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana UU Nomor 25 Tahun 2009, seluruh institusi pemerintah wajib mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat. Adapun pelaksanaan survey tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap layanan yang diberikan oleh seluruh perangkat daerah, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah sebesar 88,44 dengan kinerja sangat baik. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 85 dengan tingkat capaian 104,05%. Berdasarkan penilaian, dari 9 unsur pelayanan yang ada, 2 di antaranya berada pada mutu layanan kategori sangat baik yaitu biaya/tarif serta penanganan pengaduan. Sedangkan 7 unsur pelayanan lainnya berada pada mutu layanan kategori baik, yaitu : persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur layanan, waktu penyelesaian, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta sarana dan prasarana. Beberapa hal yang masih dikeluhkan oleh masyarakat dan menjadi kendala dalam pelayanan publik di Kabupaten Agam, antara lain :

Tabel 2.33
Kendala dan Solusi Permasalahan Pelayanan Publik

NO	UNSUR LAYANAN	KENDALA	SOLUSI
1.	Waktu layanan	Sebagian responden masih mengeluhkan lamanya waktu	- Menjaga agar waktu layanan sesuai dengan

		pelayanan. Padahal lama pelayanan masih sesuai dengan range yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan	Standar Pelayanan - Meningkatkan sosialisasi Standar Pelayanan di berbagai media informasi termasuk lama pelayanan - Melakukan evaluasi SP dan SOP secara berkala.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sebagian responden masih mengeluhkan prosedur yang berbelit dan rumit	- Melakukan evaluasi terhadap sistem, mekanisme dan prosedur secara berkala - Perlunya menyempurnakan persyaratan pelayanan yang mudah, menciptakan prosedur dan mekanisme kerja sederhana dan singkat - Melibatkan masyarakat dalam penyusun Standar Pelayanan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik - Meningkatkan inovasi pelayanan publik
3.	Kompetensi pelaksana	Masih ditemukan keluhan terkait adanya petugas layanan yang tidak memahami prosedur dan mekanisme layanan.	- Meningkatkan kapasitas petugas layanan - Menerapkan punish dan reward
4.	Sarana dan prasarana	Belum semua Perangkat Daerah / Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki kelengkapan sarana prasarana pendukung termasuk untuk sarana prasarana bagi kelompok rentan yang memadai	- Perlunya perbaikan dan pemenuhan komponen sarana prasarana sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2009 seperti ruang tunggu beserta fasilitasnya, front office, meja layanan, wc/toilet (terpisah laki-laki dan perempuan), mushalla, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang tempat bermain anak, bak sampah, parkir, cctv, dll. - Mendorong percepatan penyediaan sarana prasarana yang ramah bagi kelompok rentan sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 66 Tahun

			2020 seperti kursi roda, pintu mudah diakses, jalan landai, selasar penghubung, toilet khusus, loket khusus, ruang khusus, guiding block, parkir khusus dan area bermain anak

Sumber: Laporan SKM Tahun 2025

Di samping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.34
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86,3	101,53	85	88,44	104,05

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, baik realisasi maupun capaiannya. Pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 101,53% sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 104,05%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2025 jika dibanding tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB. Pada tahun 2024 IPP Kabupaten Agam sebesar 3,25 (Baik dengan catatan) sedangkan pada tahun 2025 meningkat sebesar 3,78 (Baik).

Untuk mengetahui persentase capaian target akhir RPJMD Periode 2021 – 2026, dapat diketahui dengan menyandingkan capaian tahun ini dengan target akhir periode RPJMD tahun 2026. Berikut disampaikan kondisi

capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target Periode Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	86,30	88,44	85,5	103,44

Sumber : Laporan SKM Kab.Agam Tahun 2025

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 telah melebihi target akhir RPJMD periode 2021 – 2026, dengan capaian 103,44%. Walaupun telah melebihi target 2026, perbaikan dan penyempurnaan layanan publik harus tetap dilaksanakan dan pelayanan prima dapat diwujudkan. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku unit organisasi yang bertugas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dituntut untuk konsisten mengawal dan mendampingi Unit Pelayanan Publik yang ada dalam memenuhi Standar Pelayanan.

Indes kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan agregat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik seluruh perangkat daerah. Dengan begitu seluruh program dan anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun 2024 mendukung kepada capaian indikator ini.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indkcator kinerja pada sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.36
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Pagu	Realisasi	Tingkat capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86,3	101,53	1.681.571.356.812,00	1.534.851.336.497,00	91,27	1,1

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat capaian kinerja Indikator Kepuasan Masyarakat lebih besar dari tingkat capaian realisasi program dengan nilai efisiensi sebesar 1,1. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan efisien mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauh mana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.37
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Tingkat Efektifitas
Indeks Kepuasan Masyarakat			101, 53	
1.	Seluruh program dalam APBD Tahun 2025		>90%	> 80

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program yang mendukung capaian Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat memiliki skala lebih dari 80%. Hal ini berarti bahwa kinerja seluruh program sangat efektif dalam mendukung capaian indikator kinerja sasaran.

D. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari

Hasil Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian kinerja indikator tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Realisasi Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Indeks	464	475	102,37%

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari menunjukkan sejauh mana Pemerintahan Nagari telah melakukan pengelolaan pemerintahan dengan baik. Indeks ini diukur berdasarkan hasil evaluasi perkembangan nagari. Evaluasi perkembangan nagari sendiri merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan berdasarkan instrument evaluasi yang telah disusun. Evaluasi ini mencakup bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui perkembangan nagari, pengelompokan nagari berdasarkan perkembangannya serta indeks pengelolaan pemerintahan nagari. Indeks pengelolaan pemerintahan nagari ini diperoleh dari jumlah rata-rata nilai pada seluruh nagari yang ada di Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil perhitungan Tahun 2025 Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari adalah 475, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 464 dengan tingkat capaian 102,37%. Nilai tertinggi adalah Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh (547) kategori cepat berkembang, sedangkan yang terendah adalah Nagari Bukit Batabuh Kecamatan Candung (404) kategori berkembang. Secara umum terlihat adanya perbaikan kinerja pengelolaan pemerintahan nagari. Hal ini tidak lepas dari upaya pendampingan dan pembinaan kepada nagari terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui

melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang kapabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.39
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari	460	469	101,96	464	469	101,08 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari tahun 2025 sama dengan tahun 2024, demikian juga halnya dengan tingkat capaian. Hal ini menunjukkan adanya mempertahankan pengelolaan pemerintahan nagari di Kabupaten Agam, antara lain penerapan e government di nagari, perkembangan inovasi di nagari serta tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat. Sedangkan kendala yang dihadapi sebagian nagari antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet, keterbatasan SDM serta budaya kerja yang belum mendukung (resistensi terhadap perubahan).

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.40
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintah Nagari Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari	469	469	474	0,99

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target akhir RPJMD 2021 - 2026

sampai dengan saat ini telah tercapai 0,99%, dengan selisih 5 poin lagi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari diharapkan dapat konsisten mendampingi Pemerintahan Nagari dalam meningkatkan kualitas layanan baik di bidang pemerintahan, kewilayahan maupun kemasyarakatan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan pemerintahan nagari :

Tabel 2.41

Program dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Penataan Desa	80,065,000	68,400,800	85,43%
2.	Program Administrasi Pemerintah Desa	498,783,926	413,972,450	82,99%
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3039894469	2,253,413,971	74,13%
Jumlah		3,618,743,395	2,735,787,221	75,61%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari dengan total anggaran Rp. 3,618,743,395 realisasi sebesar Rp 2,735,787,221 dengan capaian realisasi sebesar 75,61%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan pemerintahan nagari. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.42

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari

	Indikator Kinerja	Anggaran	

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	capaian (%)	Tingkat Efesiensi
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintah Nagari	464	469	101,08%	3,618,743,395	2,735,787,221	75,61 %	133,69

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pada APBD Tahun 2025, total anggaran untuk mendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan pemerintah nagari sebesar Rp. 3,618,743,395, realisasi Rp. 2,735,787,221 dengan persentase capaian realisasi sebesar 75,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat capaian indikator kinerja terlihat bahwa capaian realisasi anggaran lebih kecil dari capaian kinerja.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.43
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari			101,08		
1	Program Penataan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	85,15	1,19	efektif
2	Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintah nagari yang terbina	150	0,67	Kurang Efektif
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	100	1,01	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari didukung oleh 3 program. Dari 3 program tersebut, 1 Program Administrasi Pemerintah Desa kurang efektif mendukung capaian Indeks Pengelolaan Pemerintah Nagari walaupun secara kinerja program sebesar 150%, tapi belum sepenuhnya mendukung indikator kinerja indeks pengelolaan Pemerintah nagari.

2.3.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi II (Membangun Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh Melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Dan Pengembangan Pariwisata)

Misi II pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 memiliki dengan tujuan “meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat”. Tujuan ini memiliki 2 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.44

Realisasi Indikator Kinerja Misi II Meningkatnya Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Per kapita (ADHK)	Angka	3,98	6,75	169,49
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	4,89	2,99	61,15

Sumber : Agam Dalam Angka, 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK) tahun 2025 dihitung berdasarkan selisih nilai PDRB per kapita tahun 2025 dengan nilai PDRB per kapita tahun 2024 berdasarkan harga konstan tahun 2018 dibagi dengan nilai PDRB per kapita tahun 2024. Berdasarkan Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2026, Nilai PDRB Per Kapita (ADHK) Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah sebesar 29,591 miliar, naik dari tahun 2024 sebesar 27.962. Laju Pertumbuhan PDRB Per kapita (ADHK) tahun 2025 adalah sebesar 6,75, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3,98, tingkat capaian realisasi sebesar 169,49 (sangat tinggi).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur

berdasarkan lapangan usaha atau sektor produksi serta berdasarkan Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan data Agam Dalam Angka Tahun 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Agam adalah sebesar 2,99 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,89 %, tingkat realisasi tahun ini mencapai 61,15 % dengan kategori tingkat capaian sedang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 4,04 %, capaian tahun ini mengalami penurunan sebesar 1,05 %. Hal ini disebabkan karena sektor- sektor lapangan usaha utama seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan dan konstruksi mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. Di samping itu, bencana alam pada beberapa wilayah di Kabupaten Agam sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian tujuan pada Misi II didukung melalui 4 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

A. Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro

Kinerja sasaran strategis “meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro”, dapat terlihat pada capaian 3 indikator utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)	Persen	2,75	2,33	84,73
2.	Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Skala Mikro	Persen	2,6	18	692,31
3.	Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Produk Usaha Mikro	Persen	2	3,08	154

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

*Data belum dirilis BPS

Berdasarkan Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2025, nilai PDRB per kapita lapangan usaha pertanian (ADHK) Tahun 2025 adalah sebesar 4,935 miliar, sedangkan tahun 2024 sebesar 4,823 miliar, dengan laju pertumbuhan PDRB Lapangan usaha pertanian (ADHK) tahun 2025 adalah 2,33. Jika dibandingkan dengan target sebesar 2,75 maka tingkat capaian realisasi hanya sebesar 84,73%.

Laju pertumbuhan pelaku usaha mikro dapat diketahui dengan menghitung selisih jumlah pelaku usaha mikro pada tahun 2025 dengan jumlah pelaku usaha mikro tahun 2024. Pada tahun 2025 jumlah pelaku usaha mikro yang terdaftar pada Dinas Perindagkop UKM adalah 21.775, sedangkan pada tahun 2024 jumlah pelaku usaha mikro adalah sebanyak 17.777. Dengan begitu laju pertumbuhan pelaku usaha mikro adalah sebesar 18% dengan tingkat capaian sebesar 692,31. Walaupun realisasi laju pertumbuhan pelaku usaha mikro tidak sesuai dengan target yang ditetapkan namun jumlah pelaku usaha mikro mengalami peningkatan sebanyak 3.998 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun ada pertumbuhan jumlah namun laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro dapat dilihat dari nilai omset pelaku usaha mikro. Indikator ini memiliki kelemahan yaitu, hanya melihat nilai omset pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan saja, sehingga tidak menggambarkan kondisi secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan data ini tidak lagi diukur pada tahun 2025, sehingga data realisasi Tahun ini menggunakan data realisasi Tahun 2024, yaitu sebesar 3,08%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 2%, maka tingkat capaian laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro berdasarkan nilai omset adalah 3,08%. Peningkatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha mikro dalam mengurus legalitas usaha, sehingga memudahkan produk masuk ke dalam pasar yang lebih besar seperti supermarket dan pasar – pasar modern.
2. Perkembangan digital marketing yang sangat pesat, memudahkan pelaku usaha mikro untuk memasarkan usahanya tanpa batas.
3. Meningkatnya kolaborasi berbagai sektor dalam meningkatkan

kapasitas pelaku usaha mikro.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.46 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)	2,8	1,55	55,47	2,75	2,33	84,73
2.	Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Skala Mikro	2,6	1,85	71,15	2,6	18	692,31
3.	Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro	2	3,08	154	2	3,08	154

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025 untuk indikator kinerja laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK), laju pertumbuhan pelaku usaha mikro, dan laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro. Indikator Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Pertanian (ADHK) mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan mencapai 84,73%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 55,47, bahwa sangat jauh selisihnya dengan capaian tahun 2025.

Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro juga mengalami perlambatan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Ada

peningkatan yang drastis untuk jumlah pelaku usaha mikro sebesar 3998 orang. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah pelaku usaha mikro pada tahun 2025.

Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha mikro pada tahun 2025 dengan tahun 2024 diperkirakan sama yaitu sebesar 3,08%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 2%, maka tingkat capaian kinerja adalah 154%. Kelemahan dari indikator ini, adalah pengukurannya hanya dilihat dari nilai omset pelaku usaha yang dibina di tahun berjalan, sehingga tidak menggambarkan kondisi secara keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan indikator ini dievaluasi dan tidak lagi diukur pada Tahun 2025.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Usaha Mikro Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)	1,55	2,33	1,38	168,84
2.	Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Skala Mikro	1,85	18	2	900
3.	Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro	3,08	3,08	2	154

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK) pada tahun 2025 sudah melebihi target akhir RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan angka 168,84%. Kondisi ini cukup bagus, namun perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan mengingat Sektor Pertanian merupakan lahan usaha yang memberikan kontribusi yang paling besar untuk PDRB Kabupaten Agam. Penetapan target untuk tahun 2026 perlu disesuaikan kembali mengingat capaiannya telah melebihi target. Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro tahun 2025 telah sangat melebihi target akhir RPJMD Periode 2021 – 2026 sebesar 900%. Indikator Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah mencapai 154%, melebihi target akhir periode RPJMD. Kondisi ini perlu dipertahankan dan diperlukan kajian / rumusan definisi operasional untuk indikator ini, sehingga dapat menggambarkan kondisi secara keseluruhan di lapangan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor Pertanian.

Tabel 2.48 Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Usaha Pertanian dan Industri Pengolahan Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)				
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.614.102.231	1.370.445.498	84.90%
2.	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	2.251.789.574	1.043.592.201	46%
3.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	401.089.113	319.026.461	79.54%

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	veteriner			
4.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	86.444.200	73.971.700	85,57%
5.	Program penyuluhan pertanian	1,909,953,372	1,513,108,464	79.22%
6.	Program pengelolaan perikanan tangkap	58,236,860	55,798,000	95,81%
7.	Program pengelolaan perikanan budidaya	393,046,500	109,222,030	27,79%
8.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	125,376,368	114,226,474	91,11%
9.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	2,379,591,850	1,989,579,838	83,61%
	Jumlah	9.219.630.06	6,588,970,666	71,47%
Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro				
10.	Program perencanaan dan pembangunan kawasan industri	581,094,500	524,808,028	90,31%
12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1,273,270,469	1,092,701,650	86%
	Jumlah	1.854.364.969	1.617.509.678	87%
Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Usaha Mikro				
13.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	89,830,200	85,040,500	94,66%
14.	Program hubungan industrial	968,623,500	929,430,300	95,95%
15.	Program pengembangan UMKM	278,800,000	141,969,300	50,92%
16.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	49,953,972	27,205,000	54,46%
17.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	75,197,060	70,800,000	94,15%
18.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	99,158,000	49,908,380	50,33%
	Jumlah	1,562,562,733	1.304.353.480	83%

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Total	12,635,557,769	9,510,833,824	75,27%

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 9 program yang mendukung capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK) dengan total anggaran Rp. 9.219.630.068 dengan realisasi Rp. 6,588,970,666 dengan tingkat capaian realisasi 71,47%. Rata-rata realisasi anggaran cukup baik di atas 75%, kecuali Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian dan Program pengelolaan perikanan budidaya.

Indikator kinerja Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro didukung oleh 2 program dengan total anggaran Rp. 1.854.364.969 realisasi Rp. 1.617.509.678 dengan tingkat capaian realisasi 87%. Dari 2 program tersebut memiliki tingkat capaian diatas 85%.

Sedangkan untuk Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro didukung oleh 7 program dengan total anggaran Rp. 1,562,562,733realisasi Rp 1.304.353.480 dengan tingkat capaian realisasi sebesar 83%. Dari 6 program yang dilaksanakan 3 program di antaranya memiliki capaian realisasi sangat rendah (50%), yaitu Program Pengembangan UMKM dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian dan usaha mikro. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.49 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro Tahun 2025

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan	2,8	2,33	84,73	9.219.630.068	6,588,970,666	71,47	0,84

Usaha Pertanian (ADHK)							
Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	2,6	18	692,31	1.854.364.969	1.617.509.678	87	7,96
Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro	2	3,08	154	1,562,562,733	1304353480	83	1,85

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK) adalah sebesar 0,84. Nilai ini menunjukkan anggaran yang digunakan untuk program cukup efektif dalam menunjang capaian kinerja IKU dimana capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran hanya sedikit selisih untuk capaian kinerja.

Indikator kinerja Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,96 dan ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian realisasi program. Namun karena nilai efisiensinya 2 kali lipat hal ini juga dapat diindikasikan bahwa rencana penganggaran yang disusun kurang selaras dengan kinerja sasaran.

Sama halnya dengan Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Produk Usaha Mikro tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,96, hampir 4 kali lipat nilai efisiensi. Walau terlihat efisien, kondisi ini juga menunjukkan bahwa rencana penganggaran yang disusun kurang selaras dan tidak mendukung kepada kinerja sasaran.

Di samping menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja

juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektivitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektivitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Adapun tingkat efektivitas dapat ditentukan berdasarkan pengelompokan sebagai berikut :

Tabel 2.50 Tingkat Efektivitas Program

Skala Capaian Efektivitas	Tingkat Efektivitas **
Dibawah 0,75	Kurang efektif
0,76 - 0,90	Cukup efektif
0,91 - 1,10	Efektif
1,11 - 1,50	Cukup Efektif, capaian kinerja juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar program
>1,50	Kurang efektif, capaian program pengaruhnya kecil. Capaian kinerja sasaran lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan capaian program

** : Tim SAKIP, 2025

Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.51 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian Dan Usaha Mikro

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektivitas	Tingkat Efektivitas
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)			84,73		
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi pertanian (Ton)	7,5	11,29	Kurang Efektif
	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	88	0,96	Efektif

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektivitas	Tingkat Efektivitas
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medis	100	0,85	Cukup Efektif
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase kasus serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT	97,78	0,87	Cukup Efektif
	Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan SDM Penyuluh	106	0,79	Cukup Efektif
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi Ikan tangkap (ton)	100,06	0,85	Cukup Efektif
	Program pengelolaan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	109,59	0,77	Cukup Efektif
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Orang)	100%	0,85	Cukup Efektif
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi	101,05	83,48	Cukup Efektif
	Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro		692,31		
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase laju jumlah IKM dan nilai produksi	99,43	6,97	kurang Efektif
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Terfasilitasi Bermitra dengan Lembaga Keuangan dan Mitra Usaha	136	5,09	kurang Efektif
	Laju Pertumbuhan nilai tambah Produk Usaha Mikro		154		
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi sehat	90,80	1,7	kurang efektif

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektivitas	Tingkat Efektivitas
	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	100	1,5	cukup efektif
	Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan skala usaha kecil	83,33	1,85	kuang efektif
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang Memenuhi standar	61,79	2,49	kurang efektif
	Program pendidikan dan pelatihan koperasi	Persentase koperasi sehat	233	0,66	kurang efektif
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda terasah	145	1,06	efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa program- program yang mendukung capaian IKU Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian per kapita memiliki tingkat capaian kinerja yang cukup (84,73%), namun terlihat ada program yang kurang efektif dalam mendukung capaian kinerja IKU dimaksud. Nilai efektivitas program tersebut adalah di atas 11 sedangkan untuk lainnya sebanyak 7 program mendapatkan perolehan cukup efektif dan 1 program dinyatakan efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam tahap perencanaan, sehingga perlu penyempurnaan penjenjangan kinerja serta memastikan bahwa kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan betul-betul mendukung pencapaian target sasaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja program dan realisasi anggaran juga terlihat adanya ketidakselarasan antara keduanya.

Capaian IKU Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro didukung oleh 2 program. Kedua program tersebut belum mendukung terhadap capaian IKU, dilihat dari nilai efektivitasnya lebih besar dari 7.

Indikator kinerja laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha

mikro didukung oleh 6 program, 3 program diantaranya dengan capaian kinerja sangat tinggi karena mencapai lebih dari 90%, dan 3 program dengan capaian sekitar 50%. Walaupun rata-rata capaian kinerja program tersebut berada pada kategori sangat tinggi, namun terlihat kurang efektif mendukung capaian kinerja sasaran. Pelaksanaan program ternyata tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja sasaran, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya capaian kinerja sasaran. Untuk selanjutnya perlu melakukan analisis mendalam dalam perumusan penjenjangan kinerja dan menentukan program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk mendukung kinerja sasaran.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Angka	8,56	2,64	30,84
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Angka	936.752	1.173.007	125,22

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Untuk menghitung kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat dilakukan melalui pendekatan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum. Berdasarkan Kabupaten Dalam Angka Tahun 2025, nilai PDRB pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum pada tahun 2025 adalah sebesar 2,67

(milyar) sedangkan pada tahun 2024 sebesar 2,48 (milyar). Dengan begitu, laju pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK) adalah 2,64. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 8,56, maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 30,84 % dengan kategori sangat tinggi. Sangat tingginya tingkat capaian tersebut dipengaruhi meningkatnya kunjungan wisata ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Agam.

Indikator lain yang menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah jumlah kunjungan wisata. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 adalah 1.173.007 kali, angka ini sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 936.752 dengan capaian 125,22%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kunjungan wisata tahun ini antara lain :

- a) Prestasi / penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia dan Wonderful Indonesia Award 2025 yang diraih oleh Desa Wisata Koto Gadang, Nagari Lawang, dan Sungai Batang.
 - b) Wisata alam, pantai dan ngarai, pemandian (waterpark), budaya dan kuliner menjadi Trend wisata tahun 2025 di Kabupaten Agam
 - c) Meningkatnya promosi dan publikasi wisata oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, nagari wisata beserta pemerintah daerah, dalam bentuk Event, pelayanan perjalanan wisata, eksplorasi budaya alam.
- Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.53 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan	4,39	4,82	109,7	8,56	2,64	30,84

	Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)			0			
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	936.000	930.617	99,42	936.752	1.173.007	125,22

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbandingan kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025. Untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) terlihat penurunan yang cukup signifikan dimana capaian tahun 2024 sebesar 4,82% sedangkan tahun 2025 hanya 2,64%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan wisata yang mengalami peningkatan sebesar 242.390. Kondisi ini cukup membingungkan karena seharusnya kedua indikator tersebut capaiannya harusnya berbanding lurus. Jika jumlah kunjungan wisata meningkat, maka seharusnya laju pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum juga meningkat. Pengunjung wisata lebih suka menginap dan berbelanja di Kota Bukittinggi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketiadaan standar harga makan minum pada sebagian besar objek wisata yang ada serta kurangnya fasilitas penginapan yang memadai di wilayah Kabupaten Agam. Walaupun jumlah lapangan usaha akomodasi dan makan minum selalu bertumbuh setiap tahunnya di Kabupaten Agam, namun laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dari tahun ke tahun.

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 242.390 kali dibanding tahun 2024, dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 25,8%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026

Tabel 2.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya

**Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap
Perekonomian Daerah dengan Target Akhir RPJM
Tahun 2021- 2026**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian
		2024	2025		
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	4,82	2,64	4,13	63,92
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	930.617	1.173.007	717.993	163,37

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) baru memenuhi target akhir RPJMD sebesar 63,92%, sementara waktu yang tersebdia untuk memenuhinya tinggal 1 tahun lagi. Perlu perbaikan dan strategi untuk dapat memenuhi target dimaksud. Namun untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah melampaui target.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah pada tahun 2025 :

Tabel 2.55 Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,078,949,163	377,993,350	35.03%
2.	Program Pemasaran Pariwisata	307,133,000	220,337,000	71,73%
3.	Program Pengembangan Sumber	70,889,680	64,691,000	91,26%

	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	Total	1,456,971,843	663,021,350	45,51%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2025 dengan total anggaran Rp. 1,456,971,843, realisasi Rp. 663,021,350 dengan tingkat capaian realisasi 45,51%. Dari 3 program di atas, hanya 1 program yang memiliki capaian realisasi anggaran yang sangat tinggi yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan 2 program lainnya capaiannya tidak begitu baik. Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.56 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	8,56	2,64	30,84	1,456,971,843	663,021,350	45,51%	0,88
Jumlah Kunjungan Wisatawan	936.752	1.173.007	125,22				2,75

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Pertumbuhan Lapangan

Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) adalah sebesar 0,88 dan Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan kurang efisien mendukung pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah tahun 2025. Kedepannya diperlukan perbaikan perencanaan penganggaran sehingga anggaran yang disusun betul betul mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

**Tabel 2.57 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatnya Kontribusi Usaha Pariwisata
Terhadap Perekonomian Daerah Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentas e Capaian	Nilai Efektivita s	Tingkat Efektivita s
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)			30,84%		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang terkelola	100%	0,31	Kurang Efektif
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	100%	0,31	Kurang Efektif
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	100%	0,31	Kurang Efektif
Jumlah Kunjungan Wisatawan			125,22		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Jumlah destinasi yang terkelola	100%	1,25	Kurang Efektif

	Pariwisata				
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	100%	1,25	Kurang Efektif
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	100%	1,25	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa IKU Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) dan Jumlah Kunjungan Wisata didukung oleh 3 program dengan capaian program sangat tinggi (100%). Walaupun kinerja program tercapai dengan baik, namun tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan capaian kinerja sasaran. Hal ini tergambar dalam nilai efektivitas pada tabel di atas. Untuk itu perlu adanya perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran sehingga rancangan program dapat mendukung kepada capaian kinerja sasaran.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)	Angka	5,94	1,54	25,93
2.	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	86	58,37	67,87

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi (ADHK) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tentang konektivitas wilayah dan kawasan. Indikator ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, yang berjadwal maupun tidak termasuk jasa kurir. Berdasarkan Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2025, nilai PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK) pada tahun 2025 berdasarkan harga konstan adalah 1,179 (milyar), sedangkan pada tahun 2024 sebesar 1.161,19 (milyar). Dengan begitu laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi (ADHK) tahun 2025 adalah sekitar 1,54. Jika dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 5,94, maka tingkat capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 25,93% dengan kategori capaian rendah. Walaupun terjadi pertumbuhan lapangan usaha transportasi namun tidak sebesar target yang ditetapkan.

Meningkatnya konektivitas wilayah dan kawasan juga tergambar pada capaian indikator persentase jalan kabupaten kondisi mantap. Yang dimaksud dengan jalan mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, yang telah diaspal dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Sesuai dengan SK Bupati Agam Nomor 406 Tahun 2015 panjang jalan kabupaten adalah 1.694,63 km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 699 ruas. Adapun kondisi jalan di Kabupaten Agam saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jalan kondisi baik sepanjang 838,04 km
- b) Jalan kondisi sedang sepanjang 330,84 km
- c) Jalan kondisi rusak ringan dan berat sepanjang 525,75 km

Berdasarkan data di atas, jalan kabupaten kondisi mantap adalah sebanyak 58,37%. Kondisi ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan hanya memenuhi sebesar 86% dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja hanya 67,87%. Hal ini disebabkan karena laju kerusakan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki jalan. Kondisi ini terjadi karena luas wilayah Kabupaten Agam yang sangat luas dan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini diperburuk dengan adanya bencana hidrometeorologi yang terjadi pada sebagian besar wilayah Kabupaten Agam pada akhir Tahun 2025.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.59
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2025
dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)	5,8	7,60	131,10	5,94	1,54	25,93
2.	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	84	68,89	82,12	86	58,37	67,87

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Untuk kedua indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) dan persentase jalan kondisi mantap sama - sama mengalami penurunan capaian kinerja. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a) Bencana alam hidrometeorologi yang berlangsung cukup lama di tahun 2025 bahkan sampai saat ini masih berlangsung. Bencana alam ini menyebabkan longsor dan banjir bandang hampir di setiap wilayah Kabupaten Agam, yang mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur termasuk jalan dan jembatan utama yang menghubungkan antar Kecamatan, Kabupaten/kota bahkan provinsi. Banyaknya jalan yang rusak parah menyebabkan tekanan berat terhadap jalan lain yang menjadi alternatif jalan sementara.
 - b) Terbatasnya anggaran pemeliharaan
- Di samping penurunan kondisi fisik jalan, rendahnya angka capaian tahun ini juga disebabkan karena adanya perubahan metode

pembaharuan data Base jalan dari manual menjadi digital.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu disandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021- 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2024	2025		
1.	Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	7,60	1,54	4,26	36,15%
2.	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	68,89	58,37	88	66,32%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 baru mencapai 36,15%. Dengan waktu tinggal hanya 1 tahun lagi, kondisi ini menggambarkan bahwa perlu upaya yang sangat keras untuk dapat mencapai target di tahun 2026. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase jalan kabupaten kondisi mantap terlihat tingkat kemajuan sebesar 66,32% jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Terdapat selisih sebesar 19,68 poin. Walaupun sedikit lebih baik dari indikator laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi, namun dibutuhkan upaya keras dan sumber daya yang besar untuk mencapai target akhir tahun 2026. Di samping itu perlu adanya evaluasi target karena penetapan target kurang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi sumber daya terutama

anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan pada tahun 2025 :

Tabel 2.61 Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian
Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)				
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	18,424,597,686	18,315,988,822	99,41
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap				
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	18,075,776,838	14,702,285,935	81,34
	Total	36,500,374,524	33,018,274,757	90,46

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program yang mendukung capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) yaitu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan realisasi anggaran mencapai 99,41%. Sedangkan program yang mendukung Persentase jalan kabupaten kondisi mantap adalah program penyelenggaraan jalan dengan realisasi anggaran yang mencapai 81,34%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.62 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan Kawasan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisi
	Targ	Real	Cap	Pagu	Realisasi	Capai	

	et	isasi	aian (%)			an (%)	ensi
Laju Pertumbuh an Lapangan Usaha Transportas i (ADHK)	5,94	1,54	25,9 3	18,424,597 ,686	18,315,988, 822	99,41	0,26
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	86	58,3 7	67,8 7	18,075,776 ,838	14,702,285, 935	81,34	0.83

Sumber : Hasil Pengolahan data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK) adalah sebesar 0,26, dimana capaian kinerja sasaran lebih rendah dari capaian realisasi anggaran. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa anggaran yang digunakan kurang efisien mendukung capaian kinerja IKU. Sedangkan nilai efisiensi anggaran untuk IKU Persentase jalan kabupaten kondisi mantap sebesar 0,83 dimana capaian kinerja sasaran lebih rendah dari capaian realisasi. Anggaran yang digunakan cukup efektif dalam mendukung kinerja sasaran.

Di samping menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran, sumber daya lainnya yang perlu di analisa adalah kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran. Tabel berikut memberikan gambaran efisiensi kinerja program terhadap capaian indikator kinerja sasaran :

**Tabel 2.63 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah Dan
Kawasan**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektivitas	Tingkat Efektivitas
Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi (ADHK)			30,84		
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	99,41	0,31	Kurang Efektif
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap			67,87		
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (%)	67,87	1	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indikator Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK) didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan indikator rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan, capaian kinerja program mencapai 30,34% (rendah). Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja Indikator sasaran, belum terlihat bahwa kinerja program apakah efektif mendukung capaian kinerja sasaran, dimana capaian kinerja belum dirilis. PDRB lapangan usaha transportasi menunjukkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap aktivitas produksi di lapangan usaha transportasi. Sedangkan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat tidak adanya hubungan antara laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dengan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan. Ke depannya perlu kajian lebih komprehensif dalam merumuskan sasaran kinerja dengan program pendukungnya.

Indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap didukung dengan 1 program yaitu Program penyelenggaraan jalan, dengan capaian realisasi 67,87%. Jika capaian program tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sama dengan capaian kinerja program, dengan nilai efektivitas 1.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	Persen	43,50	- 39,60%	-91,04

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Persentase peningkatan nilai realisasi investasi adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan besar modal yang masuk dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dihitung dengan membandingkan selisih antara realisasi investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Total nilai investasi di Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 437.791.413.357,-. Pada tahun 2024 total nilai investasi adalah Rp. 724.684.210.630,- , dengan begitu nilai investasi tahun ini menurun sebesar Rp. 286.892.797.273,-. Dapat dikatakan bahwa peningkatan investasi tahun ini menurun (tidak ada peningkatan) jika dibandingkan dengan target tahun 2025 maka tingkat capaiannya adalah -91,03%. Minus (-) menerangkan bahwasanya realisasi yang diperoleh belum sesuai dengan bahasa indikator kinerja yaitu peningkatan tapi menyatakan bahwa realisasi tahun 2025 saat ini mengalami penurunan. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan realisasi nilai investasi antara lain :

- a) Berkurangnya jumlah pelaku usaha yang mengurus NIB. Pada tahun 2024 pelaku usaha yang mengurus NIB sebanyak 7953, tahun 2025 menurun menjadi 6532. Dengan selisih 1421 pelaku usaha.

- b) Tingkat kesadaran perusahaan dalam melaporkan nilai investasinya secara berkala berkurang.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.65 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	40	75,76	189,4	43,50	-39,60 %	-91,03

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Realisasi kinerja tahun 2025 menurun yaitu sebesar -91,03%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 selisihnya adalah sebesar 189,6%. Hal ini menggambarkan bahwasanya perlunya keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan jumlah investor di Kabupaten Agam.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.66 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan Target Akhir RPJM Tahun 2021- 2026

		Realisasi	Target	Tingkat

No	Indikator Kinerja	2024	2025	2026	Kemajuan
1.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	75,76 (Rp. 724,68)	-91,03 (437,79)	22 (Rp. 353,38)	-413,77%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026, target kinerja untuk persentase peningkatan nilai realisasi investasi pada akhir periode (tahun 2026) adalah 22% dari total nilai investasi tahun sebelumnya (2025). Hal ini berarti terjadi penurunan realisasi investasi sebesar -91,03% . Jika dibandingkan dengan target akhir 2026, tingkat kemajuan yang diperoleh yaitu -413,77%.

Berdasarkan data yang ada, nilai investasi tahun 2025 adalah Rp.437.791.413.357, sedangkan nilai investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 724.684.210.630,-. Kalau dibandingkan dengan target nilai investasi pada tahun 2026 di RPJMD 2021 – 2026, maka realisasi tahun ini telah melebihi target 2026 yang ditetapkan sebesar Rp. 353,38 M. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap penetapan target tahunan dan akhir periode tahun 2026 agar kinerja peningkatan nilai investasi dapat terus meningkat.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2024 :

Tabel 2.67 Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Promosi Penanaman Modal	36,310,000	8,567,400	23,59%
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	139,755,000	107,671,650	77,04%
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11,620,000	10,456,800	89,99%
	Total	187,685,000	126,695,850	67,50%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Terdapat 3 program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025, dengan total anggaran Rp. 187,685,000 dengan realisasi Rp. 26,695,850 dengan rata – rata tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 67,50%. Dari 3 program tersebut, hanya 2 program diantaranya memiliki tingkat capaian realisasi yang cukup baik yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan realisasi 77,04% dan 89,99%, selebihnya realisasi anggarannya sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pada kas daerah yang tidak memadai. Untuk melihat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	43,50	- 39,59%	- 91,03	187,685,000	126,695,850	67,50 %	-1.58,

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi adalah sebesar -1,58. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan tidak efisien mendukung capaian kinerja. Perlu adanya evaluasi menyeluruh dan penataan ulang perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran yang disediakan memang efisien mendukung capaian kinerja.

Di samping menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja

juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.69 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektivitas
Persentase peningkatan nilai realisasi investasi			-91,03		
1.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan Pengusaha besar dan UMKM	0	0	Kurang Efektif
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Dokumen perizinan yang terbit tepat waktu (%)	88%	-1,03	Kurang Efektif
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertambahan Jumlah Investor	-0,18	505,72	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 3 program yang mendukung capaian IKU Persentase peningkatan nilai realisasi investasi, terlihat bahwasanya adanya penurunan dari nilai investasi sehingga perolehan nilai efektivitas menjadi minus. Hal ini menandakan bahwasanya capaian program tidak berkorelasi dengan kinerja sasaran. Dengan begitu untuk tahun tahun selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran yang dirancang untuk mendukung kinerja sasaran ini.

2.3.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran pada Misi III (Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, Keterpaduan Tata Ruang Wilayah Dan Mitigasi Bencana)

Misi III pada RPJMD Tahun 2021-2026 memiliki tujuan “Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.70
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi III Tahun 2025
Mewujudkan Pembangunan Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Angka	Tinggi	0,34 (rendah)	40

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Tingkat kapasitas ketahanan daerah menunjukkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Untuk menentukan tingkat kapasitas ketahanan daerah dilakukan dengan mengukur indeks ketahanan daerah melalui 7 kriteria dan 71 indikator. Adapun 7 kriteria tersebut adalah : perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah diklasifikasikan menjadi rendah (< 0,55), sedang (0,55 – 0,85) dan tinggi (> 0,85).

Tingkat kapasitas ketahanan daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 berada pada kategori rendah dengan nilai sebesar 0,34, sementara target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 berada pada kategori tinggi. Apabila dibandingkan dengan ambang batas minimal kategori tinggi (0,85), maka capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 baru mencapai sekitar 40%. Rendahnya capaian ini tidak semata-mata mencerminkan kondisi riil ketahanan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain belum optimalnya kualitas dan kelengkapan data dukung yang disampaikan

oleh perangkat daerah, adanya indikator yang belum terisi secara komprehensif, serta keterbatasan dalam proses verifikasi dan validasi data pada saat pengukuran. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara indikator yang diukur dengan data yang tersedia, serta belum meratanya pemahaman perangkat daerah terhadap mekanisme pengisian dan pelaporan Indeks Ketahanan Daerah sesuai pedoman yang berlaku. Dengan demikian, nilai yang diperoleh cenderung belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi aktual di lapangan, melainkan lebih mencerminkan aspek administratif dalam penyediaan data dan pelaporan. Pencapaian tujuan pada Misi III ini didukung melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

A. Pengukuran Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam

Kinerja sasaran strategis “Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam”, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,87	78,96	102,72

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengukuran IKLH Tahun 2025, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam berada pada kategori baik dengan nilai IKLH 78,96, dengan rincian : indeks kualitas air 78,96 (sedang), indeks kualitas udara 84,07

(sedang) dan inspeksi kesehatan lingkungan 69,52 (sedang). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 76,87, realisasi kinerja tahun ini melebihi target dengan Capaian (%) kinerja sebesar 102,72%. Dari 3 komponen lingkungan yang menjadi komposit untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, indeks tertinggi adalah Indeks Kualitas Air, bahkan IKU Kabupaten Agam menempati urutan 4 dari 19 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan indeks yang paling rendah adalah Indeks Kualitas Lahan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan antara lain :

- Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- Kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.
- Optimalisasi pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan hidup, pemberian reward dan punishment.
- Frekuensi kejadian bencana alam.

Di samping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.72
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya
Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50	70,74	94,95	76,87	78,96	102,72

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya kenaikan kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 baik dari sisi realisasi maupun Capaian (%). Kenaikan realisasi kinerja adalah sebesar 8.22 poin, sedangkan Capaian (%) sebesar 7.77 poin. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

dibentuk dari komposit nilai indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas lahan (IKL). Sesuai dengan hasil penilaian kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan 2025, Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam selama 2 tahun terakhir dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.73
Matriks Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2025 dan Tahun 2024

TAHUN	IKA	IKU	IKL	IKLH
2024	56,81	94,8	50,18	70,74 (Baik)
2025	78,96	84,07	69,52	78,96 (Baik)

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada 1 komponen yang mengalami penurunan nilai pada tahun 2025 yaitu Indeks Kualitas Udara. Sedangkan Indeks Kualitas Air dan Lingkungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai ini antara lain :

Tabel 2.74
Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Kendala / Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	- Melaksanakan kegiatan edukasi pengelolaan lingkungan hidup bagi kelompok masyarakat melalui bimbingan teknis, sosialisasi, simulasi, dan stimulant serta penyampaian informasi melalui berbagai media - Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan seperti pendampingan program kampung iklim, pembinaan sekolah adiwiyata, pendampingan pengolahan sampah organik, dll - Melakukan fasilitasi penerapan reward terhadap masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2.	Belum optimalnya pengawasan dan	- Meningkatkan kapasitas aparatur

	penegakan hukum lingkungan sehingga kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak tertangani dengan baik.	pengawasan (PPLHD) - Menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Pemerintah Nagari dalam pengawasan lingkungan - Mengelola sistem pengaduan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan - Melakukan sosialisasi kepada Penanggung jawab usaha / kegiatan terkait kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan - Menerapkan punish dan reward dalam pengelolaan lingkungan
3.	Rentang kendali yang sangat luas dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, karena melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Berbagai kegiatan / aktivitas pembangunan dan masyarakat mempengaruhi kualitas lingkungan.	- Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah serta lembaga / instansi terkait dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan
4.	Berbagai regulasi dan kebijakan yang kadang bertentangan dengan pelestarian lingkungan.	- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyamakan persepsi terkait pelestarian lingkungan
5.	Rendahnya cakupan pelayanan persampahan, mengakibatkan potensi pencemaran lingkungan semakin meningkat. Peningkatan timbulan sampah terjadi bukan saja akibat pertambahan jumlah penduduk namun juga diakibatkan terjadinya pergeseran gaya/ pola hidup modern.	- Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah - Menggalakkan gerakan 5 R pengelolaan sampah - Mendorong masyarakat meminimalisir produksi sampah dari sumbernya
6.	Tingginya frekwensi kejadian bencana alam seperti tanah longsor dan banjir	- Menanam sempadan sungai dan lahan terlantar dengan pohon pelindung - Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam menjaga kelestarian hutan dan pengelolaan sungai

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP 2025

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.75
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2024	2025		
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,74	78,96	69,5	113,61

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kinerja pada tahun 2025 telah melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Walaupun telah melebihi target kinerja di Tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup tetap harus konsisten dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di samping itu untuk penentuan target tahun berikutnya perlu tidak lagi mengacu kepada target tahunan pada RPJMD tetapi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia pada 2025 yang mencapai 76,49, maka kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam terlihat lebih baik dari kondisi nasional.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun 2025 :

Tabel 2.76
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.313.008,488	7.131.225,930	97,51%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	121.732.740	120.174.300	98,72%
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.194.969.792	972.779.587	81,41%
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.320.642.015	1.178.701.186	89,25%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.935.600	3.060.000	11,79%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	111.642.000	83.657.500	74,93%
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.327.200	10.847.500	87,99%
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	8,309.171.473	6.467.419.765	77,83%
Total		18.409.429.308	15.967.865.768	86,74%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 8 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 18.409.429.308 dengan realisasi Rp. 15.967.865.768 dengan rata-rata capaian realisasi 86,74%. Terdapat 1 program yang realisasinya sangat rendah bahkan di bawah 50% yaitu Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Sedangkan yang realisasi anggarannya di atas 77% hanya 7 program, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Untuk program pengelolaan persampahan dikarenakan kebijakan PMK, jadi program yang digunakan untuk menunjang pengelolaan sampah yakni Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran indeks kualitas lingkungan hidup dapat digambarkan pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.77
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,87	78,96	102,72	18.409.429.308	15.967.865.768	86,74%	1,18

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara Capaian (%) indikator kinerja sasaran dengan Capaian (%) realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran lebih besar daripada capaian realisasi anggaran, efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 1,18. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan efisien mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.78
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dan Sumber Daya Alam

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			102,72		
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	93,61%	1,10	Efektif
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	100%	1,03	Efektif
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau maninjau	91,9%	1,12	Cukup Efektif
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola	100%	1,03	Efektif
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	100%	1,03	Efektif
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang ditebitkan	15%	6,85	Kurang Efektif
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	1,03	Efektif
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Llingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pelaksanaan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyaraka	100%	1,03	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 8 program yang

mendukung capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 6 program di antaranya efektif mendukung capaian kinerja IKLH (nilai efektifitas berada pada range 0,91 – 1,10), 1 program yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan perolehan cukup efektif mendukung capaian kinerja IKLH. Dikatakan cukup efektif karena walaupun capaian kinerja lebih tinggi dari capaian program namun ada faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan 1 program lainnya memiliki nilai 6,85 yaitu Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan nilai efisiensi 0. Program ini dianggap kurang efisien karena pengaruh program sangat kecil dan capaian kinerja sasaran dipengaruhi oleh faktor lain di luar program tersebut.

Jika disandingkan antara capaian realisasi indikator kinerja program dengan realisasi anggaran program terlihat ketidaksinkronan. Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian kinerja 102,72% ternyata realisasi anggarannya hanya 6,85%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakmatangan dalam proses perencanaan sehingga capaian program tidak dipengaruhi oleh anggaran. Untuk itu ke depannya perlu kajian mendalam terhadap program yang akan dilaksanakan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang”, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Indeks	99,98	99,98	100%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks ketaatan terhadap tata ruang menunjukkan tingkat ketaatan/kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, Indeks ketaatan terhadap tata ruang ini didapat dengan membandingkan luas kawasan yang sesuai dengan luas Kabupaten Agam seluruhnya. Dari data yang ada luas wilayah yang sesuai dengan RTRW adalah 222.586,32 km dari 222.589 km total wilayah Kabupaten Agam. Dengan begitu total wilayah yang memiliki ketaatan terhadap tata ruang adalah 99,98%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 99,98%, realisasi ini dengan Capaian (%) kinerja sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Agam terdapat 12 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu dilengkapi, namun yang wajib dipenuhi hanya 6 dokumen yaitu :

- a. RDTR Lubuk Basung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- b. RDTR Matur sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- c. RDTR Paembayan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- d. RDTR Banuhampu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- e. RDTR Baso Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- f. RDTR IV Koto Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Berdasarkan beberapa kendala/ permasalahan yang ditemui dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang antara lain :

Tabel 2.80
Kendala / Permasalahan Penataan Ruang

No	Kendala/ Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengaturan pemanfaatan ruang, serta terbatasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat.	- Melakukan sosialisasi terkait regulasi penataan ruang kepada masyarakat di berbagai media - Mengintensifkan kegiatan pengawasan, menegakkan aturan penataan ruang dan memberikan punish dan reward dalam pelaksanaan tata ruang.
2.	Belum tersedianya petugas / pejabat pengawas tata ruang di Kabupaten Agam	- Melakukan rekrutmen SDM pengawas tata ruang. - Melakukan peningkatan kapasitas terkait pengawasan tata ruang kepada SDM yang ada - Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkaitnya lainnya dalam menegakkan aturan tata

		ruang
4.	Dokumen penataan ruang yang ada saat ini belum berbasiskan OSS	- Memperkuat sistem penyelenggaraan penataan ruang berbasis IT

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Agam , 2025

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.81
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)n
1	Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang	99,98	99,99	100,01	99,98	99,98	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Realisasi kinerja tahun 2025 sedikit mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar 0,01 poin.

Untuk mengetahui cakupan pencapaian target akhir RPJMD 2021 - 2026, serta untuk menyusun strategi pencapaiannya dapat dilihat persandingan data berikut ini :

Tabel 2.82
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2024	2025		
1.	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,99	99,98	98,70	101,29

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi indikator Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang tahun 2025 telah melebihi target RPJMD Tahun 2026 dengan capaian sebesar 101,29%. Dinas PUTR harus mempertahankan kondisi ini sehingga masyarakat tetap mematuhi regulasi terkait penataan ruang.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang pada tahun 2024 :

Tabel 2.83
Program dan Anggaran yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	persentase Capaian
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.060.000	44.335.900	88,57%
Total		50.060.000	44.335.900	88,57%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 1 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks ketaatan terhadap tata ruang dengan total anggaran Rp. 50.060.000,- realisasi Rp. 44.335.900,- atau 88,57%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.84
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketaatan terhadap tata ruang	99,98	99,98	100	50.060.000	44.335.900	88,57 %	1,13

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang adalah sebesar 1,13. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang lebih besar dari capaian realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dibelanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja Indeks Ketaatan terhadap tata ruang.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.85
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Indeks Ketaatan terhadap tata ruang			100		
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan Terhadap RTRW	88,57%	1,13	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang sedikit lebih besar dari capaian program dengan tingkat efektifitas 1,13 sehingga dapat dikatakan program tersebut efektif mendukung pencapaian IKU Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang.

C. Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan

Kinerja sasaran strategis “meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan”, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 Berkurangnya Resiko
Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	Indeks	87	100	114,94

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang sangat rentan terhadap bencana. Hampir seluruh jenis bencana ada di Kabupaten Agam sehingga Kabupaten Agam sering disebut juga dengan “etalase bencana”. Pada tahun 2025, jumlah bencana yang terjadi terhitung

sebanyak 163 kejadian dengan jenis bencana antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, angin puting beliung, dll. Frekuensi kejadian bencana ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 259 kejadian. Walaupun jumlah kejadian bencana menurun, namun bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir tahun 2025 memberikan dampak yang luas dan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak jika dibanding tahun 2024. Sampai dengan saat ini, penanganan bencana masih berlangsung dan koordinasi dengan pihak terkait terlaksana dengan sangat baik.

Merujuk kepada definisi operasional indikator kinerja pada RPJMD, indikator persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi dihitung berdasarkan komulatif dari persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan tanggap darurat bencana, persentase penanganan pasca bencana serta persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan ditetapkannya dokumen dimaksud.

Walaupun Capaian (%) kinerja sangat tinggi, namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan, antara lain :

- Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat bawah (nagari) sampai ke kabupaten.
- Ketersediaan anggaran yang kurang memadai termasuk untuk pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas
- Masih kurangnya kualitas manajemen data serta akurasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.87
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi	83	86,50	104,22	87	100	114,94

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Capaian indikator kinerja persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terlihat adanya peningkatan kinerja. Tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 104,22% sedangkan tahun ini meningkat menjadi 114,94%.

Beberapa kendala dan upaya misi yang dilakukan untuk melakukan penanganan bencana terintegrasi, antara lain :

Tabel 2.88
Kendala / Permasalahan Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi

No	Kendala/ Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat bawah (nagari) sampai ke kabupaten.	- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam penanganan bencana terintegrasi. - Melakukan edukasi penanggulangan kebencanaan kepada masyarakat atau lembaga seperti sekolah. - Memaksimalkan program desa tangguh bencana - Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana - Menyusun dan mensosialisasikan regulasi terkait kebijakan induk penanggulangan bencana.
2.	Masih kurangnya kualitas manajemen data serta akurasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	- Melakukan koordinasi lintas sector terkait penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana
3.	Ketersediaan anggaran yang kurang memadai termasuk untuk pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	- Melakukan koordinasi dengan BNPB Pusat terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
4.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas	- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana - Menjalin jejaring kerjasama dengan pihak lain dalam penanggulangan bencana

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat

diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.89

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi	86,50	100	91	109

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi tahun 2025 memenuhi target kinerja akhir RPJMD periode 2021 – 2026 sebesar 109%. Capaian sudah melebihi target di tahun 2026 sebesar 9 poin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana di daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi dokumen manajemen yang diperlukan agar penanggulangan bencana yang terintegrasi dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya bencana terhadap manusia dan lingkungan pada tahun 2025 :

Tabel 2.90

Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Penanggulangan Bencana	958.083.320	788.509.166	82,31%
2.	Program Pengembangan Perumahan	339.943.700	283.088.097	83,27%

3.	Program Kawasan Permukiman	317.713.000	313.298.500	98,61%
4.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.394.620.000	1.393.936.850	99,95%
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.195.407.500	2.143.426.210	97,63%
Total		5.205.767.520	4.922.258.823	94,55%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 5 program yang mendukung capaian kinerja indikator persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan total anggaran Rp. 5.205.767.520,- realisasi Rp. 4.922.258.823,- dengan persentase realisasi 94,55%. Dari 5 program yang dilaksanakan capaian atas program tersebut diatas 80%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.91
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi	87	100	114,94	5.205.767.520	4.922.258.823	94,55 %	1,22

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara Capaian (%) indikator kinerja sasaran dengan Capaian (%) realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi adalah sebesar 1,22, dimana Capaian (%) kinerja sasaran lebih besar daripada Capaian (%) kinerja program. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi. Namun karena besarnya angka

perbandingan bahkan melebihi 100%, hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran yang disusun sebelumnya, tidak semuanya berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.92
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia Dan Lingkungan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Persentase Penanggulangan Bencana Yang Terintegrasi			114,94		
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	87%	1,31	Cukup Efektif
2.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	93,51%	1,23	Cukup Efektif
3.	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah tidak layak huni (RTLH)	32,93%	3,49	Kurang Efektif
4.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	1322%	0,09	Kurang Efektif
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	97,63%	1,18	Cukup Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas tentang Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program pada sasaran Berkurangnya Risiko Bencana terhadap Manusia dan Lingkungan, capaian indikator kinerja sasaran menunjukkan realisasi sebesar 114,94%, yang mengindikasikan bahwa target secara umum telah terlampaui.

Program Penanggulangan Bencana dan Program Pengembangan Perumahan menunjukkan tingkat efektivitas masing-masing sebesar 1,31 dan

1,23 dengan kategori cukup efektif. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) juga tergolong cukup efektif dengan nilai efektivitas 1,18. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pencapaian sasaran.

Namun demikian, pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, tingkat efektivitas tercatat sebesar 0,09 dengan kategori kurang efektif, meskipun persentase capaian mencapai 1322%. Kondisi ini terjadi karena penetapan target yang relatif rendah dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi riil pada saat perencanaan. Akibatnya, realisasi terlihat sangat tinggi, tetapi secara perhitungan efektivitas menunjukkan kurang efektif karena ketidakseimbangan antara target dan capaian.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyempurnaan dalam proses penetapan target kinerja agar lebih realistis, berbasis data aktual, serta mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, pengukuran efektivitas program dapat lebih akurat dan menggambarkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.3.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi IV (Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas Dan Berkarakter)

Terdapat 3 tujuan yang akan dicapai pada misi “membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter” yaitu :

- Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
- Terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing
- Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial

Adapun setiap tujuan didukung oleh beberapa sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.3.4.1 Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter

Tabel berikut menggambarkan tentang tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Tabel. 2.93
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2025
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,75	76,04	100,38

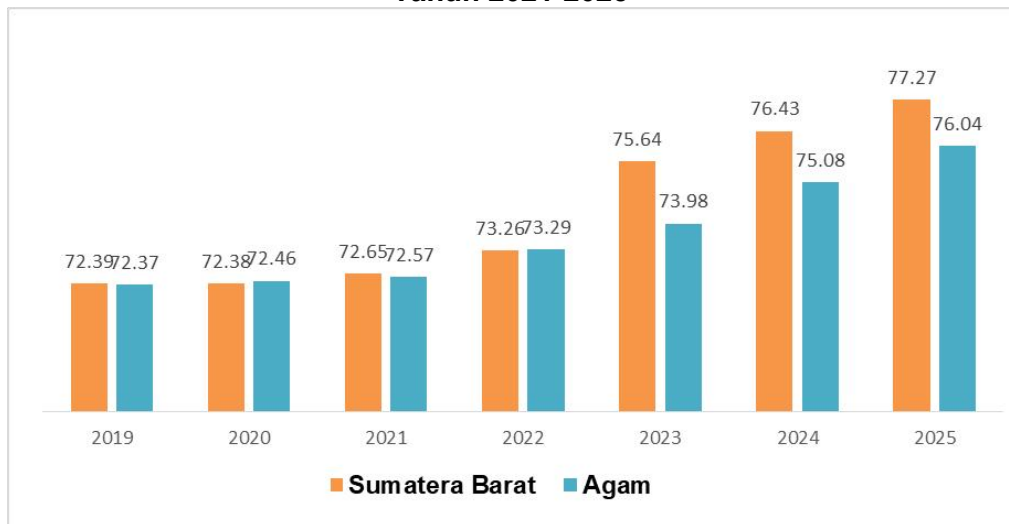
Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Agam Tahun 2025 ditargetkan IPM sebesar 75,75 capaian 76,04 dengan tingkat capaian 100,38%. Nilai IPM tahun ini berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 77,27. Namun jika dibandingkan dengan nasional, capaian IPM Kabupaten Agam sedikit di atas nasional yang mencapai 75,90.

IPM Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021, IPM Kabupaten Agam

mencapai 72,57 hingga tahun 2025 mencapai 76,04. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang 70 – 80. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.1
Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Tahun 2025

Pencapaian tujuan pada Misi IV didukung melalui 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

2.3.3.4.1.1 Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter

Kinerja sasaran strategis “meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.94
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	14,39	14,26	99,10
2.	Rata-rata lama sekolah	Angka	9,75	9,57	98,15

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar 14,26 tahun, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 14,39 dengan tingkat capaian 99,10%. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan diikuti oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,26 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma II. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 14,31. Untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat, harapan lama sekolah yang paling tinggi adalah Kota Padang (16,58) yang terendah adalah Kabupaten Sijunjung (12,99). Adapun Faktor faktor yang mempengaruhi harapan lama sekolah meliputi berbagai sektor, baik kondisi ekonomi masyarakat, akses dan kualitas layanan pendidikan, maupun dukungan kesehatan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu upaya peningkatan harapan lama sekolah seiring sejalan dengan upaya peningkatan perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan.

Rata-rata lama sekolah atau *years of schooling* digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal pada usia 25 tahun ke atas. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Agam pada kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahun, namun demikian masih dibawah rata rata lama sekolah provinsi. Pada tahun 2025 rata-rata lama sekolah kabupaten Agam mencapai 9,57. Walaupun tidak memenuhi target yang ditetapkan namun masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 98,15%. Capaian Kabupaten Agam tahun ini lebih rendah dari rata – rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 10,03, namun lebih tinggi dari capaian nasional dengan angka 9,07.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu :

Tabel 2.95

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,76	14,16	95,93	14,39	14,26	99,10
2.	Rata-rata lama sekolah	9,43	9,23	97,88	9,75	9,57	98,15

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Data di atas menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 0,10 poin. Jika dibandingkan dengan target, tingkat capaian juga mengalami peningkatan sebesar 3,17 poin dibanding tahun 2024.

Rata – rata lama sekolah juga mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun lalu sebesar 0,34 poin. Capaiannya juga mengalami peningkatan sebesar 0,27.

Peningkatan kinerja di atas menunjukkan adanya perbaikan terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi, yaitu :

- Pemerataan akses pendidikan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas
- Pemerataan mutu pendidikan melalui pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- Peningkatan ekonomi masyarakat.

Beberapa kendala yang ditemui dalam dalam pemenuhan target harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah , antara lain :

Tabel 2.96
Kendala dan Permasalahan dalam Pemenuhan Harapan lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah Tahun 2025

No	Kendala / Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Sebagian kecil wilayah di Kabupaten Agam masih ada yang kesulitan dalam mengakses sarana pendidikan karena lokasi tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi sekolah, seperti pada beberapa wilayah di Kecamatan	- Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan. - Mendorong partisipasi masyarakat / swasta dalam meningkatkan akses

	Malalak, Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Palembayan.	masyarakat ke fasilitas pendidikan.
2.	Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga masih ada beberapa anak yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.	- Melalui APBD Kabupaten Agam setiap tahunnya, menyediakan beasiswa dan bantuan biaya hidup untuk anak-anak dari keluarga kurang sejahtera yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3.	Pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas	- Melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Melalui bimbingan teknis, workshop dan rapat koordinasi lainnya.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.97
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,26	15,2	99,30
2.	Rata-rata lama sekolah	9,23	9,57	9,7	98,66

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2025 telah memenuhi 99,30% target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Selisih realisasi tahun 2025 dengan target tahun 2026 adalah 0,94. Sedangkan untuk indikator kinerja rata-rata lama sekolah terlihat pemenuhan target akhir periode RPJMD sebesar 99,30 %. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan urusan pendidikan, perlu menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata - rata lama ssekolah.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter pada tahun 2025 :

Tabel 2.98
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	84,696,542,203	80,403,795,233	94,93%
2.	Program Pengembangan Kurikulum	206,980,000	121,212,600	59%
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6,550,000	6,350,000	95,96%
	Total	84,910,072,203	80,525,007,833	94,83%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 4 program yang mendukung capaian kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama sekolah dengan total anggaran Rp. 101.712.856.799,- dengan realisasi Rp. 95.824.635.800,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar 94,21%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.99
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Harapan Lama Sekolah	14,39	14,26	99,10	84,910,072,203	80,525,007,833	94,83%	1,08
Rata-rata lama sekolah	9,75	9,57	98,15				1,04

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah adalah 1,08. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Hal ini juga terlihat dari besarnya nilai tingkat capaian kinerja sasaran dibandingkan capaian realisasi anggaran. Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, anggaran yang tersedia efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran dengan nilai efisien 1,04. Terlihat dari data pada tabel di atas capaian indikator kinerja sasaran lebih besar dari capaian realisasi anggaran

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.100
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Angka Harapan Lama Sekolah			99,10		
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	96,99%	1,02	Efektif
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase tahapan penyusunan silabus Muatan lokal	100%	0,99	Efektif
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	100%	0,99	Efektif
Rata-rata lama sekolah			98,15		

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	96,99%	1,01	efektif
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase tahapan penyusunan silabus Muatan lokal	100%	0,98	efektif
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	100%	0.98	efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Angka Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah didukung oleh 3 program. 3 program efektif mendukung capaian kinerja sasaran dimana nilai efektifitasnya berada rentang 0,98 – 1.

2.3.3.4.1.2 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Sasaran strategis kedua pada Tujuan 1, Misi IV adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kinerja sasaran tersebut tergambar pada capaian indikator Angka Harapan Hidup. Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja indikator angka harapan hidup sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2025 :

Tabel 2.101
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup	Angka	74,51	74,63	100,16

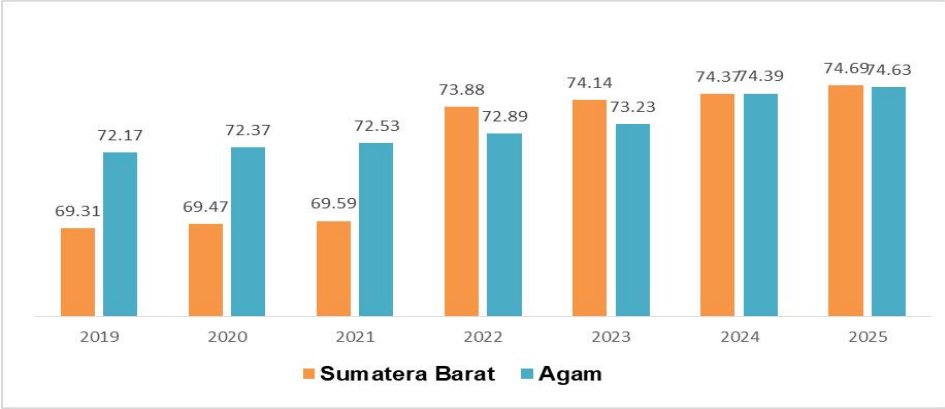
Sumber : Hasil Evaluasi Tahun 2025

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar 74,63, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,51, dengan tingkat capaian 100,16% (kategori sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Agam secara umum dapat dikatakan baik. Jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat, angka harapan hidup Kabupaten Agam sedikit lebih rendah, dimana AHH Provinsi Sumatera Barat adalah 74,69. Namun jika dibandingkan dengan AHH Nasional sebesar 74,47, nilai AHH Kabupaten Agam sedikit lebih baik.

Grafik 2.2
Perbandingan Angka Harapan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten
Agam dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025



Sumber : Agam Dalam Angka, Tahun 2025

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.102
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2024 dengan Tahun 2025

	2024	2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup	74,52	74,39	99,83	74,51	74,63	100,16

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Berdasarkan data di atas, terlihat adanya peningkatan kinerja yang cukup baik sebesar 0,24 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja di bidang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain meningkatnya perekonomian masyarakat, ketersediaan pangan dan gizi yang cukup, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan data Agam Dalam Angka Tahun 2025, selama lima tahun terakhir terlihat adanya peningkatan angka harapan hidup setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan target di masing-masing tahun, maka terlihat adanya penurunan capaian kinerja sebesar 0,6, dimana tingkat capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,43 sedangkan tahun 2024 hanya 99,83.

Untuk mengetahui kemajuan capaian target pada akhir RPJMD periode 2021 – 2026, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.103
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dengan Target Akhir
RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Angka Harapan Hidup	74,39	74,63	73,47	101,58

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup tahun 2025 telah memenuhi target kinerja tahun akhir RPJMD 2021 – 2026 dengan tingkat capaian 101,58%. Dengan begitu Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan agar konsisten untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sehingga angka harapan hidup Kabupaten Agam dapat lebih baik.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan

data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2025 :

Tabel 2.104
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54,993,784,823	53,210,767,681	97%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	964,544,950	380,738,890	39%
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	634,728,000	569,410,185	90%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200,000,000	200,000,000	100%
5.	Program Pengembangan Perumahan	339,943,700.00	283,088,097.00	83,27%
6.	Program Kawasan Permukiman	317,713,000.00	313,298,500.00	98,61%
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7,313,008,488	7,131,225,930.00	98%
8.	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1,394,620,000.00	1,393,936,850.00	99,95%
Total		66,158,342,961	63,482,466,133	95,96%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terdapat 8 program yang mendukung capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup dengan total anggaran Rp. 66,158,342,961,- dengan realisasi anggaran Rp. 63,482,466,133,- dengan rata-rata tingkat capaian realisasi sebesar 95,96%. Dari 8 program yang ada terdapat 1 program yang memiliki realisasi anggaran yang rendah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (39%), sedangkan program lainnya dengan realisasi anggaran tinggi dan sangat tinggi (di atas 82%).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian

kinerja dengan relisasi anggaran berikut :

Tabel 2.105
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Hidup	74,51	74,63	100,16 %	66,158,342,961	63,482,466,133	95,96%	1,04

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian Indikator kinerja Angka Harapan Hidup sedikit lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Nilai efisiensi anggaran pada indikator tersebut sebesar 1,04, walau sedikit melebihi angka 1 tetapi masih dapat dikatakan cukup efisien mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.106
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektivitas	Tingkat Efektivitas
Angka Harapan Hidup			100,16%		
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah puskesmas dengan grade utama	100%	1,01	Efektif
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	100%	1,01	Efektif
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang	100%	1,01	Efektif

		memenuhi standar Kesehatan dan Perizinan			
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kebijakan Gernas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan yang diterbitkan	100%	1,01	Efektif
5.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	94%	1,07	Efektif
6.	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurang nya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	32,93%	3,04	Kurang Efektif
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah Tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	98%	1,02	Efektif
8.	Program perumahan dan permukiman kumuh	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/kota yang ditangani (%)	1322%	0,076	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup didukung oleh 8 Program, dengan rata – rata capaian program sangat tinggi. Dari 8 program dimaksud, 2 di antaranya yaitu Program Program Kawasan Permukiman dan Program perumahan dan permukiman kumuh dinilai kurang efektif. Sedangkan 6 program lainnya terlihat efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran. Untuk program yang kurang efektif diperlukan penyempurnaan perencanaan baik dari penetapan indikator, target maupun kegiatan yang dilaksanakan.

2.3.3.4.2 Tujuan 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing

Misi IV dengan Tujuan 2 “terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing”, memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.107
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2025 Terwujudnya
Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Produktivitas Total Daerah	Juta rupiah	96,52	96,17	99,64

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Nilai produktivitas total daerah merupakan indikator yang mencerminkan rata rata nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap angkatan kerja yang bekerja. Nilai ini didapat dari total nilai PDRB dibagi dengan angkatan kerja yang bekerja. Realisasi nilai produktivitas total daerah pada tahun 2025 adalah sebesar 96,16 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96,52 juta rupiah, maka tingkat capaian tersebut adalah sebesar 99,64% dengan kategori sangat tinggi. Capaian nilai produktivitas total daerah ini didukung oleh peningkatan daya saing angkatan tenaga kerja dan pemuda. Disamping itu kecukupan pangan dan gizi akan mendorong kapasitas fisik dan mental seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya.

Pencapaian tujuan pada misi IV ini, didukung melalui 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

2.3.3.4.2.1 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat

Kinerja sasaran strategis “meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.108
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatkan
Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat

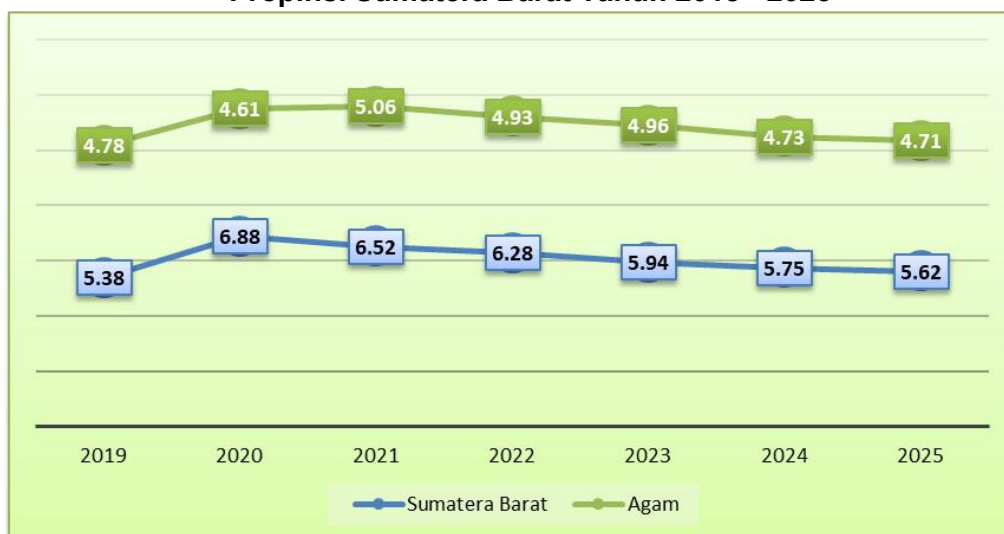
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,88	4,71	96,52%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator makro daerah. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan jumlah

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator yang targetnya harus turun, semakin kecil realisasinya akan semakin baik. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar 4,71, lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan sebesar 0,17. Jika dibandingkan dengan target maka tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 96,52% dengan kategori tinggi. Realisasi indikator ini dipengaruhi oleh struktur penduduk agam yang sifatnya ekspansif (besar di usia muda) dimana penduduk yang memasuki usia angkatan kerja (15 – 65 Tahun) jumlahnya sangat besar. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka pengangguran terbuka meningkat. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Agam masih lebih baik, dimana tingkat pengangguran terbuka Propinsi Sumatera Barat adalah 5,62 sedangkan tingkat pengangguran terbuka nasional adalah sebesar 4,74.

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam dan
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2025



Sumber : BPS Kabupaten Agam Tahun 2025

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.109
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan

Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,02	4,73	82,34	4,88	4,71	96,52%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 0,02 poin, dengan capaian 96,52 %. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam menurunkan angka pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan walaupun tidak signifikan. Ditemukan beberapa permasalahan dalam menurunkan angka pengangguran, antara lain :

Tabel 2.110
Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya pada Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Kendala / Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
1.	Struktur penduduk Kabupaten Agam yang sifatnya ekspansif (besar di usia muda) dimana penduduk yang memasuki usia angkatan kerja (15 - 65 Tahun) jumlahnya sangat besar mencapai 69,16% dari total penduduk.	- Membuka dan memperluas lapangan kerja melalui penyediaan program padat karya infrastruktur, menciptakan tenaga kerja trampil, serta memberikan bantuan permodalan berupa peralatan yang dibutuhkan - Memfasilitasi pemberdayaan dan penyebaran tenaga kerja
2.	Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas	- Membuka dan memperluas lapangan kerja melalui penyediaan program padat karya infrastruktur, menciptakan tenaga kerja trampil, serta memberikan bantuan permodalan berupa peralatan yang dibutuhkan - Memfasilitasi pemberdayaan dan penyebaran tenaga kerja
3.	Ketidaksesuaian pendidikan dan keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia	- Meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat

diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.111
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,73	4,71	3,67	71,66%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 baru memenuhi target sebesar 71,66%. Mengingat waktu yang tersedia untuk mencapai target tinggal 1 tahun lagi, perlu disusun strategi dan kebijakan yang jelas dalam menurunkan pengangguran terbuka.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat pada tahun 2025

Tabel 2.112
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	263.857.271	250.791.415	95,04%
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	52.814.800	49.234.400	93,22%
3.	Program Hubungan Industrial	968.623.500	929.430.300	95,95%
Total		1.285.295.571	1.229.456.115	95,65%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan total anggaran Rp. 1.285.295.571,- realisasi Rp. 1.229.456.115,- dengan tingkat capaian realisasi 95,65%. Dari 3 rogram tersebut memiliki capaian realisasi sangat tinggi (di atas 90%).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.113
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,88	4,71	96,52%	1.285.295.571	1.229.456.115	95,65	1,01

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 1,01, dimana capaian kinerja lebih tinggi jika dibandingkan capaian realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang telah direalisasikan sangat efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.114
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas

Tingkat Pengangguran Terbuka			96,52%		
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan produktivitas	108,84	0,88	Cukup Efektif
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	46,82	2,06	Kurang Efektif
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	100	0,97	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran Terbuka didukung oleh 3 program,. Dari 3 program dimaksud, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja cukup efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran, Program Hubungan Industrial terlihat efektif mendukung capaian kinerja sasaran, sedangkan Program Penempatan Tenaga Kerja kurang efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Jika di bandingkan antara capaian kinerja dan capaian program sangat jauh selisihnya. Untuk itu, bagi program yang cukup efektif dan kurang efektif perlu dilakukan penyempurnaan dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, baik dalam hal merumuskan indikator kinerja, penetapan target, penyusun kegiatan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung capaian target yang telah ditetapkan.

2.3.3.4.2.2 Meningkatkan Daya Saing Pemuda

Kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Daya Saing Pemuda” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.115
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen	94	93.59	99,56

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Kab.Agam Tahun 2025

Meningkatnya daya saing pemuda ditandai dengan keaktifan organisasi pemuda serta prestasi cabang olahraga. Organisasi kepemudaan merupakan kelompok yang terdiri dari individu muda yang memiliki tujuan, visi dan misi tertentu untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan pemuda di suatu wilayah tertentu. Keaktifan organisasi dimaksud dapat dilihat dari aktifitasnya sesuai dengan fokus organisasi masing-masing. Adapun beberapa kegiatan organisasi kepemudaan antara lain :

- a. Organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, seperti penggalangan dana, bakti sosial, dan aksi sosial lainnya.
- b. Organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang pendidikan seperti bimbingan belajar, pelatihan keterampilan atau seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya.
- c. Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan seperti kampanye kesehatan, donor darah, atau aktifitas lain yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan
- d. Organisasi yang bergerak dibidang lingkungan seperti kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang menunjang kelestarian lingkungan.
- e. Organisasi yang bergerak di bidang seni budaya dan olahraga, antara lain kegiatan pertunjukan seni dan budaya, olahraga serta kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya serta olahraga.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2025 adalah sebanyak 998 organisasi, dan yang aktif sebanyak 934 organisasi atau sebanyak 93,59%. Jika dibandingkan dengan target PK yang telah ditetapkan sebesar 94%, maka tingkat capaian realisasi tahun ini adalah sebesar 99,56% dengan kategori sangat tinggi. Kendala yang ditemui dalam melakukan pembinaan organisasi kepemudaan antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pembinaan organisasi kepemudaan
2. Kurangnya minat dan partisipasi pemuda dalam berorganisasi, sebagai akibat dari dampak kemajuan teknologi (*gadget*)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan antara lain dengan melakukan fasilitasi pertemuan organisasi secara berkala serta pemberian bantuan hibah dana untuk operasional

organisasi.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.116
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	93	92,79	99,77	94	93.59	99,56

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Realisasi kinerja indikator persentase organisasi kepemudaan yang aktif mengalami peningkatan pada tahun 2025 jika dibanding dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,8poin, namun cappaiannya megalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,21%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.117
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Daya Saing Pemuda dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92,79	93.59	95	98,52

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator

Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif tahun 2025 telah memenuhi 98,52% target akhir RPJMD Periode 2021 - 2026. Masih ada selisih 1,41 % lagi yang harus dicapai selama 1 tahun terakhir.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda pada tahun 2025 :

Tabel 2.118
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	486.590.000	465.947.700	95,76 %
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.571.025.648	2.130.166.623	82,85 %
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	148.854.180	85,58%
	Total	3.207.615.648	2.744.968.503	85,58 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja indikator Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina dengan total anggaran Rp. 3.207.615.648,- realisasi Rp. 2.744.968.503,- dengan tingkat capaian realisasi 85,58 % (tinggi).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.119
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Daya
Saing Pemuda Tahun 2025

Indikator	Indikator Kinerja	Anggaran	Nilai

kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Efisiensi
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	94	93.59	99,56	3.207.615.648	4.453.235.377	85,58 %	1,16

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase organisasi kepemudaan yang aktif adalah 1,16 dimana capaian indikator kinerja sasaran lebih besar daripada realisasi anggaran. Angka melebihi 1, artinya anggaran yang disediakan dan dibelanjakan dapat dikatakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.120
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif			99,56 %		
	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Wirausaha Muda	88,33 %	1,13	Efektif
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah even olahraga yang diselenggarakan dan Diikuti	100 %	0,99	Efektif

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100%	0,99	efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

IKU Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif didukung oleh 3 program, dimana 3 program terlihat efektif mendukung capaian IKU.

2.3.3.4.2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.121
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	94	71,60	76,17%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Kab.Agam Tahun 2025

Indeks ketahanan pangan daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Indeks ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan bersifat multidimensi sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator. Indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai indeks ketahanan pangan daerah. Jika dilihat dari realisasi tahun 2025, indeks ketahanan pangan daerah Kabupaten Agam mencapai 71,60, lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 94, dengan kategori sedang (76,17%).

Belum tercapainya target Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Agam

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah rendahnya indeks ketersediaan pangan, yang merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IKP. Kondisi ini diperkuat dengan rendahnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Agam, yang pada tahun 2025 baru mencapai 2,88% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2025, ketersediaan cadangan pangan berupa beras hanya sebesar 2,5595 ton, sedangkan target cadangan pangan yang ditetapkan sebesar 88,621 ton. Keterbatasan cadangan pangan tersebut berdampak langsung terhadap nilai indeks ketersediaan pangan, sehingga turut menurunkan nilai Indeks Ketahanan Pangan Daerah secara keseluruhan.

Selain itu, perubahan formulasi perhitungan Indeks Ketahanan Pangan yang melibatkan penambahan indikator dan faktor penilaian baru juga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Faktor lainnya adalah penetapan target kinerja yang relatif tinggi, sehingga realisasi yang dicapai belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Merujuk kepada pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Daerah, capaian tahun 2025 masuk dalam kelompok kondisi ketahanan pangan yang sangat baik (zona hijau). Berikut disampaikan data pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Daerah berdasarkan *cut off point*.

Tabel 2.122
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Kelompok IKP Daerah	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<= 28,84
2	>41,52 - 51,42	>28,84 - 41,44
3	>51,51 - 59,58	>41,44 - 51,29
4	>59,58 - 67,75	>51,29 - 61,13
5	>67,75 - 75,68	>61,13 - 70,64
6	>75,68	>70,64

Namun demikian, berdasarkan cut-off point Indeks Ketahanan Pangan Daerah, Kabupaten Agam tetap berada pada kategori tahan pangan. Kabupaten Agam termasuk dalam Kelompok IKP Daerah 5, yang menunjukkan kondisi 29 ketahanan pangan yang baik dan berada pada Zona Hijau. Secara nasional, Kabupaten Agam berada pada peringkat 266 dari 416 kabupaten/kota yang dinilai oleh Badan Pangan Nasional. Dengan begitu Kabupaten Agam termasuk ke dalam kelompok daerah yang memiliki tingkat kerentanan paling rendah dan ketahanan pangan yang sangat baik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator antara lain :

- Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- Rata rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
- Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih
- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
- Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
- Angka harapan hidup pada saat lahir.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.123
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	92	86,92	94,48%	94	71,60	76,17%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat adanya penurunan realisasi kinerja sebesar 15,32 poin. angka ini terkoreksi cukup besar, dimana salah satu penyebabnya adalah terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 yang menyebabkan lahan - lahan pertanian rusak dan mempengaruhi ketahanan pangan daerah. Beberapa kendala yang ditemukan dalam mencapai ketahanan pangan daerah, antara lain :

Tabel 2.124
Kendala Ketahanan Pangan dan Upaya Penyelesaiannya

No	Kendala / Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Kabupaten Agam mengalami surplus ketersediaan pangan pokok berupa beras, namun mengalami kekurangan	- koordinasi antar dinas terkait roadmap ketahanan pangan yang mempengaruhi capaian indeks

	produksi bahan pangan umbi-umbian.	ketahanan pangan daerah.
2.	Ketersediaan cadangan pangan belum memenuhi ketentuan, saat ini cadangan pangan yang tersedia adalah 10,758 ton dari seharusnya 216,23 ton (hanya 4,97%).	- perlu adanya penguatan cadangan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan nagari - koordinasi antar dinas terkait roadmap ketahanan pangan yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan pangan daerah. - Perbaikan pencatatan pola distribusi bahan pangan
3.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pendukung kemandirian pangan seperti infrastruktur lumbung pangan, lantai emur, dll)	- Dukungan terhadap penguatan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
4.	Belum maksimalnya penanganan pangan dan gizi pada nagari rawan pangan sehingga rentan mengakibatkan terjadinya stunting.	- Sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait keberagaman konsumsi pangan termasuk konsumsi sayuran, buah buahan dan protein hewani - Promosi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketahanan pangan
5.	Sulitnya mengubah budaya masyarakat dalam pola konsumsi terutama sumber pangan karbohidrat. Beras masih menjadi sumber utama karbohidrat bagi sebagian besar masyarakat.	- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal keberagaman konsumsi pangan serta mengkonsumsi pangan yang aman. - Sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait keberagaman konsumsi pangan termasuk konsumsi sayuran, buah buahan dan protein hewani
6.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mengkonsumsi pangan aman.	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan aman
7.	Kurangnya penerapan teknologi pengolahan pangan local dan promosi B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)	- Sosialisasi dan promosi B2SA
8.	Masih maraknya pemakaian bahan berbahaya untuk pangan segar asal tumbuhan	- Peningkatan pengawasan keamanan pangan serta pemakaian bahan berbahaya untuk pangan

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026, sehingga

dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.125
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	86,92	71,60	96	74,58

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah tahun 2025 telah memenuhi 74,58% dari target akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026. Untuk realisasi masih ada selisih sekitar 15,32 poin lagi yang harus dicapai selama kurun waktu 1 tahun lagi menjelang periode RPJMD 2021 - 2026 berakhir. Jika melihat trend peningkatan yang tidak signifikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketahanan pangan harus menyusun strategi yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2025 :

Tabel 2.126
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	457.118.110	415.835.848	90,96%
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	120.562.536	92.719.870	76,90%
	Total	577.680.646	508.555.718	88,03%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Terdapat 2 program utama yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah dengan total anggaran Rp. 577.680.646,- realisasi Rp. 508.555.718,- dengan tingkat capaian realisasi 88,03%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.127
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2025

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	94	71,60	76,17 %	577.680.646	508.555.718	88,03%	0,87

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan Daerah adalah sebesar Rp. 577.680.646,- realisasi Rp. 508.555.718,- dengan tingkat capaian realisasi 76,17%, dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk capaian output program sebesar 0,87%. Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran yang direalisasikan efisien dalam mendukung capaian indikator indeks ketahanan pangan daerah.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.128
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Indeks Ketahanan Pangan Daerah			76,17%		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/ perkapita/tahun)	115,95%	0,65	kurang efektif
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan Nagari Rawan Pangan	0,06%	1269,5	kurang efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan Daerah didukung oleh 2 program. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan memiliki capaian program di bawah capaian kinerja sasaran, dengan nilai efektifitas 0,65. Untuk program penanganan kerawanan pangan dengan nilai efektifitas sebesar 1269,5 sehingga dapat dikatakan kurang efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Hal ini disebabkan oleh ketidakharmonisan indikator yang mana terjadi perbedaan perhitungan pada dokumen perencanaan yang baru dan lama. . Untuk itu, bagi program yang cukup efektif dan kurang efektif perlu dilakukan penyempurnaan dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, baik dalam hal merumuskan indikator kinerja, penetapan target, penyusun kegiatan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung capaian target yang telah ditetapkan.

2.3.3.4.2 Tujuan 3 Terwujudnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial

Misi IV pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 memiliki tujuan “Terwujudnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.129
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2025
Terwujudnya Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kesejahteraan Rakyat	Indeks	80, 35	91,26	113,58

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 indeks kesejahteraan rakyat merupakan indikator yang dihitung dari rata – rata capaian Indeks Desa Membangun (status mandiri), persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan social, indeks pembangunan gender, indeks perlindungan anak dan laju pertumbuhan penduduk, dengan satuan persentase. Sesuai dengan defenisi operasional tersebut maka Indeks Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 adalah 91,26. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 80,35 dengan capaian 113,58%.

Pencapaian tujuan pada misi IV ini, didukung melalui 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

2.3.3.4.2.1 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja sasaran strategis “meningkatkan pemberdayaan masyarakat” dapat terlihat pada capaian 4 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.130
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Nagari dengan status IDM				
	Mandiri	Jumlah	34	54	158,82
	Maju	Jumlah	48	26	54,17
	Berkembang	Jumlah	10	12	120
2	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	Angka	90,35	92,88	102,80
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		98,1	97,49	99,38
4	Indeks perlindungan anak		72	68.21	94,74

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 misi IV, peningkatan pemberdayaan masyarakat tergambar pada capaian 4 indikator kinerja yaitu status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari, Persentase PPKS Yang Memperoleh Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai status perkembangan suatu desa/nagari sehingga rekomendasi yang dikeluarkan untuk pembangunan desa/nagari lebih tepat sasaran. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan lingkungan / ekologi desa (IKL).

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa, yaitu :

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, di Kabupaten Agam sudah tidak ada lagi nagari dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Dari 92 nagari yang ada 54 nagari termasuk kelompok nagari mandiri (158,82%), 26 nagari dengan kategori nagari maju (54,17%) dan 12 nagari berada pada kelompok nagari berkembang (120%). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka realisasi tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian 100%.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun social. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Sosial jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Agam tahun 2025 sebanyak 259.462 orang, sedangkan yang memperoleh layanan dan pemberdayaan social sebanyak 182.908 orang. Pelayanan dan pemberdayaan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan maupun pembinaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya capaian indikator ini antara lain:

- Tingginya peran dan kepedulian pilar pilar social dalam penanganan masalah social
- Terjalannya kerjasama yang baik antar pilar - pilar
- Tingginya motivasi dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pemberdayaan social

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator yang lebih menekankan kepada status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG

memberikan sebagian penjelasan mengenai program - program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dan IPM laki – laki. Apabila IPG mendekati angka 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun sebaliknya, jika menjauhi angka 100 maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IPG Kabupaten Agam tahun 2025 adalah 97,49 %, dengan tingkat capaian 99,38% termasuk kategori sangat tinggi. Capaian IPG yang dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan tahun 2025 dengan data tahun 2024. Walaupun sangat tinggi, terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam capaian kinerja ini adalah :

- Adanya anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lainnya
- Masih adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat
- Masih berkembangnya cap - cap negative untuk jenis kelamin tertentu jika beraktifitas di luar kebiasaan
- Kekerasan berbasis kodrat perempuan
- Marginalisasi / peminggiran ekonomi

Indeks perlindungan anak adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan nilai atau bobot atas penyelenggaraan perlindungan anak. Nilai ini dilihat dari evaluasi atas seluruh dokumen (ketersediaan dokumen) yang diintervensi, yakni klaster – klaster dalam konvensi hak anak. Ada lima klaster Konvensi Hak Anak yaitu : hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kebebasan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus anak. IPA menggambarkan tingkat capaian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan anak (pemenuhan hak dan perlindungan anak).

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Agam tahun 2025 adalah 68,21 lebih rendah dari target yang ditetapkan. Angka ini diperoleh berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS. Metode penilaian tahun ini berbeda dengan penilaian tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, nilai Indeks Perlindungan Anak berdasarkan nilai Kabupaten Layak Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian

Perlindungan Perempuan dan Anak. Nilai ini merupakan akumulasi capaian indikator kelembagaan dan 5 kluster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 kluster Indeks Pemenuhan Hak Anak dan 1 kluster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak. Adapun 5 kluster dimaksud adalah : kluster I (hak sipil dan kebebasan), kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), kluster III (kesehatan dasar dan kebebasan), kluster IV (pendidikan dan pemanfaatan waktu luang) dan kluster V (perlindungan khusus). Perbedaan metode penilaian ini, mempengaruhi capaian IPA Tahun 2025, sehingga tingkat capaian realisasi kinerja hanya sebesar 94,74% (kategori tinggi). Adapun kendala yang ditemukan antara lain :

- Sulitnya mendapatkan data / dokumen pendukung yang dimiliki oleh lintas sektor
- Belum adanya kerjasama dengan BPS di tingkat kabupaten/kota dalam penghitungan IPA
- Tatacara penilaian IPA masih dalam tahap sosialisasi oleh provinsi ke kabupaten/kota

Sehubungan dengan kendala di atas, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPA :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam menyelaraskan program dan data terkait perlindungan anak
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
3. Meningkatkan sosialisasi Konvensi Hak Anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak
4. Memfasilitasi kegiatan Forum Anak Daerah
5. Mengkoordinasikan pengembangan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
6. Menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
7. Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tahun ini dengan capaian kinerja

tahun lalu:

Tabel 2.131
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Nagari dengan status IDM						
	Mandiri	42	42	100	34	54	158,82
	Maju	41	41	100	48	26	54,17
	Berkembang	9	9	100	10	12	120
2	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,30	90,89	100,65	90,35	92,88	102,80
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,90	97,37	99,46	98,1	97,49	99,38
4	Indeks perlindungan anak(IPA)	71	63,04	88,79	72	68.21	94,74

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Untuk indikator kinerja jumlah nagari dengan status IDM Mandiri terlihat ada peningkatan kinerja yang cukup signifikan, dimana jumlah nagari dengan status IDM mandiri tahun 2025 sebanyak 54 nagari, bertambah 12 nagari dari tahun 2024. Hal ini berarti banyak nagari – nagari di Kabupaten Agam yang meningkat statusnya baik dari berkembang menjadi maju, maupun dari maju menjadi mandiri. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan kinerja baik dari indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi maupun ketahanan lingkungan.

Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial juga mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar 2.15% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tambahan bantuan dari Kementerian Sosial dan Baznas.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,12 %, dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja IPG adalah 97,37 sedangkan tahun 2023 sebesar 97,49. Walaupun peningkatannya tidak terlalu besar, namun hal ini menunjukkan ada perbaikan terkait kesetaraan

gender di kabupaten Agam.

Sedangkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami kenaikan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2025 yaitu sebesar 5.17 poin. Demikian juga halnya dengan tingkat capaian kinerja, dimana tahun 2023 tingkat capaian kinerja sebesar 88,79% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 94,74%. Pencapaian ini menunjukkan adanya upaya dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.132
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2024	2025		
1.	Jumlah Nagari dengan status IDM				
	Mandiri	42	54	28	192,85
	Maju	41	26	52	
	Berkembang	9	12	2	
2	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,89	92,88	73,02	127,19
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,37	97,49	97,19	100,31
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,04	68.21	75	90,94

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan tingkat kemajuan capaian indikator kinerja tahun 2025 dibanding target yang harus dicapai sampai akhir RPJMD Periode 2021 – 2026. Untuk indikator jumlah nagari dengan status IDM Mandiri, realisasi tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 sebanyak 36 nagari, sehingga tingkat capaiannya telah mencapai 192,85%. Untuk penetapan target selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian dengan hasil capaian tahun ini dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Sama halnya dengan status IDM, indikator Persentase PPKS yang Memperoleh Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial juga telah melebihi target akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 19,86 dengan tingkat kemajuan 127,19%. Penetapan target tahun berikutnya dan target akhir RPJMD 2021 – 2026 perlu disesuaikan.

Untuk indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat capaian tahun 2025 juga telah melebihi target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 0,31% dengan tingkat capaian 100,31%. Kondisi ini perlu dipertahankan, dan penetapan target tahun berikutnya agar disesuaikan dengan capaian tahun ini.

Berbeda dengan 3 indikator sebelumnya, Indeks Perlindungan Anak (IPA) baru memenuhi 68,21 dari target akhir RPJMD 2021 – 2023. Ada selisih sebesar 6,79 poin lagi. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyiapkan strategi agar Indeks Perlindungan Anak dapat lebih baik lagi

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2024 :

Tabel 2.133
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
Jumlah Nagari dengan status IDM Mandiri, Maju, Berkembang				

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.039.894.469	2.253.413.971	74,12%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.667.854.762	9,749,370,374	66,47%
	Jumlah	17.707.749.231	12,002,784,345	67,78%
Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial				
3.	Program Pemberdayaan Sosial	227.522.555	203.941.136	89,63%
4.	Program Rehabilitasi Sosial	306.748.600	262.672.775	85,63%
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	202.428.500	183.005.200	90,40%
6.	Program Penanganan Bencana	256.053.523	189.282.329	73,92%
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	9.383.200	9.375.000	99,91%
	Jumlah	1.002.136.378	848.276.440	84,64%
Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
8.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	358.528.000	293.988.980	81,99%
9.	Program Perlindungan Perempuan	76.401.451	73.937.100	96,77%
10.	Program Pengelolaan Sistem Gender Dan Anak	14.324.000	13.809.900	96,41%
	Jumlah	449.253.451	381.735.980	84,97%
Indeks perlindungan anak				
12.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	130.484.000	128.441.000	98,43%

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
13.	Program Perlindungan Khusus Anak	351.341.199	350.685.325	99,51%
	Jumlah	481.825.199	479.126.325	99,43%
	Total	8.944.986.237	7.950.814.816	88,89%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 13 program yang mendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dengan rata – rata capaian realisasi adalah 88,89% (kategori tinggi), tapi terdapat 3 program yang persentase realisasinya kurang dari 80%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.134
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Jumlah Nagari dengan status IDM				17.707.749.231	12,002,784,345	67,78%	2,34
Mandiri	42	54	158,82				
Maju	41	26					
Berkembang	9	12					
Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,30	92,88	102,80	1.002.136.378	848.276.440	84,64%	1,21
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,90	97,49	100,31	449.253.451	381.735.980	84,97%	1,18
Indeks Perlindungan Anak	71	68.21	94,74	481.825.199	479.126.325	99,43%	0.95

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Untuk menghitung efisiensi sumber daya anggaran dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator sasaran, dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian indikator sasaran dengan capaian realisasi belanja program yang mendukung sasaran tersebut. Jika nilai perbandingan tersebut besar atau sama dengan 1, dapat dianggap bahwa anggaran yang digunakan efisien dalam mencapai indikator sasaran. Namun jika kurang dari 1 berarti anggaran yang dibelanjakan tidak efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran yang mendukung capaian IKU Jumlah Nagari dengan Status IDM Mandiri 2,34, dimana capaian IKU jauh lebih besar dari realisasi anggaran. Hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perencanaan anggaran. Demikian juga halnya dengan Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan social dengan capaian IKU yang lebih besar dari realisasi program menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan efisien mendukung capaian IKU. Sedangkan IKU Indeks Perlindungan Anak, dengan capaian kinerja IKU lebih kecil dari realisasi anggaran, dengan nilai efisiensi 0,95 menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan kurang efisien mendukung capaian IKU.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.135
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Jumlah Nagari dengan status IDM		158,82		

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang Ditata Sesuai Standar	100%	1,58	Kurang efektif
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100%	1,58	Kurang efektif
Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial			102,80		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	100%	1,02	Efektif
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	100%	1,02	efektif
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data Terpadu penanggulangan Kemiskinan yang Dimutakhirkan	100%	1,02	efektif
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	100%	1,02	efektif
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100%	1,02	efektif
Indeks Pembangunan Gender (IPG)			100,31		

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	81,99%	1,22	efektif
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan	96,77%	1,04	efektif
	Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak	Persentase peningkatan skala usaha kecil	96,41%		
Indeks Perlindungan Anak (IPA)			94,74		
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	98,43%	1.11	Efektif
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	0,94	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Jumlah nagari dengan status IDM didukung oleh 2 program. Satu program yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan nilai efektifitas lebih dari 1,58 sehingga dapat dikatakan kurang efektif mendukung capaian IKU.

IKU Persentase PPKS Yang Memperoleh Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial didukung oleh 5 program, dan seluruh programnya efektif mendukung capaian kinerja IKU, dimana nilai efektifitas tertinggi adalah 1,18.

IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh 3 program , dan seluruhnya efektif mendukung capaian kinerja IKU.

IKU Indeks Perlindungan Anak (IPA) didukung oleh 2 program, dan

seluruhnya efektif mendukung capaian kinerja IKU.

2.3.3.4.2.2 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang

Kinerja sasaran strategis “Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.136
Realisasi Indikator Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Total Fertility Rate	Angka	2,27	2,41	93,83

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Kab.Agam Tahun 2025

Total fertility rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur / reproduksi. Hal ini menunjukkan angka kelahiran total yang mana mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dan secara umum berkorelasi positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. TFR merupakan indikator demografi yang harus dicapai untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Angka TFR yang tinggi mencerminkan rata-rata usia kawin yang rendah, jadi semakin tinggi TFR maka semakin tinggi pula laju pertumbuhan penduduk. Indikator TFR ini merupakan indikator menurun, artinya semakin rendah TFR menunjukkan kinerja yang semakin baik. TFR Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar 2,41 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,27 dengan tingkat capaian kinerja adalah sebesar 93,83%. Walaupun target tidak terpenuhi namun masih dalam kategori sangat tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi angka TFR ini, antara lain : faktor pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan serta penggunaan alat kontrasepsi. Beberapa kendala yang ditemui dalam upaya mencapai indikator ini antara lain:

1. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang keluarga berencana
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
3. Kondisi geografis yang sulit dan berragam sehingga menyulitkan jangkauan petugas dalam pelayanan KB

4. Masih adanya kepercayaan masyarakat tentang larangan ber KB
5. Keterbatasan anggaran.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.137
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Total Fertility Rate	2,35	2,48	94,47	2,27	2,41	93,83

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Nilai TFR tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan kinerja dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Walaupun secara realisasi kinerja meningkat, namun tingkat capaiannya mengalami sedikit penurunan sebesar 0,64%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.138
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang dalam Pembangunan Jangka Menengah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		

1.	Total Fertility Rate	2,48	2,41	2,2	90,45

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Total Fertility Rate tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode RJMD Tahun 2021 – 2026, telah memenuhi 90,45%. Masih ada selisih sebesar 0,21 poin lagi yang harus dicapai selama satu tahun terakhir agar target akhir RPMD 2021 - 2026 dapat dicapai. Perlu adanya strategi tertentu agar target akhir periode RPJMD 2021 - 2026 dapat tercapai.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun 2025 :

Tabel 2.139
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengendalian Penduduk	297,435,000	269,377,110	90.56
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6,605,260,088	4,492,159,776	68.01
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2,583,991,685	2,556,541,230	98,93
	Total	9,486,686,773	7,318,078,116	77,14%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 program yang mendukung capaian kinerja indikator Total Fertility Rate dengan total anggaran Rp. 9,486,686,773,- realisasi Rp. 7,318,078,116,- dengan tingkat capaian realisasi 77,14%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja

dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.140
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Total Fertility Rate	2,27	2,41	106,16	9,486,686,773	7,318,078,116	77,14	1,37

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Untuk menghitung efisiensi sumber daya anggaran dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator sasaran, dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian indikator sasaran dengan capaian realisasi belanja program yang mendukung sasaran tersebut. Jika nilai perbandingan tersebut besar atau sama dengan 1, dapat dianggap bahwa anggaran yang digunakan efisien dalam mencapai indikator sasaran. Namun jika kurang dari 1 berarti anggaran yang dibelanjakan tidak efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran yang mendukung capaian sasaran meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah 1,37 dapat diartikan bahwa anggaran yang dibelanjakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.141
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Total Fertility Rate			106,16		
1.	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	69,89	1,52	Kurang Efektif

2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet Need)	95,68	1,11	Efektif
3.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,8	1,57	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Total fertility rate didukung oleh 3 program, terlihat 2 program kurang efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran yaitu untuk program Pembinaan Keluarga Berencana kurang dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

2.3.3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi V (Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya)

Misi V pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 memiliki tujuan “Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya”. Tujuan ini memiliki 2 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.142
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2025
Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib
Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Keamanan Masyarakat	Angka	91,5	76,50	83,61
2.	Persentase nagari Madani pada Level V	%	18,48	22,82	123,48

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks keamanan masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Indeks ini merupakan agregat dari capaian indikator angka kriminalitas per 10.000 penduduk (bobot 40%), persentase korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (30%) serta capaian layanan waktu tanggap kebakaran (30%). Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Keamanan Masyarakat tahun 2025 adalah 76,50. Angka ini turun dari target yang ditetapkan sebesar 91,5 sehingga tingkat capaiannya adalah 83,61%. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat capaian tersebut antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga / instansi pemerintah yang menangani kewanmanan dan ketertiban (kepolisian)
2. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
3. Meningkatnya intensitas pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan.
4. Meningkatnya koordinasi antar wilayah dalam penanggulangan kebakaran.

Persentase nagari madani level V menunjukkan jumlah nagari yang telah menerapkan kehidupan yang madani berlandaskan ABS SBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2025, dari 92 nagari yang ada di Kabupaten Agam, 21 di antaranya sudah masuk dalam kategori nagari madani level V, 70 nagari dengan kategori nagari madani level IV dan 1 nagari dengan kategori nagari madani level III. Tidak ada lagi nagari yang berada pada nagari madani level II dan level I. Dengan begitu realisasi persentase nagari madani level V adalah sebesar 22,82% dari total nagari yang ada, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 18,48%.

Pencapaian tujuan pada Misi V ini, didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kinerja sasaran strategis “Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum” dapat terlihat pada capaian 3 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.143
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	2,90	9,24	-118,63%
2.	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	%	100	100	100%
3.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	%	100	120	120%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2025

Angka kriminalitas merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat keamanan suatu wilayah. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma – norma sosial dan agama. Dapat digambarkan apabila angka kriminalitas per 10.000 penduduk pada suatu daerah memiliki nilai 5, artinya terdapat 5 orang penduduk yang beresiko mengalami tindak kejahatan dalam 1 tahun. Berdasarkan data dari

Polres Agam dan Polres Bukittinggi, total jumlah kejadian kriminalitas pada tahun 2025 adalah 652. Jumlah tersebut sangat jauh selisihnya dibandingkan tahun 2024 hanya 146. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Agam sebanyak 534.173 orang (data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025) maka angka kriminalitas Kabupaten Agam tahun 2025 adalah sebesar 9,24. Artinya pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Agam yang beresiko mengalami tindak kejahatan adalah 9,24 orang. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk ini merupakan indikator dengan kinerja menurun, artinya semakin rendah angka capaian maka hasilnya akan semakin baik. Angka kriminalitas sebesar 9,24 merupakan capaian yang kurang baik dan jauh dari target yang ditetapkan sebesar 2,9 dengan tingkat capaian -118,63%. Kasus terbanyak pada tahun 2025 yaitu kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 198 kasus. Merujuk kepada data capaian yang ada, indikator ini sebenarnya kurang cocok dijadikan indikator kinerja pemerintah daerah, karena Pemerintah Daerah tidak bisa sepenuhnya melakukan intervensi program untuk mencapai target kinerja. Justru indikator kinerja ini lebih dipengaruhi oleh program instansi pemerintah lain yaitu POLRI. Ke depannya keberadaan indikator kinerja ini perlu dievaluasi kembali. Yang paling penting adalah sinergitas pemerintah daerah dan penegak hukum perlu ditingkatkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Persentase penurunan kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perempuan dilihat dari jumlah kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan yang tertangani secara komprehensif. Dari 17 kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan yang terjadi tahun 2025, dapat tertangani seluruhnya secara komprehensif, dengan tingkat capaian 100%. Untuk mengetahui angka kekerasan dan TPPO pada perempuan dapat dihitung berdasarkan jumlah kejadian kekerasan dan TPPO pada perempuan per 10.000 (di pedom pakai 100.000) penduduk perempuan. Pada tahun 2025, jumlah kejadian kekerasan dan TPPO pada perempuan sebanyak 17 kali.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan pada tahun 2025. Jumlah kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan tahun 2024 terjadi sebanyak 11 kali, dan tahun 2025 naik menjadi 17 kasus. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi angka dimaksud, antara lain:

Tabel 2.144

Permasalahan Penanganan Kekerasan dan TPPO pada Perempuan Tahun 2025

No	Kendala/ Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan pada perempuan baik yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh perempuan di lingkungannya.	- Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan meningkat. - Melakukan pendampingan
2.	Pelaku tindak kekerasan kepada perempuan lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat / keluarga.	Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan meningkat.
3.	Faktor – faktor eksternal lainnya antara lain persoalan ekonomi keluarga, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, derajat pendidikan orang tua, keterbukaan informasi serta rendahnya penegakan hukum.	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi - Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan
4.	Kurang optimalnya koordinasi antar stakeholder	Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan
5.	Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk mensupport penanganan kasus kekerasan pada perempuan	Peningkatan kapasitas SDM yang memadai melalui bimbingan teknis maupun kerja sama dengan lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan

Waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran atau yang lebih dikenal dengan *response time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (ditandai dengan keluarnya air pertama / penyemprotan pertama). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Kebakaran Daerah Kabupaten/kota, bahwa waktu tanggap (*response time*) adalah 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi untuk melakukan pelayanan pemadaman. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator, bahwa persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran mencapai 120%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Artinya dari 15 menit waktu tanggap yang ditetapkan dalam SPM urusan kebakaran, yang terpenuhi dengan rata-rata 12 menit (120%). Dari data ini terlihat bahwa waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Meningkatnya *response time* ini disebabkan karena beberapa kendala / permasalahan yang ditemukan sebelumnya telah ditindaklanjuti, antara lain :

Tabel 2.145
Permasalahan Waktu Tanggap Pelayanan Pemadam Kebakaran

No	Kendala/ Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Agam menyulitkan pemenuhan <i>respon time</i> .	- Memperbanyak pos – pos pemadam kebakaran sesuai dengan wilayah manajemen kebakaran
2.	Belum optimal pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran yang sesuai standar	- Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kebakaran - Pemenuhan sarana dan prasaran yang sesuai standar secara berkala - Pengecekan kondisi sarana dan prasarana secara berkala
3.	Belum optimalnya ketersediaan SDM	- Meningkatkan kapasitas SDM pemadam kebakaran baik kualitas maupun kuantitas
4.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran	- Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran melalui pembentukan kelompok relawan kebakaran - Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi - sosialisasi dan simulasi

Untuk melihat kemajuan capaian sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian indikatornya dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut disajikan data perbandingan capaian indikator sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan tahun 2024

pada tabel berikut :

Tabel 2.146
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya
Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2024 Dengan Tahun
2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	3	2,74	108,67	2,90	9,24	-118,63
2.	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	100	90	90	100	120	120

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 terjadi kenaikan angka kriminalitas per 10.000 penduduk jika dibandingkan dengan tahun 2024, bahkan kenaikan tersebut melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbaikan kinerja dalam menekan angka kriminalitas. Merujuk kepada definisi operasional indikator kinerja, serta data yang digunakan, terlihat dengan jelas bahwa indikator kinerja ini tidak cocok dengan kinerja Pemda, karena tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan terlihat adanya peningkatan kinerja. Hal ini disebabkan karena jumlah kasus yang terjadi jika dibanding tahun lalu menurun, yaitu 17 kasus di tahun 2024 menjadi 11 kasus di tahun 2025. Dan seluruh kasus yang terjadi dapat tertangani secara komprehensif.

Sama halnya dengan dua indikator kinerja lainnya, Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran juga mengalami peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terlihat dari adanya perbaikan waktu tanggap, dari 12,5 menit pada tahun 2024 menjadi 12 menit pada tahun 2025.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir

periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.147
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	2,74	9,24	4,02	-29,85
2.	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	100	100	100	100
3.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran	90	120	100	120

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum 2 indikator kinerja utama di atas memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi 1 kinerja Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk, masih sangat jauh untuk mencapai target akhir yang ditetapkan. Untuk persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan sudah mencapai target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 sedangkan untuk respon time sudah melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 :

Tabel 2.148
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk				
1.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.183.172.000	1.113.922.770	94%

2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (kecamatan)	71.133.500	37.060.400	55%
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	913.992.812,00	913.114.662,00	99%
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	45.529.560,00	21.501.950,00	47%
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.078.965.000,00	722.571.205,00	66%
Jumlah		3.292.792.872	2.808.170.987	85%
Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan				
6.	Program Perlindungan Perempuan	76.401.451	73.937.100	97%
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	358.528.000	293.988.980	90%
Jumlah		434.929.451	367.926.080	84,59%
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran				
8.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.433.807.140	1.112.014.083	77%
Jumlah		1.433.807.140	1.112.014.083	77%
Total		5.161.529.463	4.288.111.150	83%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Indikator Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk didukung oleh 5 program dengan rata – rata realisasi anggaran yang sangat tinggi mencapai 97,82%. Walaupun begitu terdapat 3 program di antaranya yang realisasi anggarannya di bawah 60% (rendah) yaitu Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (kecamatan) (59%), Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi, Sosial Dan Budaya (47%) dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (66%). Sedangkan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik tingkat realisasinya sangat tinggi yaitu lebih dari 90%.

Indikator Persentase Penurunan Kekerasan dan TPPO pada Perempuan didukung oleh 2 Program dengan rata – rata realisasi anggaran sebesar 84,59%. Sedangkan untuk mendukung indikator Persentase Pemenuhan Waktu Tanggap Pelayanan Pemadaman Kebakaran juga didukung oleh 1 program dengan capaian realisasi adalah 77%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.149
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	2,90	9,24	-118,63	3.292.792.872	2.808.170.987	83%	
Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	100	100	100%	434.929.451	367.926.080	84,59%	1,18
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan	100	120	120%	1.433.807.140	1.112.014.083	77%	1,56

pemadaman kebakaran							

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator angka kriminalitas per 1000 penduduk, sangat tidak efisien, karena dengan realisasi anggaran sebesar 83% target kinerja justru tidak tercapai. Sedangkan 2 indikator kinerja lainnya dapat dikatakan efisien karena capaian indikator kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya yang menunjukkan nilai besar dari 1.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.150
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Berkurangnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk			-118,63		
1.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	-1,19	Kurang Efektif
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (kecamatan)	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	-1,19	Kurang Efektif

3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100%	-1,19	Kurang Efektif
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	100%	-1,19	Kurang Efektif
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan / tangkal dini konflik	100%	-1,19	Kurang Efektif
Persentase penurunan kekerasan dan TPPO pada perempuan			100%		
1.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	1.0	Efektif
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	99,18%	1,01	Efektif
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran			120%		
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	77%	1,56	kurang Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Berdasarkan diatas pada sasaran Berkurangnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, seluruh program pendukung telah mencapai realisasi output sebesar 100%. Namun demikian, nilai efektivitas sebesar -1,19 dengan kategori kurang efektif menunjukkan bahwa capaian program bukan hanya tidak mampu mendukung kepada capaian sasaran, namun terlihat tidak sinkron dengan sasaran yang ada.

Pada sasaran Persentase Penurunan Kekerasan dan TPPO pada Perempuan, capaian kinerja mencapai 100% dengan tingkat efektivitas program sebesar 1,00 dan 1,01 (kategori efektif). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah selaras dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian sasaran.

Sementara itu, pada sasaran Persentase Penurunan Waktu Tanggap Pelayanan Pemadaman Kebakaran, capaian kinerja sebesar 120% dengan tingkat efektivitas 1,56 terlihat kurang efektif, karena walau capaian program hanya 77% namun capaian kinerja sasaran melebihi 100%. Perlu adanya perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran agar program dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya” dapat terlihat pada capaian 3 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.151
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai- Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah nagari Madani pada level:)				
	Level V	Jumlah	17	21	123,53%
	Level IV	Jumlah	42	70	166,67%
	Level III	Jumlah	32	1	196,88
	Level II	Jumlah	1		
	Level I	jumlah	0		
2.	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	%	100	100	100%
3.	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang Dilestarikan	%	100	100	100%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Kab. Agam Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani, Nagari Madani di Kabupaten Agam dikelompokkan menjadi 5 tingkatan, yaitu :

1. Nagari Madani level I, jika akumulasi skor indicator mulai dari 0 - 85.

2. Nagari Madani level II, jika akumulasi skor indicator mulai 86 - 110.
3. Nagari Madani level III, jika akumulasi skor indicator mulai 111 - 130.
4. Nagari Madani level IV, jika akumulasi skor indicator mulai dari 131 - 170.
5. Nagari Madani level V, jika akumulasi skor indicator mulai dari 171 - 215.

Penilaian nagari madani pada tahun 2025 dilaksanakan untuk 92 nagari. Pada tahun ini realisasi target untuk Nagari Madani secara umum sangat baik. Rata-rata capaiannya adalah sangat tinggi. Bahkan tidak ada lagi nagari yang berada pada madani level II dan level I. Berikut disampaikan klasifikasi nagari berdasarkan level nagari madani sebagai berikut :

- a. Nagari madani level V sebanyak 21 nagari atau 22,83 % dari total nagari
- b. Nagari madani level IV sebanyak 70 nagari atau 76,09% dari total nagari
- c. Nagari madani level III sebanyak 1 nagari atau 1,09% dari total nagari

Banyak nagari yang levelnya meningkat dari tahun sebelumnya, bahkan tidak ada lagi nagari yang berada pada level II dan level I. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi capaian realisasi nagari madani pada tahun 2025 antara lain :

Tabel 2.152

Kendala atau Permasalahan dan Penyelesaian Masalah

No	Kendala/ Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2022 menyebabkan jumlah nagari di Kabupaten Agam bertambah menjadi 92 nagari, sehingga mempengaruhi capaian persentase nagari madani level V.	Terkait perubahan jumlah nagari, telah dilakukan penyesuaian target dan perlu dilakukan pembinaan terhadap nagari yang baru terbentuk
2.	Ketersediaan kader nagari madani yang kurang memadai, sehingga upaya peningkatan level nagari madani tidak maksimal.	Melakukan pembinaan dan pendampingan pembentukan kader nagari madani terutama untuk nagari yang baru dibentuk
3	Kurangnya dukungan dan partisipasi lembaga nagari dalam upaya peningkatan level nagari madani.	- Perlu evaluasi terhadap Perbup Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani. - Melakukan sosialisasi nagari madani - Melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait pembinaan nagari madani
4	Masih terdapat KAN yang belum memiliki ninik mamak sehingga fungsi	Pemberdayaan lembaga adat dalam melakukan internalisasi adat budaya.

	KAN tidak optimal dalam internalisasi adat dan budaya sesuai dengan indicator nagari madani.	

Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan adat salingka nagari merupakan salah satu indikator kinerja sasaran meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai – nilai agama, adat dan budaya. Pencapaian indikator ini dapat diketahui melalui penilaian terhadap seluruh lembaga adat yang ada di Kabupaten Agam. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, jumlah lembaga adat yang ada saat ini adalah sebanyak 218 lembaga, yang terdiri dari :

- Lembaga adat tingkat kabupaten 2 buah (LKAAM dan Bundo Kandung)
- Lembaga adat tingkat kecamatan 32 buah (LKAAM dan Bundo Kandung)
- Lembaga adat tingkat nagari 184 buah (KAN dan Bundo Kandung)

Berdasarkan penilaian dan pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh lembaga adat yang ada dapat dinyatakan aktif dalam menegakkan adat salingka nagari, realisasi 100%.

Terkait indikator persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan, terdapat 51 cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang wajib dilestarikan melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Cagar Budaya. Dan saat ini sedang berlangsung proses penetapan 4 cagar budaya lagi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya yang wajib dilestarikan yaitu Stasiun Kereta Api Padang Lua di Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu, Kuburan Panjang di Jorong Aua Kuniang Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh, Masjid Tuo Palupuh di Jorong Sipisang Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh dan Makam Syech Muhammad Yusuf di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang kamang.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.153
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai
Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah nagari Madani pada level:						
	Level V	14	13	92,86	17	21	123,53%
	Level IV	46	64	139,13	42	70	166,67%
	Level III	27	15	144,44	32	1	196,88
	Level II	5	0	200	1		
	Level I				0		
2.	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	100	100	100	100	100%
3.	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100	94,54	94,54	100	100	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Untuk indikator kinerja Jumlah Nagari Madani Pada Level V terjadi peningkatan sebanyak 8 nagari. Di samping peningkatan jumlah nagari madani level V, nagari madani level IV juga mengalami peningkatan sebanyak 6 nagari, level III berkurang sebanyak 14 nagari, sedangkan level II dan level I tidak ada lagi. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan kinerja yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2024.

Indikator kinerja persentase lembaga adat yang aktif menegakkan adat salingka nagari pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu 100%. Artinya kinerja tahun 2024 yang telah terpenuhi 100% dapat dipertahankan di tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi keaktifan lembaga adat yang ada seperti LKAAM dan Bundo Kanduang Kabupaten yang giat dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan Bundo kanduang ke setiap nagari yang ada di Kabupaten Agam. Saat ini setiap lembaga adat juga dilengkapi dengan kepengurusan dan program kerjanya.

Indikator Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan

sejarah yang dilestarikan sama dengan capaian tahun 2024, sehingga capaiannya 100%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.154
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Capaian
		2024	2025		
1.	Jumlah nagari Madani pada level:				
	Level V	13	21	20	105%
	Level IV	64	70	25	280%
	Level III	15	1	37	197,29%
	Level II	0		0	
2.	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	100	81,82	122,21%
3.	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	94,54	100	70	142,86%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026. Untuk indikator kinerja jumlah nagari madani, level V dan level IV merupakan target dengan indikator bermakna positif, dimana semakin besar realisasi maka akan semakin baik kinerjanya, sedangkan level III, II, dan I merupakan indikator kinerja bermakna positif dimana semakin kecil angkanya maka akan semakin baik kinerjanya. Untuk indikator kinerja ini, yang menjadi focus adalah bagaimana menjadikan 20 nagari di Kabupaten Agam menjadi nagari madani level V pada tahun 2026. Artinya dengan capaian sebanyak 21 pada tahun 2025, sudah melebihi target nagari madani level V pada tahun 2026. Untuk itu perlu konsistensi

dalam pembinaan dan pengawalan nagari dalam memenuhi indikator nagari madani. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk mempertahankan hal tersebut , antara lain :

- Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nagari-nagari dalam mencapai indikator penilaian.
- Memaksimalkan pemberdayaan nagari dalam pencapaian level V nagari madani.
- Meningkatkan peran serta / partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk lembaga masyarakat maupun perorangan.
- Melakukan pendampingan kepada seluruh nagari terutama kepada nagari yang baru defenitif dalam pemenuhan kriteria dan indikator penilaian nagari madani.

Capaian Indikator Kinerja Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari pada tahun 2025 telah melebihi target akhir periode RPJMD pada tahun 2026, bahkan mencapai 122,22% jika dibanding target tahun 2026. Kondisi ini perlu dipertahankan agar tidak ada penurunan kinerja pada tahun tahun selanjutnya. Sama halnya dengan indikator kinerja persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan, capaian kinerjanya tahun ini telah melebihi target tahun 2026 atau mencapai 142,86%. Kondisi ini harus dipertahankan agar kinerja pelestarian kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah tetap dapat ditingkatkan.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya pada tahun 2025 :

Tabel 2.155
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah nagari Madani pada level V, IV, III dan II				

1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,039,894,469	2,253,413,971	74,13%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14,667,854,762	9,749,370,374	66,47%
Jumlah		17,707,749,231	12,002,784,345	67,78%
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari				
3.	Program Pengembangan Kebudayaan Daerah	354,775,000	198,933,050	56,07%
4.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	440,000,000	439,997,767	99,99%
Jumlah		794,775,000	638,930,817	80,39%
Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang Dilestarikan				
5.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	253,020,000	247,241,704	97,72%
Jumlah		253,020,000	247,241,704	97,72%
Total		18,755,544,231	12,888,956,866	68,72%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Indikator Jumlah Nagari Madani didukung oleh 2 program dengan rata – rata realisasi anggaran 67,78%. Indikator Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan adat salingka nagari didukung oleh 2 program dengan rata-rata realisasi anggaran 80,39%. Sedangkan indikator Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan juga didukung oleh 1 program, dengan rata-rata realisasi 97,72%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.156
Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib
Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% capaian	

Jumlah nagari Madani pada level:						67,78%	1,82
Level V	17	21	123,53%	17,707,749,231	12,002,784,345		
Level IV	42	70	166,67%				
Level III	32	1	196,88				
Level II	1						
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	100	100%	794,775,000	638,930,817	80,39%	1,24
Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100	100	100%	253,020,000	247,241,704	97,72%	1,02

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja Jumlah Nagari madani level V capaian kinerjanya lebih besar dibandingkan realisasi anggaran, dengan begitu dapat dikatakan bahwa anggaran yang digunakan efisien mendukung capaian kinerja sasaran.

Untuk persentase lembaga adat yang aktif menegakkan adat salingka nagari capaian kinerja sasaran lebih besar daripada realisasi anggaran sehingga anggaran yang digunakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Sedikit berbeda dengan indicator Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan, capaian kinerjanya sedikit lebih rendah dibanding realisasi anggaran, sehingga cukup efisien mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.157
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib
Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentas e Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efisiensi
Jumlah nagari madani level V			123,53%		
Jumlah nagari madani level IV					
Jumlah nagari madani level III					
Jumlah nagari madani level II					
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase komponen pada kelembagaan yang ditata sesuai standar	100%	1.24	Cukup Efektif
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi serta kerjasama daerah yang terlaksana	100%	1,24	Cukup Efektif
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari			100%		
1	Program Pengembangan Kebudayaan Daerah	Persentase lembaga adat yang menerapkan tradisi adat	100%	1.00	Efektif
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif	100%	1.00	Efektif
Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan Peninggalan sejarah yang dilestarikan			100%		
1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ditetapkan	100	1	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Untuk indikator kinerja Jumlah Nagari madani Level V didukung oleh 2 program yaitu Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat efektifitas 1,24 dapat dikatakan cukup efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

Untuk Persentase Lembaga Adat Yang Aktif Menegakkan Adat Salingka

Nagari juga didukung oleh 2 program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional terlihat efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

Untuk persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan didukung oleh 1 program. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya terlihat efektif dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

2.3.3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi I (Tata Kehidupan yang harmonis, Agamis, Beradat dan Berbudaya berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai”)

Misi I pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 memiliki tujuan “ Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.158
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi I Tahun 2025 Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Nagari dengan Level V	%	18,48	21,00	123,48

Sumber : Hasil Evaluasi Capaian IKU Tahun 2025

Persentase nagari madani level V menunjukkan jumlah nagari yang telah menerapkan kehidupan yang madani berlandaskan ABS SBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2024, dari 92 nagari yang ada di Kabupaten Agam, 13 di antaranya sudah masuk dalam kategori nagari madani level V, 64 nagari dengan kategori nagari madani level IV dan 15 nagari dengan kategori nagari madani level III. Tidak ada lagi nagari yang berada pada nagari madani level II dan level I. Dengan begitu realisasi persentase nagari madani level V adalah sebesar 21% dari total nagari yang ada. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian nagari madani level V yang ditemui hampir pada seluruh nagari adalah :

1. Penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2022 menyebabkan jumlah nagari di Kabupaten Agam bertambah menjadi 92 nagari, sehingga mempengaruhi capaian persentase nagari madani level V.
2. Ketersediaan kader nagari madani yang kurang memadai, sehingga upaya peningkatan level nagari madani tidak maksimal.
3. Kurangnya dukungan dan partisipasi lembaga nagari dalam upaya peningkatan level nagari madani.
4. Masih terdapat KAN yang belum memiliki ninik mamak sehingga fungsi KAN tidak optimal dalam internalisasi adat dan budaya sesuai dengan indikator nagari madani.

Pencapaian tujuan pada Misi I ini, didukung melalui 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

A. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat

Kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama “ tergambar pada capaian 1 indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 2.159
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	persen	76,53	77,04	100,67

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Tingkat penerapan nilai-nilai agama mencapai 77,04% dari target 76,53% dengan capaian 100,67% pada tahun 2025. Indikator ini merupakan indikator baru pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, sebelumnya tidak termuat pada indikator kinerja dokumen perencanaan tahun sebelumnya. Atas capaian diperoleh menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai agama pada Kabupaten Agam telah melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan akumulatif penerapan nilai-nilai agama di nagari-nagari yang menjadi pondasi penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan moral masyarakat. Indikator ini juga sejalan dengan program Bupati yakni “Bangkik dari Surau”, secara tidak langsung program tersebut sangat sejalan dengan indikator kinerja.

Untuk melihat kemajuan capaian sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama tahun ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian indikatornya dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut disajikan data perbandingan capaian indikator sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.160
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi dari baseline yang ditetapkan. Walaupun indikator tersebut merupakan indikator baru, tapi untuk realisasi sudah mampu melebihi baseline tahun 2024.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 - 2029.

Tabel 2.161
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengetahuan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan adat Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian
1.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	75,03%	77,04 %	81,93%	94,03%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja utama di atas memiliki kinerja yang sangat baik. Tetapi untuk capaian belum melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2025 - 2029. Walaupun demikian untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan, Kabupaten Agam masih memiliki waktu selama 4 tahun lagi untuk mencapai target tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Pengetahuan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama pada tahun 2025 :

Tabel 2.162
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama				

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	75,03	76,53	77,04	102,68

1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.667.854.762	9.749.370.374	66,47%
	Jumlah	14.667.854.762	9.749.370.374	66,47%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab.Agam Tahun 2025

Indikator Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama didukung oleh 1 Program dengan rata – rata realisasi anggaran sebesar 66,92%. Hal ini menggambarkan bahwa serapan anggaran pada program ini tidak terlalu bak. Hal ini disebabkan karena perencanaan dalam penganggaran belum sepenuhnya matang sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.163
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	69,61	77,04	110,67	14.667.854.762	9.749.370.374	66,47%	1,66

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama Tahun 2025 dapat dikatakan efisien karena capaian indikator kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya yang menunjukkan nilai sebesar 1,66. Untuk tahun berikutnya, program dapat dirancang lebih efisien sehingga anggaran yang disediakan dapat direalisasikan dengan baik.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna

untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Adapun tingkat efektifitas dapat ditentukan berdasarkan pengelompokan sebagai berikut :

Tabel 2.164
Tingkat Efektifitas Program

Skala Capaian Efektifitas	Tingkat Efektifitas **
Dibawah 0,75	Kurang efektif
0,76 – 0,90	Cukup efektif
0,91 – 1,10	Efektif
1,11 – 1,50	Cukup Efektif, capaian kinerja juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar program
>1,50	Kurang efektif, capaian program pengaruhnya kecil. Capaian kinerja sasaran lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan capaian program

** : Tim SAKIP, 2025

Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.165
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama			102, 68%		
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi serta kerjasama daerah yang terlaksana	100%	1,03	Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKJIP, 2025

Indikator kinerja tingkat penerapan nilai-nilai agama didukung oleh 1 program, dengan capaian program 100%. Berdasarkan perbandingan antara capaian sasaran dan

capaian program, terlihat bahwa Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat efektif mendukung kepada capaian sasaran.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal

Kinerja sasaran strategis “ Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal “ tergambar pada capaian 1 indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 2.166
Realisasi Indikator Sasaran Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian(%)
1.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	Tingkat	63,70	62,42	97,99

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Tingkat penerapan nilai-nilai Adat, Budaya dan Kearifan lokal mencapai 62,42% dari target 63,70% dengan capaian 97,99% pada tahun 2025. Indikator ini merupakan indikator baru pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Walaupun target belum tercapai, namun realisasi indikator ini berada pada kategori sangat tinggi.

Untuk melihat kemajuan capaian sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama tahun ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian indikatornya dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut disajikan data perbandingan capaian indikator sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.167
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	62,55	63,70	62,42	97,99

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tahun 2025 terjadi penurunan realisasi dari baseline yang ada dan target yang ditetapkan sebesar 0,13 poin, namun capaiannya masih berada pada kategori sangat tinggi. Capaian ini juga dipengaruhi oleh indikator yang baru terlaksana pada pertengahan tahun 2025 sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaan.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 - 2029.

Tabel 2.168
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan
pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal Dengan Target Akhir RPJMD
Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian
1.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	62,55	62,42	68,32	91,36%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja utama di atas memiliki kinerja yang sangat baik. Kondisi ini cukup bagus mengingat Tahun 2025 masih merupakan Tahun pertama untuk mengevaluasi capaian IKU ini. Kabupaten Agam masih memiliki waktu selama 4 tahun lagi untuk mencapai target tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal pada tahun 2025 :

Tabel 2.169
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya
pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal tahun
2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal				
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	354.775.000	198.933.050	56,07%
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	440.000.000	439.997.767	99,99%
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	253.020.000	247.241.704	97,71%

4.	Program Pengelolaan Permuseuman	1.014.774.500	799.243.972	78,76%
	Jumlah	2.062.569.500	1.685.416.493	81,71%
	TOTAL	2.062.569.500	1.685.416.493	81,71%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Indikator Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal didukung oleh 4 Program dengan rata – rata realisasi anggaran sebesar 81,71%. Dari ke 4 program, hanya 2 program yang perolehan capaian lebih dari 90% yaitu Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Namun, 1 program memperoleh capaian rendah hanya 56,07% yaitu Program Pengembangan Kebudayaan. 1 program lagi memperoleh capaian 78,76%. Hal menggambarkan bahwasanya perencanaan dalam penganggaran belum sepenuhnya matang dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Untuk selanjutnya program ini perlu dievaluasi pada saat perencanaan dan penganggarnya.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.170
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	63,70	62,42	97,99	2.062.569.500	1.685.416.493	81,71%	1,19

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat

bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal Tahun 2025 dapat dikatakan efisien karena capaian indikator kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya yang menunjukkan nilai sebesar 1,19. Walaupun begitu, untuk 2 program yang realisasi anggarannya di bawah 90%, perlu dievaluasi dan diperbaiki pada saat perencanaan dan penganggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran.

Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.171
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal			97,99%		
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi serta kerjasama daerah yang terlaksana	100%	0,97	Efektif
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif	100%	0,97	Efektif
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ditetapkan	100%	0,97	Efektif
4.	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan Museum (orang)	143,75%	0,68	kurang Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Indikator kinerja tingkat penerapan nilai-nilai agama didukung oleh 4 program.

Hanya 3 Program yang dapat dikatakan efektif mendukung capaian kinerja sasaran, dengan perolehan nilai efektifitas yaitu 0,97. 1 Program lainnya memiliki tingkat efektifitas kurang efektif yaitu Program Pengelolaan Permuseuman. Untuk tahun berikutnya program ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kinerja sasaran yang didukungnya.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Kinerja sasaran strategis “ Sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum “ tergambar pada capaian 1 indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 2.172
Realisasi Indikator Sasaran Sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Keamanan Daerah	Angka	79,45	64,63	81,35

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks Keamanan Daerah mencapai 64,63% dari target 79,45% dengan capaian 81,35% (baik) pada tahun 2025. Indikator ini merupakan indikator baru pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, sebelumnya tidak termuat pada indikator kinerja dokumen perencanaan tahun sebelumnya. Atas capaian diperoleh menunjukkan bahwa Indeks Keamanan Daerah pada Kabupaten Agam belum mencapai target yang ditetapkan. Selisih targetnya yakni 26,87 poin lagi.

Untuk melihat kemajuan capaian sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian indikatornya dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut disajikan data perbandingan capaian indikator sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.173
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tahun 2025 belum dapat disandingkan dengan

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Keamanan Daerah	n.a	79,45	64,63	81,35

baseline tahun 2024. Hal ini disebabkan belum adanya tersedia data baseline untuk indikator kinerja indeks keamanan daerah pada tahun 2025. Ke depannya realisasi tahun ini dapat menjadi dasar untuk menetapkan target pada tahun selanjutnya.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 - 2029.

Tabel 2.174
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian
1.	Indeks Keamanan Daerah	n.a	64,63	94,55	68,36%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja utama Tahun 2025 baru memenuhi target Tahun 2029 sebesar 68,36%. Walaupun Kabupaten Agam masih memiliki waktu 4 tahun untuk mencapainya, perlu disusun strategi dan kebijakan yang mendukung kepada capaian kinerja sasaran ini.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 :

Tabel 2.175
Program Dan Anggaran Yang Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indeks Keamanan Daerah				
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	1.183.172.000	1.113.922.770	94,1

2.	Program Pencegahan Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.433.807.140	1.112.014.083	77,6
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.611.915.558	13.910.922.549	95,20
4.	Program Perlindungan Perempuan	76.401.451	73.937.100	96,8
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	913.992.812,00	913.114.662,00	99,9
6.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.984.000,00	1.510.000,00	50,6
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan. Ekonomi. Sosial dan Budaya	45.529.560,00	21.501.950,00	47,2
8.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.078.965.000,00	722.571.205,00	67,0
	Jumlah	19.346.767.522	17.869.494.319	92,4
TOTAL		2.062.569.500	1.685.416.493	81,71%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Indikator Indeks Keamanan Daerah didukung oleh 8 Program dengan rata – rata realisasi anggaran sebesar 81,71%. Dari ke 8 program, hanya 4 program yang memiliki realisasi anggaran dari 90%, 1 program memiliki realisasi anggaran sedang (77%) sedangkan 3 program lainnya rendah Hal menggambarkan bahwasanya perencanaan dalam penganggaran belum sepenuhnya matang dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Ke depannya, untuk realisasi anggaran yang rendah, perlu dievaluasi dan disempurnakan pada tahap perencanaan dan penganggaran.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.176
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Keamanan Daerah	91,5	64,63	70,64%	2.062.569.500	1.685.416.493	81,71%	0,86

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban umum Tahun 2025 terlihat kurang efisien, karena capaian kinerja lebih rendah dari realisasi anggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran.

Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.177
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Sasaran
Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Indeks Keamanan Daerah			64,63		
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan trantibum	100%	0,64	Kurang Efektif
2.	Program Pencegahan Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar (%)	100%	0,64	Kurang Efektif
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	100%	0,64	Kurang Efektif

		kantor dan ASN.			
4.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	0,64	Kurang Efektif
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat	100%	0,64	Kurang Efektif
6.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	100%	0,64	Kurang Efektif
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan. Ekonomi. Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	0,64	Kurang Efektif
8.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	0,64	Kurang Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Indikator kinerja tingkat penerapan nilai-nilai agama didukung oleh 8 program. Semua program yang dapat dikatakan kurang efektif mendukung capaian kinerja sasaran, dengan perolehan nilai efektifitas yaitu 0,64. Hal ini menunjukkan kurangnya relevansi antara program dengan sasaran kegiatan. Ke depannya agar program lebih efektif, perlu dilakukan evaluasi dan melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program lebih efektif.

2.3.3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi II (Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional)

Misi II pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 memiliki dengan tujuan “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.178
Realisasi Indikator Kinerja Misi II Meningkatnya Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	79	81,20	102,78

Sumber LKE Menpan RB, Tahun 2026

Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Peraturan tersebut memuat adanya perubahan tata cara penilaian / evaluasi serta implementasi reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, dimana mulai tahun 2023 terjadi penajaman dan penyesuaian fokus pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi 2 yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

RB General berfokus kepada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaksanaan RB General berada pada level mikro yang merupakan implementasi kebijakan/ program yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso. Pelaksanaan RB General pada level mikro harus didasari pada dua dimensi yaitu :

1. Dimensi prioritas nasional, yang sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang ditetapkan pada level makro dan meso yang bersifat *mandatory*.
2. Dimensi prioritas instansional, merupakan kegiatan utama inisiatif yang mengakomodir pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih ditemui dalam penyediaan

pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Terdapat 5 tematik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2025, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Walaupun secara umum, instansi pemerintah diberi keleluasaan untuk memilih satu atau lebih tema dari lima tema yang diangkat sebagai fokus RB tematik, namun Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan seluruh tema tersebut untuk ditetapkan dalam RB Tematik Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan karena seluruh tema tersebut relevan dengan persoalan dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Adapun 5 tema dimaksud adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan nilai investasi
3. Digitalisasi pemerintahan fokus penanganan stunting
4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
5. Pengendalian laju inflasi

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator Nasional, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah 81,20 dengan kategori A. Nilai ini adalah nilai sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB yang untuk selanjutnya menunggu jika ada sanggahan terhadap nilai indikator pembentuk Indeks RB yang telah dikeluarkan oleh kementerian / lembaga terkait. Capaian realisasi sementara ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,2 poin dengan tingkat capaian sebesar 102,78. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi RB General dan Tematik
2. Capaian beberapa indikator penilaian RB sudah menunjukkan kemajuan yg signifikan dalam pelaksanaannya seperti indikator tindak lanjut pengaduan masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Pelayanan Publik, Opini BPK, Indeks Kualitas Kebijakan dan TL rekomendasi.
3. Telah menginput dan melampirkan bukti dukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik pada aplikasi Portal RB tepat waktu.

Berikut disampaikan hasil evaluasi Tim Evaluator Pusat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Agam sesuai dengan LKE sebagai berikut :

Tabel 2.179
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan LKE
KEMENPANRB

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi
	RG GENERAL					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.30	76,67	1. Rencana aksi yang disusun belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama 2. Indikator Output atas Rencana Aksi sudah relevan, namun belum cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan 3. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 4. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai	1. Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama 2. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran 3. Melakukan reuiu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 4. Melakukan reuiu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi
2.	Tingkat capaian Sistem Kerja RB General	7	100	76,67	Total Rata Rata Capaian Output Rencana Aksi RB General sebesar 100%.Capaian Tingkat Implementasi dipengaruhi oleh Capaian Kualitas Rencana Aksi RB General	
3.	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	3	2	1,2		Segera melakukan penetapan pengaturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan

						penyederhanaan birokrasi
4.	Tingkat maturitas SPIP	4	3,15	2,52	1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Agam berada pada Level 2 (Berkembang). Tingkat maturitas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam secara umum telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun hal tersebut belum didukung strategi pencapaian kinerja yang relevan. Selain itu, penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang dibangun belum memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. 2. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kabupaten Agam belum sepenuhnya memadai. Masih terdapat kelemahan dimana proses manajemen risiko belum sepenuhnya melekat pada proses bisnis pemerintah Kabupaten Agam dan belum dilakukan pengukuran efektivitas pengendalian intern dalam pencapaian tujuan organisasi. c. Hasil evaluasi menunjukkan pengendalian	Bupati Agam agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam untuk menyusun rencana aksi, yang di dalamnya menugasi: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan reviu dan perbaikan atas dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas konstruksi perencanaan OPD. 2. Inspektur Kabupaten Agam melaksanakan penilaian efektivitas pengendalian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dibangun. 3. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam untuk meningkatkan penerapan SPIP dan manajemen risiko melalui penguatan komitmen pimpinan, pengukuran efektivitas pengendalian intern, serta peningkatan koordinasi dan monitoring antar OPD.

					korupsi di Pemerintah Kabupaten Agam belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Kabupaten Agam telah berupaya untuk menunjukkan keseriusannya dalam pembelajaran dan edukasi antikorupsi namun belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, sumber daya untuk pengelolaan risiko anti korupsi belum sepenuhnya memadai	
5.	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	14,29		
6.	Nilai SAKIP	4	67,45	67,50	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2025 dapat diakses pada portal rb nasional dengan menggunakan akun instansi	
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	60,01	68,40	Instansi sudah menyusun Arsitektur SPBE To-Be sesuai standar	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	68,36	68,40	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI
9.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikandeks	2.5	3,00	60,00	Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu: • Jumlah pengaduan yang diterima melalui aplikasi SP4N LAPOR! relatif sedikit	Sehubungan dengan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, sebagai berikut: • Meningkatkan

					selama periode evaluasi. • Belum terdapat laporan yang diberikan penilaian (rating) oleh pelapor.	sosialisasi dan kampanye kanal SP4N-LAPOR! kepada pengguna layanan instansi serta mendorong digitalisasi pengaduan ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR!. • Meningkatkan kualitas tindak lanjut pengaduan sesuai substansi laporan guna mendorong pelapor memberikan penilaian (rating) atas laporan yang telah direspons.
10.	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	74,31	74,40	Fully Participant (Baik)	Peningkatan kualitas kebijakan pada dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan transparansi dan partisipasi publik
11.	Indeks Reformasi Hukum	2.5	88,88	88,80	Melebihi target	
12.	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2,75	55,20	• Penerapan Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas, dan Kode Referensi dan/ atau data induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data yang diatur dalam surat Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2000 tentang Satu Data Kabupaten Agam. • Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data yang diatur dalam SOP Diskominfo Nomor 2.20.2023.4 Tentang Diseminasi Data Sektor ke Sosial Media, SOP Nomor 2.20.2023.5 Tentang Diseminasi Data Statistik Sektor ke Portal Satu Data, dan SOP Nomor 2.20.2023.6 Tentang	

					Diseminasi Melalui Buku Publikasi Statistik • Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten Agam terkait perencanaan pembangunan statistik telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Agam 2024-2028. • Penerapan Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Keterbandingan dan Konsistensi Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, namun masih merujuk pada pedoman di unit kerja produsen masing masing. • Penerapan Aspek SDM yang memadai dan kapabel sudah dilaksanakan oleh setiap produsen data, namun belum ada pemenuhan kompetensi SDM nya.	
13.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	74,87	74,80	(1) Tingkatkan pemanfaatan sistem pada Non e Tendering/Non e Purchasing, e-Katalog, Toko Daring. (2) Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% bahkan belum lebih dari 60%. (3) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif). Selanjutnya, persiapan untuk mengusulkan penilaian PKP Proaktif.	Lakukan persiapan penilaian ITKP 2026 sesuai metode penilaian baru
14.	Indeks Sistem Merit	4	278,00	67,75	2023	
15.	Indeks Pelayanan Publik	2	3,78	75,50		Disampaikan melalui LHE yang disampaikan deputi pelayanan publik.
16.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	95,48	95,50		
17	Indeks SPBE	2	2,96	59,22		

18	Opini BPK	5	3,00	100,00		
19.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	83,71	83,75		
20.	Indeks BerAkhlak	4	69,98	70,00	Kategori cukup	
21.	Survei Penilaian Integritas	10	78,02	78,00		Pemerintah Kabupaten Agam perlu memperhatikan kejelasan informasi layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pengemasan informasi prosedur layanan secara jelas dan interaktif melalui inovasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan juga harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat meningkat. Selanjutnya, kemudahan dalam memahami prosedur layanan juga menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Pengemasan

						informasi prosedur layanan yang jelas dan bersifat interaktif harus terus diupayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Evaluasi melalui survei kepuasan layanan juga akan memberikan masukan berharga untuk perbaikan di masa mendatang, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam aspek pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Agam perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. SOP ini harus mencakup seluruh proses pengadaan, mulai dari tender hingga evaluasi dan pengelolaan kontrak. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP baru dan standar harga juga sangat penting untuk memastikan keseragaman dalam implementasi. Dengan demikian, diharapkan kualitas barang dan jasa

						yang diperoleh dapat sesuai dengan harga yang dibayarkan, serta mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan. Pemerintah Kabupaten Agam juga harus memperhatikan hubungan kedekatan antara penyedia barang/ jasa dengan pejabat dalam proses pengadaan. Edukasi dan kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan integritas dalam pengadaan. Melakukan due diligence terhadap vendor dan memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam juga merupakan langkah yang perlu diambil. Dengan membuka ruang pengadaan yang lebih luas dan melibatkan masyarakat secara efektif, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan dan adil. Dalam hal pengelolaan gratifikasi, Pemerintah Kabupaten Agam perlu mengimplementasikan dan menginternalisasi

						kebijakan serta regulasi yang ada. Mekanisme pelaporan dan pengelolaan gratifikasi harus diperkuat untuk mencegah praktik korupsi. Selain itu, sosialisasi mengenai larangan menerima gratifikasi juga perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan langkah langkah ini, diharapkan pengaruh negatif gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir. Pemerintah Kabupaten Agam juga perlu mewajibkan survei kebutuhan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diadakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing masing divisi atau direktorat. Selain itu, pengembangan sistem aplikasi e-catalog atau e-procurement dapat memfasilitasi input data kebutuhan secara lebih terstruktur. Dengan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat, serta memberikan

						sanksi kepada vendor yang tidak memenuhi kualifikasi, kualitas pengadaan dapat terjaga. Dalam menghadapi pengaruh pihak lain dalam pengambilan keputusan, sosialisasi dan pelatihan mengenai standar prosedur operasional dalam pelaksanaan sanksi atau denda perlu dilakukan. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keputusan yang diambil dapat lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah Kabupaten Agam perlu membuat kebijakan yang melarang penggunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Penerapan sanksi terhadap pelanggar juga harus dilakukan secara adil dan konsisten. Selain itu, pengawasan internal yang ketat perlu diterapkan untuk mendeteksi penyalahgunaan

						anggaran dan fasilitas kantor. Dengan langkah langkah ini, diharapkan integritas pegawai dalam menggunakan fasilitas kantor dapat terjaga dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam hal pengaruh nepotisme dalam promosi dan mutasi pegawai, Pemerintah Kabupaten Agam harus menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Larangan perdagangan pengaruh perlu diterapkan secara tegas, disertai dengan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Penguatan mekanisme pengawasan internal juga penting untuk mendeteksi adanya praktik nepotisme. Dengan meningkatkan integritas calon pimpinan dan melakukan deklarasi konflik kepentingan, diharapkan proses promosi dan mutasi pegawai dapat berlangsung secara adil dan transparan. Terakhir, dalam menghadapi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, sosialisasi mengenai gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap perlu

						dilakukan secara rutin. Penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan komitmen pimpinan dalam penegakan aturan harus diperkuat. Dengan menerapkan sistem manajemen kepatuhan yang sesuai dengan standar internasional, diharapkan seluruh pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
22.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,45	88,50		Mempertahankan kualitas pelayanan publik serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, Mengoptimalkan data hasil SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan
23.	Capaian IKU Makro	4	90,33	90,25		
24.	Capaian IKU Non Makro	6	91,67	61,83		
RB TEMATIK						
25.	Pentasan Kemiskinan (strategi Pembangunan)	1	0,51	51,00	-Rencana aksi yang disusun sudah cukup baik dengan hasil realisasi indikator sasaran yang memenuhi target. Namun demikian keseluruhan rencana aksi yang disusun masih cenderung business as usual tanpa adanya inovasi/ perbaikan dalam menjawab permasalahan utama - Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya	-Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait dan memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata

					kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan	dengan unsur pentahelix lain
26.	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,53	53,00	- Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan	-Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait dan memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
27.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,58	58,00	(1) Sebagian sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. (2) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya menunjukkan adanya percepatan/inovasi untuk menyelesaikan masalah (masih cenderung business as usual). (3) Rencana aksi belum memuat kolaborasi nyata dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan. (4) Rencana aksi yang disusun pada tema "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting" belum memuat	

					unsur digitalisasi.	
29.	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0,63	63,00	1. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan	
30.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2,36	78,67	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2025, sumber data BPS	
31.	Reealisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,00	33,33	Data Realisasi Investasi Menggunakan Data Per Desember 2025	
32.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	1,13	37,67	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	
33.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,85	95,00	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada Kepmen PANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	
34.	Pengendalian Inflasi	3	0	0,00	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian	

					Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	
35.	Percepatan Hilirisasi	0,01				
36.	Ketahanan Pangan	0,01				
37.	Peningkatan KUalitas dan Akses Layanan Kesehatan	0,01				
38.	Peningkatan Akses, Kualitas dan mutu layanan pendidikan	0,01				

A. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah”, dapat terlihat pada capaian 6 indikator utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.180
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Maturitas SPIP	Level	3,16	2,74	86,71
2.	Nilai SAKIP	Nilai	68,61 (B)	67,45 (B)	98,31
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	77,50	69,7 (B)	89,94
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,65	2,96	111,28
5.	Indeks Sistem Merit	Angka	270	278*	102,96
6.	EPPD	Nilai	3.581	3,5771	99,89

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

**: Data tahun 2024*

1) Maruritas SPIP

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target Tahun 2025 sebesar Level 3,16. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi Maturitas SPIP Kabupaten Agam Tahun 2025 mencapai Level 2,74, sehingga Capaian (%) kinerja sebesar 86,71%. Dengan capaian tersebut, implementasi SPIP berada pada kategori Baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Level 2,74 menunjukkan bahwa unsur-unsur SPIP telah diterapkan dan terdokumentasi pada sebagian besar perangkat daerah, namun efektivitas dan konsistensi implementasinya masih perlu diperkuat agar dapat mencapai level yang lebih optimal.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain:

1. Komitmen pimpinan daerah dalam mendorong penguatan tata kelola

- pemerintahan.
2. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang aktif dalam pembinaan dan evaluasi SPIP.
 3. Tersedianya regulasi dan pedoman internal terkait pengendalian dan manajemen risiko.
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain:

1. Belum optimalnya integrasi manajemen risiko dalam seluruh proses bisnis perangkat daerah.
2. Variasi tingkat pemahaman dan kompetensi SDM dalam penerapan pengendalian intern.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pengendalian dan pelaporan.
4. Masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti

Untuk meningkatkan Maturitas SPIP pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Agam akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pendampingan penerapan SPIP.
3. Mengoptimalkan peran APIP dalam fungsi assurance dan consulting.
4. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi pengendalian intern secara lebih efektif.

Dengan strategi tersebut, diharapkan Maturitas SPIP Kabupaten Agam dapat meningkat secara bertahap dan mencapai target yang ditetapkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil dapat terwujud secara berkelanjutan.

2) Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Nilai SAKIP daerah didapatkan berdasarkan hasil evaluasi Tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi SAKIP pada lembaga/instansi yang ada. Berdasarkan Surat Deputi

Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/257/AA.05/2025 tanggal 28 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Nilai SAKIP Kabupaten Agam tahun 2025 adalah 67,45 dengan predikat "B", sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 67,11. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", artinya implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Terdapat sedikit perbedaan penilaian Tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya nilai SAKIP daerah hanya berdasarkan komponen penilaian SAKIP saja, namun Tahun 2025 penilaian SAKIP juga memperhatikan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Adapun rincian komponen penilaian SAKIP Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.181
Nilai SAKIP Kabupaten Agam Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	21,95
B	Pengukuran Kinerja	30	18,74
C	Pelaporan Kinerja	15	10,66
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,10
	Nilai hasil evaluasi	100	67,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa kelemahan yang masih ditemui dalam penerapan SAKIP di Kabupaten Agam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja;
2. Belum terdapat identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak terkait;
3. terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum berorientasi outcome

- atau bersifat kegiatan/ output;
4. terdapat ketidakselarasan indikator kinerja pada dokumen indikator kinerja utama (IKU) dan PK PD;
 5. Aplikasi E sakip Kab. Agam belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja secara optimal;
 6. terdapat dokumen IKU yang belum dilengkapi definisi operasional dan formulasi perhitungan;
 7. hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja;
 8. Laporan kinerja yang disusun sebagian PD tidak selaras dengan PK tahun 2024 yang telah ditetapkan;
 9. sebagian besar laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai;
 10. laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 11. laporan hasil evaluasi belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
 12. sebagian rekomendasi atas hasil evaluasi internal belum ditindaklanjuti oleh PD;
 13. belum terdapat kebijakan terkait reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, beberapa rekomendasi yang disarankan dilakukan adalah :

1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/ cascading kinerja pada seluruh PD dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
2. melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
3. melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART
4. menetapkan Iku pada level PD dilengkapi dengan definisi operasional,

- sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat;
5. memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi dan mengintegrasikan dengan pengukuran kinerja individu yang telah ada;
 6. mendorong PD untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan menerapkan reward dan punishment;
 7. meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja;
 8. melakukan reviu terhadap laporan kinerja PD;
 9. meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluais internal;
 10. meningkatkan kualitas LHE AKIP;
 11. melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP;
 12. membuat kebijakan reward dan punishment.

3) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan di daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat 6 dimensi yang dinilai yaitu : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah serta Opini BPK terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 040-806-2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat tahun Anggaran 2024, Dengan Tahun Ukur 2025, IPKD Kabupaten Agam adalah 69,7048 dengan kategori cukup baik (B). Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.182
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

N o	Dimen si	Bobot (%)	Inde ks (%)	Tingkat Capaian (%)
1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D1)	15	13,1010	87,34
2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D2)	20	8,5420	42,71

3.	Transparansi pengelolaan keuangan (D3)	15	14,0630	93,75
4.	Penyerapan anggaran (D4)	20	20	100
5.	Kondisi keuangan daerah (D5)	20	4	20
6.	Opini BPK (D6)	10	10	100
	TOTAL		69,7048	
	Nilai		B	

Sumber : SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 040-806-2025 Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 dimensi penilaian IPKD yang memiliki nilai rendah yaitu kondisi keuangan daerah serta pengalokasian belanja pada APBD, sedangkan nilai tertinggi adalah dimensi penyerapan anggaran dan Opini BPK terhadap laporan keuangan yang mencapai 100%. Adapun beberapa permasalahan dan kendala yang masih perlu diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.183

Hasil Evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terdapat ketidaksesuaian beberapa pagu program pada RKPD dengan pagu program pada KUA PPAS.	a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. b. Mengawal keselarasan program dan kegiatan serta penganggaran mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran. c. Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
2.	Terdapat ketidaksesuaian beberapa pagu program pada KUA PPAS dengan pagu program pada APBD.	
3.	Tidak tercapainya alokasi <i>mandatory spending</i> dana kesehatan minimal 10%.	a. Menyusun prioritas penganggaran
4.	Tidak tercapainya alokasi <i>mandatory spending</i> dana infrastruktur minimal 20%.	b. Melakukan pengawalan terhadap pemenuhan alokasi belanja SPM dan <i>mandatory spending</i>
5.	Alokasi belanja pemenuhan SPM yang belum sesuai.	
6.	Terdapat 1 dokumen pemerintah daerah yang tidak publish tepat waktu.	Memastikan publish dokumen pemerintah daerah tepat waktu
7.	Rendahnya indeks kemandirian keuangan daerah	- Melakukan kajian terkait potensi pajak dan retribusi serta melakukan updating

		potensi pajak dan retribusi. - Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam pemungutan pajak dan retribusi. - Penguatan regulasi, kapasitas SDM dan kelembagaan pemungut pajak dan retribusi
8.	Rendahnya indeks fkesibilitas keuangan	
9.	Rendahnya indeks solvabilitas operasional	
10.	Rendahnya indeks solvabilitas jangka pendek	

Sumber : Hasil Evaluasi IPKD kabupaten Agam, 2025

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Agam terus mendorong peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada Tahun 2025, target Indeks SPBE yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar 2,65.

Realisasi yang dicapai pada akhir Tahun 2025 adalah sebesar 2,96, sehingga Capaian (%) kinerja mencapai 111,28%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Agam telah melampaui target yang ditetapkan.

Peningkatan nilai Indeks SPBE ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek tata kelola, manajemen layanan, manajemen data dan informasi, serta penguatan integrasi sistem elektronik antar perangkat daerah. Selain itu, komitmen pimpinan daerah, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi berbasis digital turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian tersebut.

Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Agam berjalan dengan baik dan semakin mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus melakukan penguatan arsitektur SPBE, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi layanan berbasis elektronik guna mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks SPBE secara

berkelanjutan.

5) Indeks Sistem Merit

Pada indikator kinerja Indeks Sistem Merit, target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 270. Namun sampai dengan penyusunan LKjIP ini, data realisasi Indeks Sistem Merit belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB, karena itu untuk sementara masih digunakan capaian Tahun 2024 yaitu 278, dengan capaian sebesar 102,96%.

6) Nilai EPPD

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah baik secara keseluruhan (makro) maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nilai EPPD ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan setiap tahunnya. Untuk penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2025 belum dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 yang disampaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2023, nilai EPPD Kabupaten Agam adalah 3,5771 (tinggi).

Capaian ini sedikit lebih rendah jika dibanding target yang ditetapkan sebesar 3,581 (tinggi) dengan Capaian (%) sebesar 99,89%. Jika dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten lain di Indonesia, capaian Nilai EPPD Kabupaten Agam cukup membanggakan karena berada pada peringkat 21 nasional. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan upaya yang keras dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kondisi ini dapat dicapai karena adanya peningkatan kinerja OPD serta keseriusan OPD dalam melengkapi data dukung.

Di samping itu, capaian tahun 2025 juga didukung oleh capaian kinerja indikator makro yang sudah berada pada kategori baik. Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui

melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai PDRB sektor tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel. 2.184
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Maturitas SPIP	3,152	3,16	2,74	86,71
2.	Nilai SAKIP	67,11	68,61 (B)	67,45 (B)	98,31
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,03	77,50	69,7 (B)	89,94
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2,65	2,96	111,28
5.	Indeks Sistem Merit	278,00	270	278	102,96
6.	EPPD	3,5000	3,581	3,5771	99,89

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas tentang *Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025*, secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Agam pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pada indikator Maturitas SPIP, target tahun 2025 sebesar 3,16 dengan realisasi 2,74 atau Capaian (%) 86,71%. Jika dibandingkan dengan baseline tahun 2024 sebesar 3,152, capaian tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masih memerlukan optimalisasi, khususnya dalam aspek manajemen risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.

Indikator Nilai SAKIP menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target 68,61 (kategori B), terealisasi sebesar 67,45 (kategori B) dengan Capaian (%) 98,31%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan baseline tahun 2024 sebesar 75. Hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang semakin selaras dengan prinsip akuntabilitas berbasis hasil.

Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, target tahun 2025 sebesar 77,50 dengan realisasi 69,7 (kategori B) dan Capaian (%) 89,94%. Dibandingkan baseline tahun 2024 sebesar 74,03, capaian ini menunjukkan adanya penurunan nilai indeks. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan. Dari target 2,65, terealisasi sebesar 2,96 dengan Capaian (%) 111,28%. Capaian ini tidak hanya melampaui target, tetapi juga meningkat dibandingkan baseline tahun 2024 sebesar 2,58. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan, integrasi layanan, serta peningkatan tata kelola berbasis teknologi informasi.

Untuk indikator Indeks Sistem Merit, dengan baseline tahun 2024 sebesar 278,00 dan target tahun 2025 sebesar 270,00, capaian realisasi tahun 2025 perlu terus dimonitor dan ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip manajemen ASN berbasis merit. Penguatan sistem rekrutmen, promosi, mutasi, serta pengembangan kompetensi ASN menjadi faktor kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Adapun indikator Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) menunjukkan capaian yang baik, dengan target 3,581 dan realisasi

3,5771 atau Capaian (%) 99,89%. Jika dibandingkan baseline tahun 2024 sebesar 3,5000, terjadi peningkatan nilai yang menunjukkan perbaikan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sisi tata kelola, pelayanan publik, maupun capaian pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian indikator sasaran “Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah” pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik, dengan sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target. Namun demikian, masih diperlukan langkah-langkah strategis dan perbaikan berkelanjutan terutama pada aspek SPIP dan pengelolaan keuangan daerah guna memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Agam.

Tabel 2.185
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2029	Tingkat Capaian
		2024	2025		
1.	Maturitas SPIP	3,15	2,74	3,19	85,89
2.	Nilai SAKIP	67,11	67,45 (B)	74,61 (B)	90,41
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,03	69,7 (B)	81,60	85,42
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2,96	3,06	96,73
5.	Indeks Sistem Merit	278	278	290	95,86
6.	EPPD	3,5771	3,5771	3,596	99,47

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas tentang Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan capaian yang cukup baik dan berada pada tren positif.

Maturitas SPIP jika disandingkan dengan target akhir memperoleh capaian

sebesar 85,89. Indikator Nilai SAKIP pada tahun 2025 terealisasi sebesar 67,45 (kategori B) dari target akhir 74,61 (B), dengan Capaian (%) sebesar 90,41%. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 69,7 (kategori B) dibandingkan target 81,60, dengan Capaian (%) 85,42%. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan, meskipun masih diperlukan optimalisasi untuk mencapai target RPJMD.

Sementara itu, nilai EPPD tahun 2025 menggunakan data tahun 2024 dengan capaian sebesar 3,5771, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,581. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, maka capaian tahun ini telah mencapai sebesar 99,47%. Kondisi ini sangat baik mengingat Tahun 2025 merupakan tahun pertama untuk mencapai target lima tahunan.

Adapun indikator lainnya seperti Maturitas SPIP dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih memerlukan penguatan dan konsistensi perbaikan agar selaras dengan target akhir RPJMD.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah menunjukkan progres yang baik, dengan beberapa indikator telah melampaui target, serta menjadi dasar untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.186
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Menigkatnya
tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Nilai Sakip				
1.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	31.605.000	21.597.800	68,34
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	302.771.300	209.558.900	69,21
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	911.345.200	799.775.211	87,76
4.	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	242.237.000	90.076.610	37,19

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Jumlah	1,487,958,500	1,121,008,521	75.34
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				
5.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	213.789.735.393	199.161.477.944	93,16
6.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	899.735.100	669.090.098	74,37
7.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.047.285.430	3.604.085.206	89,05
8.	Program Perekonomian dan Pembangunan	99.886.000	96.889.300	97,00
	Jumlah	218,836,641,923	203,531,542,548	93,01
Indeks Sistem Merit				
9.	Program Kepegawaian Daerah	1.324.739.700	1.019.439.265	76,95
	Jumlah	1.324.739.700	1.019.439.265	76,95
Maturitas SPIP				
10.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.603.834.900	1.050.862.619	65,52
	Jumlah	1.603.834.900	1.050.862.619	65,52
EPPD				
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.501.217.702	28.417.832.138	93,17
11.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.667.854.762	9.749.370.374	66,47
12.	Program Pengelolaan Arsip	39.083.700	33.679.850	86,17
	Jumlah	45,208,156,164	38,200,882,362	84,49
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
13.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.620.641.326,00	515.628.854	31,82
14.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.054.982.828,00	1.210.990.293	58,93

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
15.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	6.551.000,00	6.410.000	97,85
16.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	65.721.400	61.411.370	93,44
	Jumlah	3,747,896,554	1,794,440,517	47,88
	Jumlah	272.209.227.741	246.718.175.832	90,64

Secara umum, realisasi anggaran untuk sasaran meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah sebesar 90,64%. Namun sebagian besar program juga dengan realisasi anggaran sedang sampai rendah. Untuk program - program dengan realisasi anggaran sedang sampai rendah, agar dapat dievaluasi dan diperbaiki baik pada tahap perencanaan maupun penganggaran. Realisasi Anggaran terendah yakni pada Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi sebesar 37,19%. Untuk indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh capaian realisasi program pengelolaan BMD sebesar 74,37%. untuk Indeks SPBE peroleh capaian anggaran terendah yakni pada program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 31,82%.

Tabel berikut dapat menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah :

Tabel 2.187
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah Tahun 2025

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Maturitas SPIP	3,16	2,74	86,71	1.603.834.900	1.050.862.619	65,52	1,32
Nilai SAKIP	68,61 (B)	67,45 (B)	98,31	1,487,958,500	1,121,008,521	75.34	1,31
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77,50	69,7 (B)	89,94	218,836,641,923	203,531,542,548	93,01	0,97
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,65	2,96	111,28	3,747,896,554	1,794,440,517	47,88	2,32

Indeks Sistem Merit	270	278	102,96	1.324.739.700	1.019.439.265	76,95	1,34
EPPD	3,581	3,5771	99,89	45,208,156,16 4	38,200,882,362	84,49	1,18

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara Capaian (%) kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Maturitas SPIP, Nilai SAKIP, dan IPKD mendukung efisien dalam mendukung tercapainya indikator. Sedangkan untuk indikator Indeks SPBE terdapat gap, dimana perbedaan capaian antara capaian kinerja dengan capaian anggaran sangat jauh yakni sebesar 63,4. hal ini menandakan bahwa untuk indikator SPBE perlu di kaji kembali program yang mendukung terhadap capaian indikator dan dapat mengindikasikan bahwa rencana penganggaran yang disusun sebelumnya kurang selaras atau belum terukur secara presisi terhadap potensi capaian kinerja sasaran yang sebenarnya dapat diraih. Untuk indikator sistem merit dan EPPD belum bisa dilakukannya perbandingan karena data belum dirilis.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran.

Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.188
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Nilai Sakip		98,31		

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD	100	0,98	Efektif
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Program Bidang Sosial SDM Pemerintahan	100	0,98	Efektif
3	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan manajemen risiko	100	0,98	Efektif
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	0,98	Efektif
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			89,94		
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Program Bidang Sosial SDM Pemerintahan	100	0,89	Cukup Efektif
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai aset Tetap	100	0,89	Cukup Efektif
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Bid. Pengendalian Evaluasi)	98,10	0,91	Efektif
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan yang terlaksana (AP)	100	0,89	Cukup Efektif
Indeks Sistem Merit			102,96		

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
1	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-
Maturitas SPIP			86,71		
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	0,86	Cukup Efektif
EPPD			99,89		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dibidang Administrasi pemerintahan, Administrasi kewilayahan dan Otonomi, serta kerjasama daerah yang terlaksana (Bagian Tapem)	100	1	Efektif
2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip dinamis yang dikelola	82,67	1,21	Cukup Efektif
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	1	Efektif
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			111,28		
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah	100	1,11	Cukup Efektif
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terhubung akses internet yang disediakan	100	1,11	Cukup Efektif
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang terhubung akses internet yang disediakan	113,33	1,08	Efektif
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	100	0,98	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sebagian program efektif mendukung capaian kinerja sasaran, dan beberapa terlihat cukup efektif. Indikator nilai SAKIP menerangkan bahwa capaian kinerja program mendukung terhadap capaian indikator. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efektifitas yang efektif untuk setiap programnya. Indikator IPKD hanya program pengelolaan pendapatan yang memiliki nilai efektif dalam mendukung indikator, sedangkan 3 program lainnya cukup efektif. Indeks Sistem Merit memperoleh capaian kinerja program 0%, disebabkan karena pada tahun 2025 program kepegawaian daerah dengan indikator IP ASN tidak dilakukannya penilaian. Untuk selanjutnya indikator program perlu dievaluasi dan disesuaikan. EPPD memiliki 3 program dengan 2 capaian yang efektif dan 1 program lainnya cukup efektif dalam mendukung indikator. Sedangkan indeks SPBE didukung oleh 4 program, dimana 2 program mendukung dalam mencapai indikator kinerja dengan nilai efektif dan 2 program lainnya mendapatkan nilai cukup efektif.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.189
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 202 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,50	3,78	108

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintah yang efektif dan transparan

memerlukan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan layanan, ketersediaan fasilitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Berdasarkan Tabel diatas tentang Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan hasil yang Baik (B).

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran tersebut adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan satuan angka. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,50, dan realisasi yang dicapai adalah 3,78, dengan Capaian (%) sebesar 108%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kabupaten Agam tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya.

Pencapaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari aspek standar pelayanan, kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, sistem pelayanan berbasis teknologi, maupun pengelolaan pengaduan masyarakat. Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam melakukan inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan.

Dengan capaian sebesar 108%, Pemerintah Kabupaten Agam telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.190
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas

pelayanan publik Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pelayanan Publik	3,25	3,25	100	3,50	3,78	108

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik merupakan instrumen krusial yang merepresentasikan tingkat kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.54 mengenai perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran, terlihat sebuah tren positif yang sangat signifikan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, target Indeks Pelayanan Publik ditetapkan pada angka 3,25 dan berhasil direalisasikan secara presisi sebesar 3,25, yang berarti instansi telah memenuhi ekspektasi dengan Capaian (%) kinerja tepat 100%.

Memasuki tahun 2025, meskipun target yang ditetapkan ditingkatkan menjadi 3,50, realisasi yang dicapai justru melampaui harapan dengan menyentuh angka 3,78. Pencapaian ini menghasilkan Capaian (%) kinerja yang melonjak hingga 108%, yang mengindikasikan bahwa inovasi dan perbaikan sistem pelayanan publik telah berjalan secara optimal serta mampu memberikan dampak nyata dalam mempermudah serta mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di lapangan. Secara keseluruhan, perbandingan ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga konsistensi performa sekaligus menunjukkan adanya perbaikan layanan yang progresif dan berkelanjutan, sebagaimana terdokumentasi dalam hasil pengolahan data LKjIP Tahun 2025.

Tabel 2.191
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Target Akhir RPJM Tahun 2025- 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2029	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Indeks Pelayanan Publik	3,25	3,78	4,35	86,90

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Capaian (%) kinerja indikator Indeks

Pelayanan Publik Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029 telah memenuhi target sebesar 86,90. Agar target di tahun 2029 terpenuhi perlu dilakukan penyusunan strategi dan kebijakan sehingga target tersebut dapat dicapai dalam waktu yang masih tersisa 4 tahun.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2025 :

Tabel 2.192
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Pencatatan Sipil	1.031.935.700	935.557.905	90,66
2.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126.351.500	122.322.500	96,81
3.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.151.185.900	20.232.661.961	87,39
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87.817.600.140	80.739.999.659	91,94
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	64.658.500	44.433.875	68,72
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.047.688	88.063.000	89,82
7.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	465.066.250	283.101.850	60,87
8.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	57.524.000	47.205.700	82,06
	Total	112.812.369.678	102.493.346.450	90,85

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 8 program yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2025 dengan total anggaran Rp. 112.812.369.678, realisasi Rp. 102.493.346.450

dengan Capaian (%) realisasi 90,35%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.193
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,78	108	112.812.369.678	102.493.346.450	90,85	1,10

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara Capaian (%) indikator kinerja sasaran dengan Capaian (%) realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik adalah sebesar 1,10. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan sangat efisien mendukung pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2025. Namun ada 1 program yang realisasi anggarannya rendah yaitu Program Pemerintahan dan Pelayanan publik (60,87%). Ke depannya diperlukan perbaikan perencanaan penganggaran sehingga anggaran yang disusun betul betul mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.194
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas

Indeks Pelayanan Publik			108		
1.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	1,08	Efektif
2.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100	1,08	Efektif
3.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fungsi Anggaran dan Pengawasan yang difasilitasi	100	1,08	Efektif
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	99	1,09	Efektif
5.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	1,08	Efektif
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	100	1,08	Efektif
7.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	96	1,12	Cukup Efektif
8.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	1,08	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.58 di atas, dapat dilihat bahwa IKU Indeks Pelayanan Publik didukung oleh 8 (delapan) program dengan capaian kinerja program yang terkategori sangat tinggi (seluruhnya di atas 90%). Mayoritas program, yakni sebanyak 6 program, berhasil mencatatkan capaian kinerja sempurna sebesar 100%. Walaupun semua program berkinerja sangat tinggi, namun yang menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini cukup unik karena meskipun capaian kinerja programnya secara fisik merupakan yang terendah (96%),

Jika dilakukan persandingan antara realisasi fisik dan tingkat efektivitasnya, terlihat adanya pola yang perlu dicermati dalam perencanaan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mampu memberikan dampak efektivitas yang lebih besar terhadap IKU Indeks Pelayanan Publik meskipun target fisiknya belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menggambarkan bahwa indikator aktivitas dalam program tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat dan strategis terhadap kualitas pelayanan publik di

Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya, perlu dilakukan penyelarasan antara penetapan target kinerja program dengan bobot pengaruhnya terhadap sasaran strategis, sehingga program-program yang memiliki daya ungkit (leverage) tinggi dapat diprioritaskan dukungannya untuk memastikan anggaran yang dibelanjakan betul-betul efisien dan memberikan dampak maksimal terhadap capaian kinerja sasaran.

2.3.3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran pada Misi III (Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, Berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing)

Misi III pada RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki tujuan “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.195
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi III Tahun 2025 Perubahan
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,75	76,04	100,38

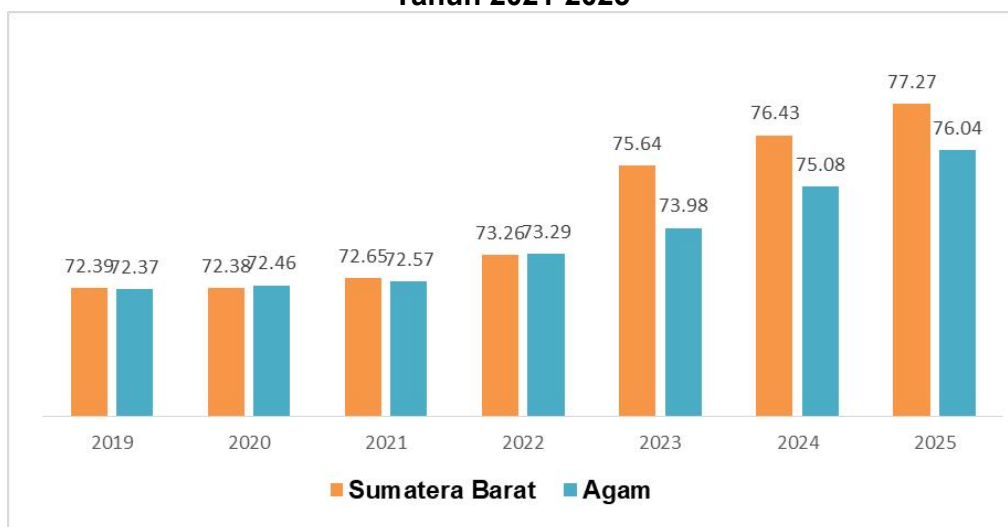
Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Agam Tahun 2025 ditargetkan IPM sebesar 75,75 capaian 76,04 dengan tingkat capaian 100,38%. Nilai IPM tahun ini berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 77,27. Namun jika dibandingkan dengan nasional, capaian IPM Kabupaten Agam sedikit di atas nasional yang mencapai 75,90.

IPM Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021, IPM Kabupaten Agam mencapai 72,57 hingga tahun 2025 mencapai 76,04. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah

daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang 70 – 80. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.4
Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Tahun 2025

Pencapaian tujuan pada Misi III didukung melalui 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

A. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter”, terdiri atas 2 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.196
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,75	9,57	98,15
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	14,4	14,26	99,03

Rata-rata lama sekolah atau *years of schooling* digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal pada usia 25 tahun ke atas. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Agam pada kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahun, namun demikian masih dibawah rata rata lama sekolah propinsi. Pada tahun 2025 rata-rata lama sekolah kabupaten Agam mencapai 9,57. Walaupun tidak memenuhi target yang ditetapkan namun masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 98,15%. Capaian Kabupaten Agam tahun ini lebih rendah dari rata – rata lama sekolah di Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 10,03, namun lebih tinggi dari capaian nasional dengan angka 9,07.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar 14,26 tahun, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 14,4 dengan tingkat capaian 99,03%. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan diikuti oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,26 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma II. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 14,31. Untuk Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat, harapan lama sekolah yang paling tinggi adalah Kota Padang (16,58) yang terendah adalah Kabupaten Sijunjung (12,99). Adapun Faktor faktor yang mempengaruhi harapan lama sekolah meliputi berbagai sektor, baik kondisi ekonomi masyarakat, akses dan kualitas layanan pendidikan, maupun dukungan kesehatan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu upaya peningkatan harapan lama sekolah seiring sejalan dengan upaya peningkatan perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu :

Tabel 2.197

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rata-rata lama sekolah	9,43	9,23	97,88	9,75	9,57	98,15
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,76	14,16	95,93	14,4	14,26	99,03

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Rata – rata lama sekolah juga mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun lalu sebesar 0,34 poin. Capaiannya juga mengalami peningkatan sebesar 0,27. Peningkatan kinerja di atas menunjukkan adanya perbaikan terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi, yaitu :

- Pemerataan akses pendidikan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas
- Pemerataan mutu pendidikan melalui pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- Peningkatan ekonomi masyarakat.

Data di atas menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 0,10 poin. Jika dibandingkan dengan target, tingkat capaian juga mengalami peningkatan sebesar 3,17 poin dibanding tahun 2024.

Beberapa kendala yang ditemui dalam dalam pemenuhan target harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah , antara lain :

Tabel 2.198
Kendala dan Permasalahan dalam Pemenuhan Harapan lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah Tahun 2025

No	Kendala / Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Sebagian kecil wilayah di Kabupaten Agam masih ada yang kesulitan dalam mengakses sarana pendidikan karena lokasi tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi sekolah, seperti pada beberapa wilayah di Kecamatan Malalak, Kecamatan Palupuh dan	• Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan. • Mendorong partisipasi masyarakat / swasta dalam meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas pendidikan.

	Kecamatan Palembayan.	
2.	Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga masih ada beberapa anak yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.	Melalui APBD Kabupaten Agam setiap tahunnya, menyediakan beasiswa dan bantuan biaya hidup untuk anak-anak dari keluarga kurang sejahtera yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3.	Pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas	Melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Melalui bimbingan teknis, workshop dan rapat koordinasi lainnya.

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.199
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2029	Tingkat Capaian
		2024	2025		
1.	Rata-rata lama sekolah	9,23	9,57	10,27	93,18
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,26	14,72	96,88

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2025 telah memenuhi 96,88% target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. Selisih realisasi tahun 2025 dengan target tahun 2029 adalah 0,46. Sedangkan untuk indikator kinerja rata-rata lama sekolah terlihat pemenuhan target akhir periode RPJMD sebesar 99,18%. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan urusan pendidikan, perlu menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter pada tahun 2025 :

Tabel 2.200
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	84.696.542.203	80.403.795.233	94,93
2.	Program Pengembangan Kurikulum	206.980.000	121.212.600	58,56
3.	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	6.550.000	6.350.000	96,95
4.	Program Pembinaan Perpustakaan	116.526.100	106.634.250	91,51
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	563.111.240.364	559.198.755.228	99,34
Total		648.137.838.667	639.836.747.311	98,72

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 (lima) program yang mendukung capaian kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, dengan total anggaran sebesar Rp648.137.838.666,00 dan realisasi sebesar Rp639.836.747.311,00, sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 98,72%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.201
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	

Rata-rata lama sekolah	9,75	9,57	98,15				0,99
Angka Harapan Lama Sekolah	14,4	14,26	99,03	648.137.838.66	639.836.747.311	98,72%	1,01

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah adalah 1,01. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Hal ini juga terlihat dari besarnya nilai tingkat capaian kinerja sasaran dibandingkan capaian realisasi anggaran. Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, anggaran yang tersedia efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran dengan nilai efisien 0,99. Terlihat dari data pada tabel di atas capaian indikator kinerja sasaran lebih besar dari capaian realisasi anggaran

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.202
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Angka Harapan Lama Sekolah			99,03		
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	96,99%	1,02	Efektif

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase tahapan penyusunan silabus Muatan lokal	100%	0.99	Efektif
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	100%	0.99	Efektif
Rata-rata lama sekolah			98,15		
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	96,99%	1,01	efektif
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase tahapan penyusunan silabus Muatan lokal	100%	0.98	efektif
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	100%	0.98	efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Angka Harapan lama sekolah didukung oleh 3 program. Dari 3 program dimaksud efektif mendukung capaian kinerja sasaran dimana nilai efektifitasnya berada rentang 0,99 – 1,02. Sama halnya dengan Indikator Kinerja Utama Rata – rata lama sekolah, dari 3 program efektif mendukung capaian kinerja indikator sasaran.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis kedua pada Tujuan 1, Misi IV adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kinerja sasaran tersebut tergambar pada capaian indikator Angka Harapan Hidup. Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja indikator angka harapan hidup sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2025 :

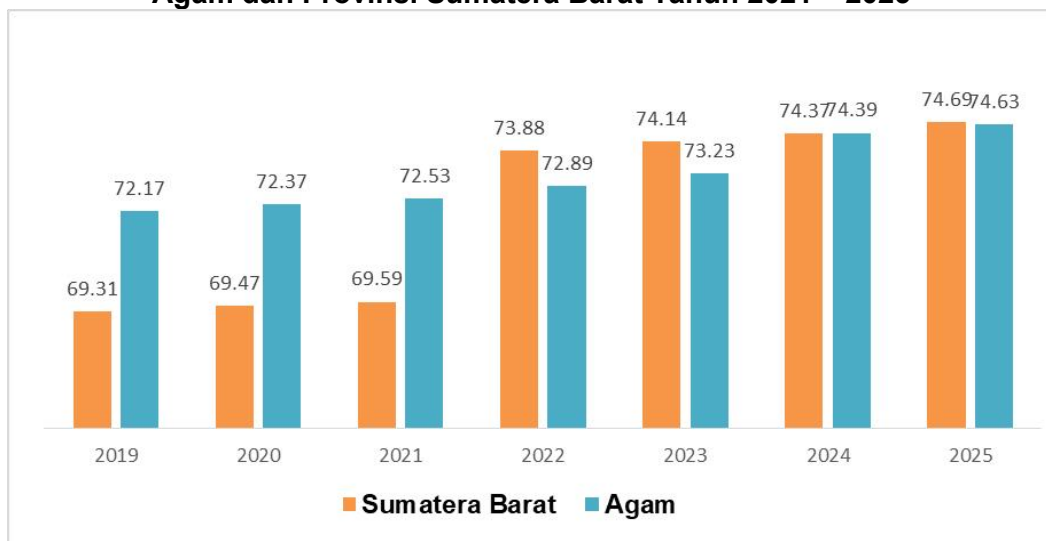
Tabel 2.203
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup	Angka	74,51	74,63	100,16

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar 74,63, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,51, dengan tingkat capaian 100,16% (kategori sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Agam secara umum dapat dikatakan baik. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, angka harapan hidup Kabupaten Agam sedikit lebih rendah, dimana AHH Provinsi Sumatera Barat adalah 74,69. Namun jika dibandingkan dengan AHH Nasional sebesar 74,47, nilai AHH Kabupaten Agam sedikit lebih baik.

Grafik 2.5
Perbandingan Angka Harapan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025



Sumber : Agam Dalam Angka, Tahun 2025

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang

telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.204
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup	74,52	74,39	99,83	74,51	74,63	100,16

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Berdasarkan data di atas, terlihat adanya peningkatan kinerja yang cukup baik sebesar 0,24 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja di bidang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain meningkatnya perekonomian masyarakat, ketersediaan pangan dan gizi yang cukup, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan data Agam Dalam Angka Tahun 2025, selama lima tahun terakhir terlihat adanya peningkatan angka harapan hidup setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan target di masing-masing tahun, maka terlihat adanya penurunan capaian kinerja sebesar 0,6, dimana tingkat capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,43 sedangkan tahun 2024 hanya 99,83.

Untuk mengetahui kemajuan capaian target pada akhir RPJMD periode 2025 – 2029, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.205
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian (%)
		2024	2025		
1.	Angka Harapan Hidup	73,39	74,63	73,47	101,58

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator

Angka Harapan Hidup tahun 2025 telah memenuhi target kinerja tahun akhir RPJMD 2025 – 2029 dengan tingkat capaian 101,58%. Dengan begitu Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan agar konsisten untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sehingga angka harapan hidup Kabupaten Agam dapat lebih baik.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2025 :

Tabel 2.206
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54,993,784,823	53,210,767,681	97%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	964,544,950	380,738,890	39%
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	634,728,000	569,410,185	90%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200,000,000	200,000,000	100%
5.	Program Pengembangan Perumahan	339,943,700.00	283,088,097.00	83,27%
6.	Program Kawasan Permukiman	317,713,000.00	313,298,500.00	98,61%
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7,313,008,488	7,131,225,930.00	98%
8.	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1,394,620,000.00	1,393,936,850.00	99,95%
Total		66,158,342,961	63,482,466,133	95,96%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terdapat 8 program yang mendukung capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup dengan total anggaran Rp. 66.158.342.961 dengan realisasi anggaran Rp.63.482.466.133 dengan rata-rata tingkat capaian

realisasi sebesar 95,96%. Dari 8 program yang ada terdapat 1 program yang memiliki realisasi anggaran yang rendah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (39%), sedangkan program lainnya dengan realisasi anggaran tinggi dan sangat tinggi (di atas 82%).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut :

Tabel 2.207
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Hidup	74,51	74,63	100,16 %	66.158.342.961	63.482.466,33	95,96%	1,04

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian Indikator kinerja Angka Harapan Hidup sedikit lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Nilai efisiensi anggaran pada indikator tersebut sebesar 1,04, walau sedikit melebihi angka 1 tetapi masih dapat dikatakan cukup efisien mendukung capaian kinerja sasaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.208
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Angka Harapan Hidup		100,16%		

1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah puskesmas dengan grade utama	100%	1,01	Efektif
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	100%	1,01	Efektif
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar Kesehatan dan Perizinan	100%	1,01	Efektif
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan yang diterbitkan	100%	1,01	Efektif
5.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	94%	1,07	Efektif
6.	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	32,93%	3,04	Kurang Efektif
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah Tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	98%	1,02	Efektif
8.	Program perumahan dan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/kota yang ditangani (%)	1322%	0,08	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup didukung oleh 8 Program, dengan rata – rata capaian program sangat tinggi. Dari 8 program dimaksud, 2 di antaranya yaitu Program Program Kawasan Permukiman dan Program perumahan dan permukiman kumuh dinilai kurang efektif. Sedangkan 6 program lainnya terlihat efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran. Untuk program yang kurang efektif diperlukan

penyempurnaan perencanaan baik dari penetapan indikator, target maupun kegiatan yang dilaksanakan.

C. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia”, terdiri atas 2 (satu) indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.209
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya daya saing
Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,33	0,35	93,94
2.	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Nilai	39,49	53,92	136,54

Sumber : Hasil Evaluasi RKPDP Tahun 2025
**Data Belum dirilis BPS*

Indikator Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 masih menunggu rilis BPS karena itu untuk laporan ini digunakan data capaian tahun 2024 (baseline) yang mencapai 0,35 dengan capaian 93,94%. Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga mencapai 53,92 dari target 39,49 dengan capaian 136,54 % pada tahun 2025. Kedua indikator ini merupakan indikator baru pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, sebelum tidak termuat pada indikator kinerja dokumen perencanaan tahun sebelumnya. Atas capaian diperoleh menunjukkan bahwa Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga pada Kabupaten Agam telah melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya adanya peningkatan akumulatif terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Untuk melihat kemajuan capaian sasaran Meningkatnya daya saing sumber daya manusia tahun ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian indikatornya dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut disajikan data perbandingan capaian indikator sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.210
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya daya saing Sumber
Daya Manusia Tahun 2025 Dengan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Ketimpangan Gender	0.35	0,33	0,35	93,94
2.	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	n.a	39,49	53,92	136,54

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya (baseline 2024). Sedangkan indikator indeks daya saing pemuda olahraga tidak dapat disandingkan karena tidak ada base line 2024.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.211
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya daya saing
Sumber Daya Manusia dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Capaian
1	Indeks Ketimpangan Gender	0.35	0,35	0,23	47,82%
2.	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	n.a	39,49	46,88	84,24%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender baru memenuhi 47,82% target kinerja di akhir periode RPJMD Tahun 2025 - 2029. Agar target kinerja pada tahun 2029 dapat tercapai, perlu dilakukan penyusunan strategi dan kebijakan yang terstruktur mengingat capaian tahun 2025 masih belum mencapai 50%. Kondisi lebih baik pada capaian Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga yang telah mencapai 84,24% target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. Dengan waktu yang masih ada 4 tahun lagi, diharakan target kinerja dapat

dicapai dengan baik.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Pengetahuan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama pada tahun 2025 :

Tabel 2.212
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Indeks Ketimpangan Gender				
1.	Progran Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	358.528.000	293.988.980	82,00
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	150.000.000	147.448.522	98,30
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	14.324.000	13.809.900	96,41
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	14.324.000	13.809.900	96,41
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	351.341.199	350.685.325	99,81
6.	Program pemenuhan hak anak	130.484.000	128.441.000	98,43
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.641.304.673	4.322.783.286	93,13
8.	Program Pengendalian Penduduk	297.435.000	269.377.110	90,57
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.605.260.088	4.492.159.776	68,01
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.583.991.685	2.556.541.230	98,94
Jumlah		15,146,992,645	12,589,045,029	88,73
Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga				
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.950.721.496	4.494.349.420	90,78
12.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	486.590.000	465.947.700	95,76
13.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.571.025.648	2.130.166.623	82,85

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Indeks Ketimpangan Gender				
14.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	148.854.180	99,24
Jumlah		8.158.337.144	7.239.317.923	83,11
Total		23.305.329.789	19.828.362.952	85,08

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terdapat 10 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Ketimpangan gender dan 4 program untuk mendukung kinerja Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga, dengan total anggaran Rp. **23.305.329.789,-** dengan realisasi anggaran Rp. **19.828.362.952,-** dengan rata-rata tingkat capaian realisasi sebesar 85,08%. Dari 14 program yang ada terdapat 1 program yang memiliki realisasi anggaran yang rendah yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (68,01%), sedangkan program lainnya dengan realisasi anggaran tinggi dan sangat tinggi (di atas 82%).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut :

Tabel 2.213
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33	0,35	93,94	15,146,992,645	12,589,045,029	88,73	1,06
Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	39,49	53,92	136,54	8.158.337.144	7.239.317.923	83,11	1,64

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dapat dikatakan efisien karena capaian indikator kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya yang menunjukkan nilai sebesar 1,06 dan 1,64. Khusus untuk program yang mendukung Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga, perlu perbaikan pada perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran yang disusun lebih efisien.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran.

Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.214
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Berkurangnya Resiko Bencana Terhadap Manusia

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			93,94		
1.	Progran Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	99,18	0,95	efektif
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga	*	-	-
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan. evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	100	0,94	efektif
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	0,94	efektif

5.	Program pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	*	-	-
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	0,94	efektif
7.	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	69,98	1,34	Cukup Efektif
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modren Contraceptif (mCPR)	95,68	0,98	Efektif
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	68,7	1,37	Cukup Efektif
Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga			87,50		
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	0,88	Cukup Efektif
11.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan wirausaha muda	88,33	1,15	Efektif
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan	100	0,88	Cukup Efektif
13.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	100	0,88	Cukup Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKJIP Tahun 2025

Indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) didukung oleh 9 program. 5 program di antaranya efektif dalam mendukung capaian indikator, sedangkan 2 program lainnya cukup efektif dalam mendukung indikator. Ada 2 program yang belum keluar hasil capaiannya sehingga belum bisa disandingkan dengan indikator. Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga didukung oleh 4 program. Hanya 1 Program yang dapat dikatakan efektif mendukung capaian kinerja sasaran, dengan perolehan nilai efektifitas yaitu 0,81 yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Sementara 3 program lainnya memiliki tingkat efektifitas yang cukup efektif.

2.3.3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi IV (Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan)

Terdapat 3 tujuan yang akan dicapai pada misi “membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter” yaitu :

- Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
- Terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing
- Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial

Adapun setiap tujuan didukung oleh beberapa sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.3.8.1 Tujuan 1 Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan

Tabel berikut menggambarkan tentang tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Tabel. 2.215
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2025
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4,41	2,99	67,77
2.	IDSD	Nilai	3,64	3,70	101,79

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2025

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur berdasarkan lapangan usaha atau sektor produksi serta berdasarkan Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2025 mencapai 2,99%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,41%, tingkat realisasi tahun ini mencapai 67,77 % dengan kategori tingkat capaian rendah. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 4,12, capaian tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,29%. Hal ini disebabkan karena sektor- sektor lapangan usaha utama seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan dan konstruksi mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan bencana

alam yang mengakibatkan beberapa akses menjadi sulit dijangkau.

IDSD adalah kepanjangan dari Indeks Daya Saing Daerah. Ini merupakan instrumen pengukuran produktivitas dan daya saing yang dikembangkan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, yang terdiri dari empat komponen utama (lingkungan, SDM, pasar, dan inovasi). ISDS menjadi rujukan bersama dalam memperkuat fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. 12 Pilar Pengukuran IDSD terdiri dari institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Dengan tujuan mengukur komprehensif tingkat produktivitas daerah untuk mendorong inovasi dan daya saing. Capaian IDSD tahun 2025 sebesar 3,70 dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,64 dengan capaian 101,79%.

Pencapaian tujuan pada Misi IV didukung melalui 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

2.3.3.8.1.1 Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkarakter

Kinerja sasaran strategis “meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter” dapat terlihat pada capaian 2 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.216
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/Angka	82,61	88,51	107,14
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	10,44	10,57	101,16

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

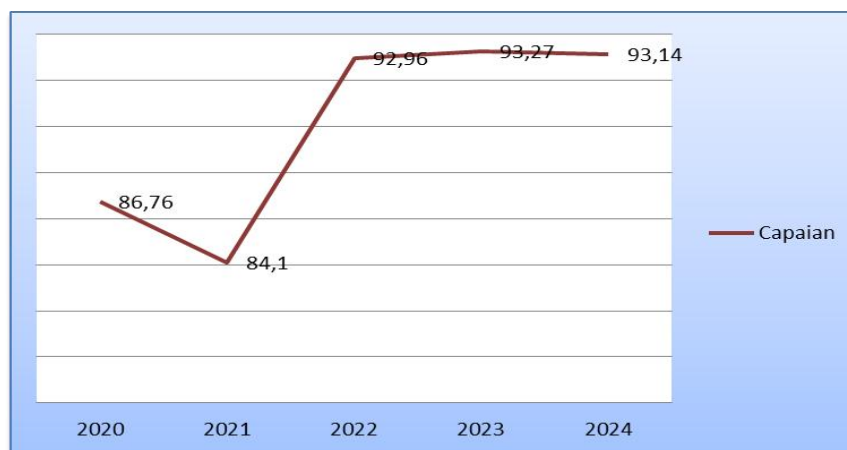
*Ket : *Data belum dirilis BPS*

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan

waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan. Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor pertanian juga bersifat fluktuatif yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Di sisi lain, fluktuasi produktivitas tenaga kerja mengindikasikan bahwa efisiensi atau output per tenaga kerja tidak stabil, yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan teknologi, kebijakan, atau dinamika pasar. Tahun 2025, Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Agam sebesar 88,51. Angka ini lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 82,61, sehingga capaiannya sebesar 107,14%. Sama halnya dengan indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, realisasi tahun 2025 mencapai 10,57 sedikit lebih tinggi dibanding target sebesar 10,44.

Tabel 2.217

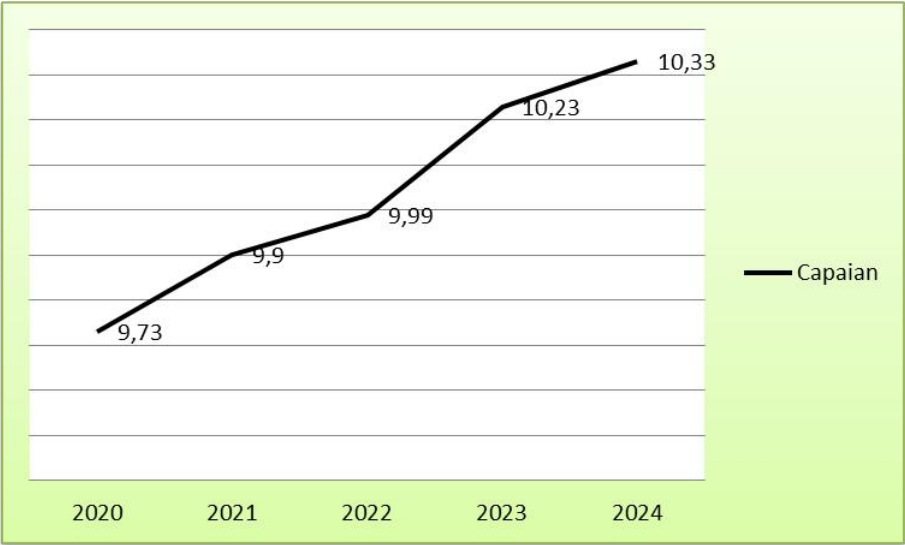
Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024



Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk

Domestik Regional Bruto per daerah. Dalam lima tahun terakhir rasio industri pengolahan Kabupaten Agam mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai dari 9,73 pada Tahun 2020 dan meningkat hingga mencapai 10,33 pada Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa industri pengolahan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Agam selama periode tersebut. Stabilitas ini mencerminkan keberlanjutan kegiatan ekonomi dalam sektor industri pengolahan.

Tabel 2.218
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Agam
Tahun 2020 - 2024



Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.219
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya produktivitas
Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan Tahun 2024 dengan
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat produktifitas tenaga	82,54	82,61	88,51	107,14

	kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan				
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,33	10,44	10,57	101,16

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kedua indikator kinerja utama menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2024.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.220
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian (%)
1.	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	82,54	88,51	84,21	105,11
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,33	10,57	10,89	97,06

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan target akhir pada Tahun 2029. Untuk IKU Tingkat Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha ssektor pertanian, kehutanan dan perikanan realisasi tahun 2025 telah melebihi target akhir pada tahun 2029 dengan capaian 105,11%. KOndisi ini mengharuskan dilakukan evaluasi terhadap target - target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025 - 2029.

Untuk IKU Rasio PDRB Industri Pengolahan, realisasi tahun 2025 telah memenuhi target tahun 2029 dengan capaian 97,06%. Capain ini sangat tinggi

sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target kinerja tahun - tahun berikutnya mengingat Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaannya.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan pada tahun 2025 :

Tabel 2.221
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan				
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.614.102.231	1.370.445.498	84,90
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.251.789.574	1.043.592.201	46,35
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	401.089.113	319.026.461	79,54
4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	86.444.200	73.971.700	85,57
5.	Program Penyuluhan Pertanian	1.909.953.372	1.513.108.464	79,22
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.140.451.335	14.684.448.865	96,99
Jumlah		21,403,829,825	19,004,593,189	88,79
Rasio PDRB Industri Pengolahan				
7.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	58.236.860	55.798.000	95,81
8.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	393.046.500	109.222.030	27,79
9.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	125.376.368	114.226.474	91,11
10.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	4.179.000	3.732.200	89,31

	Dan Perikanan			
11.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	581.094.500	524.808.028	90,31
	Jumlah	1,161,933,228	807,786,732	69,52
	Total	22.565.763.053	19.812.379.921	87,80

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 11 program yang mendukung capaian kinerja indikator Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total anggaran Rp. 21,403,829,825,- dengan realisasi Rp. 19,004,593,189,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar 88,79%. dan rasio PDRB industri pengolahan dengan total anggaran Rp. 1,161,933,228,- dengan realisasi Rp. 807,786,732,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar 69,52%. Capaian anggaran terendah pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar 27,79 dan 46,35%. Pada program pengelolaan perikanan budidaya memiliki capaian kinerja program yang kecil disebabkan karena ketersediaan pagu hanya mampu memenuhi target 1 dari 3 dalam perencanaan yaitu mengakomodir pembangunan saluran air masuk dan 1 (satu) unit Kolam Air Deras. Sementara itu, Calon Penerima mengajukan kebutuhan minimal berupa saluran air masuk dan 3 (tiga) unit Kolam Air Deras. Karena keterbatasan pagu dana tidak memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut diputuskan dilakukan penghentian Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan dan Fisik Konstruksi tidak dapat dilanjutkan.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan . Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.222
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Tingkat produktifitas tenaga kerja	82,61	88,51	107,14	21,403,829,825	19,004,593,189	88,79	1,21

pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan							
Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,44	10,57	101,16	1,161,933,228	807,786,732	69,52	1,46

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Kalau dilihat pengolahan data di atas, terlihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari capaian anggaran , sehingga penggunaan anggaran terlihat efisien. Namun karena adanya gap yang cukup besar antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, perlu untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan penganggaran pada tahun tahun berikutnya.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran.

Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.223
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Capaian Program Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan			107,14		
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (ton)	7,5	14,28	kurang efektif
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi	88	1,21	kurang efektif

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan			107,14		
		pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)			
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan pelayanan penyakit hewan menular strategis (PHMS) tahun n (%)	100	1,07	efektif
4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan luas areal yang difasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	98,78	1,08	efektif
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan Jumlah Kelompok tani yang aktif	106	1,01	efektif
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	1,07	efektif
Rasio PDRB Industri Pengolahan			101,16		
7.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	100,06	1,01	efektif
8.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	109,59	0,92	efektif
9.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	100	1,01	efektif
10.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap peraturan	145	0,69	kurang efektif
11.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang Disusun	99,43	1,02	efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program yang

capaiannya kurang efektif mendukung capaian kinerja sasaran, yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan capaian paling rendah sebesar 7,5%, Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan 88% serta Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan capaian 145%. Ketiga program ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar dapat lebih efektif dalam mendukung kinerja sasaran.

2.3.3.8.1.2 Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah

Sasaran strategis kedua pada Tujuan 1, Misi IV adalah 'Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah. Kinerja sasaran tersebut tergambar pada capaian indikator Rasio Kewirausahaan, Rasio PDRB Akomodasi Mamin, Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya). Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja indikator angka harapan hidup sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2025 :

Tabel 2.224
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan
Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,89	5,23	134,45
2	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Persen	0,96	0,90	94,05
3	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	Persen	0,93	0,96	103,38

Sumber : Hasil Evaluasi Tahun 2025

Peningkatan rasio kewirausahaan bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Untuk mendorong peningkatan tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, penerapan sertifikasi produk dan pengembangan produk, bantuan sarana prasarana produksi serta pendampingan untuk Usaha Mikro naik kelas. Capaian rasio kewirausahaan di Agam dihitung dengan pendekatan jumlah usaha mikro yang terdapat di Agam. Usaha mikro sebagai

salah satu usaha yang dominan ditengah masyarakat Agam Tahun 2023 mencapai 17.449 unit. Jumlahnya naik cukup pesat dalam lima tahun terakhir, dimana di Tahun 2019 jumlah usaha mikro baru sebanyak 13.183 unit. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah pelaku usaha mikro baru yang tumbuh seiring dengan penyediaan dana stimulus oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan modal yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2025 jumlah pelaku usaha mikro yang terdaftar pada Dinas Perindagkop UKM adalah 21.775, sedangkan pada tahun 2024 jumlah pelaku usaha mikro adalah sebanyak 17.777 dengan jumlah pelaku usaha mikro mengalami peningkatan sebanyak 3.998 orang. Pada tahun 2025, rasio kewirausahaan realisasinya mampu melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 5,23. Selisih target dan realisasi sebesar 1,34 dan capaian sebesar 134,45. Hal ini menandakan bahwa terjadinya pertambahan pelaku usaha dan memiliki skil dibidangnya sehingga mampu untuk bertahan.

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum mengukur kontribusi sektor akomodasi, termasuk restoran, hotel, kafe, dan usaha-usaha makanan dan minuman lainnya, terhadap total PDRB. Rasio sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Agam pada periode Tahun 2020 sampai 2024 bergerak naik, dari 0,78 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,90 ditahun 2025. secara keseluruhan, fluktuasi dalam rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kabupaten Agam mencerminkan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan industri makanan dan minuman dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan sosial, terutama sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase kontribusi sektor Jasa Lainnya sebagai proksi dari sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB. Pada Tahun 2020 kontribusi sektor Ekonomi Kreatif ke PDRB sebesar 0,77 persen. Pada Tahun 2021, proporsi PDRB sektor Ekonomi Kreatif mengalami peningkatan menjadi 0,78 persen. Walaupun peningkatannya tidak besar, ini menjadi indikasi awal pemulihan sektor kreatif di Kabupaten Agam. Dukungan pemulihan ekonomi dan adaptasi digital yang dilakukan beberapa pelaku usaha kreatif turut menjadi faktor dalam peningkatan ini. Pada Tahun 2023, kontribusi sektor Ekonomi Kreatif mencapai 0,85 persen dan kembali meningkat di Tahun 2024 menjadi 0,91 persen. Dan pada tahun 2025 realisasi IKU ini mencapai 0,96. Peningkatan ini mencerminkan peran sektor Ekonomi

Kreatif yang semakin strategis dalam perekonomian Kabupaten Agam dan menandakan potensi besar sektor ini untuk terus berkembang.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.225
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Kewirausahaan		3,89	5,23	134,45
2.	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,89	0,96	0,90	94,05
3.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0,91	0,93	0,96	103,38

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun baseline 2024 dengan tahun 2025. Pada indikator Rasio Kewirausahaan belum adanya baseline 2024 tetapi realisasi yang diperoleh tahun 2025 telah memenuhi target dengan capaian 134,45%. Sedangkan untuk 2 indikator lainnya terlihat adanya peningkatan realisasi dari Tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui kemajuan capaian target pada akhir RPJMD periode 2025- 2029, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.226
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Capaian (%)
1.	Rasio Kewirausahaan		5,23	4,69	111,51
2.	Rasio PDRB Akomodasi	0,89	0,90	1,14	78,95

	Mamin				
3.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0,91	0,96	1,01	95,05

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Rasio Kewirausahaan tahun 2025 telah melebihi target kinerja tahun akhir RPJMD 2025 – 2029 dengan tingkat capaian 111,51%. Untuk IKU rasio PDRB Akomodasi Mamin, capaian tahun 2025 baru memenuhi target tahun 2029 sebesar 78,95%, untuk itu perlu dilakukan penyusunan langkah - langkah strategis agar target akhir periode dapat dicapai. Sedangkan rasio PDRB ekonomi kreatif (jasa lainnya) mencapai 95,05% dari target Tahun 2029, perlu dilakukan evaluasi penetapan target untuk tahun - tahun berikutnya. untuk 2 indikator lainnya belum bisa diperoleh perbandingan dikarenakan realisasi dari indikator tersebut dirilis.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2025 :

Tabel 2.227
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan
Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Rasio Kewirausahaan				
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	89.830.200	85.040.500	94,67
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	99.158.000	49.908.380	50,33
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1.273.270.469	1.092.701.650	85,82
4.	Program Pengembangan UMKM	278.800.000	141.969.300	50,92

	Jumlah	1.741.058.669	1.369.619.830	79
Rasio PDRB Akomodasi Mamin				
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.981.705.526	1.729.602.040	87,28
6.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	8.009.800	7.070.000	88,27
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	49.953.972	27.205.000	54,46
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	71.675.850	41.531.400	57,94
	Jumlah	2.111.345.148	1.805.408.440	86
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)				
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.078.949.163	377.993.350	35,03
10.	Program Pemasaran Pariwisata	307.133.000	220.337.000	71,74
	Jumlah	1.386.082.163	598.330.350	43,17
Total		5.238.485.980	3.773.358.620	72,03

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terdapat 10 program yang mendukung capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup dengan total anggaran Rp. 5.238.485.980,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.773.358.620,- dengan rata-rata tingkat capaian realisasi sebesar 72,03%. Terdapat 5 program yang memiliki realisasi anggaran yang rendah yaitu kurang dari 50%, sedangkan program lainnya dengan realisasi 71%).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut :

Tabel 2.228
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya
kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap
perekonomian daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Rasio Kewirausahaan	3,89	5,23	134,45	1.741.058.669	1.369.619.830	79	1,71
Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,96	0,90	94,05	2.111.345.148	1.805.408.440	86	1,09
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0,93	0,96	103,38	1.386.082.163	598.330.350	43,17	2,44

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi untuk ketiga IKU tinggi, terihat dari capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran. Namun kondisi ini perlu dievaluasi karena gap yang terlalu besar antara keduanya, sehingga perlu adanya perbaikan pada perencanaan dan penganggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.229
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha
Mikro terhadap perekonomian daerah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Rasio Kewirausahaan		134,45		

1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase cakupan koperasi yang diawasi	90,80	1,48	Cukup Efektif
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas pelatihan	233	0,58	Kurang Efektif
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi dan mendapatkan pendampingan	136	0,98	Efektif
4.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Telah meningkat skala usahanya	83,33	1,61	Kurang Efektif
Rasio PDRB Akomodasi Mamin			94,05		
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	0,94	efektif
6.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha perdagangan yang difasilitasi	89,29	1,05	efektif
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya	61,79	1,52	kurang efektif
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Mendekati Harga Acuan Pemerintah	111	0,84	kurang efektif
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)			103,38		
9.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	100	1,03	efektif
10.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase wisatawan yang mendapatkan informasi dari media pemasaran wisata	100	1,03	efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator Rasio Kewirausahaan terhadap perekonomian daerah didukung oleh 4 Program, dengan capaian program sebanyak 2 program dinilai kurang efektif, 1 cukup efektif dan 1 efektif dalam menunjang indikator kinerja tersebut. Hal ini menunjukkan kurangnya relevansi antara program dengan sasaran kegiatan. Ke depannya agar program lebih efektif, perlu dilakukan evaluasi dan melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program lebih efektif. Untuk Indikator kinerja Rasio PDRB Akomodasi Mamin terdapat 2 program yang kurang efektif yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Sedangkan untuk Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya) memiliki 2 program yang terlihat efektif mendukung capaian IKU.

2.3.3.8.1.3 Meningkatnya Investasi Daerah

Sasaran strategis kedua pada Tujuan 1, Misi IV adalah 'Meningkatnya Investasi Daerah. Kinerja sasaran tersebut tergambar pada capaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB. Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja indikator angka harapan hidup sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2025 :

Tabel 2.230
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	Persen	30,02	28,34	94,40

Sumber : Hasil Evaluasi Tahun 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Tahun 2025, capaian pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB yaitu 28,34 dengan

persentase capaian sebesar 94,40%.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Investasi Daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.231
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	29,71	30,02	28,34	94,40

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan kinerja antara tahun baseline 2024 dengan tahun 2025. Pada indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB capaian tahun 2025 lebih rendah dibanding capaian 2024 yang menjadi baseline. Selisih capaian tahun 2025 dengan baseline 2024 sebesar 1,37 persen.

Untuk mengetahui kemajuan capaian target pada akhir RPJMD periode 2025- 2029, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.232
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian (%)
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	29,71	28,34	31,28	90,60

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB tahun 2025 belum melebihi target kinerja tahun akhir RPJMD 2025 – 2029 dengan tingkat capaian 90,60%.

Capaian yang harus diperoleh untuk 4 tahun kedepan sebesar 2,94 dengan artian bahwa setiap tahun capaian harus meningkat sebesar 0,735 %.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2025 :

Tabel 2.233
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,690,248,190.99	2,444,403,255	90,86
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11,620,000	10,456,800	89,99
3.	Program Promosi Penanaman Modal	36,310,000	8,567,400	23,60
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	139,755,000	107,671,650	77,04
Total		2.877.933.190,99	2.571.099.105	89,34

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terdapat 4 program yang mendukung capaian kinerja indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB dengan total anggaran Rp. 2.877.933.190,99,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.571.099.105,- dengan rata-rata tingkat capaian realisasi sebesar 89,34%. Terdapat 3 program yang memiliki realisasi anggaran besar dari 77 %, sedangkan 1 program lainnya (Program Promosi Penanaman Modal) dengan realisasi hanya 23,60%. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran untuk tahun berikutnya agar program dapat berjalan optimal mendukung kinerja sasaran.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan yang

berkualitas. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut :

Tabel 2.234
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	30,02	28,34	94,40	2.877.933.190,99	2.571.099.105	89,34	1,06

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi untuk Indikator kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB sebesar 1,06. Dapat dikatakan bahwa secara umum, anggaran yang direalisasikan efisien dalam mencapai kinerja sasaran meningkatnya investasi daerah.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.235
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas

	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB		94,40		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional	100	0,94	Efektif
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pertambahan jumlah investor	-0,18	-524,44	Kurang Efektif
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	0	0	Kurang Efektif
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	88	1,07	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB daerah didukung oleh 4 Program, 2 diantaranya efektif dalam mendukung capaian sasaran. Namun 2 program lainnya justru tidak memiliki kinerja sama sekali bahkan minus. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tersebut sama sekali tidak mendukung dan tidak relevan dengan indikator program dan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Ke depannya agar program lebih efektif, perlu dilakukan evaluasi dan melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program lebih efektif.

2.3.3.8.2 Tujuan 2 Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah

Misi IV dengan Tujuan 2 “Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah”, memiliki 2 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.236
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi IV Tahun 2025 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Gini Rasio	Angka	0,248	0,233	106,05
2.	Pendapatan per kapita (ribu)	Angka	57,85	52,37	91
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50	5,97	108,93

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan

yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (Gini Ratio) menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Gini Ratio dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (Gini Ratio 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (Gini Ratio 0,35- 0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (Gini Ratio 0,20-0,35). Capaian Gini Ratio tahun 2025 sebesar 0,233 dengan persentase capaian 106,68%. Capaian tahun 2025 belum memenuhi target 0,248 dengan selisih 0,015.

Besarnya pendapatan rata rata yang diperoleh oleh setiap penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi suatu negara:

- Tingkat Kemakmuran dan Kesejahteraan Rata rata: Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi pula perkiraan standar hidup rata rata penduduk di negara tersebut.
- Perkembangan Ekonomi: Perubahan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun menunjukkan suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi atau stagnasi/penurunan.
- Daya Beli Masyarakat: kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Agam yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan visi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dirancang secara holistik dan terintegrasi, dengan mengedepankan pendekatan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup rumah tangga miskin, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap

dinamika sosial ekonomi.

- Penguatan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan terpadu sebagai dasar penentuan sasaran program yang lebih tepat.
- Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar bagi penduduk miskin, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan.
- Penguatan perlindungan sosial dan jaminan sosial terpadu bagi masyarakat rentan dan miskin ekstrem melalui integrasi program pusat dan daerah.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, ekonomi kreatif, dan kegiatan padat karya berbasis potensi lokal.
- Peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet di wilayah tertinggal atau rawan kemiskinan.
- Perluasan kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Agam Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik jika dibanding target, sehingga capaian kinerjanya melebihi 100% (108,93%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja di beberapa sektor yang berpengaruh kepada capaian indikator kinerja.

Pencapaian tujuan pada misi IV ini, didukung melalui 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut :

2.3.3.8.2.1 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.237
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)

1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86,93	71,60	82,37

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Indeks ketahanan pangan daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Indeks ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan bersifat multidimensi sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator. Indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai indeks ketahanan pangan daerah. Jika dilihat dari realisasi tahun 2025, indeks ketahanan pangan daerah Kabupaten Agam mencapai 71,60, lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 86,93, berada dalam kategori sedang (76,17%).

Belum tercapainya target Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah rendahnya indeks ketersediaan pangan, yang merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IKP. Kondisi ini diperkuat dengan rendahnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Agam, yang pada tahun 2025 baru mencapai 2,88% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2025, ketersediaan cadangan pangan berupa beras hanya sebesar 2,5595 ton, sedangkan target cadangan pangan yang ditetapkan sebesar 88,621 ton. Keterbatasan cadangan pangan tersebut berdampak langsung terhadap nilai indeks ketersediaan pangan, sehingga turut menurunkan nilai Indeks Ketahanan Pangan Daerah secara keseluruhan.

Selain itu, perubahan formulasi perhitungan Indeks Ketahanan Pangan yang melibatkan penambahan indikator dan faktor penilaian baru juga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Faktor lainnya adalah penetapan target kinerja yang relatif tinggi, sehingga realisasi yang dicapai belum mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Merujuk kepada pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Daerah, capaian tahun 2025 masuk dalam kelompok kondisi ketahanan pangan yang sangat baik (zona hijau). Berikut disampaikan data pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Daerah berdasarkan *cut off point*.

Tabel 2.238
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Kelompok IKP Daerah	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<= 28,84
2	>41,52 - 51,42	>28,84 - 41,44
3	>51,51 - 59,58	>41,44 - 51,29
4	>59,58 - 67,75	>51,29 - 61,13
5	>67,75 - 75,68	>61,13 - 70,64
6	>75,68	>70,64

Namun demikian, berdasarkan cut-off point Indeks Ketahanan Pangan Daerah, Kabupaten Agam tetap berada pada kategori tahan pangan. Kabupaten Agam termasuk dalam Kelompok IKP Daerah 5, yang menunjukkan kondisi 29 ketahanan pangan yang baik dan berada pada Zona Hijau. Secara nasional, Kabupaten Agam berada pada peringkat 266 dari 416 kabupaten/kota yang dinilai oleh Badan Pangan Nasional. Dengan begitu Kabupaten Agam termasuk ke dalam kelompok daerah yang memiliki tingkat kerentanan paling rendah dan ketahanan pangan yang sangat baik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator antara lain :

- Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- Rata rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
- Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih
- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
- Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
- Angka harapan hidup pada saat lahir.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.239
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah Tahun 2025 dengan
Tahun 2026

N o	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian

							ian
1.	Indeks Ketahanan Pangan	92	86,92	94,48%	86,93	71,60	82,37

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat adanya penurunan realisasi kinerja di tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. ingkatan realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja urusan pangan pada tahun 2025. Walaupun secara realisasi mengalami peningkatan, namun tingkat capaiannya menurun dari 94,48% menjadi 82,37%. Beberapa kendala yang ditemukan dalam mencapai ketahanan pangan daerah, antara lain :

Tabel 2.240

Kendala Ketahanan Pangan dan Upaya Penyelesaiannya

No	Kendala / Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Kabupaten Agam mengalami surplus ketersediaan pangan pokok berupa beras, namun mengalami kekurangan produksi bahan pangan umbi-umbian.	koordinasi antar dinas terkait roadmap ketahanan pangan yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan pangan daerah.
2.	Ketersediaan cadangan pangan belum memenuhi ketentuan, saat ini cadangan pangan yang tersedia adalah 10,758 ton dari seharusnya 216,23 ton (hanya 4,97%).	perlu adanya penguatan cadangan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan nagari koordinasi antar dinas terkait roadmap ketahanan pangan yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan pangan daerah. Perbaikan pencatatan pola distribusi bahan pangan
3.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pendukung kemandirian pangan seperti infrastruktur lumbung pangan, rantai emur, dll)	Dukungan terhadap penguatan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
4.	Belum maksimalnya penanganan pangan dan gizi pada nagari rawan pangan sehingga rentan mengakibatkan terjadinya stunting.	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait keberagaman konsumsi pangan termasuk konsumsi sayuran, buah buahan dan protein hewani Promosi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketahanan pangan
5.	Sulitnya mengubah budaya masyarakat dalam pola konsumsi terutama sumber	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal keberagaman konsumsi

	pangan karbohidrat. Beras masih menjadi sumber utama karbohidrat bagi sebagian besar masyarakat.	pangan serta mengkonsumsi pangan yang aman. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait keberagaman konsumsi pangan termasuk konsumsi sayuran, buah buahan dan protein hewani
6.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mengkonsumsi pangan aman.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan aman
7.	Kurangnya penerapan teknologi pengolahan pangan local dan promosi B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)	Sosialisasi dan promosi B2SA
8.	Masih maraknya pemakaian bahan berbahaya untuk pangan segar asal tumbuhan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan serta pemakaian bahan berbahaya untuk pangan

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 2.241
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2029	Tingkat capaian
		2024	2025		
1.	Indeks Ketahanan Pangan	86,92	71,60	86,97	82,33

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah tahun 2025 telah memenuhi 82,33% dari target akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029. Untuk realisasi masih ada selisih sekitar 15,37 poin lagi yang harus dicapai selama kurun waktu 4 tahun lagi menjelang periode RPJMD 2025 - 2029 berakhir. Jika melihat trend peningkatan yang tidak signifikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketahanan pangan harus menyusun strategi yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2025 :

Tabel 2.242
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah Tahun
2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	457.118.110	415.835.848	90,96%
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	120.562.536	92.719.870	76,90%
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	29.755.390	27.980.550	94,04
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.649.756.070	3.457.660.723	94,74
Total		4.257.192.106	3.994.196.991	93,82

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Terdapat 4 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan dengan total anggaran Rp. 4.257.192.106,- realisasi Rp. 3.994.196.991,- dengan tingkat capaian realisasi 93,82%. Dari 4 program tersebut , 3 program memiliki capaian realisasi sangat tinggi (di atas 90%) sedangkan 1 program dengan capaian realisasi sebesar 76%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.243
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan
Produktivitas Dan Daya Saing Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Pangan	86,93	71,60	82,37	4.257.192.106	3.994.196.991	93,82	0,89

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan Daerah adalah sebesar Rp. 4.257.192.106,- realisasi Rp.3.994.196.991,- dengan tingkat capaian realisasi 93,82%, dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk capaian output program sebesar 0,89%. Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran yang direalisasikan kurang efisien dalam mendukung capaian indikator indeks ketahanan pangan daerah karena realisasi anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.244
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya
keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Indeks Ketahanan Pangan		82,37		
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	skor Pola Pangan Harapan	115,95	0,71	Kurang Efektif

2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Pangan	0,06	1371,83	Kurang Efektif
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	186	0,44	Kurang Efektif
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	0,82	Cukup Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan didukung oleh 4 program. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa program yang dijalankan terlihat kurang efektif mendukung ketercapaian sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya keselarasan antara program dan sasaran. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang baik dalam penentuan indikator, penentuan target maupun rencana aksi yang disusun. Ke depannya perlu dilakukan perbaikan di tahap perencanaan. Untuk itu, bagi program yang cukup efektif dan kurang efektif perlu dilakukan penyempurnaan dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, baik dalam hal merumuskan indikator kinerja, penetapan target, penyusunan kegiatan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung capaian target yang telah ditetapkan.

2.3.3.8.2 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja” dapat terlihat pada tabel berikut :

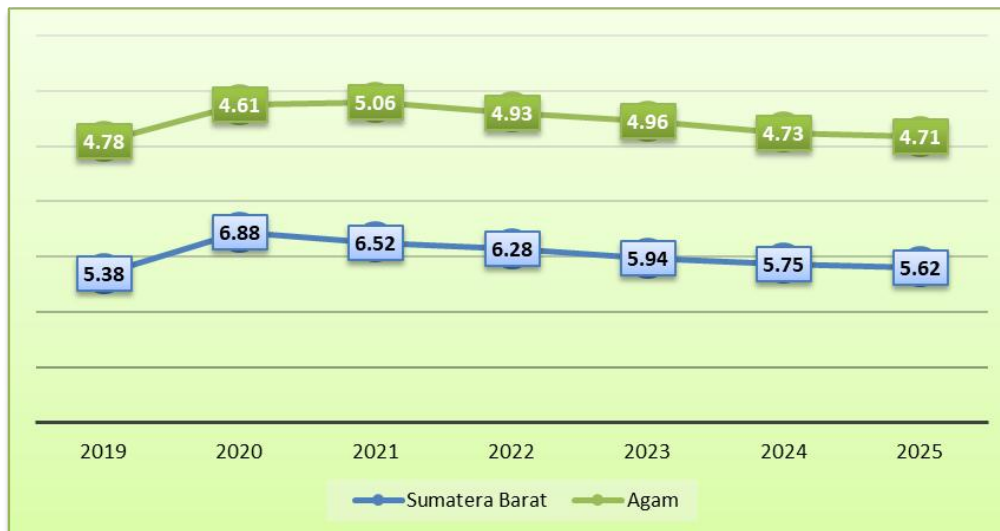
Tabel 2.245
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	4,71	4,71	100
2.	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Juta	98,35	96,17	97,78

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Kab.Agam Tahun 2025

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator makro daerah. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator yang targetnya harus turun, semakin kecil realisasinya akan semakin baik. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Agam pada tahun 2025 adalah sebesar 4,71, sama dengan target yang telah ditetapkan sebesar 4,71. Jika dibandingkan dengan target maka tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori tinggi. Walaupun sesuai target, namun yang perlu diwaspadai adalah struktur penduduk agam yang sifatnya ekspansif (besar di usia muda) dimana penduduk yang memasuki usia angkatan kerja (15 – 65 Tahun) jumlahnya sangat besar. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka pengangguran terbuka meningkat. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Agam masih lebih baik, dimana tingkat pengangguran terbuka Propinsi Sumatera Barat adalah 5,62 sedangkan tingkat pengangguran terbuka nasional adalah sebesar 4,74.

Grafik 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam dan
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2025



Sumber : BPS Kabupaten Agam Tahun 2025

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan. Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2025 bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor pertanian juga bersifat fluktuatif yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Di sisi lain, fluktuasi produktivitas tenaga kerja mengindikasikan bahwa efisiensi atau output per tenaga kerja tidak stabil, yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan teknologi, kebijakan, atau dinamika pasar. Tahun 2025 tingkat produktivitas tenaga kerja adalah sebesar 96,17 juta rupiah, sedikit lebih rendah dibanding target yang ditetapkan sebesar 98,35 juta rupiah. Hal ini diduga disebabkan karena hampir seluruh wilayah Kabupaten Agam dilanda bencana hidrometeorologi di akhir tahun, sehingga berpengaruh kepada berbagai sektor termasuk produktivitas tenaga kerja.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui

melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.246
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja Tahun 2025 dengan
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2026		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran terbuka	4,73	4,71	4,71	100
2	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	92.97	98,35	96,17	97,78

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian / data base tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam menurunkan angka pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini juga dapat dilihat pada indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, walau target tahun ini tidak tercapai 100%, namun terlihat adanya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2024, dimana produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 3,2 poin. Walaupun begitu ditemukan beberapa permasalahan dalam menurunkan angka pengangguran, antara lain :

Tabel 2. 247
Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya pada Tingkat
Pengangguran Terbuka

No	Kendala / Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
1.	Struktur penduduk Kabupaten Agam yang sifatnya ekspansif (besar di usia muda) dimana penduduk yang memasuki usia angkatan kerja (15 – 65 Tahun) jumlahnya sangat besar mencapai 69,16% dari total penduduk.	Membuka dan memperluas lapangan kerja melalui penyediaan program padat karya infrastruktur, menciptakan tenaga kerja trampil, serta memberikan bantuan permodalan berupa peralatan yang

		dibutuhkan Menfasilitasi pemberdayaan dan penyebaran tenaga kerja
2.	Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas	Membuka dan memperluas lapangan kerja melalui penyediaan program padat karya infrastruktur, menciptakan tenaga kerja trampil, serta memberikan bantuan permodalan berupa peralatan yang dibutuhkan Menfasilitasi pemberdayaan dan penyebaran tenaga kerja
3.	Ketidaksesuaian pendidikan dan keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia	Meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.248
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran terbuka	4,73	4,71	4,62	98,05
2.	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	92.97	96,17	123,03	78,17

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029 telah memenuhi sebesar 98,05%. Diperkirakan tahun depan (2026) target kinerja akhir periode RPJMD (2029) dapat dicapai. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target kinerja. Capaian kinerja indikator tingkat produktifitas tenaga kerja pada tahun 2025 baru

memenuhi 78,17% dari target akhir periode RPJMD (2029). Agar target Tahun 2029 tercapai, perlu disusun langkah - langkah strategis yang mendukung pencapaian target kinerja.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat pada tahun 2025.

Tabel 2.249
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja Daerah
Tahun 2025

N o	Progra m	Anggaran	Realisasi	Capai an %
Tingkat Pengangguran terbuka dan Tingkat Produktivitas tenaga kerja				
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.531.000	1.479.800	96,66
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	263.857.271	250.791.415	95,05
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	52.814.800	49.234.400	93,22
4.	Program Hubungan Industrial	968.623.500	929.430.300	95,95
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.905.534.286	3.742.850.145	95,83
	Total	5.192.360.857	4.973.786.060	95,79

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Terdapat 2 program utama yang mendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja daerah dengan total anggaran Rp. 563.184.907,- realisasi Rp. 399.659.276,- dengan tingkat capaian realisasi 70,96%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai

indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.250
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Tingkat Pengangguran terbuka	4,71	4,71	100	5.192.360.857	4.973.786.060	95,79	1,04
Tingkat Produktivitas tenaga kerja	98,35	96,17	97,78				1,02

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 1,04, dimana capaian kinerja lebih tinggi jika dibandingkan capaian realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang telah direalisasikan efisien dalam mendukung capaian kinerja sasaran. Hal yang sama juga terjadi pada indikator kinerja tingkat produktivitas tenaga kerja, dimana nilai efisiensi 1,02 yang menunjukkan efisien mendukung capaian kinerja IKU.

Disamping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program / kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.251
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Tingkat Pengangguran terbuka		100		

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	108,84	0,91	Efektif
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	46,82	2,14	Kurang Efektif
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	100	1	Efektif
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	1	Efektif
Tingkat Produktivitas tenaga kerja			96,17		
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	108,84	0,88	cukup efektif
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	46,82	2,05	kurang efektif
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	100	0,96	efektif
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	0,96	efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat produktifitas tenaga kerja dukung oleh 4 program. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan penyusunan perencanaan dan penganggaran baik dalam hal merumuskan indikator kinerja, penetapan target, penyusun kegiatan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung capaian target yang telah ditetapkan.

2.3.3.8.2.3 Meningkatnya perlindungan sosial

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya perlindungan sosial” dapat

terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.252
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	50,50	48,50*	96,04

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Kab.Agam Tahun 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan individu maupun kelompok, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, peran sosial, dan keberdayaan ekonomi. Indeks ini sering digunakan oleh Kementerian Sosial sebagai indikator utama untuk mengevaluasi pembangunan sosial dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Indeks ini mengukur tingkat keberhasilan masyarakat melalui indikator objektif dan subjektif. Data yang digunakan seringkali bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data potensi desa, serta survei lapangan. Dalam konteks bantuan sosial, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil (tingkatan) untuk menentukan prioritas penerima bantuan, di mana desil 1 memiliki kondisi ekonomi terendah. Komponen penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) atau Indeks Kesos umumnya mencakup dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Indikator utamanya meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, serta jaminan sosial. Pengukuran ini bertujuan menilai taraf hidup objektif dan subjektif masyarakat. Tingkat capaian tahun 2025 belum bisa dihitung karena masih menunggu rilis BPS, karena itu untuk laporan ini menggunakan data tahun sebelumnya (Tahun 2024) dengan capaian sebesar 48,50, dengan capaian 96,04.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian

kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.253
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	48,50	50,50	48,50	96,04

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, perbandingan indeks kesejahteraan sosial belum bisa dianalisa dikarenakan capaian belum dirilis BPS, sehingga data yang digunakan adalah data tahun lalu sebesar 48,50.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.254
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian (%)
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	48,50	48,50	54,50	88,99

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kinerja indikator Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2025 mencapai 88,99 % dari target akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029. Dengan waktu yang tersisa 4 tahun anggaran, diharapkan target tersebut dapat dicapai.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2025 :

Tabel 2.255
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran
Meningkatnya perlindungan sosial Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	227.522.555	203.941.136	89,64
2.	Program Rehabilitasi Sosial	306.748.600	262.672.775	85,63
3.	Program Penanganan Bencana	256.053.523	189.282.329	73,92
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	202.428.500	183.005.200	90,40
5.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	9.383.200	9.375.000	99,91
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.580.239.639	3.373.388.875	94,22
	Total	4.582.376.017	4.221.665.315	92,13

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Terdapat 6 program utama yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Kesejahteraan Sosial dengan total anggaran Rp. 4.582.376.017,- realisasi Rp. 4.221.665.315,- dengan tingkat capaian realisasi 92,13%. Capaian paling rendah sebesar 73,92 % yakni Program Penanganan Bencana.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.256
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Meningkatnya perlindungan sosial
Tahun 2025

Indikator kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Indeks Kesejahteraan Sosial	50,50	48,50	88,99	4.582.376.017	4.221.665.315	92,13	0,96

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kesejahteraan Sosial sebesar 0,96. Dapat dikatakan anggaran tersebut kurang efisien karena capaian kinerja lebih rendah dibanding realisasi anggaran.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program/ kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak. Tabel berikut ini menyampaikan informasi terkait analisis program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian sasaran :

Tabel 2.257
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Sasaran Meningkatnya
perlindungan sosial Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Indeks Kesejahteraan Sosial			88,99		
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS dan PSKS yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan	100	0,89	cukup efektif
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,gepeng terlantar diluar panti serta PMKS bukan korban HIV/AIDS dan Napza yg terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	0,89	cukup efektif
3	Program Penanganan Bencana	Persentase korban Bencana Alam dan Bencana sosial yang	100	0,89	cukup efektif

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
		terpenuhi kebutuhan dasarnya			
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang dilakukan perlindungan dan Jaminan Sosial	100	0,89	cukup efektif
5	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	0,89	cukup efektif
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	0,89	cukup efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja program Indeks Kesejahteraan Sosial sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran, maka program program tersebut cukup efektif dalam mendukung sasaran kinerja.

2.3.3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi V (Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan, dan Meningkatkan Ketangguhan Mitigasi Bencana)

Terdapat 2 tujuan yang akan dicapai pada Misi V “Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan, dan Meningkatkan Ketangguhan Mitigasi Bencana” yaitu :

- Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana
- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata

Adapun setiap tujuan didukung oleh beberapa sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.3.9.1 Tujuan 1 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana

Tabel 2.258
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2025 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	200,28	240,3	119,98%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Tingkat bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan ancaman lainnya. Capaian indikator ini tahun 2025 mencapai 240,3 dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 200,28. Dengan persentase capaian sebesar 119,98%

Pencapaian tujuan pada Misi V ini, didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.259
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93	78,96	109,77

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengukuran IKLH Tahun 2025, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Agam berada pada kategori baik dengan nilai IKLH 78,96, dengan rincian : indeks kualitas air 78,96 (sedang), indeks kualitas udara 84,07 (sedang) dan inspeksi kesehatan lingkungan 69,52 (sedang). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 76,9, realisasi kinerja tahun ini tidak sesuai dengan target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,67%. Walaupun tidak sesuai target kinerja IKLH masih dalam kategori sangat tinggi. Dari 3 komponen lingkungan yang menjadi komposit untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, indeks tertinggi adalah Indeks Kualitas Air, bahkan IKU Kabupaten Agam menempati urutan 4 dari 19 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan indeks yang paling rendah adalah Indeks Kualitas Lahan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan antara lain :

- a. Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.
- c. Optimalisasi pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan hidup,

pemberian reward dan punishment.

d. Frekuensi kejadian bencana alam.

Di samping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.260
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50	70,74	94,95	71,93	78,96	109,77

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya kenaikan kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 baik dari sisi realisasi maupun tingkat capaian. Kenaikan realisasi kinerja adalah sebesar 8.22 poin, sedangkan tingkat capaian naik sebesar 14.82 poin. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibentuk dari komposit nilai indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas lahan (IKL). Sesuai dengan hasil penilaian kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan 2025, Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam selama 2 tahun terakhir dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.261
Matriks Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Tahun 2024

TAHUN	IKA	IKU	IKL	IKLH
2024	56,81	94,8	50,18	70,74 (Baik)
2025	78,96	84,07	69,52	78,96 (Baik)

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada 2 komponen yang mengalami penurunan nilai pada tahun 2025 yaitu Indeks Kualitas Udara. Sedangkan Indeks

Kualitas Air dan Lingkungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai ini antara lain :

Tabel 2.262
Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Kendala / Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	○ Melaksanakan kegiatan edukasi pengelolaan lingkungan hidup bagi kelompok masyarakat melalui bimbingan teknis, sosialisasi, simulasi, dan stimulant serta penyampaian informasi melalui berbagai media ○ Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan seperti pendampingan program kampung iklim, pembinaan sekolah adiwiyata, pendampingan pengolahan sampah organik, dll ○ Melakukan fasilitasi penerapan reward terhadap masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2.	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sehingga kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak tertangani dengan baik.	○ Meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan (PPLHD) ○ Menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Pemerintah Nagari dalam pengawasan lingkungan ○ Mengelola sistem pengaduan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan ○ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan ○ Melakukan sosialisasi kepada Penanggung jawab usaha / kegiatan terkait kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan ○ Menerapkan punish dan reward

		dalam pengelolaan lingkungan
3.	Rentang kendali yang sangat luas dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, karena melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Berbagai kegiatan / aktivitas pembangunan dan masyarakat mempengaruhi kualitas lingkungan.	- o Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah serta lembaga / instansi terkait dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan - o
4.	Berbagai regulasi dan kebijakan yang kadang bertentangan dengan pelestarian lingkungan.	o Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyamakan persepsi terkait pelestarian lingkungan
5.	Rendahnya cakupan pelayanan persampahan, mengakibatkan potensi pencemaran lingkungan semakin meningkat. Peningkatan timbulan sampah terjadi bukan saja akibat pertambahan jumlah penduduk namun juga diakibatkan terjadinya pergeseran gaya/ pola hidup modern.	- o Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah - o Menggalakkan gerakan 5 R pengelolaan sampah - o Mendorong masyarakat meminimalisir produksi sampah dari sumbernya
6.	Tingginya frekwensi kejadian bencana alam seperti tanah longsor dan banjir	- o Menanam sempadan sungai dan lahan terlantar dengan pohon pelindung - o Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam menjaga kelestarian hutan dan pengelolaan sungai

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.263
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		2024	2025		
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,74	78,96	77,70	101,62%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa walaupun terjadi penurunan kinerja pada tahun 2025 tapi realisasinya telah melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. Walaupun telah melebihi target kinerja di Tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup tetap harus konsisten dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di samping itu untuk penentuan target tahun berikutnya perlu tidak lagi mengacu kepada target tahunan pada RPJMD tetapi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Jika disandingkan dengan kualitas lingkungan hidup nasional, capaian Kabupaten Agam lebih baik, dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia pada 2024 mencapai 73,57.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun 2024 :

Tabel 2.266
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indeks kualitas lingkungan hidup				
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7,313,008,488	7,131,225,930.00	97,51%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	121,732,740	120,174,300	98,72%
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,194,969,792	972,779,587	81,41%
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,320,642,015	1,178,701,186	89,25%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25,935,600	3,060,000	11,79%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	111,642,000	83,657,500	74,93%
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12,327,200	10,847,500	87,99%
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	8,309,171,473	6,467,419,765	77,83%

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Total		18,409,429,308	15,967,865,768	86,73%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 8 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 18,409,429,308 dengan realisasi Rp. 15,967,865,768 dengan rata-rata capaian realisasi 86.73%. Terdapat 1 program yang realisasinya sangat rendah bahkan di bawah 50% yaitu Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). Sedangkan yang realisasi anggarannya di atas 77% hanya 7 program.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran indeks kualitas lingkungan hidup dapat digambarkan pada pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.267
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Nilai Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	78,96	109,77	18,409,429,308	15,967,865,768	86,73%	1,27

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran lebih besar daripada capaian realisasi anggaran, efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 1,27. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibelanjakan cukup efisien mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran.

Tabel 2.268
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program
Sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat efektifitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			109,77		
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	93,61%	1,17	Cukup Efektif
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	100%	1,09	Efektif
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau maninjau	91,9%	1,19	Cukup Efektif
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola	100%	1,09	Efektif
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	100%	1,00	Efektif
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang ditebitkan	15%	7,31	Kurang Efektif
7.	Program Penanganan Pengaduan	Persentase pengaduan pencemaran/kerusakan	100%	1,09	Efektif

	Lingkungan Hidup	lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pelaksanaan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100%	1,09	Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program dalam mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dapat dilihat bahwa dari 8 program yang mendukung capaian IKLH, sebanyak 5 program berada pada kategori efektif (nilai efektivitas berada pada rentang 0,91-1,10). Program tersebut yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, serta Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Program-program tersebut dinilai efektif karena capaian indikator kinerja program relatif tinggi dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, terdapat 2 program yang termasuk dalam kategori cukup efektif yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki indikator kinerja berupa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dengan capaian sebesar 93,61 persen dan nilai efektivitas 1,17 sehingga dikategorikan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian indikator kinerja cukup tinggi, kontribusinya terhadap peningkatan IKLH masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Sementara itu, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai efektivitas 1,19 juga dikategorikan cukup efektif karena capaian indikatornya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar intervensi program.

Adapun 2 program lainnya termasuk dalam kategori kurang efektif yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Program Pengelolaan Persampahan. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan PPLH hanya mencapai capaian sebesar 15 persen sehingga kontribusinya terhadap peningkatan IKLH masih sangat terbatas.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar program telah memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penetapan target yang lebih realistis serta penguatan implementasi program agar keterkaitan antara capaian kinerja program dengan indikator sasaran strategis dapat lebih optimal dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya ketahanan daerah” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.269
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya ketahanan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,34	61,81%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Perolehan capaian indeks ketahanan daerah tahun 2025 yaitu 0,34 dengan target 0,55. Capaian tahun 2025, belum melebihi dari target yang ditetapkan sehingga capaiannya hanya 61,81%. Capaian ini dikatakan rendah karena masih di bawah target yang ditetapkan.

Untuk menentukan indeks ketahanan daerah dilakukan melalui 7 kriteria dan 71 indikator. Adapun 7 kriteria tersebut adalah : perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan

sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah diklasifikasikan menjadi rendah ($< 0,55$), sedang ($0,55 - 0,85$) dan tinggi ($> 0,85$). Nilai ini lebih dipengaruhi oleh penyampaian data dukung yang kurang valid pada saat penghitungan indeks ketahanan daerah, sehingga nilai yang diperoleh rendah.

Di samping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.270
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Ketahanan Daerah
Tahun 2025 Dengan Tahun 2026

N o	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Tinggi	0,34 (rendah)	40	0,55	0,34	61,81 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 terjadi capaiannya sama dengan tahun 2024. Namun jika dilihat dari tingkat capaiannya terlihat ada kenaikan pada tahun 2024 yaitu 40% sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 61,81%.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.271
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah
Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir 2029	Capaian
		2024	2025		
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,34	0,34	0,77	44,15%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa walaupun capaian tahun 2024 dan 2025 masih memiliki capaian yang sama, tapi belum melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. capaian yang diperoleh indeks ketahanan pangan jika disandingkan dengan target akhir sebesar 44,15%. Perlu strategi dan kebijakan khusus agar target kinerja 2029 dapat dicapai.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi sumber daya terutama anggaran yang disediakan dalam mencapai kinerja sasaran. Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun 2025 :

Tabel 2.272
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Meningkatnya
ketahanan daerah Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.800.248.629	4.458.112.792	92,87
2.	Program Penanggulangan Bencana	958.083.320	788.509.166	82,30
Jumlah		5.758.331.949	5.246.621.958	91,11

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 program yang mendukung capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Daerah dengan total anggaran Rp. 5.758.331.949 dengan realisasi Rp. 5.246.621.958 dengan rata-rata capaian realisasi 91,11%. Realisasi dari program diatas dikategorikan tinggi karena lebih dari 82% dari realisasi anggarannya.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran indeks kualitas lingkungan hidup dapat digambarkan pada pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.273
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah	0,55	0,34	61,81 %	5.758.331.949	5.246.621.958	91,11	0,66

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Sasaran meningkatnya ketahanan daerah Tahun 2025 dapat dikatakan kurang efisien karena capaian indikator kinerja lebih kecil dari capaian realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya yang menunjukkan nilai besar dari 0,66.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.274
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya ketahanan daerah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Indeks Ketahanan Daerah	61,81%			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	0,61	Kurang Efektif
2.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100	0,61	kurang Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Indikator kinerja tingkat penerapan nilai-nilai agama didukung oleh 2 program. Program tersebut dapat dikatakan kurang efektif dan cukup efektif mendukung capaian kinerja sasaran, dengan perolehan nilai efektifitas yaitu 0,61. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh program mendukung capaian kinerja sasaran.

2.3.3.9.2 Tujuan 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata

Misi V pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 memiliki tujuan 2 “Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.275
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2025 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	41,52	36,02	86,75%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit untuk mengukur kualitas, ketersediaan, dan cakupan infrastruktur dasar—seperti jalan, jembatan, energi, dan air bersih—di suatu wilayah. Indeks ini sering digunakan pemerintah untuk menilai kinerja pembangunan, meningkatkan daya saing, dan pemerataan layanan dasar demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Komponen dan Fokus Pembangunannya yaitu :

- Infrastruktur Pelayanan Dasar: Akses air minum, sanitasi, dan perumahan

layak.

- Infrastruktur Konektivitas: Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mempermudah konektivitas antardaerah.
- Infrastruktur Teknologi (IP-TIK): Pengukuran pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi yang juga terus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2025 adalah 36,02. Angka ini belum melebihi target yang ditetapkan sebesar 41,52 sehingga tingkat capaiannya adalah 86,75%. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan indikator yaitu karena adanya efesiensi anggaran dan terjadinya bencana alam di kabupaten Agam, sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

Pencapaian tujuan pada Misi V ini, didukung melalui 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar” dapat terlihat pada capaian 3 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.276
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	15,40	5,45	35,39
2.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	Persen	17,95	13,35	74,37
3.	Jalan dalam kondisi mantap	Persen	60	58,37	97,28

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2025

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mencapai 5,45% dari target 15,40% dengan capaian 35,39% pada tahun 2025. Akses Rumah Tangga

Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan) mencapai 13,35% dengan target 17,95% dengan capaian 74,37% tahun 2025. Indikator ini merupakan indikator baru pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, sebelum tidak termuat pada indikator kinerja dokumen perencanaan tahun sebelumnya. Atas capaian diperoleh menunjukkan bahwa Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman pada Kabupaten Agam belum melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus adanya peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.

Meningkatnya konektifitas wilayah dan kawasan juga tergambar pada capaian indikator persentase jalan kabupaten kondisi mantap. Yang dimaksud dengan jalan mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, yang telah diaspal dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Sesuai dengan SK Bupati Agam Nomor 406 Tahun 2015 panjang jalan kabupaten adalah 1.694,63 km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 699 ruas. Adapun kondisi jalan di Kabupaten Agam saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jalan kondisi baik sepanjang 838,04 km
- Jalan kondisi sedang sepanjang 330,84 km
- Jalan kondisi rusak ringan dan berat sepanjang 525,75 km.

Berdasarkan data di atas, jalan dalam kondisi mantap adalah sebanyak 58,37%. Kondisi ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan hanya memenuhi sebesar 97,28% dari target yang telah ditetapkan.

Disamping pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kinerja sasaran juga dapat diketahui melalui perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Konektifitas Wilayah Dan Kawasan pada tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu:

Tabel 2.277
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,23	15,40	5,45	35,39
2.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	18	17,95	13,35	74,37

3.	Jalan dalam kondisi mantap	58,91	60	58,37	97,28

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 terjadi penurunan dari baseline untuk indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Selisih realisasi 9,78 dengan capaian hanya 35,39%. indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan) belum melebihi baseline tahun 2024, yakni hanya 13,35 dengan capaian 74,37%.

Indikator persentase jalan kabupaten kondisi mantap justru terlihat mengalami penurunan kinerja baik realisasi maupun tingkat capaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju kerusakan jalan lebih besar dibandingkan upaya untuk melakukan pemeliharaan jalan tersebut. Adapun faktor pemicu kondisi ini antara lain :

- Bencana alam hidrometeorologi yang berlangsung cukup lama di tahun 2025 bahkan sampai saat ini masih berlangsung. Bencana alam ini menyebabkan longsor dan banjir bandang hampir di setiap wilayah Kabupaten Agam, yang mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur termasuk jalan dan jembatan utama yang menghubungkan antar Kec, Kabupaten/kota bahkan propinsi. Banyaknya jalan yang rusak parah menyebabkan tekanan berat terhadap jalan lain yang menjadi alternatif jalan sementara.
- Terbatasnya anggaran pemeliharaan

Di samping penurunan kondisi fisik jalan, rendahnya angka capaian tahun ini juga disebabkan karena adanya perubahan metode pembaharuan data base jalan dari manual menjadi digital.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.278
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

N o	Indikator Kinerja	Baseli ne 2024	Realis asi 2025	Target Akhir 2026	Capaian
1.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,23	5,45	19,69	27,67
2.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	18	13,35	24,25	55,05
3.	Jalan dalam kondisi mantap	58,91	58,37	68	86,83

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum 3 indikator kinerja utama di atas memiliki kinerja yang sangat baik. Bahkan 2 di antaranya telah memenuhi bahkan belum melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. Walaupun telah melebihi target, capaian ini tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga keamanan dan ketertiban meningkat. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase jalan kabupaten kondisi mantap terlihat tingkat kemajuan sebesar 86,83% jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. Terdapat selisih sebesar 28,26 poin.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 :

Tabel 2.279
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.379.591.850	1.989.579.838,00	83,61
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.313.008.488	7.131.225.930,00	97,51
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	12.807.263.476,91	11.152.133.403,46	87,08

4.	Program Penyelenggaraan Jalan	18.075.776.838	14.702.285.935	81,34
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	80.598.000	9.865.000	12,24
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.060.000	44.335.900	88,57
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.911.098.740,91	41.873.768.438,46	83,90
8	Program Penatagunaan Tanah	49.169.000,00	46.629.650,00	94,84
9.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	29.734.000,00	28.881.500,00	97,13
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	53.437.900,00	52.334.505,00	97,94
Jumlah		90.749.738.294	77.031.040.100	84,88

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 10 program yang mendukung capaian kinerja indikator Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar memperoleh capaian anggaran lebih dari 80%. Pada program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan capaian yang sangat rendah hanya sebesar 12,24%, hal ini disebabkan tidak terlaksananya pelatihan tenaga kerja konstruksi. Berkenaan dengan hal tersebut, seperti tahun sebelumnya Pemerintah Kab. Agam juga menunggu surat undangan dari provinsi tentang pelatihan tenaga kerja konstruksi. Tetapi di tahun 2025 hal tersebut tidak terlaksana.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.280
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,40	5,45	35,39	2.379.591.850	1.989.579.838,00	94,10	0,37
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	17,95	13,35	74,37	20.120.271.964,91	18.283.359.333,46	90,87	0,81
Jalan dalam kondisi mantap	60	58,37	97,28	132.340.900,00	127.845.655,00	83,16	1,16

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas tentang perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator menunjukkan hasil yang bervariasi.

Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman memiliki target sebesar 15,40 dengan realisasi 5,45 atau tingkat capaian sebesar 35,39 persen. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.379.591.850,00 dengan realisasi Rp1.989.579.838,00 atau sebesar 94,10 persen, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,37.

Selanjutnya indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan) memiliki target sebesar 17,95 dengan realisasi 13,35 atau

tingkat capaian 74,37 persen. Dari pagu anggaran sebesar Rp20.120.271.964,91 terealisasi Rp18.283.359.333,46 atau sebesar 90,87 persen dengan tingkat efisiensi sebesar 0,81.

Sementara itu indikator Jalan dalam kondisi mantap menunjukkan capaian yang relatif tinggi, dengan target sebesar 60 dan realisasi sebesar 58,37 atau tingkat capaian 97,28 persen. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp132.340.900.000,00 dengan realisasi Rp127.845.655.000,00 atau sebesar 83,16 persen dan tingkat efisiensi sebesar 1,16.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada ketiga indikator tergolong tinggi, namun capaian kinerja masih bervariasi, dimana indikator jalan dalam kondisi mantap menunjukkan capaian paling optimal dibandingkan dengan indikator lainnya.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.281
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)			74,37		
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	83,61%	0,88	Cukup Efektif
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman			35,39%		
1.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	69,57	0,50	Kurang Efektif
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase masyarakat dengan sanitasi layak	94%	0,37	Kurang Efektif

Jalan dalam kondisi mantap			97,28		
1.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	78%	1,24	Cukup efektif
2.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	1,02	Efektif
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	100%	0,97	Efektif
4.	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	67,87	1,43	Kurang Efektif
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Kualifikasi Ahli	*	*	*
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tenaga Konstruksi Kualifikasi Ahli	98,65	0,98	Efektif
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100%	0,97	Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja dengan capaian program pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar, secara umum program-program yang mendukung indikator kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi, yaitu berada pada kategori efektif, cukup efektif, dan sebagian masih kurang efektif.

Pada indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan) dengan capaian sebesar 74,37%, dukungan program berasal dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang menunjukkan capaian program sebesar 83,61% dengan nilai efektivitas 0,88 sehingga termasuk kategori cukup efektif.

Sementara itu pada indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dengan capaian 35,39%, didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung dengan capaian 69,57% dan nilai efektivitas 0,50 yang tergolong Kurang efektif, serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian 94% namun memiliki nilai efektivitas 0,37 sehingga juga termasuk kategori kurang efektif.

Selanjutnya pada indikator Jalan dalam Kondisi Mantap dengan capaian 97,28%, didukung oleh beberapa program, antara lain Program Penatagunaan Tanah dengan capaian 78% dan nilai efektivitas 1,24 yang tergolong cukup efektif, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan serta Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang masing-masing memiliki capaian 100% dengan nilai efektivitas 0,97 sehingga tergolong efektif. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencatat capaian 100% dengan nilai efektivitas 0,97 yang tergolong efektif.

Adapun Program Penyelenggaraan Jalan memiliki capaian 67,87% dengan nilai efektivitas 1,43 yang tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran serta kondisi teknis di lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan peningkatan maupun pemeliharaan jalan.

Selain itu, Program Pengembangan Jasa Konstruksi belum memiliki persentase capaian dan nilai efektivitas karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat operasional berupa keikutsertaan dalam pelatihan serta pemenuhan undangan dari Pemerintah Provinsi, sehingga capaian kinerja belum dapat diukur secara kuantitatif pada tahun pelaporan.

2. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya konektivitas wilayah

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya konektivitas wilayah” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.282
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya konektivitas wilayah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Konektivitas	Persen	69	68,50	99,28%

Rasio konektivitas mengukur keterhubungan antarwilayah melalui infrastruktur transportasi (jalan, laut, penyeberangan), yang krusial untuk mobilitas barang dan manusia. Konektivitas wilayah merupakan salah satu fokus strategis dalam pembangunan infrastruktur. Tujuannya yaitu mempermudah pergerakan, meningkatkan aksesibilitas wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat ini realisasi terhadap rasio konektivitas Kabupaten Agam mencapai 68,50 dengan target 69. Selisih dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 0,50 dengan capaian 99,28%. Dalam hal ini, kabupaten Agam selalu berupaya untuk melakukan peningkatan terhadap infrastruktur. Apalagi beberapa bulan yang lalu tepatnya bulan November 2025, rata-rata daerah Kabupaten Agam mengalami musibah bencana alam yang mengakibatkan beberapa akses terputus. Upaya yang akan dan telah dilakukan oleh Pemerintahan Kab. Agam bersama dengan Pemerintah Provinsi, Pusat, TNI, Polri serta dukungan dari masyarakat diantara pemulihan jalan Malalak, Pembangunan jembatan darurat dan lainnya.

Tabel 2.283

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya konektivitas wilayah Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Konektivitas	65,88	69	68,50	99,28%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan Rasio Konektivitas jika dibandingkan dengan baseline tahun 2024, peningkatan tersebut sebesar 2,62%. Namun belum melebihi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian

kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.284
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya konektivitas wilayah
Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian
1.	Rasio Konektivitas	65,88	68,50	70,50	97,16%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja utama di atas memiliki kinerja yang belum melebihi target akhir yang ditetapkan. Selisih capaian terhadap target akhir sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwasanya perolehan rasio minimal yang harus didapatkan menjelang target akhir sebesar 0,5%.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya konektivitas wilayah pada tahun 2025 :

Tabel 2.285
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Meningkatnya konektivitas
wilayah Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	18.424.597.686	18.315.988.822	99,41
2.	Program Pengelolaan pelayaran	41.545.000	41.287.200	99,37
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.818.816.107	5.414.525.759	93,05
Jumlah		24.284.958.793	23.771.801.781	97,88

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Indikator Rasio Konvektivitas didukung oleh 3 Program dengan rata – rata realisasi anggaran sebesar 97,88%. Setiap program memiliki capaian diatas 93%. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya program yang ada sangat mendukung terhadap indikator kinerja sehingga serapan anggaran dapat secara maksimal

digunakan demi menunjang terlaksananya indikator.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.286
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatkan konektivitas wilayah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Rasio Konektivitas	69	68,50	99,28%	24.284.958.793	23.771.801.781	97,88	1,01

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatkan konektivitas wilayah Tahun 2025 dapat dikatakan efisien karena capaian indikator kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya yang menunjukkan nilai besar dari 1.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauh mana kinerja program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.287
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya konektivitas wilayah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Rasio Konektivitas			99,28%		
1.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	99,41	0,99	Efektif
2.	Program Pengelolaan pelayaran	Persentase dermaga dan angkutan danau yang sesuai standar kelayakan	99,38	0,99	Efektif
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	93,05	1,06	Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Indikator kinerja Rasio Konektivitas didukung oleh 3 program. Semua program mendukung capaian kinerja sasaran dengan perolehan nilai efektifitas lebih dari 0,9. Dengan kata lain, program yang ada sangat mendukung tercapainya sasaran yang akan dilaksanakan.

3. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pemukiman rumah layak huni

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pemukiman rumah layak huni” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.288
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya pemukiman rumah layak huni

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Persen	73,75	65,82	89,25

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2025

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah layak huni harus memenuhi syarat keselamatan

bangunan, kecukupan minimum luas, serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Kriteria hunian layak menurut BPS meliputi:

- Ketahanan Bangunan: Atap, dinding, dan lantai bangunan yang kokoh
- Luas Tempat Tinggal: Minimal 7,2 m² per kapita
- Akses Air Minum: Memiliki akses ke sumber air minum layak
- Akses Sanitasi: Memiliki akses ke fasilitas sanitasi layak

Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Berdasarkan capaian tahun 2025 indikator Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau sebesar 65,82 dengan target 73,75. Capaian belum melebihi target yang ditetapkan dengan selisih sebesar 7,93 dengan persentase capaian yakni 89,25.

Tabel 2.289
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	79,75	73,75	65,82	89,25

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 realisasi belum melebihi baseline tahun 2024 yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan baseline tahun 2024, selisih tersebut sebesar 13,93%. Namun jika dilihat dari tingkat capaiannya terlihat ada peningkatan dari baseline 2024.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian

kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.290
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Capaian
1.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	65,85	65,85	79	83,35%

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum indikator kinerja utama di atas memiliki kinerja yang belum melebihi target akhir 2029.. Bahkan selisih untuk memenuhi target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029 sebesar 13,15. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau pada tahun 2025 hanya 65,85 sama dengan baseline tahun 2024. Kesempatan untuk memperoleh capaian sesuai dengan target yang ditetapkan minimal sebesar 3,3% per tahunnya.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 :

Tabel 2.291
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Pengembangan Perumahan	339.943.700,00	283.088.097,00	83,27
2.	Program Kawasan Permukiman	317.713.000,00	313.298.500,00	98,61
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	99,95
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.499.189.147,00	3.295.740.129,00	94,19
Jumlah		5.551.465.847,00	5.286.063.576,00	95,22

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Indikator Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan

terjangkau didukung oleh 4 program dengan rata – rata realisasi anggaran yang sangat tinggi mencapai 95,22%. Hanya 1 program yang capaiannya 83,27% yakni program Program Pengembangan Perumahan sedangkan yang capaian program lainnya lebih dari 90%.

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan relisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.292
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian	
Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	73,75	65,82	89,25	5.551.465.847,00	5.286.063.576,00	95,22	0,94

Sumber : Pengolahan Data LKjIP Tahun 2025

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja sasaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian 1 indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya pemukiman rumah layak huni Tahun 2025 dapat dikatakan efisien karena capaian indikator kinerja tidak jauh selisihnya dengan capaian realisasi anggaran. Hal ini terlihat dari nilai perbandingannya yang menunjukkan nilai besar dari 0,94.

Di samping menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya, analisa terhadap program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja juga perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah program / kegiatan yang dilakukan mendukung kepada pencapaian kinerja sasaran atau tidak.

Untuk melihat efektifitas kinerja program atau sejauhmana kinerja

program mendukung kepada capaian kinerja sasaran dapat diketahui dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja program. Tingkat efektifitas sebuah program dapat ditentukan dari seberapa besar program tersebut mendukung capaian sasaran. Untuk mengetahui dukungan program / kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.293
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya pemukiman rumah layak huni

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau		89,25		
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	94%	0,94	Efektif
2.	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 ha	32,93%	2,71	Kurang Efektif
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani	1322%	0,07	Kurang Efektif
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	108%	0,82	Cukup Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Capaian sasaran strategis untuk meningkatkan pemukiman rumah layak huni di Kabupaten Agam pada tahun 2025 menunjukkan performa yang cukup kuat secara makro, namun tetap menyisakan beberapa catatan evaluatif pada level program pendukungnya. Indikator utama yang merepresentasikan keberhasilan sasaran ini, yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau, berhasil menyentuh angka 89,25%. Angka ini menjadi cerminan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan standar hunian bagi masyarakat telah berjalan pada jalur yang tepat, didukung oleh Program Pengembangan Perumahan yang fokus pada penyediaan rumah layak bagi warga korban bencana dengan tingkat capaian 94%. Dengan nilai efektivitas sebesar 0,94, program penanganan pascabencana ini dinilai telah memberikan dampak yang nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun indikator utama menunjukkan hasil yang memuaskan, terdapat dinamika yang cukup kontras pada beberapa program teknis lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Program Kawasan Permukiman yang menargetkan pengurangan luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha tercatat baru mencapai realisasi sebesar 32,93%. Rendahnya capaian ini, ditambah dengan nilai efektivitas sebesar 2,71, menempatkan program tersebut dalam kategori kurang efektif. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan fisik di lapangan atau mungkin hambatan birokrasi yang memperlambat proses pengerjaan. Kondisi serupa juga terlihat pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang menangani area di luar kawasan kumuh. Program ini mencatatkan angka realisasi yang sangat ekstrim, yakni mencapai 1.322%, namun hanya memiliki nilai efektivitas sebesar 0,07. Fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi antara perencanaan target yang terlalu rendah dengan realisasi di lapangan, sehingga meskipun secara kuantitas melampaui target, penggunaan sumber daya dinilai sangat tidak efisien dan masuk dalam kategori kurang efektif.

Di sisi lain, kelancaran seluruh urusan pemerintahan dalam mendukung isu pemukiman ini ditopang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini berhasil memenuhi kebutuhan operasional kantor dan aparatur sipil negara sebesar 108% dengan nilai efektivitas 0,82, yang secara umum dikategorikan cukup efektif. Keberhasilan dukungan administratif ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi-fungsi teknis lainnya. Secara kolektif, meskipun akses rumah layak huni di Kabupaten Agam sudah sangat tinggi, hasil evaluasi tahun 2025 ini memberikan rekomendasi kuat bagi instansi terkait untuk melakukan kaji ulang terhadap sistem perencanaan target dan sinkronisasi anggaran. Fokus utama untuk tahun mendatang adalah memperbaiki ketepatan perencanaan pada program-program penanganan kawasan kumuh agar nilai efektivitas dapat meningkat sejalan dengan realisasi fisiknya.

2.3.3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pada Misi VI

(Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat)

Misi VI pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 memiliki tujuan “Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari”. Tujuan ini memiliki 1 indikator kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.294
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Misi V Tahun 2025
Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Nagari Mandiri (Indeks Desa)	Indeks	46,37	58,69	126,57

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

ID atau Indeks Desa merupakan evolusi atau pengembangan dari IDM atau Indeks Desa Membangun. IDM (yang digunakan sebelum 2025) adalah indeks komposit untuk mengukur kemandirian desa. Indeks Desa 2025 adalah penyempurnaan IDM dengan indikator yang lebih sederhana, terintegrasi, dan meluas cakupannya. Indeks Desa berfokus pada layanan dasar, tata kelola pemerintahan desa, dan konektivitas, serta lebih selaras dengan era digital. Sama halnya dengan IDM, Indeks Desa bertujuan mengukur status perkembangan desa (Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, Mandiri). Pada tahun 2025, perolehan Indeks Desa (ID) mencapai 58,69 dengan persentase capaian 126,57 %. Capaian tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan dengan selisih 12,32.

Pencapaian tujuan pada Misi VI ini, didukung melalui 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan per sasaran sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kemandirian desa

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kemandirian desa” dapat terlihat pada capaian 1 indikator kinerja utama. Adapun capaian kinerja indikator tersebut jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.295
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya kemandirian desa

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Nagari Mandiri (Indeks Desa)	Persen	43	54	126

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD-P Kab.Agam Tahun 2025

Jumlah Nagari Mandiri mencapai 54% dari target 43% dengan capaian 126% pada tahun 2025. Indikator Jumlah Nagari Mandiri (Indeks Desa) berbeda dengan Indeks Desa Membangun yang merupakan indikator tahun 2024. Metode penilaian terhadap kedua indikator tersebut juga berbeda. Penilaian Nagari Mandiri (Indeks Desa) pada tahun 2025 di koordinasi oleh Perangkat Daerah, Nagari dan didampingi oleh Pendamping Desa dari Kementerian Desa. Penginputan data untuk penunjang Nagari Mandiri dilakukan pada aplikasi Om-SPAN dari Kementerian Keuangan, dengan beberapa indikator penilaian.

Untuk melihat kemajuan capaian sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama tahun ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian indikatornya dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut disajikan data perbandingan capaian indikator sasaran berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025 dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.296
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
kemandirian desa Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

N o	Indikator Kinerja	Baselin e 2024	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Nagari Mandiri (Indeks Desa)	42	43	54	126

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tahun 2025 telah melebihi baseline tahun 2024 Nagari Mandiri (Indeks Desa) pada tahun 2025. Jumlah nagari di Kabupaten Agam yaitu 54 dari 92 nagari. Kecamatan yang memiliki keseluruhan

nagari dengan status mandiri diantaranya Kecamatan Lubuk Basung, Ampek Angkek dan Candung.

Capaian kinerja tahun ini juga perlu kita sandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025 – 2029, sehingga dapat diketahui seberapa besar upaya yang harus dilakukan sehingga target akhir periode RPJMD tersebut dapat dicapai. Berikut disampaikan kondisi capaian kinerja sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD 2025 – 2029.

Tabel 2.297
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kemandirian desa
Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026

N o	Indikator Kinerja	Baseli ne 2024	Realisa si 2025	Target Akhir 2029	Capaian (%)
1.	Persentase Nagari Mandiri (Indeks Desa)	42	54	47	114,89

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja utama di atas memiliki kinerja yang tinggi yaitu sebesar 54 dibandingkan target akhir 47 dengan capaian 114,89%. dan sudah melebihi target akhir periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. Perlu dilakukan evaluasi untuk penetapan target tahun berikutnya.

Tabel berikut ini menyajikan data terkait program/kegiatan beserta besar anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal pada tahun 2025 :

Tabel 2.298
Program Dan Anggaran Yang Mendukung Realisasi Sasaran Meningkatnya
kemandirian desa Tahun 2025

N o	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Penataan Desa	80.065.000	68.400.800	85,43
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	498.783.926	413.972.450	83,00

3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.666.919.884	4.366.801.149	93,57
Jumlah		5.245.768.810	4.849.174.399	92,44

Sumber : Hasil Pengolahan Data LKjIP Kab. Agam Tahun 2025

Indikator Persentase Nagari Mandiri (Indeks Desa) didukung oleh 3 Program dengan rata – rata realisasi anggaran sebesar 92,44%. Capaian anggaran pada program ini cukup tinggi. yang berarti bahwasanya anggaran program yang ada mendukung dalam pelaksanaan indikator nagari mandiri (indeks desa).

Dari tabel program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran di atas, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 2.299
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Program Sasaran
Meningkatnya kemandirian desa

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Nilai Efektifitas	Tingkat Efektifitas
Persentase Nagari Mandiri (Indeks Desa)			126		
1	Program Penataan Desa	Persentase pasilitasi penataan desa	84,15	1,49	Kurang Efektif
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	150	0,84	Cukup Efektif
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	1,26	Kurang Efektif

Sumber : Pengolahan Data LKjIP, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 3 program yang mendukung capaian IKU Persentase Nagari mandiri (indeks desa). Dari 3 program, 2 diantaranya memperoleh nilai efektifitas yang kurang dan 1 lainnya

cukup efektif. Hal ini menandakan bahwasanya capaian kinerja program belum menunjang dalam pelaksanaan persentase (indeks desa). Walaupun rata-rata capaian kinerja program tersebut berada pada kategori sangat tinggi, namun terlihat kurang efektif mendukung capaian kinerja sasaran. Pelaksanaan program ternyata tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja sasaran, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya capaian kinerja sasaran. Untuk selanjutnya perlu melakukan analisis mendalam dalam perumusan penjenjangan kinerja dan menentukan program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk mendukung kinerja sasaran.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pada Tahun 2025, Kabupaten Agam memperoleh Tugas Pembantuan (TP) dari pemerintah pusat, dialokasikan pada Dinas Pertanian, sebesar Rp. 14.608.677.000,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Agam Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Agam

Untuk Tahun 2025, Kabupaten Agam memperoleh Tugas Pembantuan untuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Agam. Ketahanan pangan merupakan prioritas pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan dan penguatan

pembangunan pertanian dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Agam pada Tahun 2025 memperoleh Tugas Pembantuan (TP) dari pemerintah pusat. Kegiatan ini merupakan tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian melalui Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas-Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari APBN Tahun 2025.

Pemanfaatan anggaran tugas pembantuan Tahun 2025 digunakan untuk kegiatan:

a. Kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa Pekerjaan Konstruksi

Optimasi Lahan Non Rawa

Optimasi lahan non rawa merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan selain rawa. Pada kegiatan ini dilaksanakan pekerjaan konstruksi berupa perbaikan sarana fisik guna meningkatkan fungsi lahan, ketersediaan air dan produktivitas tanaman. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pompa irigasi, pembangunan rumah pompa dan bak penampung serta pembangunan bak kontrol dan pipanisasi.

Gambar 3.1 Konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2025

Kegiatan ini dilaksanakan dengan target luas lahan yang dioptimasi melalui pekerjaan konstruksi dengan target luas yang terfasilitasi 2.631 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan 173 kelompok tani terfasilitasi. Realisasi luas lahan yang terfasilitasi adalah sebesar 2.570,27 Hektar (97.69%). Tidak tercapainya target karena terdapat beberapa konstruksi terkena dampak bencana alam. Berikut adalah tabel sebaran konstruksi optimasi lahan di lima belas kecamatan:

Tabel 3.1 Sebaran Konstruksi Optimasi Lahan di Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Target Luas (ha)	Luas yang terfasilitasi (ha)	Capaian
1	Ampek Angkek	8	114,20	114,20	100%
2	Ampek Nagari	15	171,40	171,40	100%
3	Banuhampu	6	115	103,60	90%
4	Baso	12	209,60	209,60	100%
5	Canduang	13	158,70	158,70	100%
6	IV Koto	10	174	143.12	82%
7	Kamang Magek	13	218,20	218,20	100%
8	Lubuk Basung	9	112,70	112,70	100%
9	Malalak	9	103,70	103,70	100%
10	Matur	14	230,20	230,20	100%
11	Palembayan	17	281,60	269,10	97.06%
12	Sungai Pua	2	33,40	33,40	100%
13	Tanjung Mutiara	8	101,10	101,10	100%
14	Tanjung Raya	19	302,65	302,65	100%
15	Tilatang Kamang	18	298,60	298,60	100%
Total		173	2.631	2.570,27	97.69%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2026

b. Kegiatan Olah Lahan Optimasi Lahan Non Rawa

Merupakan kegiatan pengolahan tanah pada lahan kering atau sawah non-rawa agar kondisi tanah lebih gembur, subur, mudah ditanami dan hasil pertanian meningkat. Pada Tahun 2025, target olah lahan optimasi lahan non rawa seluas 2.384,53 ha dengan realisasi 90,2% atau seluas 2.152,22 ha. Hal ini disebabkan beberapa petani tidak mengolah lahan di bulan Oktober, November dan Desember akibat iklim serta terdapat lahan yang terkena dampak bencana alam.

Tabel 3.2 Realisasi olah lahan di Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Target Luas (ha)	Realisasi olah lahan (ha)	Capaian
1	Ampek Angkek	8	107.44	84.48	79%
2	Ampek Nagari	15	153.30	153.30	100%
3	Banuhampu	6	97.80	79.35	81%
4	Baso	12	183.59	183.59	100%
5	Canduang	13	130.85	89.60	68%
6	IV Koto	10	158.60	119.60	75%
7	Kamang Magek	13	217.40	203.90	94%
8	Lubuk Basung	9	98.90	98.90	100%
9	Malalak	72	67.40	44.80	66%
10	Matur	14	225.85	222.60	99%
11	Palembayan	17	278.10	239	86%
12	Sungai Pua	2	30	17	57%
13	Tanjung Mutiara	8	101	101	100%
14	Tanjung Raya	19	282.35	263.15	93%
15	Tilatang Kamang	18	251.95	251.95	100%
	Total	173	2.384,53	2.152,22	90.26%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2026

c. Kegiatan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Kegiatan ini berupa pembangunan sarana fisik yang bertujuan menyimpan, mengatur dan menjaga ketersediaan air untuk mengurangi dampak kekeringan, banjir dan perubahan pola hujan akibat anomali iklim. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembangunan dam parit sebanyak tiga unit, 2 unit di Kecamatan Baso dan 1 unit di Kecamatan Ampek Angkek.

Tabel 3. 3 Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian	Dinas Pertanian		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Terwujudnya Peningkatan Indeks Pertanaman dan produktivitas melalui perbaikan/pembangunan infrastruktur lahan dan air ditingkat usaha tani							
				Kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa	Terealisasinya dan termanfaatnya Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa mendukung penambahan areal tanam	2.631 ha	2.570,27 ha	97.69%	Tidak terlaksana sesuai waktu kontrak karena adanya bencana alam pada tanggal 24 November 2025 dan masih terjadi bencana alam susulan di awal Bulan Januari 2026. Kemudian, adanya pekerjaan konstruksi yang telah mencapai bobot 100% tetapi tertimbun material (Tanah, pasir, batu) akibat bencana alam.	Perpanjangan waktu kontrak		
				Kegiatan Olah Lahan Optimasi Lahan Non Rawa	Terlaksananya pengolahan lahan untuk mendukung pertanaman padi sawah di lokasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan non rawa	2.384,53 ha	2.155,22 ha	90.26 %	Realisasi memang tidak sesuai target rencana karena ada beberapa kelompok yang tidak melakukan pengolahan lahan di bulan Oktober, November, dan Desember. Kemudian, adanya lahan petani yang terkena dampak bencana alam.	-		
				Kegiatan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Dam Parit	Terbangun dan termanfaatnya bangunan konservasi air Antisipasi Anomali Iklim pada tahun 2025	3 Unit	3 Unit	100%	Tidak ada	-		

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2026

3.2. Manfaat

Melalui pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian Tahun 2025 diperoleh manfaat yaitu dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) Padi Sawah dari lahan yang semula 1 kali tanam menjadi 1,5 –2 kali tanam per tahun melalui perbaikan tata air dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian agar mampu mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan di sektor pertanian belum sepenuhnya berjalan optimal karena adanya beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja. Salah satu hambatan utama adalah terjadinya bencana alam hidrometeorologi yang berdampak terganggunya jadwal pelaksanaan kegiatan, kerusakan lahan pertanian serta menurunnya keberhasilan kegiatan budidaya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hambatan tersebut memerlukan upaya mitigasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta petani penerima manfaat agar pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan di sektor pertanian dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

3.4.1. Saran

Dalam rangka meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi terhadap pelaksanaan tugas pembantuan, disarankan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan yang berbasis mitigasi risiko bencana, dengan mempertimbangkan potensi kejadian hidrometeorologi pada lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Perlu ditingkatkan pemanfaatan informasi prakiraan cuaca dan iklim dari instansi berwenang sebagai dasar dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Perlu dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi serta pola budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk penggunaan varietas yang tahan terhadap kondisi ekstrem.
4. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka penanganan dampak bencana dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

3.4.2. Tindak Lanjut

Sebagai upaya penanganan atas hambatan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah terdampak bencana.
2. Melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan lahan pertanian yang terdampak, melalui pemberian bantuan sarana produksi, perbaikan infrastruktur pendukung, serta pendampingan teknis kepada petani.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan prioritas serta merencanakan kembali kegiatan yang belum terlaksana pada periode berikutnya.
4. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pendampingan oleh tenaga penyuluh, guna memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Agam yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaannya, penerapan SPM di bidang Urusan Pendidikan diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis pelayanan Minimal Pendidikan, adapun jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan terdiri dari:

a. Pendidikan Dasar.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

b. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

c. Pendidikan Anak Usia Dini.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

4.1.2 Target, Realisasi dan Capaian SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM di Bidang urusan Pendidikan, diuraikan dalam target, realisasi dan capaian seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	10.100 orang	10.100 Orang	100%	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	61	61	100	
	2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	53	53	100	
2		Pendidikan Dasar	Orang	81900 Orang	81659 Orang	99.71%	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
SD (2025)							
	1	Kemampuan literasi	Nilai	68.01	75.72	100	
	2	Kemampuan numerasi	Nilai	63.1	74.38	100	
	3	Indeks Iklim keamanan	Nilai	70.85	74.35	100	
	4	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	70.19	66.51	100	
	5	Indeks Iklim inklusivitas	Nilai	58.5	57.78	100	
SMP (2025)							
	1	Kemampuan literasi	Nilai	70.67	76.77	100	
	2	Kemampuan numerasi	Nilai	63.1	73.47	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
3	Indeks Iklim keamanan	Nilai	70.85	67.45	100	
	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	70.19	65.46	95.31	
	Indeks Iklim inklusivitas	Nilai	58.5	55.1	100	
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	1862 Orang	1566 Orang	84.10%	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	30.74	32.78	100	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam Tahun 2025

4.1.3 Alokasi Anggaran

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan anggaran yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
(1)	Pendidikan Dasar						
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				3.380.024.961	3.195.590.250	94.54
ANGKA PARTISIPATI SEKOLAH							

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
		1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	200.000.000	197.715.000	99.89
		2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	938.093.993	931.710.104	99.32
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	112.831.800	111.262.077	98.61
	LITERASI						
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.443.576.968	1.368.658.820	96.06
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	599.442.200	482.915.539	80.56
		3	Penyelenggaraa n Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	42.110.000	41.504.530	98.56
	NUMERASI			0	0	0	0
	KEAMANAN						
		1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	43.970.000	43.824.180	99.67
	KEBHINEKAAN			0	0	0	0
	INKLUSIFITAS			0	0	0	0
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.099.912.193	1.069.642.916	97.25
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH						

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
		1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	519.299.913	517.053.689	99.57
		2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	95.335.000	93.617.360	98.20
LITERASI							
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	394.980.000	386.488.000	97.85
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	49.384.280	45.283.967	91.70
	NUMERASI				0	0	0
	KEAMANAN						
		1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	40.913.000	27.199.900	66.48
	KEBHINEKAAN				0	0	0
	INKLUSIFITAS				0	0	0
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				668.526.026	654.258.549	97.87
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH							
		1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	529.024.536	526.256.439	99.48
		2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	44.740.000	37.160.100	83.06
KEKHUSUSAN PAUD							

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	48.161.500	46.351.620	96.24
		2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	46.599.990	44.490.390	95.47
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH				0	0	0
5	Pembinaan , Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah				0	0	0
	LITERASI				0	0	0
	NUMERASI				0	0	0

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam Tahun 2025

4.1.4 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan faktor penting dalam pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di daerah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No		Jenis Tenaga	Jumlah (orang)												Total
			PNS				Non PNS				PPPK				
1		Tenaga Pendidik	PA UD	SD/ MI	SMP /MTs	PK BM	PA UD	SD /MI	SMP /MTs	PK BM	PA UD	SD/MI	SMP /MTs	PK BM	
	a.	Guru	137	2016	1347	6	986	866	1046	113	2	1524	529	8	8580
	b.	Pengawas	2	21	2										25

c.	Penilik	11	0	0	11
d.	Pamong	3	0	0	3
2	Tenaga Kependidikan	163	1020	53	1236

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam Tahun 2025

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Agam tentu mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, berikut permasalahan dan solusi per tahap penerapan SPM yang ditemukan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan Dasar	1	Pengumpulan Data	Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan karena data peserta didik yang kurang mampu perlu pengolahan terlebih dahulu	Membuat tim khusus untuk mengumpulkan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	Perhitungan kebutuhan saat ini hanya berdasarkan angka minimum yang harus dicapai di Rapor Pendidikan. Diperlukan juga data dari bidang yang bersangkutan	koordinasi yang intens seluruh Elemen
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	Penyusunan sub kegiatan belum memprioritaskan anggaran Untuk pemenuhan SPM	Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	Keterbatasan anggaran sehingga pemenuhan SPM belum maksimal	Monitoring dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan	Solusi
					terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
2	Pendidikan Kesetaraan	1	Pengumpulan Data	Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan karena data peserta didik yang kurang mampu perlu pengolahan terlebih dahulu	Membuat tim khusus untuk mengumpulkan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	Perhitungan kebutuhan saat ini hanya berdasarkan angka minimum yang harus dicapai di Rapor Pendidikan. Diperlukan juga data dari bidang yang bersangkutan	koordinasi yang intens seluruh Elemen
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	Belum Maksimal disebabkan karena pertimbangan anggaran Pemerintah Daerah sehingga dalam penyusunan rencana anggaran mempertimbangkan mandatori dan kebutuhan wajib daerah	Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh siswa miskin karena keterbatasan anggaran	Monitoring dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
3	Lainnya			Keterlambatan realese rapor pendidikan sebagai sumber data pengisian laporan SPM Triwulan 1	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan	Solusi
				Masih adanya data yang belum tersedia untuk pemenuhan laporan SPM	

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Tahun 2025

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.2 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengacu pada definisi operasional masing-masing pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun jenis pelayanan dasar yang berkaitan dengan pelayanan SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil memiliki standar kuantitas kunjungan 4 kali selama hamil; 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. Standar kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan ante natal 10 T yang terdiri dari:

- Pengukuran berat badan.
- Pengukuran tekanan darah.
- Pengukuran LILA.
- Pengukuran tinggi puncak Rahim.
- Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin.
- Pemberian imunisasi sesuai status imunisasi.
- Tablet tambah darah.
- Tes laboratorium/tripel eliminasi.
- Tata laksana/penanganan kasus.
- Temu wicara(konseling).

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Standar persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal(APN) sesuai

standar dilakukan di fasilitas kesehatan dan tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari Dokter dan bidan atau 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas KN1: 6-48 jam pasca kelahiran, KN2: 3-7 hari pasca kelahiran, .KN 3: 8-28 hari pasca kelahiran dan standar kualitas.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sakit dan pelayanan balita sehat. Pelayanan kesehatan balita terdiri dari pelayanan kesehatan balita 0-11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan dan pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan 1 kali dalam 1 tahun ajaran anak kelas 1-9 dan anak usia 7-15 tahun diluar sekolah.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan pada usiaproduktif meliputi kegiatan skrining, minimal 1 kali setahun meliputi:

- Pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut
- Pengukuran tekanan darah
- Pemeriksaan gula darah
- Pemeriksaan SADANIS dan IVA Tes untuk wanita usia 30-50 tahun.
- Anamnesa perilaku berisiko
- Tindak lanjut hasil skrining: rujukan jika perlu dan penyuluhan

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usialanjut sesuai standar meliputi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi kegiatan:

- Pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan di fasyankes. Tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambah pelayanan terapi farmakologi.
- Edukasi perubahan gaya hidup dan atau kepatuhan minum obat.
- Melakukan rujukan bila diperlukan.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus meliputi kegiatan:

- Pengukuran gula darah minimal satu kali sebulan di fasyankes. Tes gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200mg/dl ditambah pelayanan terapi farmakologi.
- Edukasi perubahan gaya hidup dan atau nutrisi.
- Melakukan rujukan bila diperlukan.

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Pelayanan kesehatan ODGJ Berat sesuai standar penderita bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

- Pemeriksaan kesehatan jiwa
- Edukasi
- Terapi farmakologi

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar meliputi:

- Pemeriksaan klinis
- Pemeriksaan penunjang
- Edukasi

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- Edukasi perilaku berisiko
- Skrining

4.2.3 Target, Realisasi dan Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa dalam pencapaian penerapan SPM diiringi dengan capaian mutu pelayanan dasar. Target, realisasi dan capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Target	Realisasi	Capaian	Persentase
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	3856	3856	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						

NO	Jenis Pelayanan Dasar	satuan	Target	Realisasi	Capaian	Angka
	Vaksin Tetafus Difteri (Td)		3856	3856	100	
	Tablet tambahan darah		3856	3856	100	
	Alat deteksi resiko ibu hamil : Tes Kehamilan		856	856	100	
	Alat deteksi resiko ibu hamil : Pemeriksaan HB		3856	3856	100	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah		3856	3856	100	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)		3856	3856	100	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV		23	23	100	
	Kartu ibu/rekam medis ibu		3856	3856	100	
	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		3856	3856	100	
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
	Gel USG		23	23	100	
	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;		251	251	100	
	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		101	101	100	
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	
	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)		3856	3856	100	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		3808	3808	100	
	Formulir Fotograf		3808	3808	100	
	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		3808	3808	100	
	Buku KIA		3808	3808	100	
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi		251	251	100	
	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		101	101	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar		satuan	Target	Realisasi	Capaian	Angka
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir		3661	3661	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
		Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)		3661	3661	100	
		Vitamin K1 Injeksi		3661	3661	100	
		Salep/Tetes mata antibiotic		3661	3661	100	
		Formulir bayi baru lahir	Formulir	3661	3661	100	
		Formulir MTBM	Formulir	3661	3661	100	
		Buku KIA		3661	3661	100	
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
		Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak		219	219	100	
		Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
		Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		101	101	100	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku		46	46	100	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	
		Kader Kesehatan		4026	4026	100	
		Pelayanan Kesehatan Balita		16504	16504	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Kuis/Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku	Dokumen	16504	16504	100	
	2	Formulir DDTK	Formulir	16504	16504	100	
	3	Buku KIA		16504	16504	100	
	4	Vitamin A Biru		6288	6288	100	
	5	Vitamin A Merah		15144	15144	100	
	6	Vaksin Imunisasi Dasar : BCG		3880	3880	100	
	7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes		3880	5436	100	
	8	Vaksin imunisasi dasar: IPV		3880	3880	100	
	9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib		3880	3880	100	
	10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella		3880	3880	100	
	11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib		3880	3880	100	
	12	Vaksin imunisasi lanjutan :		3880	3880	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	atuan	Target	Realisasi	Capaian	Angka
	Campak – Rubella					
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)		3880	4655	100	
14	Peralatan Anafilaktik		869	869	100	
15	Formula Terapi Gizi Buruk		1	1	100	
16	Tenaga medis : Dokter		217	217	100	
17	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
18	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	
20	Guru PAUD		3663	3663	100	
21	Kader Kesehatan		4026	4026	100	
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		38241	38241	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Buku raport kesehatan		38241	38241	100	
2.	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan		38241	38241	100	
3.	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	38241	38241	100	
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	38241	38241	100	
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	38241	38241	100	
6.	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah		247	247	100	
7.	Alat Pemeriksaan Hb		23	23	100	
8.	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7		23	23	100	
9.	Media promosi kesehatan		23	23	100	
10.	Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)		38241	38241	100	
11.	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi		311	311	100	
12.	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
13.	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
14.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		101	101	100	
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		46	46	100	
17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru		3663	3663	100	
18.	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor		4026	4026	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar		satuan	Target	Realisasi	Capaian	Angka
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		158035	158035	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
	2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)		46	46	100	
	3	Alat : Tensimeter		92	92	100	
	4	Alat : Glukometer		46	46	100	
	5	Alat: Alat Pemeriksa Hb		23	23	100	
	6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol		46	46	100	
	7	Alat : KIT IVA Tes		23	23	100	
	8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb		23	23	100	
	9	Kit Ophthalmologi Komunitas		23	23	100	
	10	Kuesioner PUMA	Dokumen	23	23	100	
	11	Alat Pelayanan KB	Unit	69	69	100	
	12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	23	23	100	
	13	Vaksin Tetanus Difteri (td)		78782	78782	100	
	14	Tenaga medis : Dokter		217	217	100	
	15	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
	16	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
	17	enaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	
	18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		46	46	100	
	19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu		4026	4026	100	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		30918	30918	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							

NO	Jenis Pelayanan Dasar	satuan	Target	Realisasi	Capaian	Angka
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter		23	23	100	
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah		23	23	100	
3	Alat pemeriksaan kolesterol		23	23	100	
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol		30918	30918	100	
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)		30918	30918	100	
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya		30918	30918	100	
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
8	Tenaga medis : Dokter		217	217	100	
9	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
10	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
11	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		46	46	100	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		46	46	100	
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu		4026	4026	100	
	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		7905	7905	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE		23	23	100	
2	Obat Hipertensi		7905	7905	100	
3	Tensimeter		92	92	100	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)		23	23	100	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
6	Tenaga medis : Dokter		217	217	100	
7	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
8	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	

NO		Jenis Pelayanan Dasar	atuan	Target	Realisasi	Capaian	angan
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku		46	46	100	
	11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian		101	101	100	
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		46	46	100	
		Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus		2124	2124	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Obat Diabetes Melitus		2124	2124	100	
	2	Fotometer atau Glukometer		23	23	100	
	3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet		23	23	100	
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	23	23	100	
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
	6	Tenaga medis : Dokter		217	217	100	
	7	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
	8	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		101	101	100	
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		46	46	100	
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		46	46	100	
	12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)		45	45	100	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		716	716	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1	Buku pedoman diagnosis penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan		23	23	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	satuan	Target	Realisasi	Capaian	Angka
	Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)					
2	Penyediaan Psikofarmaka		23	23	100	
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	23	23	100	
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	23	23	100	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
6	Tenaga kesehatan : Dokter		217	217	100	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa		23	23	100	
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.		23	23	100	
9	Tenaga profesional lainnya		23	23	100	
	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkolosis	Orang	2864	2864	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		23	23	100	
2	Reagen Zn TB		2864	2864	100	
3	Masker bedah dan Masker N95		2864	2864	100	
4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		2864	2864	100	
5	Catridge Tes Cepat Molekuler		2864	2864	100	
6	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Dokumen	23	23	100	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen	23	23	100	
8	Tuberkulin		23	23	100	
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru		221	221	100	
10	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		101	101	100	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		46	46	100	
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)		45	45	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
14	Tenaga kesehatan : Radiografer		12	12	100	
15	Kader Kesehatan		4026	4026	100	
	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency)		1853	1853	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, Poster, banner		23	23	100	
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama		1853	1853	100	
3	Bahan Medis Habis pakai, Handschoen Alkohol swab Plester Lancet/jarum steril Jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai		1853	1853	100	
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK		1853	1853	100	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin		221	221	100	
6	Tenaga kesehatan : Bidan		494	494	100	
7	Tenaga kesehatan : Perawat		358	358	100	
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)		45	45	100	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat		46	46	100	
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan		96	96	100	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Agam Tahun 2025

4.2.4 Alokasi Anggaran

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan anggaran yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan	Ket
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	175.805.000	161.502.200	91.86	
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	45.825.000	26.533.000	57.90	
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000	200.000	100	
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4.000.000	4.000.000	90.60	
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah	769.634.800	721.550.000	93.75	
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.900.000	11.900.000	100	
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	14.000.000	14.000.000	100	
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	0	0	0	

9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	128.363.000	128.363.000	99.99	
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	0	0	0	
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	487.941.000	165.500.000	94.50	
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.950.000	13.500.000	61.50	
JUMLAH TOTAL				1.659.618.800	1.245.033.800	75.02	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dianggarkan sehingga pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tidak terlaksana dengan baik, dan kedepannya harus dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158 ayat (2).

4.2.5 Dukungan Personil

Penerapan SPM di Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dengan dukungan personil tenaga medis yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Dukungan Personil Pencapaian dan Penerapan SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)		Total
		PNS	Non	

			PNS	
1	Dokter Umum/Kandungan	87	6	93
2	Dokter Gigi	34	1	35
3	Perawat	313	1	314
4	Bidan	438	9	447
5	Nutrisisionis	51	3	54
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	60	0	60

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab.Agam Tahun 2025

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Ada Beberapa Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan yang belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan/ program sehingga target tidak tercapai. Berikut disampaikan permasalahan dan upaya/solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 :

Tabel 4.8
Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	PelayPelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. 2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini dari dana sumber DAU dan DAK. Dana DAU belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dana DAKpenggunaannya di rinci Kemenkes sesuai program prioritas nasional bidang kesehatan bukan sesuai kebutuhan daerah	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Pagu dari dana DAU perlu ditingkatkan jumlahnya sehingga target kegiatan dapat di capai
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. 2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan

NO	Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.. 2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. 2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. 2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Pagu dari dana DAU perlu ditingkatkan jumlahnya sehingga target kegiatan dapat di capai
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. 2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas. 2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan

NO	Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Pengumpulan Data Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1. Pelaksanaan Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Pagu dari dana DAU perlu ditingkatkan jumlahnya sehingga target kegiatan dapat di capai
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. Pelaksanaan Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Pagu dari dana DAU perlu ditingkatkan jumlahnya sehingga target kegiatan dapat di capai
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. Pelaksanaan Sasaran DTKS tidak bisa kita dapatkan by name dan by adress per wilayah kerja Puskesmas yang 1 kecamatan ada 2 Puskesmas.	1. Agar pihak Kecamatan melakukan pembilan sasaran berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2. Perlu tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan
		2. Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar Anggaran yang tersedia untuk	

NO	Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		kegiatan ini hanya dana sumber DAK dengan rincian kegiatan yang sangat rinci dari Kemenkes	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2025

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang ditentukan oleh peraturan kementerian teknis Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan jenis pelayanan dasar antara lain:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target, Realisasi dan Capaian SPM

Pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan target, realisasi dan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	eterangan
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	575	575	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
JARINGAN PERPIPAAN						
Kuantitas SPAM						
1.	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	126	126	100	

NO	jenis Pelayanan Dasar	Satuan	target	realisasi	target	tercapaian	keterangan
Kualitas SPAM							
2.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga	126	126	100		
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN							
Kuantitas SPAM							
3.	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	100	(Tutup Mutu)	
Kualitas SPAM							
4.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	100	(Tutup Mutu)	

NO	Indeks Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	eterangan
	berbau					
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	2513	2513	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
KUANTITAS SPAL-D						
	1. n kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	551	551	100	
KUALITAS SPAL-D						
	2. n kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	100	(Tutup Mutu)
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	n Tangga	10	10	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Papain	eterangan
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	541	541	100	

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2025

4.3.3 Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang penerapan indikator SPM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebagai berikut :

Tabel 4.10
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Ket
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	1.836.101.220	1.519.397.501	82.75	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air	1	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	153.385.488	108.499.730	70.74	

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Ket
	Limbah	2	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	8.649.623.000	8.553.225.002	98,89	
Total				8.803.008.488	8.661.724.732	98.40	

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2025

4.3.4 Dukungan Personil

Jumlah personil dalam pengelolaan pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Kategori/Status Personil	Jumlah
1	PNS	8 Orang
2	Non PNS	4 Orang
Total		12 Orang

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam Tahun 2025

4.4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, ada beberapa persoalan/permasalahan serta solusi dalam pelaksanaannya, antara lain:

Tabel 4.12
Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-	1	Pengumpulan Data	1 Masih kurangnya data-data yang mendukung SPM air minum	Melakukan pendataan dalam rangka melengkapi data yang diminta

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
	hari			2	Peningkatan kapasitas dan jumlah personil dalam pengumpulan data	Perlunya penambahan dan pengembangan kapasitas personil SKPD pelaksana SPM dalam pengumpulan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Kurangnya pemahaman SPM dan penetapan target yang kurang tepat	Penetapan target sesuai dengan karakteristik daerah
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Alokasi anggaran yang masih kurang dalam pelaksanaan program air minum	Perlunya kebijakan dan keberpihakan dalam mengalokasikan anggaran untuk program air minum
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pembinaan SPM dari Kementerian yang belum rutin dan kontinu	Pemerintah pusat aktif dan kontinu melakukan sosialisasi kepada daerah untuk peningkatan pemahaman SPM
				2	Tumpang tindih peraturan dan kebijakan tentang SPM dan indikator SPM	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar Kementerian
				3	Kurangnya sumber mata air yang memenuhi standar	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan sosialisasi penerapan sanitasi aman agar menghindari mata air tanah tercemar oleh limbah domestik
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	1	Pengumpulan Data	1	Masih kurangnya data-data yang mendukung SPM air limbah domestik	Melakukan pendataan dalam rangka melengkapi data yang diminta

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)		Permasalahan	Solusi
	Domestik			2	Peningkatan kapasitas dan jumlah personil dalam pengumpulan data	Perlunya penambahan dan pengembangan kapasitas personil SKPD pelaksana SPM dalam pengumpulan data
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Kurangnya pemahaman SPM dan penetapan target yang kurang tepat	Penetapan target sesuai dengan karakteristik daerah
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Alokasi anggaran yang masih kurang dalam pelaksanaan program air limbah domestik	Perlunya kebijakan dan keberpihakan dalam mengalokasikan anggaran untuk program air limbah domestik
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pembinaan SPM dari Kementrian yang belum rutin dan kontinu	Pemerintah pusat aktif dan kontinu melakukan sosialisasi kepada daerah untuk peningkatan pemahaman SPM
				2	Tumpang tindih peraturan dan kebijakan tentang SPM dan indikator SPM	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar Kementerian
				3	Saat ini IPLT belum beroperasi di Kabupaten Agam, dalam proses penetapan perda dan retribusi	Penyusunan perda air limbah domestik serta retribusi IPLT

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2025

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan dua jenis pelayanan dasar antara lain:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten
- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah

4.4.2 Target, Realisasi dan Capaian SPM

Pencapaian penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat dengan target, realisasi dan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Orang	628	628	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana		26	26	100	
2.	Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana		54	54	100	
3.	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/Relokasi bagi bencana		77	77	100	
4.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	0	100	(tutup mutu)
2.	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Orang		0	100	(Mengisi Form Penerapan yang telah di minta aplikasi e-SPM)

		daerah					
	1.	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Rumah		0	100	
		a. Penilaian Oleh Tim Penaksir (Appraisal)	Rumah		0	100	
		b. Proses Sosialisasi kepada masyarakat, dan	Rumah		0	100	
		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam rencana aksi	Rumah		0	100	
	2.	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah		0	100	

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman 2025

4.4.3 Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Agam, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Penerapan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab.Agam Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
I	Program Pengembangan Rumah				158.455.600	127.792.550	80.65
		1		Pendataan Penyediaan dan Tehanilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	56.098.000	42.269.100	75.35

		1.	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	7.588.000	2.650.000	34.92
		2.	Identifikasi Perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kab/Kota	48.510.000	39.619.100	81.67
2	Program Pengembangan Rumah			102.357.600	85.523.450	83.55
		1.	Pembangunan rumah bagi korban bencana	3.507.600	1.243.100	35.44
		2.	Fasilitasi penyediaan Rumah bagi korban bencana Kab/Kota	98.850.000	84.280.350	85.26

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dianggarkan sehingga pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tidak terlaksana dengan baik, dan kedepannya harus dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158 ayat (2).

Untuk capaian pembangunan kembali rumah korban bencana, dilaksanakan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana daerah. Subkegiatan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat terletak pada subkegiatan yang sama.

4.4.4 Dukungan Personil

Dalam pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman didukung oleh personil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Agam, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.15

**Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2025**

No	Kategori/Status Personil	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang Perumahan	1
4	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1
5	Fungsional Analis Kebijakan	1
6	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1
7	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	1
8	Analis Perencanaan	1
9	Staf Administrasi	1
Total		9

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2025

4.5.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Agam Tahun 2025 tentunya mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain :

Tabel 4.16

**Permasalahan dan Solusi Penerapan & Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	1	Pengumpulan Data	1 Pada Kegiatan TA 2025, Metode Pengumpulan Data masih dilakukan secara manual. Untuk itu, untuk keberlanjutan kegiatan Pendataan Rumah Warga di Lokasi Rawan Bencana TA 2025 dilakukan dengan metode	Untuk Kegiatan Pendataan Rumah Warga di Lokasi Rawan Bencana pada TA 2025 dilakukan dengan metode berbasis aplikasi digital

			berbasis aplikasi digital	
2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan Kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar dilakukan masih dengan cara per kejadian bencana alam	Untuk kedepanya perlu dilakukan pendataan perumahan dan kajian bencana menyeluruh yang akan mengancam masing-masing kecamatan di Kabupaten Agam supaya pemenuhan penanganan SPM Perumahan Rakyat terlaksana.
3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Pemenuhan SPM untuk TA 2025, hanya terakomodir untuk Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Sehingga untuk Kegiatan pemenuhan SPM lainnya yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota belum dilaksanakan untuk TA 2025	Untuk Tahun Anggaran berikutnya, diharapkan penambahan anggaran untuk kegiatan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat
4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Masyarakat	dilaksanakan penanganannya dengan dana BTT, DSP (APBD dan APBN) dan

				Akibat bencana, Relokasi Rumah Masyarakat akibat bencana, belum terlaksana untuk Tahun Anggaran 2025	sumber dana lainya yang tidak mengikat.
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	1	Pengumpulan Data	Tidak Mengganggu Kegiatan	
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar		
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar		
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar		

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2025

4.5 Bidang Urusan Sosial

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan jenis pelayanan

dasar antara lain :

- a. Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar Panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana

4.5.2 Target, Realisasi dan Capaian SPM

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan target dan capaian pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.17
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti	Orang	50	70	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	19	20	100	
2.	Penyediaan permakanan	Orang	30	32	100	
3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	19	20	100	
4.	Penyediaan sandang	Orang	30	30	100	
5.	Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	100	
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	19	20	100	
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	50	50	100	
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	100	
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang		3	100	
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3	3	100	
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	5	100	
13.	Layanan rujukan	Orang	6	6	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	7	45	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	10	11	100	
2.	Penyediaan Permakanan	Orang	15	16	100	
3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	11	100	
4.	Penyediaan sandang		15	16	100	
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti		0	0	0	
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		10	10	100	
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	100	
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	100	
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	4	100	
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3	3	100	
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	100	
12.	Layanan rujukan	Orang	8	8	100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti		3	07	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	30	30	100	
2.	Penyediaan permakanan	Orang	62	62	100	
3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	30	30	100	
4.	Penyediaan sandang	Orang	62	62	100	
5.	Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	100	
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	31	100	
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	30	30	100	
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti	Orang	1	1	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	kepemilikan NIK					
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	100	
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang			100	
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			100	
13.	Layanan rujukan	Orang	5	5	100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial				100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	1	2	100	
2.	Penyediaan Permakanan	Orang	1	1	100	
3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	2	100	
4.	Penyediaan sandang	Orang	1	1	100	
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	2	100	
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	100	
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	100	
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100	
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	100	
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	100	
12.	Layanan rujukan	Orang	1	1	100	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		00	099	100	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Penyediaan permakanan	Orang	800	3099	100	
2.	Penyediaan Sandang	Orang	400	3099	100	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	100	3099	100	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	75	2888	100	
	5. Pelayanan dukungan psikososial	Orang	400	3099	100	

Sumber : Data Dinas Sosial Kab.Agam Tahun 2025

4.5.3 Alokasi Anggaran

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial sebesar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dengan rincian anggaran yang tersebar dalam subkegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Ket
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			299.413601	256.363834	85.62	
		1	Penyediaan Permakanan	85.542.400	84.029.035	93.84	
		2	Penyediaan Sandang	32.400.000	30.991.704	95.65	
		3	Penyediaan Alat Bantu	47.008.500	34.729.996	73.88	
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.654.100	2.339.500	50.26	
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	9.338.800	8.172.000	87.5	
		6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	42.710.500	35.777.300	83.76	

			Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng				
		7	Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	417.000	150.000	35.97	
		8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.969.500	1.275.000	64.73	
		9	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	0	0	0	
		10	Pemberian layanan kedaruratan	39.000.000	29.584.000	75.85	
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.143.701	2.580.999	82.1	
		11	Pemberian Layanan Rujukan	29.179.100	26.734.300	91.62	
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			166.133632	118.104.120	71.09	
		1	Penyediaan Makanan	99.922.182	66.873.380	66.93	
		2	Penyediaan Sandang	26.062.500	25.825.240	99.09	
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	35.402.500	20.702.500	58.48	
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	695.750	686.000	58.48	
		5	Pelayanan dukungan psikososial	4.050.700	4.017.000	99.17	

Sumber : Data Dinas Sosial Tahun 2025

Pada pencapaian untuk jenis pelayanan dasar :

a. Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar Panti

- b. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- terletak pada satu kegiatan yang sama, dan dengan subkegiatan yang sama.

4.5.4 Dukungan Personil

Dalam pencapaian penerapan SPM Bidang urusan Sosial di Kabupaten Agam, dibantu oleh tenaga personil, antara lain :

Tabel 4.19
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)		Total
		PNS	Non PNS	
1	Penyuluh Sosial	1		1
2	Pekerja Sosial	5		11
3	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	1		1
4	Analisis Rehabilitasi Sosial Masalah Sosial	1		1
5	Penyuluh Sosial Ahli Pratama	1		1
6	Pendamping Ressos		4	4
7	TAGANA		27	27
8	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)		16	16
9	Pendamping Sosial (PKH)		65	65
10	Pendamping Sosial Masyarakat (PSM)		215	215
11	Relawan Sosial		2	2
Total				338

4.6.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 202, mengalami beberapa permasalahan terkait pencapaian jenis pelayanan dasar tersebut, antara lain :

Tabel 4.20
Permasalahan Dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan	Solusi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan Data	1 Belum adanya database penyandang disabilitas terlantar yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database penyandang disabilitas terlantar
				2 Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
		2	Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal penyandang disabilitas terlantar yang menjadi target capaian	Diperlukan database penyandang disabilitas terlantar sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1 Penghitungan penganggaran terkendala dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar	Diperlukan database penyandang disabilitas terlantar sebagai data awal yang akan menjadi dasar penghitungan anggaran

				2	Anggaran dari APBD terbatas sehingga sulit untuk membuat perencanaan dan penganggaran	Diperlukan anggaran prioritas untuk SPM, perlu diberikan peraturan mengenai alokasi minimal anggaran daerah untuk penerapan SPM Bidang Sosial
				3	Anggaran dalam DPA masih bergabung antar sasaran SPM, sedangkan dalam pelaporan dan penggaran SPM harus dipisah antara anggaran disabilitas, anak, lansia, dan gepeng	Diperlukan peraturan yang jelas
				4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1
		2	Belum adanya rumah singgah yang sesuai prosedur untuk menampung sementara disabilitas terlantar sebelum dilakukan rujukan/reunifikasi			Diperlukan alokasi anggaran untuk penyediaan rumah singgah beserta dengan operasionalnya
		3	Terbatasnya pelaksanaan rehabilitasi/rujukan untuk disabilitas karena ketersediaan panti rehab yang sedikit			Diperlukan penambahan kuota untuk rehabilitasi disabilitas dalam panti/sentra
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan Data	1	Belum adanya database anak terlantar yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database anak terlantar

			2	Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
	2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal anak terlantar yang menjadi target capaian	Diperlukan database anak terlantar sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan
	3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan penganggaran terkendala dengan jumlah anak terlantar	Diperlukan database anak terlantar sebagai data awal yang akan menjadi dasar penghitungan anggaran
2			Anggaran dari APBD terbatas sehingga sulit untuk membuat perencanaan dan penganggaran	Diperlukan anggaran prioritas untuk SPM, perlu diberikan peraturan mengenai alokasi minimal anggaran daerah untuk penerapan SPM Bidang Sosial	
3			Anggaran untuk SPM anak terlantar dalam DPA masih bergabung dengan anggaran disabilitas, lansia, dan anak, sedangkan pelaporan dan penggaran SPM harus dipisah antara anggaran disabilitas, anak, lansia, dan gepeng	Diperlukan peraturan yang jelas	
	4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terkendala adanya pengurangan anggaran	Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target capaian pemenuhan kebutuhan dasar
			2	Belum adanya rumah singgah yang sesuai prosedur	Diperlukan alokasi anggaran untuk

					untuk menampung sementara anak terlantar sebelum dilakukan rujukan/reunifikasi	penyediaan rumah singgah beserta dengan operasionalnya
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan Data	1	Belum adanya database lanjut usia terlantar yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database lanjut usia terlantar
				2	Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal lanjut usia terlantar yang menjadi target capaian	Diperlukan database lanjut usia terlantar sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan penganggaran terkendala dengan jumlah lanjut usia terlantar	Diperlukan database lanjut usia terlantar sebagai data awal yang akan menjadi dasar penghitungan anggaran
				2	Anggaran dari APBD terbatas sehingga sulit untuk membuat perencanaan dan penganggaran	Diperlukan anggaran prioritas untuk SPM, perlu diberikan peraturan mengenai alokasi minimal anggaran daerah untuk penerapan SPM Bidang Sosial
				3	Anggaran dalam DPA masih bergabung antar sasaran SPM, sedangkan dalam pelaporan dan penganggaran SPM harus dipisah antara anggaran disabilitas, anak, lansia, dan gepeng	Diperlukan peraturan yang jelas

		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar		Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terkendala adanya pengurangan anggaran	Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target capaian pemenuhan kebutuhan dasar
				1		
				2	Belum adanya rumah singgah yang sesuai prosedur untuk menampung sementara lansia terlantar sebelum dilakukan rujukan/reunifikasi	Diperlukan alokasi anggaran untuk penyediaan rumah singgah beserta dengan operasionalnya
				3	Terbatasnya pelaksanaan rehabilitasi/rujukan untuk lansia terlantar karena ketersediaan panti rehab yang sedikit	Diperlukan peraturan yang jelas
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Pengumpulan Data	1	Belum adanya data lanjut gepeng yang valid dan terbaru	Perlu dilakukan pengumpulan data untuk dijadikan database gepeng terlantar
				2	Belum tersedianya anggaran pada DPA OPD untuk honor petugas pengumpulan data	Perlu dianggarkan kegiatan pengumpulan data di dalam DPA, berupa honor petugas
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terkendala belum adanya data awal gepeng yang menjadi target capaian	Diperlukan database gepeng sehingga memudahkan dalam menghitung kebutuhan
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan penganggaran terkendala dengan gepeng	Diperlukan database gepeng sebagai data awal yang akan menjadi dasar penghitungan anggaran
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar terkendala adanya pengurangan anggaran	Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan target capaian pemenuhan kebutuhan dasar

Sumber : Data Dinas Sosial Tahun 2025

4.6 Bidang Urusan Trantibum Linmas

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebekaran Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah dengan 6 (enam) jenis pelayanan dasar, yaitu :

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi.
- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.
- Pelayanan Informasi rawan bencana.
- Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.6.2 Target, Realisasi dan Capaian SPM

Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas dilaksanakan melalui Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan target dan realisasi capaian sebagai berikut.

Tabel 4.21
Target, Realisasi dan Capaian SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Orang	125	125	100%	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar						
1.	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai	Unit	36	36	100%	

		penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP					
	2.	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	1	1	100%	
	3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM		51	51	100	
	4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	100	
	5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1	0	100	(Mutu ditutup)

	6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1	0	100	(Mutu ditutup)
KEBENCANAAN							
2.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana		50	100	100%	
		Capaian Mutu Pelayanan Dasar					
	1.	Penyusunan kajian resiko bencana	Dokumen	0	0	0	
	2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana					
		1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				100%	
		a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	2	2	100%	
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	1	1	100%	
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100%	
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100%	
		2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				100%	
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)		1	1	100%	
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	1	1	100%	
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100%	
		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	100%	
		e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai	Orang	20	20	100%	

		dengan kebutuhan)					
		3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				100%	
		a.Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	17	17	100%	
		b.Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	4	4	100%	
		c.Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100%	
		d.Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100%	
		e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100%	
3.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	100	100	100%	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				50%	
		a.Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkara	Dokumen	0	0	0	
		b.Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	Dokumen	2	2	100%	
	2.	Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)				100%	
		a.Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	2	2	100%	
		b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	2	2	100%	
		c.Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100%	
		d.Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	100%	

3.	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi				81.67%	
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				83.33%	
	a.Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
	b.Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
	c.Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	0	0	0	
	d.Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100%	
	e.Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100%	
	f.Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100%	
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				80%	
	a.Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
	b.Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
	c.Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	0	0	0	
	d.Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100%	
	e.Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100%	
4.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100%	
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				100%	
	a.Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100%	
	b.Tersedianya Sarpras dan	Paket	5	5	100%	

		peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)					
		c.Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	100%	
		2) Gladi Lapang				100%	
		a.Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100%	
		b.Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	100%	
		c.Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	100%	
	5.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100%	
		1)Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100%	
		a.Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	365	100%	
		b.Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	3	3	100%	
		c.Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	100%	
		d.Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	100%	
		e.Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100%	
		2)Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				100%	
		a.Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5	5	100%	
		b.Tersedianya Sarpras komando	Unit	1	1	100%	

		dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)					
		c.Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100%	
		d.Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100	
		3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				100%	
		a.Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
		4)Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				100%	
		a.Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100%	
		b.Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100%	
	6.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100%	
		a.Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
		b.Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100%	
		c.Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100%	
		d.Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana	Unit	4	4	100%	

		(sesuai dengan kebutuhan)					
4.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		903	6671	100%	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Respon Cepat Darurat Bencana Posko				72.12%	
		a.Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	52	23	44.23%	
		b.Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	52	52	100%	
	2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				100%	
		a.Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)		1	1	100%	
		b.Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)		20	20	100%	
		c.Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)		3	3	100%	
		d.Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	4	4	100%	
		e.Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	4	4	100%	
		f.Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	40	40	100%	
		g.Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan	Orang	40	40	100%	

		pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)					
		h.Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	40	40	100%	
DAMKAR							
5.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		480	480	100%	
Capaian Mutu Pelayanan Dasar							
	1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	150	193	100%	
	2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	1	1	100%	
	3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	82	82	100%	
	4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	78	78	100%	
	5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	480	480	100%	
	6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	480	480	100%	

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Tahun 2025

4.6.4 Alokasi Anggaran

Anggaran penunjang penerapan SPM bidang Tratibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan BPBD tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran Penerapan SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				1.183.172.000	1.113.922.770	94.15
		1.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.151.792.000	1.084.901.970	94.19
			1.	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	901.581.800	862.153.700	95.63
			2.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	173.710.200	173.409.400	99.83
			3.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.500.000	49.338.870	64.50

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
		2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.380.000	29.020.800	92.48
			1.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.000.000	20.140.800	95.91
			2.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.380.000	8.880.000	85.55
		3.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0	0
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				335.040.840	289.185.149	86.31
		4.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	27.986.200	27.567.300	98.50
			1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	27.986.200	27.567.300	98.50
		5.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	143.647.640	141.039.824	98.18
			1.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	48.932.708	48.110.400	98.32
			3.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	91.706.732	90.205.824	98.36
			4.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	3.008.200	2.723.600	90.54

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
				Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
		6.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	163.407.000	120.578.025	73.79
			1.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	37.851.700	13.273.005	35.07
			2.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	118.480.300	101.438.370	85.62
			3.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	7.075.000	5.866.650	82.92
		7.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	0	0
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				1.433.807.140	978.971.083	68.28
		8.		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.278.475.340	873.408.883	68.32
			1.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	829.911.000	659.881.950	79.51
			2.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulanga n kebakaran dan Alat	148.000.000	14.782.363	9.99

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
				Pelindung Diri			
			3.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	261.516.340	161.457.500	61.74
			4.	Penyelenggaraa n kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulanga n, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	39.048.000	37.287.070	95.49
		9.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		6.132.800	3.240.000	52.83
			1.	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	6.132.800	3.240.000	52.83
		10.	Investigasi Kejadian Kebakaran		0	0	0
		11.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		85.769.000	57.287.400	66.79
			1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulanga n kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	56.525.500	48.363.000	85.56

No	Jenis Pelayanan SPM	No	No	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
			2.	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	29.243.500	8.924.400	30.52
		12.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		63.430.000	45.034.800	71.00
			1.	Penyelenggaraa n operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan , dan/atau mengancam keselamatan manusia	63.430.000	45.034.800	71.00

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dianggarkan sehingga pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tidak terlaksana dengan baik, dan kedepannya harus dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158 ayat (2).

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan hal yang penting dalam pencapaian indikator SPM. Pada Urusan Bidang Trantibum Linmas, di Kabupaten Agam didukung oleh 2 (dua) OPD yakni Satpol PP & Damkar dan BPBD yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23
Dukungan Personil Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Agam Tahun 2025

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

No	Jenis Tenaga	Jumlah		Total
		PNS	Non PNS	
1.	Pamong Praja	32	66	98
2.	Petugas Pemadam Kebakaran	41	45	86

3.	PPNS	3		3
Total		76	111	187

Sumber : Data Satpol PP & Damkar 2025

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Tenaga	Jumlah		Total
		PNS	Non PNS	
1.	Pegawai	20	5	25
2.	Satgas PB	7	9	16
3.	Puldalops PB		10	10
Total		27	24	51

Sumber : Data BPBD Kab.Agam Tahun 2025

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pemenuhan SPM Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

Tabel 4.24
Permasalahan dan Solusi Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Pengumpulan Data	1	Keterbatasan sarana dan kompetensi aparatur	Pemenuhan sarana pendataan dan peningkatan kompetensi aparatur
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum tersusunnya dokumen standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyusunan peraturan Bupati yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan ketenteraman dan ketertiban

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
						umum
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran	Penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana operasional
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan sarana operasional dan adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penambahan sarana dan prasarana operasional dan penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1	Pengumpulan Data	1	Keterbatasan sarana dan kompetensi aparatur	Pemenuhan sarana pendataan dan peningkatan kompetensi aparatur
		2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum tersusunnya dokumen standar pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penyusunan peraturan Bupati yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
		3	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran	Penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana operasional

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah pos pemadam kebakaran belum sesuai dengan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Penambahan pos pemadam kebakaran pada kecamatan dan Nagari sesuai WMK
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Pengumpulan Data	1	Sulit menentukan target pelayanan informasi per jenis bencana bagi masyarakat rawan bencana	Meningkatkan kualitas pengumpulan data dan keakuratan data
		2.	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum ada penghitungan kebutuhan terhadap target capaian SPM tersebut	Melaksanakan penghitungan secara komprehensif terkait target dan kebutuhan pemenuhan SPM
		3.	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran Daerah dalam penanggulangan bencana	Pemenuhan deseminasi informasi pelayanan rawan bencana dilaksanakan melalui pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana berupa sharing dana kegiatan dengan pemerintah nagari/desa
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah personil yang belum memadai	Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana dalam membantu desiminasi informasi rawan bencana
				2	Kompetensi petugas masih minim	Peningkatan kapasitas petugas melalui bimtek dan diklat teknis
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pengumpulan Data	1	Sulit menentukan target pelayanan informasi per jenis bencana bagi masyarakat rawan bencana	Meningkatkan kualitas pengumpulan data dan keakuratan data

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
		2.	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Belum ada penghitungan kebutuhan terhadap target capaian SPM tersebut	Melaksanakan penghitungan secara komprehensif terkait target dan kebutuhan pemenuhan SPM
		3.	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran Daerah dalam penanggulangan bencana	Pemenuhan deseminasi informasi pelayanan rawan bencana dilaksanakan melalui pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana berupa sharing dana kegiatan dengan pemerintah nagari/desa
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah personil yang belum memadai	Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana dalam membantu desiminasi informasi rawan bencana
				2	Kompetensi petugas masih minim	Peningkatan kapasitas petugas melalui bimtek dan diklat teknis
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Pengumpulan Data	1	Lambatnya informasi kejadian bencana dari masyarakat	Pemberdayaan KSB terhadap informasi actual kejadian bencana di kecamatan/nagari
		2.	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1	Penghitungan kebutuhan belum tepat, disebabkan tidak dapat diprediksi secara pasti kebutuhan penanganan bencana tersebut	Meningkatkan kapasitas tim kaji cepat penanggulangan bencana
		3.	Penyusunan rencana dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar	1	Keterbatasan anggaran daerah	Prioritas anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana kedaruratan
		4	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	1	Jumlah personil yang belum memadai	Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana dalam

No	Jenis Pelayanan Dasar		Permasalahan Tahapan Penerapan SPM (Pilih berdasarkan permasalahan yang ada)	Permasalahan		Solusi
						membantu desiminasi informasi rawan bencana
				2	Kompetensi petugas masih minim	Peningkatan kapasitas petugas melalui bimtek dan diklat teknis
				3	cakupan pelayanan kebencanaan terlalu luas	Membentuk UPT BPBD/pos-pos pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kedaruratan dalam peningkatan respon bencana Meningkatkan kapasitas Satgas TRC-PB (Tim Respon Cepat) dalam penanganan bencana

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Tahun 2025

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan /Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Su bkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pendidikan Dasar	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	90%	96.99%	84.696.542.203	80.403.795.233	95
		1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	53.106.618.342	50.234.839.365	94.59
		1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	1 ruang	1 Ruang	938.093.993	931.710.104	99.32

		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang guru/kepala sekolah			0	0	0
		3	Penambahan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk melengkapi sarana pendidikan			0	0	0
		4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			0	0	0
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	104.792.500	104.270.370	99.50
		6	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan mebel sekolah	1 Paket	1 Paket	104.337.000	103.945.728	99.62
		7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan perlengkapan sekolah	6 Paket	6 Paket	459.706.950	446.279.976	97.08
		8	Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5000 Paket	5000 Paket	200.000.000	197.715.000	98.86
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	441 Satuan Pendidikan	441 Satuan Pendidikan	42.110.000	41.504.530	98.56
		10	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah sekolah yang melaksanakan Asesmen Nasional			0	0	0

				Jumlah sekolah yang melakukan validasi kurikulum					
				Jumlah tim validasi kurikulum yang diberikan transport					
		11	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	105.660.000	105.145.230	99.51
		12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan	1500 Orang	1227 Orang	1.443.576.968	1.386.658.820	96.06
		13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	157 Orang	157 Orang	599.442.200	428.915.539	80.56
		14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	441 Satuan Pendidikan	441 Satuan Pendidikan	43.970.000	43.824.180	99.67
		15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	441 Satuan Pendidikan	441 Satuan Pendidikan	48.952.096.931	46.279.607.811	94.54
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	112.831.800	111.262.077	98.61

	2		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	97.73%	20,036,961,727	19,379,025,103	97.73
		1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	519,299,913	517,053,689	99.57
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	4,178,078,386	4,129,422,595	98.84
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah			0	0	0
		4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	816,850,134	794,844,565	97.31
		5	Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	16.320 Paket	16.320 Paket	95,335,000	93,617,360	98.20
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			0	0	
		7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang mengikuti pengembangan Literasi Digital Bahasa Inggris			0	0	
				Jumlah pembayaran validasi kurikulum	350 Orang		421,700,000	393,064,500	93.21

				Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Assesment Nasional					
				Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran					
		8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	220 Peserta Didik	198,385,000	185,215,090	93.36
		9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	500 Orang	500 Orang	394,980,000	386,488,000	97.85
		10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	49,384,280	45,283,967	91.70
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	40,913,000	27,199,900	66.48

			12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	17,420,200,000	16,837,297,145	96.65
			13	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	99,650,000	99,358,320	99.71
2	Pendidikan Kesetaraan	1		Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	90%	96.99%			
			1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%	3,348,034,908	3,156,795,984	94.24
			1	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Warga Belajar Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			0	0	
			2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	119,510,908	109,364,600	91.51
			3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	3,189,400,000	3,008,933,614	94.34
			4	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	10 Unit	15,004,000	14,986,770	99.89

			5	Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	24,120,000	23,511,000	97.48
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1		Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)					
			1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	8,204,927,226	7 ,633,134,781	93.03
			1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	529,024,536	526,256,439	99.48
			2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	90,317,700	88,659,863	98.16
			3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	31 Paket	31 Paket	1,573,883,500	1,571,621,813	99.86
			4	Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	500 Paket	44,740,000	37,160,100	83.06
			5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan,			0	0	

				Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	378 Satuan Pendidikan	378 Satuan Pendidikan	46,599,990	44,490,390	95.47
		7	Pengelola Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	378 Satuan Pendidikan	378 Satuan Pendidikan	5,872,200,000	5,318,594,556	90.57
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, Prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit	48,161,500	46,351,620	96.24

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Tahun 2025

B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2025, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan

1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	770,030,000	641.283.800	83.28
		1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3270 orang	3270 orang	770,030,000	641,283,800	83.28
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	18,136,700	8,952,650	49.36
		1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3086 orang	3086 orang	18,136,700	8,952,650	46.05
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	19,056,600	9,624,300	50.50

		1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 Layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
		1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2914 orang	2914 orang	19,056,600	9,624,300	50.50
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	19.469.400	8.082.200	41.51
		1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 Layanan	28 Layanan	58.038.072.642	54.025.579.064	93.08
		1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12.232 Orang	12.232 Orang	19.469.400	8.082.200	41.51
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	706,464,000	482,238,800	68.6
		1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	68.26

			1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	27.131 orang	27.131 orang	706,464,000	482,238,800	68.26
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	58,299,750	35,062,200	60.14
			1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)"	106.073 orang	106.073 orang	14,456,000	12,262,150	84.82
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	58,299,750	35,062,200	60.14
			1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase pelaksanaan program pelayanan kesehatan pada usia lanjut	30.629 orang	30.629 orang	58,299,750	35,062,200	60.14

8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	18,740,000	12,934,650	69.02
		1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12.863 orang	12.863 orang	18,740,000	12,934,650	69.02
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	16,705,009	1,962,700	11.74
		1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2216 orang	2216 orang	16,705,009	1,962,700	11.74
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	380,400,000	260,130,600	68.38

	Jiwa Berat		1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 Layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1215 orang	1215 orang	380,400,000	260,130,600	68.38
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	358,734,828	248,893,000	69.38
			1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08
			1	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7156 orang	7156 orang	358,734,828	248,893,000	69.38
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	1		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	18 Unit Paripurna	18 Unit Paripurna	68,184,000	6,800,000	0.97
			1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan masyarakat	28 layanan	28 layanan	58,038,072,642	54,025,579,064	93.08

				1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	4447 orang	4447 orang	68,184,000	6,800,000	0.97

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab.Agam Tahun 2025

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat. Keberadaan infrastruktur fisik yang baik dapat diposisikan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. SPM bidang urusan Pekerjaan Umum lebih mengarah kepada infrastruktur yang bersifat kepentingan hidup masyarakat sehari-hari, yakni terkait persoalan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah. Adapun program/kegiatan/subkegiatan mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

Tabel 4.27
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

N o	Jenis Pelayanan SPM	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengelohan Air Limbah Domestik	541 RT	79%	8,803,008,488	8,661,724,732	98.40

	Kabupaten/Kota									
		1		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten Kota						
		1		Pembangunan /Penyediaan Sistem PengelolaPeningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaanan Air Limbah Terpusat Skala Kota		541 RT	79%	8,649,623,000	8,553,225,002	98.89
		2		Peningkatan Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		Operasional	70.74%	153,385,488	108,499,730	70.74

2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	126 RT	100%	1,836,101,220	1,519,397,501	82.75
			1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota						
			1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		126 RT	100.00%	1,836,101,220	1,519,397,501	82.75

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Agam Tahun 2025

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2025, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Agam Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No			Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	1			Program Pengembangan Perumahan				85.905.000	5.092.500	6.87
			1		Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena Program Kabupaten/Kota						
				1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	2500 Unit	9600 Unit	85.905.000	5.902.500	6.87
			2		Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana						
				1	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	40.948.000	22.913.950	55.96
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	1.			Program Pengembangan Perumahan	Tidak mengganggu kegiatan					

	program pemerintah daerah					

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab.Agam Tahun 2025

E. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.29
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Subkegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	1		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.					
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial			119,360,532	99.001.390	82.94

			1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial"	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani			119,360,532	99.001.390	82.94
			2	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana any rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
			3	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang	12,580,645	9,543,226	75.85

						terpenuhi kebutuhan dasarnya			
		4	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana nya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut lantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25,814,025	24,224,587	93.84
		5	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8,917,431	8,529,810	95.65

		6	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35,256,375	26,047,497	73.88
		7	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					
		8	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang	3,028,645	2,636,129	87.03

						terpenuhi kebutuhan dasarnya			
		9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	21,355,250	17,888,650	83.76
		10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	267,000	50.000	18.72

		11	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	590,850	382,500	83.77
		12	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	857,373	703,909	82.1
		13	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas	1,939,208	974,792	50.26

					Kabupaten/Kota	terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
			14	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8,753,730	8,020,290	91.62
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial	1		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial			48,354,145	42,373,597	87.63

			1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani			48,354,145	42,373,597	87.63
			1	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
			2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS	6,919,355	5,248,774	90.30

							lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				
				3	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	12,907,013	12,112,293	93.84
				4	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	4,755,963	4,549,232	95.65

				5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					
				6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,514,323	1,318,065	87.03
				7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang	8,114,995	6,797,687	83.76

							terpenuhi kebutuhan dasarnya				
				8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50,000	50,000	100
				9	Akses ke Layanan Penidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	787,800	510,000	64.73

				10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	857,373	703,909	82.10
				11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	775,683	389,917	50.26
				12	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas	11,671,640	10,693,720	91.62

							terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut UsiaTerlantar diluar Panti Sosial	1			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial			127,007,881	111,086,893	87.46
			1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani			127,007,881	111,086,893	87.46
				1	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta			

							PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				
				2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	18,870,968	14,314,839	75.85
				3	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50,014,674	46,935,137	93.84

				4	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	18,429,358	17,628,275	95.65
				5	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	11,752,125	8,682,499	73.88
				6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan					

						Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					
				7	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	4,694,400	4,086,000	87.03
				8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	12,813,150	10,733,190	83.76

				9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50,000	50,000	100
				10	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	393,900	255,000	64.73

				11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,143,164	938,545	82.10
				12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,551,367	779,833	50.26
				13	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas	7,294,775	6,683,575	91.62

							terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sosial			4,691,043	3,901,894	83.17
			1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani			4,691,043	3,901,894	83.17
				1	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta			

							PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				
				2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	629,032	477,161	75.85
				3	Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	806,688	757,018	93.84

				4	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	297,248	284,327	95.65
				5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota					
				6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS	151,432	131,806	87.03

							lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				
				7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakan rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	427,105	357,773	83.76
				8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakan rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50,000	-	-

			9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	196,950	127,500	64.73
			10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	285,791	234,636	82.10
			11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	Terlanksan anya rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas	387,842	194,958	50.26

					Kabupaten/Kota	terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
			12	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlanksan any rehabilitasi sosial dasar penyandan g disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Persentase Anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis di Luar Panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,458,955	1,336,715	91.62
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana	1		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial			166,135,632	117,418,120	70.67
			1	Kegiatan Program Penanganan Bencana Kabupaten Kota				166,135,632	117,418,120	70.67

				1	Penyediaan permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi ya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi asinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	99,922,182	66,873,380	66.92
				2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi ya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi asinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	26,062,500	25,825,240	99.08
				3	Penyediaan Tempat Penampungan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan	Tersedianya Tempat Pengungsian	Terfasilitasi asinya kebutuhan	35,402,500	20.702.500	58.47

					Pengungsi	Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	n Kewenangan Kabupaten/Kota	dasar korban bencana alam dan bencana sosial			
				4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi ya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi asinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	695,750	20,702,500	100
				5	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi ya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi asinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	4,052,700	4,017,000	99.11

Sumber : Data Dinas Sosial Kab.Agam Tahun 2025

F. Bidang Urusan Trantibum linmas

Program dan kegiatan penunjang peme nuhan SPM Bidang urusan Tratribumlinmas tertuang dalam RKPD Kab.Agam Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.30
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung
Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	No			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/kegiatan/ Sub kegiatan	Target Indikator Program/kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	1,183,172,000	1,113,922,770	94
			1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	1,151,792,000	1,084,901,970	94
				1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	250 Laporan	472 Laporan	901,581,800	862,153,700	96

				Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					
		2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	100 Laporan	54 Laporan	173,710,200	173,409,400	99.82	
		3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unti	4 Unit	76,500,000	49,338,870	64	
		2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	31,380,000	29,020,800	92	

				1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	10,380,000	8,880,000	86
				2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	21,000,000	20,140,800	96
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar	100 %	100 %	1,433,807,140	1,112,014,083	78
			1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Persentase Laporan kebakaran yang ditindaklanjuti	100 %	100%	1,278,475,340	1,006,451,883	79

					Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	i					
				1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	12 Laporan	12 Laporan	829,911,000	659,881,950	80
				2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakan dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	12 Dokumen	148,000,000	147,825,363	99.80
				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan	18 Unit	15 Unit	261,516,340	161,457,500	62

					n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	dan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					
				4	Penyelenggaraa n Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Ko ta dalam Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	39,048,000	37,287,070	95
			2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pemeriksaan bangunan yang dipersyaratka n memiliki sisten proteksi kebakaran	100 %	50%	6,132,800	3,240,000	53

			1	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6,132,800	3,240,000	53
			3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	"Jumlah Satlakar yang terbentuk"	46 Kelompok	0 Kelompok	85,769,000	57,287,400	67
			1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	300 Orang	300 Orang	56,525,500	48,363,000	86

				2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	29,243,500	8,924,400	31
				4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Laporan kejadian mengancam manusia yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	63,430,000	45,034,800	71
				1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 laporan	63,430,000	45,034,800	71
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1			Program Penanggulangan Bencana	Terintegrasinya fase pra bencana	87%	100%	27,986,200	27,567,300	99

			1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	50 Orang	50 Orang	27,986,200	27,567,300	99
			1.	Sosialisasi KIE	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	50 Orang	50 Orang	27,986,200	27,567,300	99
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	1		Program Penanggulangan Bencana	Terintegrasinya fase pra bencana	87 %	100%	143,647,640	141,039,824	98
		1		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	143,647,640	141,039,824	98

				1	Gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	48,932,708	48,110,400	98
				2	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun masyarakat		-		-	
				3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	100 Orang	91,706,732	90,205,824	98

				4	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1 Laporan	3,008,200	2,723,600	91
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1			Program Penanggulangan Bencana	Terintegrasinya fase tanggap darurat bencana	87%	100%	163,407,000	120,578,025	74
			1		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	163,407,000	120,578,025	74

				1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	903 Orang	18.742 orang	118,480,300	101,438,370	86
				2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	903 Orang	1000 orang	7,075,000	5,866,650	83
				3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana	52 Dokumen	13 Dokumen	37,851,700	13,273,005	35

Sumber : Data Satpol PP & Damkar dan BPBD Kab.Agam Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), merupakan salah satu laporan tahunan pemerintah daerah yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Agam Tahun 2025 berisi satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan, capaian penerapan standar pelayanan minimal dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan data terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal di Kabupaten Agam. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Agam.

Berbagai permasalahan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk tahun yang akan mendatang. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diraih berkat kerja keras, kerjasama dan partisipasi seluruh komponen pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan seluruh elemen masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 disampaikan untuk dipergunakan seperlunya sebagai wujud tertib pelaksanaan fungsi pemerintahan, sekaligus sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan secara

menyeluruh. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam pada masa yang akan datang.

Lubuk Basung, 30 Maret 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

DATA KINERJA KUNCI PER KATEGORI URUSAN TAHUN 2025 KABUPATEN AGAM

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
a. Urusan Pendidikan							
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	9.622	16.556	58,12	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	81.029	81.029	100,00	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	1.566	1.862	84,10	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	586	1.778	32,96	%
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	1.415	3.751	37,72	%
b. Urusan Kesehatan							
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	9	5.427	0,17	%
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	2.332	28.422	8,20	%
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.719	6.102	93,72	%
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.401	5.427	99,52	%
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.315	5.498	96,67	%

1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	27.490	36.711	74,88	%
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	74.030	74.030	100,00	%
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	267.617	285.458	93,75	%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	52.310	62.817	83,27	%
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	21.272	22.848	93,10	%
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	4.889	5.275	92,68	%
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.422	1.422	100,00	%
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	8.431	11.847	71,17	%
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6.608	7.928	83,35	%

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	15.039	29.012	51,84	%
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	981,94	1682,15	58,37	%
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	470.530	533.532	88,19	%
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	102.501	128.813	79,57	%
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1,00	1,00	100,00	%
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	tidak dapat dilaksanakan	tidak dapat dilaksanakan	tidak dapat dilaksanakan	
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	186,00	186,00	100,00	%
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1,00	1,00	100,00	%
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	147,00	575,00	25,57	%
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	19,00	129,00	14,73	%

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	160,00	160,00	100,00	%
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	0,0014	0,002	70,00	%
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	84,00	101,00	83,17	%
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	1.953.945.955	1.953.945.955	100,00	%
e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3,00	3,00	100,00	%
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	56,00	56,00	100,00	%
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	12,00	12,00	100,00	%
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1.836	1.836	100,00	%
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	18.720	18.720	100,00	%
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	177,00	193,00	91,71	%
f. Urusan Sosial							
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	120,00	120,00	100,00	%
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	64,00	64,00	100,00	%
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	137,00	137,00	100,00	%

1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	2,00	2,00	100,00	%
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	3.096,00	3.096,00	100,00	%
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	224,00	224,00	100,00	%

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	4,00	4,00	100,00	%
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	24,00	366,00	6,56	%
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1,00	1,00	100,00	%

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	75,00	75,00	100,00	%
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	17,00	17,00	100,00	%

c. Urusan Pangan							
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	2,5595	88,621	2,89	%
d. Urusan Pertanahan							
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	66.712	1.793.556	3,72	%
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	3.387	11.284	30,02	%
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1.355	4.516	30,00	%
e. Urusan Lingkungan Hidup							
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	3,00	5,00	60,00	%
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	28.751	81.748	35,17	%
f. Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil							
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	146.933	148.811	98,74	%
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	90.786	139.350	65,15	%
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2,00	2,00	100,00	%
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	387.293	394.824	98,09	%
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	3.972	3.972	100,00	%

2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	154.069	226.683	67,97	%
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	7.615	12.673	60,09	%

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	tuntas hasil 100%	tuntas hasil 100%	tuntas hasil 100%	%
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	0,00	12,00	0,00	%
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	2,00	3,00	66,67	%

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,41	2,36	102,12	%
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	28.589	58.818	48,61	%
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	12,20	12,50	97,60	%

i. Urusan Perhubungan

2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	-	0,80		0,80	Rasio
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,48		0,48	Rasio
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0,00	4,00	0,00	%

j. Komunikasi dan Informasi

2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	44,00	44,00	100,00	%

2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	15,00	15,00	100,00	%
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	341.063,00	341.063,00	100,00	%

k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	307.798.586,00	306.186.355,00	0,53	%
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	5.701,00	21.775,00	26,18	%

l. Penanaman Modal

2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	(273.997.530.693)	1.666.325.185.726	-116,44	%
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	437.791.413.357	491.112.000.000	89,14	%

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	64,00	150,00	42,67	%
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	39.192	135.639	28,89	-
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	4,00	4,00	100,00	%
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	42,00	42,00	100,00	%

n. Urusan Statistik

2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	797,00	797,00	100,00	%

o. Urusan Persandian

2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	340,00	918,00	37,04	%
p. Urusan Kebudayaan							
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	51,00	51,00	100,00	%
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	33.063	26.967	22,61	%
q. Urusan Perpustakaan							
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100		58,52		58,52	Nilai
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100		21,07		21,07	Nilai
r. Urusan Kearsipan							
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T = (a + i + s + j)/4		58,15		58,15	%
3. Urusan Pilihan							
a. Urusan Kelautan dan Perikanan							
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	25,57		25,57	Kg / Kap Tahun
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	41.874,91	38.920	107,59	%
b. Urusan Pariwisata							
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	36.998.400	36.998.400	100	%
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	20.412	17.286	18,08	%
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	221.978	913.330	-75,70	%

c. Urusan Pertanian							
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	379.565	468.512	-18,98	%
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	69.234	67.038	3,28	%
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	194.538,86	347.139	-43,96	%
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	1.570,99	1.570,99	100	%
d. Urusan Perdagangan							
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	2.696	731,00	368,81	%
e. Urusan Perindustrian							
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan		50,00		50	%
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	1,00	154,00	0,65	%
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	18,00	136,00	-86,76	%
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	4.116.850.000	1.392.327.655.033	0,30	%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
Urusan Perencanaan							
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	%
Urusan Keuangan							
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	683.591.228.953	3.116.888.919.695	21,93	%
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	202.739.875.121	1.572.035.369.950	12,90	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	762.733.615.327	3.067.247.452.791	24,87	%
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	19.746.427.767	2.912.850.003.331	0,68	%
Urusan Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.108	1.435	77,21	%
Urusan Penelitian dan Pengembangan							
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	339	339	100	%
Urusan Fungsi Pengawasan							
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2		2	Nilai
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3		3	Nilai

4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	2		2 Nilai	
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	190	331	57,4018127	%

Urusan Pengadaan

4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40		40 Poin	
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem	-	17,91		17,91 Poin	
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	16,96		16,96 Poin	

Urusan Hubungan dengan Perwakilan Daerah

4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1		1 1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang	5	18	27,78	%

Urusan Pelayanan Publik

4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	78,16		78,16 Nilai	

3.1.1 CAPAIAN PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Tabel 3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Pendidikan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PNS	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan PNS	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 30	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.128 Orang/Bulan	5.128 Orang/Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	25 Paket	25 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan	Jumlah Laporan	12	12	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan					
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	40 Unit	40 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Operasional atau Lapangan	Perizinannya							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	96,99 Persen	96,99	1. Karena keterbatasan akses. 2. Ketersediaan guru tidak merata. 3. Sarana prasarana kurang memadai	Pemenuhan akses dan layanan pendidikan	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	1.500 Orang	1.227 Orang	81,8	Guru honor yang telah diangkat menjadi PPPK= 273 orang, tidak	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Dasar				diusulkan lagi menjadi penerima jasa guru tenaga kependidikan			
				Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	157 Orang	157 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	441 Satuan Pendidikan	441 Satuan Pendidikan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	441 Satuan Pendidikan	441 Satuan Pendidikan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5000 Paket	5000 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	4 Ruang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	441 Satuan Pendidikan	441 Satuan Pendidikan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan	Persentase Peningkatan	100	97,73	97.73	Provinsi Tidak	Mengikuti Jadwal	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	Persen		Melaksanakan Kegiatan Gala Siswa Untuk 280 Peserta Didik	Provinsi		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	220 Peserta Didik	44	Provinsi tidak melaksanakan kegiatan Gala Siswa untuk 280 Peserta didik	Mengikuti jadwal provinsi	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	500 Orang	500 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	68 Satuan	68 Satuan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Manajemen Sekolah	yang Dilaksanakan Pembinaan	Pendidikan	Pendidikan					
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	16320 Paket	16320 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	31 Paket	31 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	378 Satuan Pendidikan	378 Satuan Pendidikan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelola Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	378 Satuan Pendidikan	378 Satuan Pendidikan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	500 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah sarana, Prasarana dan utilitas PAUD yang telah	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					direhabilitasi sedang/berat							
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Persen Paket	100 Persen Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	10 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Tahapan Silabus Muatan Lokal	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Peningkatan Layanan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	60 Orang	60 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Sekolah yang telah memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai	502 Unit	502 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Standar							
				Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan PNS, gaji tenaga kontrak dan asuransinya serta honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan aset dinas/puskesmas	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 30	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.471 Orang/Bulan	1.456 Orang/Bulan	100	Tidak ada	Menyesuaikan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	-	Adanya pegawai yang pensiun sebanyak 13 orang, Meninggal sebanyak 1 orang dan Pindah sebanyak 1 orang -
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi	Persentase peningkatan	100	100	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Umum Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum.	Persen	Persen					
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jasa Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	82 Unit	70 Unit	85	Adanya kelebihan pembayaran (penggantian suku cadang)sehingga melebihi dari SBU yaitu, AC, laptop dan printer sehingga target tidak terpenuhi	Untuk menurunkan tinggi nya biaya pemeliharaan perlu dilakukan pengadaan peralatan dan mesin baru	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan <i>grade</i> akreditasi puskesmas	18 Unit paripurna	18 Unit paripurna	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Persentase penyediaan fasilitas kesehatan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	sesuai standar							
				Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	3 Unit	3 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	28 Layanan	28 Layanan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.102 Orang	5.719 Orang	93.72	Data sasaran ditetapkan berdasarkan capaian 3 tahun terakhir ditambah 10 % sehingga pencapaian sebenarnya kurang dari sasaran yang	Menetapkan sasaran berdasarkan kondisi yang sebenarnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang Mendapatkan pelayanan sesuai Standar	5.427 Orang	5.401 Orang	99,52	ditetapkan Data sasaran ditetapkan berdasarkan capaian 3 tahun terakhir ditambah 10 % sehingga pencapaian sebenarnya kurang dari sasaran yang ditetapkan	Menetapkan sasaran berdasarkan kondisi yang sebenarnya	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi Baru lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.498 Orang	5.315 Orang	96,67	Data sasaran ditetapkan berdasarkan capaian 3 tahun terakhir ditambah 10 % sehingga pencapaian sebenarnya kurang dari sasaran yang ditetapkan	Menetapkan sasaran berdasarkan kondisi yang sebenarnya	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.711 Orang	27.490 Orang	74,88	Data sasaran ditetapkan berdasarkan capaian 3 tahun terakhir ditambah 10 % sehingga pencapaian sebenarnya kurang dari	Menetapkan sasaran berdasarkan kondisi yang sebenarnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									sasaran yang ditetapkan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar	74.030 Orang	72.737 Orang	98,25	Ada beberapa puskesmas yang tidak tuntas melakukan pelayanan kesehatan usia dasar ke sekolah2 wilayah kerja puskesmas yang terdampak bencana alam	Untuk Tahun selanjutnya mendorong semua puskesmas agar melakukan pelayanan kesehatan usia dasar ke seluruh sekolah2	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	285.458 Orang	267.617 Orang	93,75	Terdapat sasaran usia produktif yang tidak berada di wilayah tersebut	Validasi data sasaran usia produktif	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	62.817 Orang	27.020 Orang	43,01	Masih terdapat petugas yang belum paham pelayanan usia lanjut dengan penggunaan Pemantauan Paripurna Pasien Geriatrik (P3G), sehingga masih ada lansia yang tidak terpantau	Akan diadakan pelatihan bagi petugas dalam pelayanan Lansia tahun 2026 dengan menggunakan dana DAK Non Fisik	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang	22.848 Orang	21.272 Orang	93,10	1. Masih terdapat	1. Melakukan edukasi kepada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penderita Hipertensi	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Penderita Hipertensi yang tidak disiplin melakukan kontrol pengobatan, 2. Kurangnya minat masyarakat penderita Hipertensi mengikuti sosialisasi pencegahan dan tatalaksana pengobatan	penderita hipertensi untuk berobat teratur minimal 1 x sebulan ke puskesmas, mengikuti 2. memberikan edukasi kepada penderita hipertensi terkait pola makan dan gaya hidup sehat		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.275 Orang	4.889 Orang	92,68	1. Masih terdapat Penderita DM yang tidak disiplin melakukan kontrol pengobatan 2. Adanya penderita DM yang berobat secara mandiri sehingga tidak dilaporkan	1. Meningkatkan kesadaran penderita DM untuk berobat secara teratur 1x sebulan ke puskesmas 2. Menjalinkan kolaborasi dengan klinik swasta untuk melaporkan penderita hipertensi dan DM yang mereka layani ke puskesmas di wilayah kerjanya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.422 Orang	1.422 orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.847 Orang	8.431 Orang	71.17	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki gejala /keluhan TBC untuk memeriksakan diri ke sarana Kesehatan 2. Kurangnya partisipasi kontak serumah/ kontak erat penderita TBC untuk melakukan pemeriksaan 3. Tidak tersedianya Catridge TCM pada Trimester II /tidak mencukupi, sehingga Sputum yang belum di	1. Penyediaan <i>cartridge</i> di awal tahun 2. Pelaksanaan edukasi dan promosi tentang TBC dan risikonya lebih luas	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									periksa menumpuk di Puskesmas 4. Masih belum terlaksana secara maksimal skrining pada Tenaga Kerja di perusahaan2 wilayah Kabupaten agam.			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.928 Orang	6.608 Orang	83,35	Masih ada masyarakat yang berisiko tidak mau diperiksa HIV	Meningkatkan upaya Edukasi dan Promosi kesehatan kepada masyarakat yang berisiko HIV untuk mau memeriksakan diri ke sarana Kesehatan	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana"	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil	2	2	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen					
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan <i>Surveilans</i> Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan <i>Surveilans</i> Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	60 Paket	39 Paket	65	Biaya Pemeriksaan sampel tidak ditanggung lagi oleh Kemenkes sehingga kita tidak lagi mengirimkan sampel kasus Potensi KLB	Untuk tahun selanjutnya biaya pemeriksaan sampel dianggarkan di Dinas kesehatan	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	200 Orang	450 Orang	225	Pelaksanaan sosialisasi bahaya NAPZA dilaksanakan di sekolah di suppor penuh oleh guru dan kepala sekolah sehingga peserta melebihi dari	Lebih meningkatkan koordinasi dengan sekolah dan lintas sektor	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									yang ditargetkan			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	2 Dokumen	2 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan haji	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2435 Orang	890 orang	40.57	1. Pelaksanaan skrining ke Perusahaan masih belum tuntas dilaksanakan 2. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti skrining TB	Meningkatkan upaya promotif dan preventif serta kerjasama dengan perusahaan untuk screening TB	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	13 orang	36,11	1. Penderita HIV tidak mau berobat di wilayahnya, karena malu menjadi penderita HIV (takut dikucilkan masyarakat) 2. Data pasien	Pendekatan dengan rumah sakit yang melayani pasien HIV	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									HIV sulit didapatkan sehingga tidak bisa diberikan layanan dasar HIV			
				Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1200 orang	1296 orang	108	Tidak Ada	-	-	Adanya kerjasama dengan lintas sektor dalam penjangkaran suspek malaria
				Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin praktik mandiri, rumah sakit dan klinik yang diusulkan sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	35 unit	35 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	30 unit	30 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyiapan	Jumlah Dokumen Hasil	1	1	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	dokumen					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan Yang dilakukan Pembinaan pemanfaatan aplikasi SDM Kesehatan	22.13 persen	62.28 persen	281	Tidak ada	Tidak ada	-	Adanya Bimtek pemanfaatan aplikasi SDMK untuk akses
				Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang	7 pelatihan	4 pelatihan	57	RAB yang disetujui Kemenkes tidak sesuai dengan DPA	Menyusun Rancangan DPA sesuai RAB yang disepakati pada Berita Acara Kemenkes	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	125 orang	63			-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pengawasan dan pemenuhan standar perizinan toko obat dan apotek	82 persen	82 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase peningkatan layanan pengawasan apotek dan toko obat	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimtek keamanan pangan	120 pelaku usaha	120 pelaku usaha	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
				Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan post market pada industri rumah tangga pada produk makanan dan minuman rumah tangga yang beredar	20.86 persen	46 persen	221	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pengawasan sarana yang dilakukan berada pada jarak yang tidak berjauhan sehingga pengawasan dapat dilakukan melebihi target
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70 Unit	70 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kebijakan GERMAS dan kebijakan berwawasan kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Persentase peningkatan layanan promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kabupaten/Kota	masyarakat							
				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	RSUD Lubuk Basung		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN.	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Jasa	36 Orang	36 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan RS	12 Bulan	12 Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan	80 Persen	80 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit							

Tabel 3.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sesuai dengan perencanaan							
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	4 Unit	57,14	Keterbatasan Anggaran Daerah	Dianggarkan Kembali pada tahun berikutnya	-	Pengadaan Rak Arsip, Laptop, PC dan AC
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah Kendaraan Operasional dan Kantor 23 Unit
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran	Pemeliharaan peralatan lainnya dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	1 Unit	20	Kemampuan keuangan daerah yang	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	Jumlah Kantor 5 unit terdiri dari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi				terbatas			Kantor DPUTR 1unit, Kantor Pengamat 3 Unit, Workshop Sungai Jaring 1 unit. Yang terealisasi hanya kantor Dinas PUTR 1 unit
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	51,20 Persen 10,85 Persen	51,74 Persen 10,85 Persen	101,05 100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 22	-
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Sungai Yang Terpelihara	400 M	300 M	75	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,1 Km	0,3 Km	300	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Berikutnya target akan disesuaikan	-	Normalisasi Batang Antokan, Batang Sigaga, Batang Sianok

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												dengan alat berat
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Luas areal sawah terairi	250 Ha	250 Ha	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 Km	0 Km	0	Sub Kegiatan merupakan penampung DAK namun tidak mendapat alokasi dari pusat	Diusulkan Kembali pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,0 Km	0,325 Km	10,83	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	-
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	94 Persen	88.19 Persen	93.81	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 22	Kegiatan berupa penyediaan SPAM anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota, untuk memenuhi Alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses air minum	109.396 SR	0 Porsen	0	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan berupa penyediaan SPAM anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kabupaten/kota, untuk memenuhi Alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya
				Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	12 Liter/ Detik	0 Liter/ Detik	0	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan berupa penyediaan SPAM anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota, untuk memenuhi Alokasi anggaran DAU yang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												ditentukan penggunaannya
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	85 Persen	79,57 Persen	93,61	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 22	-
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga yang telah terlayani dengan IPAL	101.467 RT	18 RT	0.01	Belum terbentuknya UPTD air limbah dan layanan L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	Pembentukan UPTD air limbah dan pengoperasian layanan L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	10 M ³ / Hari	10 M ³ / Hari	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Operasional IPLT terdiri dari tenaga operasional 3 orang (1 jaga malam, 1 kebersihan, 1 sopir truk tinja), jumlah truk tinja 2 unit
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Perkotaan.	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	0 m ³ /hari	0 m ³ /hari	0	Sub kegiatan tidak sesuai menu DAK yang diperoleh	Sub kegiatan disesuaikan dengan menu DAK yang diperoleh.	-	Merupakan kegiatan DAK dengan realisasi capaian 541 RT yang tersebar di Kecamatan Palembang,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Palupuh, Banuhampu, Kamang Magek, Tilatang Kamang dan Ampek Nagari
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik	40,21 Persen	40.85 Persen	101.5	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 22	Kegiatan berupa pembangunan saluran drainase, anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota, untuk memenuhi Alokasi anggaran DAU yang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												ditentukan penggunaannya
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Drainase yang terbangun	628,11 Km	1.58 km	0.25	Tidak merubah target pada RKPD P	Akan disesuaikan di Tahun berikutnya	-	Kegiatan berupa pembangunan saluran drainase, anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota, untuk memenuhi Alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	16.150,5 m	1.582 m	9.79	Tidak merubah target pada	Akan disesuaikan di Tahun berikutnya	-	Kegiatan berupa

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Drainase Lingkungan	yang Dibangun				RKPD P			pembangunan saluran drainase, anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota, untuk memenuhi Alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	95 Persen	79,55 Persen	83,73	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Pemerintah	46 Kegiatan	32 Kegiatan	69,57	Kemampuan keuangan daerah yang	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					terbatas			
				Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	46 Kegiatan	32 Kegiatan	69,57	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	SPAM 5 paket, Gedung 6 paket, Jaling 15 paket, Drainase 5 paket, RDTR 1 paket (RDTR Tilatang Kamang)
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi Mantap jalan kabupaten	86 Persen	58,37 Persen	67,87	Penurunan kondisi jalan akibat faktor umur jalan dan intensitas bencana alam yang tinggi tahun 2025	Meningkatkan pendanaan dari sumber lainnya	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 11, 22	Data kemantapan jalan berdasarkan data survei kondisi jalan 2025
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Jembatan Kabupaten yang Dibangun/ Diganti Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara Jumlah Jembatan Kabupaten yang dipelihara	2 Unit 3 Unit 40,50 Km 3 Km	1 unit 5 unit 14,65 Km 10 km	50 166,77 24,69 333,33	Target tidak disesuaikan pada Perubahan RKPD	Berikutnya target akan disesuaikan	-	-
				Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6,7 Km	4,65 Km	69,40	Keterbatasan kemampuan anggaran	Dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 Km	15 Km	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemeliharaan jalan di Kecamatan Sungai Pua, Canduang, Banuhampu, Ampek Angkek, Kamang Magek, Tilatang Kamang, Baso, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Matur dan IV Koto
				Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembangunan Oprit Jembatan Durian Labu Dusun Padang Baru Lubuk Jua Manggopoh Kec. Lubuk Basung
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di rehabilitasi	5 Unit	5 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Rehab Jembatan di Kec Ampek Nagari, Tilatang Kamang, Candung, Lubuk

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Basung, Matur
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,04 Persen	0 Persen	0	Terjadi perubahan kriteria persyaratan penyelenggaraan pelatihan	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 22	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang terlatih	60 Orang	0	0	Terjadi perubahan kriteria persyaratan penyelenggaraan pelatihan	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	0	0	Terjadi perubahan kriteria persyaratan penyelenggaraan pelatihan	Dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	Kegiatan yang terlaksana hanya berupa operasional mengikuti pelatihan memenuhi undangan provinsi
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	98,65 Persen	98,65 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 22	-
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan	Jumlah materi teknis dan	1	1	100	Pembiayaan	Dilaksanakan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RDTR Kabupaten Kota	RANPERKADA RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen		dipindah pada sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota (PMK)	sesuai program dasarnya		
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	40 Layanan	199 Layanan	497,5	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku tidak dapat diprediksi jumlahnya, secara kegiatan ini menampung seluruh layanan	Akan disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	40 Layanan	199 Layanan	497,5	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu	Akan disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya	-	Rekomendasi KKPR Berusaha 70 dokumen, Non

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									yang berlaku tidak dapat diprediksi jumlahnya, secara kegiatan ini menampung seluruh layanan.			Berusaha 59 dokumen, Pengesahan Site plan 70 dokumen

Tabel 3.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Permukiman

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	92 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	750 Laporan	750 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	30	Keterbatasan Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	30	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 Laporan	750 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	5 Unit	25	Keterbatasan Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	5 Laporan	5 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

					Kantor yang Disediakan							
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota-	Pendataan rumah korban bencana	2500 rumah	2500 rumah	100	Tidak Ada	Tidak Ada	--	--
				Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen identifikasi perumahan di lokasi relokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang di rehabilitasi	1 unit	0	0	Telah terakomodir dalam kegiatan BNPB		-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang di bangun	1 unit	0	0	Telah terakomodir dalam kegiatan BNPB	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rumah bagi korban bencana yang terfasilitasi	12 unit	12 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembinaan	Pemeliharaan rusunawa	1 unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
				Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	50 persen	50 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan drainase perumahan dan lingkungan permukiman yang dibangun	2500 m	3007,2 m	120	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Sesuai dengan kondisi lapangan
				Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi perumahan yang disediakan PSU	7 Lokasi	9 Lokasi	128	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	-
				Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni	1,67 persen	2.07 persen	123	Target tidak disesuaikan pada RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Jumlah usulan RTLH dalam Kawasan kumuh yang diperbaiki	10 unit	7 unit	70	Target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	10 Unit	7 unit	70	Target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kotaku dan pisew	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha								
				Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/tereviden/terlegalisasi	1 Dokumen	0	0 %	Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	0.09	0,11	122	Target tidak disesuaikan pada RKPD P	Akan disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni yang ditangani	100 unit	77 unit	77	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Akan disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	100 Unit	77 Unit	77	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Akan disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-

Tabel 3.6 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	87 Persen	87	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 23	-
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang	78,56 Persen	78,56 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana							
				Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	50 Orang	50 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti Gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan	Jumlah laporan layanan Pusat	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi (PUSDOLAP) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya							
				Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warganegara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	52 Dokumen	13 Dokumen	25	Rendahnya kejadian bencana yang membutuhkan SK tanggap darurat bencana sehingga realisasi dibawah target	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis bencana	903 Orang	18.742 Orang	2076	Terjadinya bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten	SK Darurat Bencana ditetapkan sesuai dengan jumlah bencana yang terjadi	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Agam pada tanggal 23 November 2025, jumlah terbanyak 15.300 jiwa			
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	903 Orang	1.000 Orang	111	Realisasi melebihi target karena adanya pembagian masker kepada 1000 orang korban terdampak erupsi gunung Marapi	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen JITUPASNA yang disusun berdasarkan kerusakan akibat bencana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pelayanan dasar											
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	100 Persen	54,55 Persen	54,55	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	6 Unit	54,55	Pengadaan laptop 1 Unit dan 4 Unit komputer tidak bisa dilaksanakan disebabkan spesifikasi pada DPA tidak tersedia di e-catalog	Penyesuaian Spesifikasi barang yang akan dibeli dengan ketersediaan barang di e-catalog	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang	Persentase Barang Milik Daerah yang	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Berkondisi Baik							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentramanan dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan	250 Laporan	250 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
				Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 Laporan	54 Laporan	54	Target tidak tercapai karena berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya keamanan dan ketertiban	Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	4 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase Laporan Pelanggaran Perda dan Perbup yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perkada Sesuai SOP							
				Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda Dan Per Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Perda dan Perkada	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan kebakaran yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tahun), Sah, dan Legal							
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	16 Unit	14 Unit	87,50	Target tidak tercapai karena Pengadaan 2 sel baju tahan panas tidak terlaksana	Pengadaan akan dilaksanakan di tahun berikutnya	-	-
				Sub kegiatan penyelenggaraan dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Objek Retribusi Apar Terlayani	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Selakar yang Terbentuk	46 Kelompok	36 Kelompok	78,26	Kegiatan yang dijadwalkan akhir tahun	Kegiatan akan dilaksanakan di tahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									untuk 10 kelompok satlakar tidak terlaksana karena terjadinya bencana alam			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	300 Orang	300 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10 Desa	0 Desa	0	Kegiatan yang dijadwalkan di akhir tahun tidak terlaksana karena terjadinya bencana alam	Kegiatan akan dilaksanakan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Laporan Kejadian Mengancam Manusia Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa Membahayakan dan atau Mengancam	Jumlah Laporan Hasil Pelanggaran Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Keselamatan Manusia								

Tabel 3.7 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Bidang Sosial	Dinas Sosial		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	95 Persen	95 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2 Paket	2 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Dilakukan Pembinaan Dan Pemberdayaan	70 Persen	70 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	30 Keluarga	30 Keluarga	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas terlantar, Gelandang dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 Persen	70 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	208 Orang	206 Orang	99	2 orang penerima manfaat meninggal dunia.	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	108 Orang	106 Orang	98	2 orang penerima manfaat meninggal dunia.	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kabupaten/Kota							
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	12 Orang	120	Realisasi Melebihi Target karena pada tahun berjalan kasus yang di tangani lebih banyak dari target (Respon Kasus)	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	62 Orang	103	Realisasi Melebihi Target karena pada tahun berjalan kasus yang ditangani lebih banyak dari target (Respon Kasus)	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	11 Orang	110	Realisasi melampaui Target karena kasus yang dilayani melebihi target yang ditetapkan (Respon Kasus)	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	55 Orang	92	Realisasi tidak mencapai Target karena berkurangnya pengaduan masyarakat terkait layanan kedaruratan (55 Orang). Dimana layanan yang diberikan sesuai dengan kasus yang dilaporkan.	Menurunnya kasus layanan kedaruratan menunjukkan rendahnya kejadian kedaruratan	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	10 Orang	11 Orang	110	Capaian melampaui target seiring dengan	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kabupaten/Kota				meningkatnya jumlah kasus yang ditangani (Respon Kasus)			
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	2 Orang	67	Target tidak tercapai karena Pengaduan yang diterima hanya 2 orang pada tahun berjalan (Respon Kasus)	Menurunnya kasus layanan kedaruratan menunjukkan rendahnya kejadian kedaruratan	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimutakhirkan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	7965 Orang	7965 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Didata							
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Terfasilitasnya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	800 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	442 Orang	110.50	Target melebihi kinerja karena adanya penambahan penerima sebanyak 42 orang pada masa tanggap darurat bencana.	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Unit	79 Unit	103	Realisasi melebihi Target karena beberapa kasus dibiayai dengan dana provinsi	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penanganan	Jumlah Orang yang	5 Orang	5 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Khusus bagi Kelompok Rentan	Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota							
				Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	442 Orang	110.50	Penambahan 42 orang yang mendapatkan layanan dukungan psikososial pada masa tanggap darurat bencana.	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	85 persen	85 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Terpeliharanya Makam Pahlawan Nasional	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharanya pada	17 Makam	17 Makam	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota							

3.1.2 CAPAIAN PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Tabel 3.8 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenaga kerjaan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	88 Persen	88 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan sebanyak 28 orang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	28 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja	88 Persen	88 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	88 Persen	88 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88 Persen	88 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	88 Persen	88 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	1 unit

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							kendaraan roda empat
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	2 unit kendaraan roda empat
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	22 Unit	73,33	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Pemeliharaan Laptop, PC, AC dan Printer
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	60 Persen	0 Persen	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang Mengacu ke RTK	60 Persen	0 Persen	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	Proses penyusunan RTK dilaksanakan hingga penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi selanjutnya kegiatan tidak dapat dilanjutkan karena efisiensi anggaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mempunyai Kompetensi dan Produktif	7 Persen	7,62 Persen	108,84	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Dukungan terhadap program unggulan Agam sejahtera
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Jumlah Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	80 Orang	125	Target tidak disesuaikan pada RKPDP	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Dukungan terhadap program unggulan Agam sejahtera
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	70 Persen	30,43 Persen	43,48	Banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan sedangkan pencari kerja yang terdaftar meningkat	Koordinasi ke perusahaan penyedia jasa tenaga kerja	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	70 Persen	30,43 Persen	43,48	Banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan sedangkan pencari kerja	Koordinasi ke perusahaan penyedia jasa tenaga kerja	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									yang terdaftar meningkat			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.200 Orang	1.334 Orang	111	Meningkatnya pencari kerja melalui rekrutmen CPNS dan Perusahaan	Tidak Ada	-	-
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Hubungan Industrial	80 Persen	80 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sarana HI	80 Persen	80 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan	40 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	40 perusahaan yang telah dilakukan pendataan HI (hubungan industrial)
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Persentase Perselisihan HI yang Terfasilitasi	75 Persen	92,5 Persen	123,33	Perusahaan yang mengajukan penyelesaian perkara ke	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					mediator melebihi target yang ditetapkan dan perkara dapat terselesaikan dengan baik			
				Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	40 Perkara	37 Perkara	92,5	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kasus yang diselesaikan mediator sebanyak 37 perkara, kasus yang lain selesai secara bupati di perusahaan
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	0 Lembaga	0	Efisiensi anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-

Tabel 3.9 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOME NDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Bidang Pember dayaan Perempuan dan Perlind ungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	98,44 Persen	98,44	Adanya Pegawai yang pensiun 1 orang	Menyesuaikan kebutuhan gaji dengan jumlah pegawai	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	31 Orang	96,88	Adanya Pegawai yang pensiun 1 orang	Menyesuaikan kebutuhan gaji dengan jumlah pegawai.	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Kebutuhan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2 Paket	2 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

					Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	65 Unit	65 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehab	2 Unit	2 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36,40 Persen	36,10 Persen	99,18	Tidak tercapainya target karena beberapa perangkat daerah mengurangi kegiatan anggaran responsif gender	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia	-	-
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen GAP dan GAB	55 PD	55 PD	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	55 Orang	55 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Organisasi	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang Dibina	19 Organisasi	19 Organisasi	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	105 Orang	105 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan	Jumlah layanan rujukan	3	3	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	lanjutan bagi kasus perempuan	Layanan	Layanan					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 layanan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilar-pilar kualitas keluarga.	83.3 persen					-	Belum dirilis oleh Kementerian PPPA
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Data Gender dan Anak yang Dicetak	20 Buku	20 Buku	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Kota	Tersedia							
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	80 Persen	-	-	-	-	-	Belum Dirilis Oleh Kementerian PPPA
				Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Layak Anak	65 Persen	79,33 Persen	122,05	-	Tidak Ada	-	Capaian melebihi target karena pelaksanaan evaluasi terhadap Nagari, Puskesmas, Satuan Pendidikan dan Forum Anak mendorong percepatan peningkatan capaian KLA
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	10 Organisasi	10 Organisasi	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah Peserta Bimtek	330 Orang	330 orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
				Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	330 Orang	330 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK Penerima Layanan	50 Orang	75 Orang	150	Tidak ada	Tidak ada	-	Masyarakat telah berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan Sosialisasi KDRT dapat dipahami oleh masyarakat
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	75 Orang	150	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Tingginya kasus Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak ke UPTD PPA Kab Agam.
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	50 layanan	75 Layanan	150	Tingginya kasus Kekerasan terhadap anak	Tidak Ada	-	-

									disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak ke UPTD PPA Kab Agam.			
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UPTD PPA	1 Lembaga	1 Lembaga	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan AMPK	70 Orang	70 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

Tabel 3.10 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan (Orang/ Bulan)	25 orang/bulan	25 orang/bulan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD & laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD (laporan)	10 laporan	10 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar unit kerja	90 persen	90 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1 paket	1 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1 paket	1 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Penyediaan Barang Cetak	Jumlah paket barang	1 paket	1 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1 laporan	1 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4 Unit	4 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4 Unit	4 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	90 persen	90 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pembayaran Gaji Non ASN
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	90 persen	90 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	3 unit	3 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 unit	1 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1 unit	1 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/Th)	110 kg/kapita /Th	92.45 kg/kapita /Th	115.95	Tidak ada	Tidak ada	-	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan sehat
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Capaian Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan terhadap target yang ditetapkan	100 persen	104.5 persen	104.5	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Meningkatnya ketersediaan stok pangan dan produksi di Kabupaten Agam
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	GPM (Gerakan Pangan Murah) yang

					Pangan Lainnya (Laporan)							dilaksanakan 16 Kali .
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	130 Keluarga	162 Keluarga	125	Tidak ada	Tidak Ada	-	Meningkatnya jumlah keluarga yang memperoleh bantuan bibit seperti bibit cabe, benih sayuran, ternak ayam
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah cadangan pangan terhadap kebutuhan (%)	20 persen	17.9 persen	89.5	Tidak ada	Tidak ada	-	Sisa cadangan pangan yang tersedia 2.5 ton dari stok awal 24 ton. Disamping bantuan dari Bapanas sebesar 62 ton
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/kota (ton)	10 ton	10 ton	100	Tidak ada	Tidak ada		

				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Angka Kecukupan Energi Tingkat Konsumsi terhadap target yang ditetapkan	100 persen	95.5 persen	95.5	Belum beragamnya konsumsi karbohidrat pada masyarakat	Perlu dukungan dari pemerintah secara terus menerus tentang edukasi dan sosialisasi sumber pangan berbasis pangan lokal	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 kelompok	1 kelompok	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pelatihan pangan lokal sebanyak 20 orang, lomba B2SA sebanyak 1 kali.
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	45 persen	83.89 persen	186	Tidak ada	Tidak ada	-	Optimalisasi peran aktif Dinas melalui inovasi GEDOR PINTU yang menerapkan pendekatan jemput bola kepada pelaku usaha dalam mendorong pengurusan registrasi izin edar PSAT PDUK
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	

				Kabupaten/Kota	Pangan Segar (%)							
				Rekomendasi perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (dokumen)	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan nagari rawan pangan (%)	19.40 persen	1.09 persen	0.06	Target Tidak disesuaikan pada RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Terdapat 1 nagari yang diintervensi yaitu Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto
				Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan (%)	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	Terdapatnya 1 Nagari (1.09%) rentan Pangan dari 92 Nagari pada Prioritas 3, yaitu di Nagari Koto Tuo Kec. IV Koto
				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah (%)	100	100	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-

				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	Pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Seperti sarden, telur sama minyak sebanyak 100 KK di Kec. tanjung Raya, Malalak, Tj. Mutiara dan Palembayan.
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kab/ kota (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	Pemberian bantuan untuk nagari mandiri pangan berupa cabe, bibit terung, bibit jagung dan pupuk di Nagari Kampung tengah, Malalak Timur dan Malalak Selatan, Nag. Koto Panjang, Nag. Pagadih, Nag. Koto Tuo.

				Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	Kegiatan berupa sosialisasi, sosialisasi sudah dilaksanakan pada 3 nagari, agar setiap nagari tersebut menganggarkan dana di DPA masing-masing
				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi kab/ Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/ Kota (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) setiap bulan

Tabel 3.11 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100 %	100 %	100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam satu (satu) Daerah Kab/Kota	2 Berita Acara	4 Berita Acara	200	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Meningkatnya kasus sengketa yang dimediasi
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 Persen	78 Persen	78	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Akan disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang disertifikatkan	100 Bidang	78 Bidang	78	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Akan disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam satu Kabupaten/Kota	100 Laporan	78 Laporan	78	Target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan	Akan disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-

				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah pekerja Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.12 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Lingkungan Hidup

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	98,9 Persen	98,9	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100,0 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	37 Orang/bulan	119	Tidak ada	Tidak ada	-	ASN 37 P3K 8 Org PNS 29. Adanya penambahan pegawai di semester II
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah paket peralatan	6 paket	6 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan perlengkapan kantor yang disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	1 unit	1 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang milik daerah yang berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Pemerintahan Daerah								
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	11 unit	8 unit	73	3 kendaraan tidak ada pelaporan pembayaran pajak	Akan ditingkatkan tertib membayar pajak pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	0 unit	0	Efisiensi anggaran	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	7 unit	88	Disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada	-	-
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan dokumen lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Tahapan Penyusunan Perda RPPLH Kabupaten yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Propinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau	40 Persen	36 Persen	90	Tidak ada	Tidak ada	-	Angka indeks kualitas air

				Hidup	maninjau							masih menunggu data final dari KLHK
				Sub Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Identifikasi potensi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan upaya mitigasi yang dilakukan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Realisasi kegiatan tergantung permintaan yang masuk
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi hasil inventarisasi GRK dari sektor LH yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Kegiatan berupa sosialisasi, pendampingan dan pembentukan kampung iklim (jorong batang Palupuh dan dalko)
				Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	40 lokasi	40 lokasi	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pemantauan kualitas air di 20 lokasi se Kabupaten Agam dalam 2 kali musim panas dan hujan (kondisi ideal 40 lokasi)
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan di	700 dokumen	529 dokumen	75,57	Realisasi tergantung	Tidak ada	-	Penyelenggaraan

				Hidup Kabupaten/Kota	laboratorium				permintaan yang masuk			assesment setiap tahun dan akreditasi setiap 5 tahun, pengujian sampel dan kasus pencemaran lingkungan
				Sub Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemulihan media lingkungan yang dilaksanakan	4 kegiatan	3 kegiatan	75	Tidak ada	Tidak ada	-	Pembersihan Danau, Operasional sekretariat Save maninjau, pengadaan sarpras, pemantauan kualitas air
				Sub Kegiatan Pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4000 M2	0	0	Kemampuan keuangan daerah yang rendah dan cuaca ekstrem	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang terkelola	14 persen	14 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Keanekaragaman hayati yang terkelola	14 persen	14 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan	Luas RTH yang Dikelola	26,9 Ha	26,9 Ha	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Lokasi RTH

				Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota							27 Lokasi dalam kota Lubuk Basung
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	98 persen	100 persen	100	Realisasi rincian teknis limbah B3 yang terkelola terlaksana sepenuhnya sesuai permohonan yang masuk	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Rekomendasi Standar Teknis/Rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 yang diterbitkan	100 persen	50 persen	50	Realisasi tergantung permohonan yang masuk	Penyesuaian target berdasarkan tren realisasi tahun sebelumnya	-	-
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 laporan	2 laporan	50	Realisasi tergantung permohonan yang masuk	Penyesuaian target berdasarkan tren realisasi tahun sebelumnya	-	Rincian teknis yang diterbitkan untuk balai veteriner Baso dan PT sentosa usaha kita abadi(usaha peternakan ayam) lokasi nagari Bawan
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	33 persen	5 persen	15	Keterbatasan Anggaran dan SDM PPLHD	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-

				Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	diterbitkan							
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	33 persen	5 persen	15	Keterbatasan Anggaran dan SDM PPLHD	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	5 usaha dari 99 pelaku usaha yang dilakukan pengawasan
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 dokumen	4 dokumen	133	Realisasi sesuai jumlah permohonan	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	6 badan usaha	7 badan usaha	117	Adanya pendampingan dari Provinsi (Batang Palupuh) dan Pusat (PT. AMP)	Tidak ada	-	Usaha Keg yang dilakukan pengawasan RSUD Lubuk basung PT. Mutiara Agam, Puskesmas Lubuk Basung PDAM Tirta Antokan, RSIA Rizki Bunda, PT Batang Palupuh Jaya, PT

				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Operasional pengelolaan sampah
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 lembaga	7 lembaga	175	Bertambahnya minat lembaga pendidikan untuk melaksanakan program adiwiyata, meningkatnya sosialisasi program adiwiyata	Tidak ada	-	7 lembaga pendidikan formal (6 SD 1 SMP)
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di	Persentase Pengaduan Masyarakat dibidang	100	100	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	PPLH yang difasilitasi	persen	persen					
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti	4 pengaduan	9 pengaduan	225	Tingginya jumlah permohonan kasus pengaduan yang masuk	Tidak ada	-	Pengaduan limbah bengkel, pabrik tahu 2 pabrik Ampek Angkek dan Lubuk Basung, tambak udang, PT Mogi (produksi bata ringan), stone crusher, pembakaran batok kelapa, pembakaran lahan PT. Kamu, Peternakan Sapi Maninjau Tj Raya
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten	46 persen	0	0%	Capaian target menunggu evaluasi dari Provinsi	Tidak ada	-	Kegiatan operasional pengelolaan sampah terletak di

												sub kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup (PMK)
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang terkelola	46 persen	0	0%	Tidak ada	Tidak ada	-	Penginputan data sedang dilakukan di aplikasi SIPSN dan sedang menunggu validasi dari provinsi dan KLHK, hasil dapat diperoleh di Minggu ke 3 Februari. Capaian di tahun 2024 46.29%
				Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengelolaan sampah di	0 Ton	0	0%	Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan	Akan meningkatkan anggaran pengelolaan sampah	-	-

				TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTSa,R DF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah dari rumah			

Tabel 3.13 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Hak Gaji dan Tunjangan PNS	100 Persen	98,15 Persen	98,15	Adanya PNS yang pensiun 1 orang	Menyesuaikan anggaran gaji dengan jumlah ASN	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	26 Orang	96,3	Adanya PNS yang pensiun 1 orang	Menyesuaikan anggaran gaji dengan jumlah ASN	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum dan Operasional Kantor	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	50 Persen	50	Spesifikasi barang yang akan di beli tidak tersedia lagi di e-katalog	Pengadaan barang menyesuaikan dengan Spesifikasi yang tersedia di e-katalog	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	0	Spesifikasi barang yang akan di beli tidak tersedia lagi di e-katalog	Pengadaan barang menyesuaikan dengan spesifikasi yang tersedia di e-katalog	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun	99 Persen	99 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Cakupan Pelayanan Administrasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Kependudukan	Kependudukan oleh Unit Pelayanan							
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Terkelola	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.14 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBLJ AKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	90 Persen	90 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan Non ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang	19 Orang	105.56	Penambahan Pegawai CPNS 2025 sebanyak 1 orang	Menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan jumlah pegawai	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum di OPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	2 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBLAKAK	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	8 Unit	114	Realisasi melebihi target karena ada nya mutasi masuk 1 unit kendaraan dari PUTR		-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah peralatan dan	35 Unit	35 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peralatan Mesin dan Lainnya	mesin lainnya yang dipelihara							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Penataan Desa	Jumlah Nagari Yang terfasilitasi dalam Penataan Sesuai Standar	92 Nagari	92 Nagari	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Nagari	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	13 Nagari	13 Nagari	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari yang terbina	18 Kegiatan	19 Kegiatan	103.3	Adanya penambahan 1 kegiatan yang menunjang administrasi pemerintahan nagari	Menyesuaikan kegiatan dengan program	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya evaluasi tingkat Perkembangan Nagari dan evaluasi LPPN Nagari	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	20 Dokumen	22 Dokumen	110	Tidak ada	Tidak ada	-	Karena ada penambahan 2 usulan

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												RANPERDA dari Nagari
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	276 Dokumen	276 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	184 Orang	202 Orang	110	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Karena adanya penambahan aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas 18 orang perangkat nagari
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	92 Dokumen	92 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	92 Dokumen	92 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase komponen pada kelembagaan nagari yang ditata sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan lembaga	100 Persen	121,88 Persen	121,88	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat di nagari							
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	128 Lembaga	184 Lembaga	143,75	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Realisasi melebihi target karena adanya penambahan kegiatan Bimtek New Posyandu bagi 56 lembaga yang ditingkatkan
				Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

Tabel 3.15 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Pengendalian Penduduk	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	69,65	48,74	69.98	Tidak tercapainya target karena minat dan Partisipasi masyarakat untuk menjadi akseptor KB masih rendah	Meningkatkan KIE Terhadap masyarakat terutama PUS	-	-
				Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang mendukung Kebijakan kependudukan	27 OPD	27 OPD	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	50.000 KK	50.000 KK	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan	16 Laporan	16 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pengumpulan Data Keluarga							
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) (%)	12,5 Persen	11,96 persen	95,68	Tidak tercapainya target karena minat dan Partisipasi masyarakat daerah Unmet Need untuk menjadi akseptor Khususnya MKJP masih rendah	Meningkatkan KIE terhadap Masyarakat khususnya PUS	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	6.000 Orang	8.515 Orang	141,9	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Tingginya capaian karena adanya pelayanan serentak pada hari-hari tertentu seperti IBI KB KES, Harganas, Hari Kartini, Hari Sejuta Akseptor dan pada momen-momen tertentu.
				Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program	2 Laporan	2 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					KKBPK							
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	16 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	16 Laporan	16 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	35 Organisasi	35 Organisasi	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan Mitra Kerja							
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang Dibina	25 Orang	25 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.251 Orang	1.251 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Akseptor yang Dilayani	7.000 Orang	8.515 orang	121,64	Tidak ada	Tidak Ada	-	Tingginya capaian karena adanya pelayanan serentak pada hari-hari tertentu seperti IBI KB KES, Harganas, Hari Kartini, Hari Sejuta Akseptor dan pada momen-momen tertentu.
				Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	24 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan	Jumlah Orang yang	2.000	1.910	95,50	Tidak tercapainya	Meningkatkan KIE	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	orang		target karena minat dan Partisipasi masyarakat untuk menjadi akseptor MOP masih rendah	terhadap Masyarakat khususnya PUS		
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	94 Unit	94 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	24 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	76 Dokumen	70 Dokumen	92,11	Target tidak tercapai karena ada beberapa Kampung KB di daerah terdampak bencana tidak bisa melaksanakan kegiatan yang direncanakan di akhir tahun	Kegiatan akan dilaksanakan ditahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	76 Kampung KB	70 Kampung KB	92,11	Target tidak tercapai karena ada beberapa Kampung KB di daerah terdampak bencana tidak	Kegiatan akan dilaksanakan ditahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kampung KB)				bisa melaksanakan kegiatan yang direncanakan diakhiri tahun			
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	56,12 persen	68,7 persen	122	Tidak ada	Tidak ada	-	Ibangga diukur oleh 3 dimensi yaitu ketentraman keluarga, kemandirian ekonomi keluarga dan kebahagiaan keluarga. Salah satu dari 3 dimensi yang mempengaruhi tingginya ibangga adalah ketentraman keluarga.
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKS	51 Kelompok	103 Kelompok	201	Tidak ada	Menyesuaikan kembali target untuk selanjutnya	-	Capaian melebihi target karena Adanya Penambahan Kelompok BKB, BKR, BKL dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												UPPKS pada Tahun 2025
				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	6 Unit	6 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina	50 Kelompok	50 Kelompok	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita							
				Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	10 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

Tabel 3.16 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Perhubungan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD	100 Persen	93,05 Persen	93,05	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji sebanyak 37 Orang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	70	100	142,9	Tidak disesuaikan di RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Barang	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Gaji PTT, Kontrak dan THL Persentase Pemenuhan Pembayaran air, listrik dan telepon	100 Persen 90 Persen	100 Persen 100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	80 Persen	93,75 Persen	95,37	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	22 Unit	91,67	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	34 Unit	94,44	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan	Rasio kejadian	0,007	0,016	42.17%	Jumlah	Meningkatkan	-	-

				Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Persen	Persen		kecelakaan yang terjadi relatif sama dengan tahun sebelumnya namun angka keberangkatan menurun menyebabkan rasio menjadi tinggi	sosialisasi dan edukasi, kelengkapan sarana jalan dan pengaman lalu lintas		
				Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang terlaksana	76%	76%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80%	79.60%	99,50	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2000 Unit	1990 Unit	99,50	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2000 Unit	1990 Unit	99,50	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C yang sesuai standar	80%	80%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengujian Berkala	Persentase tersedianya	74 persen	74 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Kendaraan Bermotor	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
				Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	60 persen	60 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70 persen	70 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penetapan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam satu daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya penetapan Rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten /	60 persen	60 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

					kota							
				Sub Kegiatan Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten / kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase dermaga dan angkutan danau yang sesuai standar kelayakan	60 persen	60 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Persentase dermaga dan angkutan danau yang diawasi	66 Persen	66 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai danau dan penyebrangan	Jumlah Laporan Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai danau dan penyebrangan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.17 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.Peningkatan Penerapan Sistem Smart Government, 2.Meningkatkan transparansi informasi publik, 3.Meningkatkan kualitas data dan layanan informasi, 4.Meningkatkan keamanan informasi	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100%	92,22%	92,22	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelola keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan TPP PNS	37 orang	37 orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 bulan	12 bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umm Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	0	0	spesifikasi belanja modal tidak tersedia pada e-katalog	Mengusulkan penambahan spesifikasi barang import pada e katalog	-	-
				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	5 unit	83,33	Terdapat 1 unit pesanan yang tidak direspon oleh penyedia dan terbatas pada waktu untuk melaksanakan realisasi pengadaan	Melakukan follow up untuk pesanan agar di respon penyedia. Apabila terdapat pembatalan pesanan, maka akan dilakukan pencarian penyedia lain. Upaya lain melalui komplain di INAPROC atau adendum pesanan.	-	-
				Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persentase	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan	36 bulan	36 bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulam	12 bulam	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 nit	20 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktifitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1. terefikasi dewan pers 2. terdaftar di dinas kominfo 3. aktif dalam kegiatan	35 media	35 media	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 pemohon	5 pemohon	167	Tidak Ada	Tidak Ada	-	karena PPID merupakan bank data informasi Pemkab Agam, sehingga permohonan yang masuk tidak dapat diprediksi
				Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	20 rekomen dasi	20 rekomen dasi	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria juknis	6 media	6 media	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	50 konten	157 konten	314	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Kominfo secara rutin melakukan peliputan lapangan dan output peliputan berupa konten yang dipublish di medsos
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik	50%	50%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

					dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah							
				Kegiatan Pengelolaan e-governemnt di Lingkup pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya layanan e-government yang tersedia	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 aplikasi	5 aplikasi	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 dokumen	0 dokumen	0	Efisiensi anggaran sehingga tidak dapat diselesaikan, namun Evaluasi smart city tetap berjalan	Akan dilaksanakan Kembali pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	43 OPD	43 OPD	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses	20 OPD	20 OPD	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Penyelenggaraan SPBE	internet yang disediakan oleh Dinas							

Tabel 3.18 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan dengan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	PNS:10 P3K: 1
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semester SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

					disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semester SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada		

				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mabel Yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kursi putar hidrolik 3 unit Meja staf 4 unit Meja pimpinan 2 unit Kursi pejabat 2 unit Meja rapat 1 unit Sofa tamu 1 set Tenda 2 unit Kursi rapat 2 unit Lemari arsip 2 uni
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	5 Unit	5 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	AC 1 unit Laptop 1 unit Infocus 1 unit Printer 1 unit Sound System 1 unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

					Kantor Yang Disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	73 Persen	73 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Meisin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat	69,40 Persen	63,01 Persen	90,79	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan dan Memenuhi Standar	3,35 Persen	3,42 Persen	102,23	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Dengan Pengelolaan	85.0 Persen	197.78 Persen	233	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Karena adanya

					Kelembagaan Sesuai Standar							pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan inpres No 9 tahun 2025 maka untuk pelatihan yang sebelumnya direncanakan untuk koperasi yang sudah ada di Kabupaten Agam, dialokasikan ke pelatihan KDMP di Kabupaten Agam sebab KDMP yang baru dibentuk membutuhkan peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi, maka menyebabkan jumlah peserta pelatihan meningkat signifikan.
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	Persentase SDM Yang Memahami Pengetahuan Koperasi	85 Persen	197.78 Persen	233	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Karena adanya pembentukan

				Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota								Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan inpres No 9 tahun 2025 maka untuk pelatihan yang sebelumnya direncanakan untuk koperasi yang sudah ada di kabupaten agam dialokasikan ke pelatihan KDMP di kabupaten agam sebab KDMP yang bar dibentuk membutuhkan peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi, maka menyebabkan jumlah peserta pelatihan meningkat signifikan.
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	45 Orang	89 Orang	198	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Bertambahnya jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang

												membutuhka n peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi, sehingga jumlah peserta pelatihan meningkat signifikan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi dan mendapatkan pendampingan	0,50 Persen	0,68 Persen	136	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Meningkatny a jumlah usaha mikro yang diberdayakan seperti usaha mikro dari korban relokasi bencana Marapi dan usaha mikro lainnya
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendapatan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan para Pemangku	Persentase meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	0,50 Persen	0,68 Persen	136	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Meningkatny a jumlah usaha mikro yang diberdayakan seperti usaha mikro dari korban relokasi bencana Marapi dan usaha mikro lainnya
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan	Jumlah SDM Yang Memahami	70 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Kegiatan tidak dilaksanakan	Akan pada dianggarkan tahun	-	-

				Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				karena terjadinya bencana, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang dan hidrometeorologi di Kabupaten Agam	berikutnya		
				Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi	69 Unit Usaha	69 Unit Usaha	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	80 Unit Usaha	79 Unit Usaha	99	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Kecil	0.50 Persen	0.23 Persen	46	Adanya salah satu kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan bencana alam (kegiatan Studi Tiru)	Meningkatkan jumlah unit usaha yang difasilitasi pada tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Skala Usaha Kecil	0,50 Persen	0,23 Persen	46	Adanya salah satu kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan bencana alam (kegiatan Studi Tiru)	Meningkatkan jumlah unit usaha yang difasilitasi pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	50 Unit Usaha	83	Adanya salah satu kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan	Meningkatkan jumlah unit usaha yang difasilitasi pada tahun berikutnya	-	-

									bencana alam (kegiatan Studi Tiru)			

Tabel 3.19 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	90 Persen	90 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	16 Orang/ Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah PNS sebanyak 15 orang dan jumlah PPPK sebanyak 1 orang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan	100	100	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perangkat Daerah	Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja	Persen	Persen					
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
					Jumlah Paket Mabel Yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	AC 3 unit Printer 3

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Mesin Lainnya	Yang disediakan							unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kendaraan roda empat sebanyak 2 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 8 unit

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Meisin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	AC 11 unit Printer 15 unit Komputer/PC dan laptop 14 unit
				Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pertambahan jumlah investor	20 Persen	13,7 Persen	68,5	Adanya penurunan jumlah pelaku usaha yang mengurus NIB dari 2024 ke 2025	Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha	-	Jumlah pelaku usaha yang mengurus NIB 2024 sebanyak 7953 dan Jumlah pelaku usaha yang mengurus NIB 2025 sebanyak 6.532
				Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/Insentif	Persentase pelaksanaan pemberian	20	0	0	Hasil koordinasi dengan bagian	Akan dianggarkan pada tahun	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	fasilitas/insentif bagi penanaman modal	Persen			hukum perlu Pembuatan perda baru yang semula direncanakan untuk perubahan perda namun pembuatan perda tidak terpenuhi dengan anggaran yang tersedia	berikutnya		
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0	0	Hasil koordinasi dengan bagian hukum perlu Pembuatan perda baru yang semula direncanakan untuk perubahan perda namun pembuatan perda tidak terpenuhi dengan anggaran yang	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									tersedia			
				Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	Studi kelayakan kereta gantung tidak terlaksana karena keterbatasan keuangan daerah	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	8 Persen	0	0	Kegiatan promosi tidak diikuti karena keterbatasan keuangan daerah	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah kemitraan pengusaha besar dan UMKM	2 Kemitraan	0	0	Kegiatan promosi tidak diikuti karena keterbatasan keuangan daerah	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	0	Kegiatan promosi tidak diikuti karena keterbatasan keuangan	Akan dianggarkan pada tahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									daerah			
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan terhadap pelayanan meningkat	88 Persen	88 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu	88 Persen	88 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.350 Pelaku Usaha	5.350 Pelaku Usaha	100 Persen	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara	100 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	150	Dilaksanakanny a sosialisasi kepada pelaku usaha	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					elektronik							
				Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	80	Sulitnya mengakses alamat pelaku usaha sesuai data yang dimiliki	Agar pelaku usaha mencantumkan alamat perusahaan dengan jelas dan lengkap	-	-

Tabel 3.20 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	90 Persen	90 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
	Bidang Kepemudaan dan Olahraga			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	33 Orang	94	Target tidak tercapai karena 2 ASN Mutasi	Menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan jumlah pegawai	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jabatan	dibayarkan Pajaknya							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	6 Unit	75	Target tidak tercapai karena 1 unit kendaraan bus di HIBAH kan ke KONI, 1 kendaraan dihapuskan	Menyesuaikan anggaran dengan jumlah kendaraan	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	35 Unit	76,09	Beberapa peralatan kantor tidak membutuhkan pemeliharaan karena dalam kondisi baik	Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pemeliharaan peralatan	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda	90 Persen	80 Persen	88,33	Sebagian organisasi pemuda belum aktif secara kelembagaan Masih terdapat organisasi pemuda yang belum terdata atau belum melaporkan aktivitas secara rutin, sehingga berpengaruh	Melakukan pendataan ulang organisasi pemuda secara berkala, melakukan pembinaan organisasi pemuda secara bertahap	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									pada capaian indikator			
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina	16,66 Persen	11 Persen	66,99	Ada beberapa organisasi yang belum dilakukan pembinaan	Pembinaan akan dilakukan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100 Orang	150 Orang	150	Tidak ada	Tidak ada	-	Tingginya animo pemuda untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan dan Ketersediaan anggaran mencukupi untuk penambahan 50 orang peserta
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah <i>Event</i> olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	15 <i>Event</i>	15 <i>Event</i>	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan	11 Kegiatan	10 Kegiatan	90,91	Pengadaan sarana olahraga pengadaan karpet gedung olahraga tidak terlaksana	akan di adakan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang	7 Unit	6 Unit	85,71	Target tidak tercapai karena 1 unit sarana	Akan dilakukan pemeliharaan pada tahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	tersedia dan termanfaat				tidak terpelihara yaitu SPORT CENTER			
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	8 Kejuaraan	5 Kejuaraan	62,50	Kejuaraan yang tidak terlaksana : 1. Seleksi POPDA tingkat kabupaten 2. Seleksi PEPARPEDA 3. Liga Voly Nagari)	Akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi <i>Event</i> dan Single <i>Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00	Terlaksananya Hanya 1 <i>Event</i> (Pacukudo) sementara <i>Event</i> POPDA tidak dilaksanakan di provinsi sehingga agam tidak melaksanakan seleksi atlet yang akan di ikutkan ke <i>Event</i> POPDA	Melakukan Koordinasi dengan Provinsi	-	-
				Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	30 Orang	11 Orang	36,67	<i>Event</i> POPDA tidak dilaksanakan di provinsi sehingga agam	Akan berkoordinasi dengan provinsi	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									tidak mengirimkan atlet			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80	Kegiatan pembinaan olahraga POPDA yang direncanakan untuk mengikuti <i>Event</i> tingkat provinsi tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan tidak terselenggaranya <i>Event</i> dimaksud	Koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan olahraga pada tiap tingkatan	-	-
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang	105 Orang	210	Tidak ada	Tidak ada	-	Realisasi melebihi target karna <i>Event</i> pacu kuda dilaksanakan 2 kali
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	2 Pembinaan	2 Pembinaan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan	3 Pembinaa	3 Pembinaa	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rekreasi	Olahraga Rekreasi	n	n					
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Kepramukaan	85 Persen	85 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan	17 Organisasi	17 Organisasi	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

Tabel 3.21 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Yang Berkaitan Dengan Bidang Statistik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Yang Berkaitan Dengan Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun dan Mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	81 Persen	81	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Perpedoman pada ketersediaan data pada sipd.go.id
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan dan evaluasi pembangunan daerah	40 Persen	81 Persen	202,5	Salah menentukan target	Akan dievaluasi pada perencanaan tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.22 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Yang Berkaitan Dengan Bidang Persandian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang Berkaitan Dengan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan informasi Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah Indeks keamanan Informasi	300	340	113,33	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.23 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Lembaga Adat Yang menerapkan Tradisi Adat	81.82 Persen	81.82 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Lembaga Adat Di Kabupaten Agam	81,82 Persen	81,82 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	500 Orang	500 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni Yang Aktif	272 Unit	272 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sanggar/Group Kesenian Tradisi Di Kabupaten Agam	235 Sanggar	235 Sanggar	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300 Lembaga	300 Lembaga	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	51 Unit	51 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cagar Budaya di Kabupaten Agam	51 CB	51 CB	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	51 Objek	51 Objek	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum	23.000 Orang	33.063 Orang	143.75	Partisipasi peserta lomba (lomba napak tilas perjalanan Buya Hamka, lomba cerdas museum, adat dan budaya, belajar bersama di museum dan Lomba Puisi dan Ketokohan Buya Hamka) meningkat melebihi target	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum di Kabupaten Agam	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	500 Orang	630 Orang	126	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan akses Masyarakat terhadap museum	5 Unit	5 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

3.24 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	50 Persen	50 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0,79 Persen	19 Persen	2.405	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Adanya perubahan rumus capaian kinerja mengakibatkan capaian kinerja menjadi tinggi
				Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	64	61,61 (nilai sementara)	96,26	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Adanya formula baru untuk menghitung nilai TGM yang diterbitkan oleh Perpustakaan dan hingga saat ini PERPUSNAS masih dalam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												tahap proses pengumpulan data untuk menentukan nilai akhir
				Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan	11 Perpustakaan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Capaian melebihi target karena ada lokus perpustakaan nagari TPBIS 2 nagari dalam 1 kecamatan
				Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	16 Lokus	13 Lokus	81,25	3 Lokus tidak terealisasi dikarenakan akses ke lokasi tidak bisa ditempuh karena bencana alam (Palupuh, Tilatang Kamang, dan Canduang).	Tidak Ada	-	Dinas Arsip dan Perpustakaan melakukan sosialisasi budaya baca ke 14 nagari creative Hub sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan daerah

3.25 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	Dinas Arsip dan Perpustakaan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	95,80 Persen	97 Persen	101,25	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	80	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Berkurang dikarenakan ada ASN yang sudah pensiun sebanyak 6 orang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar operasional Unit Kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	100 Persen	83,33 Persen	83,33	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	5 Unit	83,33	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	79 Persen	100 Persen	126,58	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	100	Tidak Ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	16 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengelolaan Arsip	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	375 Orang	310 Orang	82,66	Kunjungan pada website tidak bisa digunakan karena website mengalami gangguan dan hingga saat ini masih dalam proses perbaikan	Website masih dalam proses perbaikan	-	Jumlah dihitung dari pengunjung depo arsip dan konsultasi aplikasi Srikandi. Untuk pengunjung website belum bisa dihitung karena website disarplus mengalami gangguan
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kab/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Dibuatkan Daftar Arsipnya	0,84 Persen	39,14 Persen	4.659,52	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Capaian tinggi karena Semakin berkembangnya penggunaan aplikasi Srikandi serta meningkatnya sadar tertib arsip oleh perangkat

												daerah, serta pengawasan rutin yang dilakukan oleh pejabat terkait
				Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2500 Berkas	2550 Berkas	102	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Tingkat capaian kinerja tinggi karena Peningkatan penggunaan aplikasi srikandi dan Gerakan tertib arsip
				Sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Laporan	44 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	s	-
				Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	15 Arsip	15 Arsip	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

3.1.3 CAPAIAN PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Tabel 3.26 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan dengan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	8170 ton	8175 ton	100.06	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	100 persen	100 persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	32 Unit	32 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Sarana penangkapan ikan untuk nelayan yaitu 16 Jaring Insang dan 16 tramel net
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	30,750 ton	33,699.91 ton	109.59	Tidak ada	Tidak ada	-	Kemandirian dan Pengalaman pembudidaya dalam melakukan penyesuaian teknis, serta

												dukungan pendampingan teknis non fisik yang menjaga stabilisasi produksi
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	100 persen	0 persen	0	Berdasarkan ketersediaan pagu dana pekerjaan fisik konstruksi, draft perencanaan hanya dapat mengakomodir pembangunan saluran air masuk dan 1 (satu) unit Kolam Air Deras. Sementara itu, Calon Penerima mengajukan kebutuhan minimal berupa saluran air masuk dan 3 (tiga) unit Kolam Air Deras. Karena keterbatasan pagu dana tidak memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka dalam Rapat	Melalui penyesuaian ruang lingkup pekerjaan dan perencanaan pembangunan secara bertahap, pengusulan penambahan anggaran pada tahun berikutnya, serta optimalisasi sumber pendanaan lain yang sah melalui kesepakatan bersama dengan calon penerima	-	-
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Kelompok	0 Kelompok	0				

									Pembahasan Tindak Lanjut diputuskan dilakukan penghentian Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan dan Fisik Konstruksi tidak dapat dilanjutkan.			
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	2 Unitnya : BBI Gumarang dan BBI Lubuk Basung
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB pada tahun berjalan	20 persen	29 persen	145	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan dalam menerapkan peraturan yang berlaku
				Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang diawasi terhadap peraturan dasar	40 persen	60 persen	150	Tidak Ada	Tidak Ada	-	

				Kabupaten/Kota								
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaku usaha budidaya darat (Lubuk Basung : 7 Pelaku Usaha, Tanjung Sani : 1 Pelaku Usaha dan Tj. Raya : 2 Pelaku Usaha
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan	338 orang	338 orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Terdapat penambahan pelaku usaha pengolahan ikan sebanyak 10 Orang.
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	28640 Ton	28326 Ton	99	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemberian bantuan sarana prasarana berupa freezer di Tj. Raya 1 Kelompok, Tj. Mutiara 5 kelompok dan

												Lubuk Basung 2 Kelompok

Tabel 3.27 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DARI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang terkelola	44 Wisata	44 Wisata	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	8 Unit	6 Unit	75	2 unit Tidak terlaksana pemeliharaannya yaitu Pembuatan Papan Informasi Geopark Sianok-Maninjau dan pembangunan pos tiket Linggai	Akan dilaksanakan di Tahun berikutnya	-	-
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata	10 Persen	10 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata Daerah	10 Event	13 Event	130	Tidak ada	Tidak ada	-	Munculnya beberapa komunitas dan local champion di desa wisata yang berani bergerak melaksanakan event berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (seperti Simarasok, Koto Gadang,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DARI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Lawang dan Sungai Batang].
				Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	7 Promosi	140	Tidak ada	Tidak ada	-	realisasi melebihi target karna bertambahnya 2 <i>Event</i> promosi dari target yang telah ditetapkan yaitu : 1. Program Kerja uda uni Sabtu bacarito dan samini saj 2. Fasilitasi pameran bagi pelaku pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dilakukan Pembinaan	25 Persen	25 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan daerah	16,66 Persen	16,66 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Proses	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINT AHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAK AN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN	TINJUT REKOMEN DARI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif							

Tabel 3.28 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Urusan Pemerintahan Pilihan di Bidang Pertanian	Dinas Pertanian		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.142 Orang/ Bulan	2.142 Orang/ Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SKPD	Konsultasi SKPD							
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	95 Persen	0 Persen	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	4 unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda dua
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	67 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemeliharaan Laptop, AC dan Printer
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	50	Keterbatasan Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Yang Dipelihara/ Direhabilitasi							
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian (Ton)	654.076 Ton	49.061 Ton	7,5	Penurunan realisasi akibat iklim dan bencana hidrometeorologi, gagal panen	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	0,30 Persen	0,16 Persen	53	Penurunan realisasi akibat iklim dan bencana hidrometeorologi, gagal panen	Perbaikan sarana dan prasarana produksi	-	-
				Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 VUB (Varietas Unggul Baru)	3 VUB (Varietas Unggul Baru)	150	Tidak merubah target pada RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Varietas kuriak kusuik, kusuik putih dan ampek angkek
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Bibit diserahkan ke masyarakat, support kegiatan PKK
				Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Bibit dan pupuk diserahkan untuk beberapa kelompok di Kecamatan Palembang,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Matur dan Canduang
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	11,15 Persen	10 Persen	89,69	Terjadinya penurunan pemotongan ternak besar dan kecil karena beralihnya konsumsi masyarakat ke daging unggas	Tidak Ada	-	Produktivitas diukur berdasarkan jumlah pemotongan
				Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	2.300 Dosis Laporan	2.183 Dosis Laporan	95	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1 Persen	0,017 Persen	1,70	Terjadinya penurunan pemotongan ternak besar dan kecil karena beralihnya konsumsi masyarakat ke daging unggas dan dampak bencana hidrometeorologi	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.146 Dosis	0 Dosis	0	Pengadaan benih tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran	Tidak Ada	-	Kegiatan yang terlaksana berupa pengadaan sapi untuk masyarakat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Tanjung Raya (13 ekor) dan Tanjung Mutiara (4 ekor) untuk 2 kelompok
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Luas Area Pertanian yang Terfasilitasi Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pertanian (ha)	1.200 ha	1.050 ha	88	Keterbatasan anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Area Pertanian yang terfasilitasi penyediaan sarana pertanian	600 ha	50 ha	8,3	Target tidak disesuaikan pada RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Keterbatasan anggaran dalam menyusun LP2B secara komprehensif tidak mencukupi	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	1 Laporan	8	Keterbatasan Anggaran dan regulasi terkait asuransi dari APBD	Akan dianggarkan di tahun berikutnya dan kajian terkait asuransi	-	Kegiatan berupa pengadaan alsintan, KP3 dan monev KP3, yang tidak terlaksana pengadaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												traktor 1 unit, asuransi usaha tani padi AUTP (untuk 1000 ha) dan AUTS 170 ekor (pihak asuransi tidak memiliki regulasi asuransi dari APBD)
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan	1.000 ha	1.000 ha	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas Area Pertanian Yang Terfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pertanian	1.500 ha	450 ha	30	Tidak Mengubah target pada RKPD P	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembangunan jaringan irigasi
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	6 Unit	50	Keterbatasan anggaran dan Penayangan di LPSE batal saat tahapan pembuktian	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	Pembangunan jalan usaha tani 299 m ³ yang tersebar di Kecamatan Palupuh, Ampek Angkek, Padang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Tarok
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 Unit	16 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Hewan yang Terfasilitasi Pelayanan Medik	25,33	25,33	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan	20 Persen	20 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 Wilayah	5 Wilayah	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Operasional Jasa Medik Veteriner Terpenuhi	35 Persen	35 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelayanan medik berupa: 1. Pelayanan jasa medik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												pengobatan karena penyakit dan pencegahan penyakit hewan target 5000 ekor per tahun, realisasi 9761, anjing, domba kambing, sapi monyet 2. surveilan identifikasi penyakit dan sosialisasi
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat	45 Persen	45 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan berupa pemotongan hewan dan hewan kurban, terdapat 984 pemotongan di RPH, Pemotongan hewan kurban 5660 ekor, 2442 ekor untuk

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												keluar masuk ternak di pasar ternak
				Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higienesanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan Yang Telah Dibina Untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	16 Unit Usaha	4 Unit Usaha	25	Keterbatasan anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	Pembinaan dan pendampingan usaha produk hewan 4 usaha di Kamang Magek susu kambing, kerupuk, susu, Tilatang Kamang makanan beku Al jamis, 3 telah memiliki sertifikat halal 1 NKV (Nomor Kontrol Veteriner) usaha makanan beku Al jamsi
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi	90 Persen	88 Persen	97,78	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					sarana pengendalian OPT							
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang ditangani	10 Persen	37 Persen	368	Tidak merubah target pada RKPD-P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Tingginya penurunan kasus dikarenakan petani sudah menerapkan pengendalian penyakit tanaman secara terpadu (pemanfaatan bahan alami untuk pestisida nabati)
				Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	700 ha	215 ha	326	Tidak merubah target pada RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Tingginya penurunan kasus dikarenakan petani sudah menerapkan pengendalian penyakit tanaman secara terpadu (pemanfaatan bahan alami untuk pestisida nabati)
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Penyuluh	66 Persen	70 Persen	106	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Meningkatnya jumlah SDM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												penyuluh yang berkualitas dengan seringnya bimbingan teknis penyuluh yang dilaksanakan
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Penyuluh	66 Persen	70 Persen	106	Tidak Ada	Tidak Ada		Meningkatnya jumlah SDM penyuluh yang berkualitas dengan seringnya bimbingan teknis penyuluh yang dilaksanakan
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapangan Sawah Pokok Murah yang terbentuk dan beroperasi	7 Unit	5 Unit	71,4	Keterbatasan anggaran daerah	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-

Tabel 3.29 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki SIUP, TDG	8,4 Persen	7,50 Persen	89,29 Persen	Sesuai regulasi persyaratan rekomendasi TDG tipe gudang minimal luas 100 m ²	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitasi penerbitan SIUP, TDG	8,4 Persen	7,50 Persen	89,29	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	80 Dokumen	6 Dokumen	7,5	Target tidak disesuaikan	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Sesuai regulasi persyaratan rekomendasi TDG tipe gudang minimal luas 100 m ²
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Tradisional yang Memenuhi Standar	2,63 Persen	1,63 Persen	61,79	Tidak terlaksana karena keterbatasan keuangan daerah	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Tradisional yang di Bangun/Rehab	1 Unit	0 Unit	0	Tidak terlaksana karena keterbatasan keuangan daerah	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0 Unit	0	Tidak terlaksana karena keterbatasan keuangan daerah (pasar Duo Koto)	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Kegiatan	Jumlah pasar yang	20 Unit	20 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	pengelolanya dibina							
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	10 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Terlaksananya Pembinaan pengurus pasar
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rata-Rata Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok yang Signifikan Dalam Setahun	33 Persen	37 Persen	111	Lonjakan harga bahan pokok pada akhir tahun yang disebabkan oleh bencana alam	Memaksimalkan distribusi bantuan bagi korban bencana	-	-
				Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Bazar Murah dan Operasi Pasar	2 Kali	2 Kali	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	20,23 Persen	29,26 Persen	145	Meningkatnya jumlah alat yang ditera	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTTP yang ditera tera ulang	100 Persen	156,20 Persen	156,20	Tidak merubah target pada RKPD P	Agar disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal,	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang,	500 Unit	718 Unit	156,20	Tidak merubah target pada	Agar disesuaikan pada tahun	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Berupa Tera, Tera Ulang	dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				RKPD P	berikutnya		

Tabel 3.30 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan dengan Perindustrian	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Peningkatan Laju Jumlah IKM dan Nilai Produksi	1,75 Persen	1,95 Persen	111	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Meningkatnya antusias masyarakat untuk menjadi entrepreneur
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan IKM dan Produksi	1,95 Persen	1,95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah IKM tahun 2025 sebanyak 8049 IKM tahun 2024 7895 IKM
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	2 Dokumen	66,7	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	Dokumen berupa Naskah Akademik dan Ranperda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	2 Dokumen	40	Tidak Merubah target pada RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Dokumen pengadaan mesin untuk masyarakat dan masyarakat relokasi
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	5 Dokumen	3 Dokumen	60	Tidak Merubah target pada RKPD P	Akan disesuaikan di tahun berikutnya	-	Dokumen berupa laporan pameran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Masyarakat	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							Inacraft, Dekranasda dan Pameran Oktober
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	60 Persen	0	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi SIINAS Terhadap Pelaku IKM	25 IKM	0 IKM	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	0 Dokumen	0	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-	-

3.1.4 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 3.31 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung yang Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan/staf ahli kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100 Persen	99 Persen	99	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Honoratium KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD	100 Persen	94 Persen	94	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Belanja Alat-alat Listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	3 Paket	75	Dikarenakan tidak ada	Akan mengkaji kembali kelayakan	-	Belanja Bahan

				Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kebutuhan Alas Meja pada saat ini masih layak di gunakan	peralatan yang masih ada		lainnya (Bahan dan Alat K3) Belanja Pakai habis (Alat Kebersihan, ATK ,alat dapur) Sovenir Cendramata Belanja Modal Alas meja
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Bahan Cetak dan Benda Pos dan Palakat
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Laporan terkait dengan bahan bakar dan Pelumas, Makan Minum, Sewa Kendaraan , Sewa Hotel dan Perjalanan
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

					Disediakan							
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63 Unit	63 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Partisi Ruangan , Kursi tamu , Meja rapat
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Marawa, Alat Pembersih, Alat Penyedot, Alat Pendingin ,Sound System, Alat Komunikasi dan Laptop
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Sewa Gedung Aset
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Mic Wireless, Ruang Bupati dan Speker Aktif Ruang Bupati
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Tagihan telepon, Tagihan Listrik , Tagihan air, Internet
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Sewa Kendaraan,

				Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							Sewa Alat kantor , Sewa Alat Peraga Kesenian
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	THL yang dibayarkan gajinya = Belanja Jasa tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga pelayanan Umum, Belanja jasa Tenaga Kebersihan , Belanja Tenaga Sopir dan Tenaga Outsourcing
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pemeliharaan n Mobil Operasional dan Pembayaran pajak Mobil dan Asuransi Mobil
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230 Unit	230 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pemeliharaan n Genset, Komputer, Alat Pendingin,

												Printer dan Laptop
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemeliharaan kantor Migrasi, Mes Belakang Balok, Pendopo, Rumah Dinas Bupati, Wakil, dan Sekda, Kantor Bupati, Bak Sampah
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 paket	2 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Atribut Bupati, Wakil Sekda, PDH Bupati, PDH Wakil Bupati, PDH Sekda, PDL Bupati, PDL Sekda, PDL Sekda, Pakaian batik Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Jas/Safari

												Bupati, Wakil Bupati dan Sekda
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Bupati dan Wakil Bupati
				Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Belanja bahan bangunan, Belanja bahan lainnya, Belanja bahan Perabot, Pemeliharaan sarana Kantor, Pemeliharaan Alat Pendingin, Belanja jasa, Belanja Modal Pending, Belanja Modal Alat Rumah

												tangga Belanja modal Bangunan, Belanja Modal Pagar
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Belanja bahan Bahan, Belanja Bahan Lainnya, Belanja Perabot Kantor, Pemeliharaa n Alat kantor, belanja Jasa, Belanja Modal Mebel, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Belanja bahan Lainnya, Belanja perabot Kantor, Belanja Mebel, Belanja Modal Alat Pembersih, Belanja Modal Alat

												Rumah Tangga, Belanja Modal Gedung kantor,
		Bagian Hukum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semestera n	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional unit kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan	12	12	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan					
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4 Unit	57,14	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Target pemeliharaan sebanyak 7 Unit untuk peralatan dan mesin kantor, realisasi pemeliharaan yang terlaksana sebanyak 4 unit, terdiri AC sebanyak 3 Unit dan Laptop sebanyak 1 unit. Terdapat printer sebanyak 3 unit tidak dilakukan

												pemeliharaan karena masih baru.
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100 Persen	96,59 Persen	96,59	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase tertib administrasi hukum yang terlaksana dengan baik	100 Persen	96,59 Persen	96,59	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk hukum daerah	Jumlah Produk hukum daerah yang disusun	660 Dokumen	615 Dokumen	93,18	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	3 Kasus	1 Kasus	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
		Bagian Perencanaan dan Keuangan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasioanal Kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 Orang	114 Orang	114	Tidak Ada	Tidak Ada		Pada TW 1 jumlah ASN sebanyak 95 orang, dan PPPK 1 orang. Pada TW 2 Penambahan ASN sebanyak 18 orang

												dengan rincian CPNS sebanyak 10 orang dan PPPK 9 orang.
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah sesuai dengan yang direncanakan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan	Jumlah Unit Peralatan	6 Unit	6 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan							
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
		Bagian Protokol dan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasinal	100 Persen	98 Persen	98	Tidak Ada	Tidak Ada	--	-

		Komunikasi Pimpinan		Kabupaten/ Kota	kantor dan ASN , Persentase kebijakan protokol, Komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan							
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelola keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 Persen	95 Persen	95	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Kendaraan	3 Unit	3 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	27 Unit	90	Adanya penerapan efesiensi dan efektivitas, sehingga peralatan dan mesin yang dipelihara disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi peralatan dan mesin	Melakukan penguatan perencanaan pemeliharaan peralatan dan mesin dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, kondisi fisik, serta tingkat prioritas penggunaannya.	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	1. Jumlah Pegawai PPPK Paruh Waktu sebanyak 6 Orang 2. Jumlah Pegawai Outsourcing sebanyak 6 Orang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah Editor Agam Media Center (AMC)

												sebanyak 2 orang
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
		Bagian Tata Pemerintahan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor Dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Dan Pengelolaan Keuangan PD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

					Yang Disediakan							
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, Dan Otonomi Serta Kerjasama Daerah Yang Terlaksana	100 Persen	89 Persen	89	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terlaksana	100 Persen	78 Persen	78	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	1 Dokumen	33,3	1. Kegiatan DOB Tidak Terlaksananya Karena Masih Proses Perbaikan Data 2. Kegiatan Batas Wilayah Tidak Terlaksana Karena Dilaksanakan Berdasarkan Permendagri	Melakukan perbaikan dan validasi data pendukung kegiatan DOB serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dengan instansi terkait	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
		Bagian Organisasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan	100	100	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Perangkat Daerah	Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	Persen	Persen					
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Laporan Outsourcing
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan RB Baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Proses penyusunan Anjab/ ABK membutuhkan waktu yang lama untuk seluruh PD	Penyusunan Anjab/ABK akan dilanjutkan ditahun 2026	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 6, 13, 14, 38	Dokumen yang dimaksud yaitu: 1. Perbup Kecamatan 2. Perda SOTK 3. Perbup Sistem Kerja 4. Perbup UPTD SPALD 5. Perbup SOTK BAPPERIDA 6. Perbup SOTK BKPSDM
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Dokumen yang dimaksud yaitu: 1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Forum

												Konsultasi Publik 3. Laporan Kompetensi Pelayanan Publik
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Rencana Aksi General dan Tematik
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Dokumen yang dimaksud yaitu: Dokumen SAKIP (LKjIP, PK, Rencana Aksi SAKIP)
		Bagian Administrasi Pembangunan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	-	-	-	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan

												dibayarkan pajaknya sebanyak 3 unit
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pemeliharaan komputer, laptop dan printer sebanyak 8 unit
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
		Bagian Perekonomian		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan asn	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

					emesteran SKPD							
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	300	Target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan	Disesuikan pada saat penginputan	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	133 Persen	133	Target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan	Disesuikan pada saat penginputan	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit	133	Target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan	Disesuikan pada saat penginputan	-	Pengadaan AC, Laptop, Printer, proyektor
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD dan Perekonomian yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang dirumuskan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 33	1. Laporan Seleksi Dewas 2. Laporan Seleksi Direktur. 3. Laporan pengawasan Perumda/ bulanan
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Laporan Pengendalian Inflasi TW I-IV
				Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Laporan pengurusan piutang dana bergulir
		Bagian Sumber Daya Alam		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan asn	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi	Persentase Pemenuhan	100	100	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Keuangan Perangkat Daerah	Kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persen	Persen					
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan	12	12	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Laptop 3 unit, Komputer PC 2 unit, Printer 3 unit
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan SDA yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan Pemantauan SDA yang dirumuskan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Koordinasi Izin Tambak Udang, KJA, Koordinasi Pemanfaatan hutan rakyat. Lebah kelulut
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Koordinasi WPR, Izin

				Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							Pertambanga n, Pajak Galian C
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Koordinasi Masyarakat Miskin belum berlistrik, Pemanfaatan Panas BUMI. Pemantauan GAS LPG Dan BBM JBT dan JBKP
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan asn	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Kantor	Kantor yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2 Unit	22,22	Keterbatasan anggaran	Direncanakan ditahun berikutnya	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	10 Unit	90,91	Pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan	Direncanakan sesuai kebutuhan	-	AC sebanyak 4 unit, computer PC sebanyak 4 Unit dan printer sebanyak 2 unit
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	50 Persen	50	Tidak ada	Tidak ada	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	2 unit	50	Keterbatasan anggaran	Direncanakan ditahun berikutnya	-	
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pengadaan langsung 17, dikecualikan 3, e-purchasing 1052 paket
				Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
		Bagian Kesejahteraan		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Akses ke Layanan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

		Rakyat			dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota							
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4.760 Orang	4.007 Orang	84,18	1. Guru TPA MDA dan Tahfiz yang di SK kan hanya 4.014 orang karena ada beberapa guru yang mengajar di lebih dari 1 TPA MDA. Dari guru yang di SK kan ada 9 orang yg tidak dibayarkan karena sudah tidak aktif.	Menyesuaikan anggaran pembayaran jasa guru TPA MDA sesuai dengan jumlah guru yang di SK kan.	-	-
				Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4.760 Orang	4.007 Orang	84.18			-	-
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	6 Unit	6 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan peralatan mesin yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	5 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

Tabel 3.32 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung yang Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung yang Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD	100 Persen	99,24 Persen	99,24	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	100 Persen	94,27 Persen	94,27	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	29 Unit	84	Target kinerja belum sepenuhnya tercapai karena adanya penyesuaian pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dengan	Melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih cermat, menetapkan skala prioritas kebutuhan secara proporsional, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan agar pemenuhan kebutuhan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									mempertimbangkan kemampuan fiskal serta menjaga keseimbangan pendanaan antar program dan kegiatan strategis daerah hingga akhir tahun anggaran.	peralatan dapat dioptimalkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	35 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	93 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait layanan administrasi DPRD yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	45 Laporan	45 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan Ranperda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	60	1. Kegiatan terdiri atas 3 (tiga) panitia khusus (pansus), 2 (dua) rancangan peraturan daerah (Ranperda) baru, dan 5 (lima) Ranperda lanjutan. 2. Pada perubahan anggaran, 2 (dua) anggaran untuk Ranperda baru dihapuskan.	Pada tahun 2026 di anggarkan kembali untuk pembahasan Ranperda lanjutan dan 2 Ranperda baru. DPRD melalui Bapemperda telah membuat skala prioritas pembahasan Ranperda agar semua Ranperda tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Namun, pada target dokumen di dalam aplikasi, jumlah tersebut belum dapat diubah menjadi 8 (delapan). 3. Dua kegiatan yang tidak terlaksana adalah pembahasan Ranperda lanjutan, yang disebabkan karena masih dalam tahap perbaikan untuk diajukan pada proses harmonisasi.			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Pada tahun 2025 tidak ada dilaksanakan pembahasan perda baru yang melibatkan pihak ketiga dan tenaga ahli	Pada tahun 2026, anggaran untuk Naskah Akademik ditetapkan sesuai dengan jumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) baru yang akan dibahas.	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Sementara itu, anggaran untuk pembayaran honorarium Tenaga Ahli dialokasikan pada rekening Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli dan tidak digabungkan ke dalam rekening Fasilitas Naskah Akademik, sehingga pelaksanaan kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.		
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Anggota DPRD yang difasilitasi dalam menghimpun aspirasi Masyarakat	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	6 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	13 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.33 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang yang Berkaitan Dengan Unsur Perencanaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	95 Persen	94,18 Persen	99,14	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
	Unsur Penunjang yang Berkaitan dengan Unsur Perencanaan			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	1 orang pegawai pindah tugas
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional Unit kerja SKPD	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	95 Persen	90,91 Persen	95,96	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	11 Unit	9 Unit	81,82	Target sebanyak 2 Unit tidak terealisasi yaitu sound system dan toren air, hal ini disebabkan karena tidak ada ketersediaan pada Unit sound system di suplier dan terdapat kesalahan rekening pada belanja toren air.	Untuk belanja modal akan dilakukan kajian lebih lanjut dan akan lebih memperhatikan ketepatan dalam rekening belanja.	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan jasa	Jumlah Laporan	38	38	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Laporan	Laporan					
				Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Laporan	10 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	95 Persen	95 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	48 Unit	48 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	Persentase ter evaluasinya perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan Laporan berkala pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Koordinasi dan	Persentase Keselarasan	100	100	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja)	Persen	Persen				Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 24, 28	
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	100 Persen					-	-
				Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)							

3.34 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang yang Berkaitan dengan Unsur Keuangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	97 Persen	93 Persen	95,87	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
	Unsur Pendukung yang Berkaitan dengan Unsur keuangan			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Unit kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	88 Persen	88	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3 Laporan	75	Capaian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami hambatan karena adanya eliminasi variabel input berupa komponen telepon sehingga sumber daya tidak lagi selaras dengan target	Target disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kantor yang Disediakan							
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	75 Persen	75	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	26 Unit	24,29	Dari target pemeliharaan 107 Unit peralatan dan mesin kantor, realisasi pemeliharaan yang terlaksana sebanyak 26 Unit. Pelaksanaan pemeliharaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan difokuskan pada peralatan utama seperti PC, Laptop, Printer, AC, CCTV, dan Infocus.	Target disesuaikan pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bangunan Lainnya	Direhabilitasi							
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	WTP	WTP	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 12, 13, 15, 16,17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40	-
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen anggaran dan pendapatan yang ditetapkan dengan regulasi daerah	6 Dokumen	16 Dokumen	267	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	16 Dokumen	267	Tidak Ada	Tidak Ada	-	1. perda APBD 2: (TW 3 DAN TW 4) 2. PERBUP APBD 2: (TW 3 DAN TW 4) 3. KUA PPS 4: TW 3 4. PERBUP pergeseran 3 : (TW1 2, TW4 1) 5. PERBUP SBU 2 : (TW2

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												DAN TW 4) 6. SK SBU 3: (TW 2, TW 3, TW 4)
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase proses pengelolaan belanja daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	59 Dokumen	59 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2.804 Dokumen	3.500 Dokumen	124,82	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Realisasi Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Instansi Terkait melebihi target dikarenakan banyaknya permintaan SP2D dari Perangkat daerah
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Jenis Laporan keuangan daerah yang disusun	3 Jenis	3 Jenis	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	546 Laporan	546 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	578 Laporan	578 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
				Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	-	Sub Kegiatan ini dilaksanakan <i>hanya ketika ada</i> amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, atau jika ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengharuskan disusunnya peraturan baru atau penyesuaian terhadap peraturan daerah yang telah ada sebelumnya.	Sub Kegiatan ini tetap direncanakan agar ketika Pemerintah Daerah diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melakukan penyusunan aturan baru dan atau penyesuaian terhadap aturan yang sudah ada, maka kita dapat segera menindaklanjutinya .	-	-
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	24 Laporan	24 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 10	-
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan yang dikelola	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.070 Dokumen	1.070 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	44 orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	85 Persen	85 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan barang	44 OPD	44 OPD	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					milik daerah untuk seluruh OPD							
				Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.056 Laporan	1.056 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
		Badan Pendapatan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	22 Orang/ Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD							
				Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional Unit kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100	100	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan mebel	9 Unit	9 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin	Jumlah Unit Pengadaan peralatan mesin	10 Unit	10 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	24 Laporan	24 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				daya air dan listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	35 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	13,13 Persen	12,88 Persen	98,09	1. Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak daerah ke tingkat kecamatan belum dilaksanakan secara efektif 2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil berpengaruh	1. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan 2. Memberikan insentif fiskal untuk wajib pajak sesuai ketentuan 3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi baik langsung maupun melalui media sosial dan media elektronik. 4. Menugaskan	-	Rasio realisasi PAD dibanding total Pendapatan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah 3.Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah masih rendah adanya perubahan regulasi yang mengurangi atau menghapus beberapa Jenis pajak dan retribusi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan.	pegawai untuk mengikuti diklat juru sita pajak dan pemeriksaan pajak		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah peningkatan realisasi PAD (Berdasarkan realisasi tahun dasar 2020)	13	23,06	177,38	Terjadi peningkatan PAD sebesar 37.986.243.493, 29 dari tahun sebelumnya	-	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 9	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									merupakan bentuk optimalisasi upaya peningkatan PAD oleh BAPENDA serta adanya penambahan objek pajak baru.			
				Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen perencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak dan kebijakan pajak daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 1, 2	-
				Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pajak Daerah	Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
				Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4.000 Dokumen	5.130 Dokumen	128.25	Tidak ada	Tidak ada	-	Banyaknya Dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Realisasi berdasarkan pada jumlah Wajib Pajak yang melapor dan upaya ekstensifikasi pajak
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 4, 5, 39, 40	-
				Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 3, 7	-

NO	URUSAN PEMERINTAH AN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJA KAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

Tabel 3.35 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Unsur Kepegawaian

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Unsur Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	80 Persen	80			-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6 Unit	60	Anggaran tersedia pada DPA perubahan Tahun 2025, ketika akan di lakukan pembelian pada bulan November komputer dengan spesifikasi tersebut sudah tidak tersedia di penyedia. Selanjutnya dilakukan konsultasi ke BPKP dan disarankan untuk pembelian spesifikasi alternatif pengganti yang setara setelah di cek ke penyedia ternyata tidak	Agar uraian spesifikasi barang pada SIPD RI lebih General atau secara umum	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									tersedia komputer yang spesifikasinya setara dengan yang tertulis di DPA.			
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							
				Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	67	0	0	Adanya surat BKN No 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 bahwa BKN sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran IP. ASN	Melakukan perubahan Indikator pada Program Kepegawaian Daerah	-	-
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kegiatan pengadaan pemberhentian dan Informasi kepegawaian yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	95 Persen	103 Persen	108	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 25	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	350 Dokumen	377 Dokumen	108	Dokumen SK pensiun yang dikeluarkan per 31 Desember 2025 untuk Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 346 dokumen, untuk	Sub kegiatan ini mengelola SK pensiun, Pensiun atas permintaan sendiri dan Pensiun Janda/Duda akibat meninggal yang tidak dapat diprediksi	-	Karena adanya pensiun permintaan sendiri 11 orang dan meninggal dunia 20 orang

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 11 dokumen dan untuk Pensiun Janda /Duda yang akibat dari meninggal sebanyak 20 dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	95 Persen	146 Persen	153	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	75 Dokumen	192 Dokumen	256	SK mutasi terhadap retribusi guru swasta sebanyak 118, SK untuk penempatan setelah Tugas Belajar (Tubel) sebanyak 2 orang, pindah masuk 16 orang, mutasi PPPK sebanyak 21 orang, serta SK mutasi antar OPD atau Unit	Melakukan penyesuaian target.	-	Karena banyaknya usulan permohonan mutasi

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Kerja sebanyak 35 orang.			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	919 Dokumen	91,9	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN ditargetkan sebanyak 1000 dokumen, Dokumen yang diusulkan dan difasilitasi sebanyak 919 dokumen, secara capaian target sudah terfasilitasi seluruh dokumen yang masuk.	Melakukan penyesuaian target pada masa yang akan datang.	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	100 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	S1 30 Orang dan S2 70 Orang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	LATSAR sebanyak 5 Orang dan PIM II sebanyak 4 Orang

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	50 Orang	50 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pengangkatan pertama 18, pengangkatan perpindahan 6, Pemberhentian 9, pengangkatan kembali 6, alih kategori 5 dan Kenaikan jabatan 6
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kinerja dan Penyelesaian Kasus - Kasus	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 14, 27, 37, 38	-
				Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	2 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	15 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Terdiri dari 6 kasus- kasus dan 9 perceraian

Tabel 3.36 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Unsur Penelitian dan Pengembangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Unsur Penelitian dan pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	2 Laporan	2 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	2 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang di terbitkan	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Nomor 18, 36	-
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Bidang Teknologi dan Inovasi							
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase jalan lingkungan permukiman kondisi baik	58%	58.09%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan berupa pembangunan jalan lingkungan, anggarannya dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/ kota (PMK)
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan berupa pembangunan jalan lingkungan, anggarannya dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggara

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												an Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota (PMK)
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan berupa pembangunan jalan lingkungan, anggarannya dipindahkan ke sub kegiatan Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota (PMK)

Tabel 3.37 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Unsur Pengawasan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
	yang Berkaitan dengan Unsur Pengawasan Pemerintahan			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai NSPK	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	56 Orang	88,88	Salah menetapkan target, 1 Orang pensiun	Akan dievaluasi pada tahun berikutnya	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan/Triwulan/semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	78 Orang	156	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Mendukung ketercapaian pemenuhan 120 jam/APIP maka dilakukan pengembangan kompetensi APIP dengan kegiatan yang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												dilaksanakan berupa penjenjangan Auditor Madya sebanyak 2 Orang, substansi sebanyak 4 Orang, ujian Kompetensi sebanyak 2 Orang dan Moo BPKP sebanyak 25 Orang dengan 2 kelas, program pelatihan melalui pelatihan daring sebanyak 20 Orang dengan 1 kelas yang lebih fleksibel dan memungkinkan partisipasi peserta lebih banyak dari target.
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai NSPK	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional rutin Kantor	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjutan Temuan (Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti/Total Temuan)	86 Persen	86 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase cakupan pengawasan internal yang dilaksanakan	89 Persen	89 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	176 Laporan	292 Laporan	166	Tidak ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja berdasarkan PKPT yang dilaksanakan sebanyak 176 laporan dengan realisasi sebanyak 292 laporan yang terdiri dari

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												penggabungan kegiatan revidi laporan kinerja dan kegiatan mandatori yang tidak terencanakan dalam PKPT
				Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	72 Laporan	60 Laporan	83	Pelaksanaan kegiatan pengawasan Keuangan berdasarkan PKPT yang dilaksanakan sebanyak 72 laporan hanya dapat direalisasikan sebanyak 60 laporan. 12 laporan lainnya digabungkan pada kegiatan yang dilaksanakan diluar PKPT.	Menetapkan skala prioritas serta penjadwalan kegiatan yang lebih efektif dan efisien	-	-
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	13 Laporan	87	Dari 15 Laporan yang direncanakan dalam PKPT, realisasi kegiatan hanya	Menetapkan skala prioritas dan penyesuaian jadwal yang lebih fleksibel dan pembagian tugas lebih jelas dan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									dapat dilaksanakan sebanyak 13 Laporan kegiatan. hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran maka kegiatan tersebut digabungkan pada kegiatan pengawasan keuangan.	tepat		
				Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	18 Laporan	50	Dari 36 laporan yang direncanakan dalam PKPT, kegiatan hanya terealisasi sebanyak 18 laporan kegiatan, hal ini dikarenakan adanya kegiatan mandatori yang diluar PKPT dan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah nagari maka kegiatan monev dana desa tidak terlaksana	Penyesuaian jadwal yang lebih fleksibel dan pembagian tugas lebih jelas dan tepat	-	-
				Sub Kegiatan Kerja Sama	Jumlah Laporan	2	2	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Internal	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Laporan	Laporan					
				Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 Dokumen	36 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan	30 Laporan	125	Tidak ada	Tidak Ada	-	Dari 24 laporan yang direncanakan dalam PKPT terealisasi sebanyak 30 laporan kegiatan dilaksanakan, melebihi target dari PKPT dikarenakan banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pemerintah nagari dan permintaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Reviu BTT Bencana alam akhir tahun yang tidak direncanakan di PKPT
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	Tingkat Kepatuhan Opd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Regulasi Pengawasan Yang Telah Ditetapkan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan yang Disusun Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi OPD yang terlaksana berdasarkan PKPT	89 Persen	89 Persen	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 OPD	43 OPD	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan	43 OPD	43 OPD	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Reformasi Birokrasi	Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
				Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 OPD	43 OPD	100	Tidak ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.38 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Unsur Pemerintahan Umum

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Fungsi Penunjang Urusan	Kesatuan Bangsa dan Politik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
	Pemerintahan yang Berkaitan dengan Unsur Pemerintahan Umum			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional Unit kerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	--
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	4 Unit	4 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	--	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	30 Persen	30 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah koordinasi dan sosialisasi terkait pendidikan wawasan kebangsaan	1 Kali	1 Kali	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90 Orang	90 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	70 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 Persen	100 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	1. Jumlah parpol yang diberi bantuan, verifikasi dan bantuan evaluasi, 2. Jumlah Kebijakan teknis yang	10 Parpol	10 Parpol	100 100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	dirumuskan 3. Persentase peran parpol dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik di masyarakat	12 Dokumen 100 Persen	12 Dokumen 100 Persen	100				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	30 Persen	30 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan teknis pemberdayaan dan pengawasan ormas yang dirumuskan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evakuasi dan Mediasi sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	5 Pembinaan	5 Pembinaan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang disusun	5 Kebijakan	5 Kebijakan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	325 Orang	325 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan /tangkal dini konflik	75 Persen	75 Persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis penanganan konflik sosial/laporan yang disusun wawasan kebangsaan, jumlah rapat koordinasi pantau ATHG,	12 Kali	12 Kali	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pengawasan, orang asing & tenaga kerja asing & rapat koordinasi penanganan konflik sosial							
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	739 Orang	739 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

Tabel 3.39 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan unsur kewilayahan	Kecamatan Ampek Angkek		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	97%	97%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan Perangkat Daerah	100	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang /bulan	16 Orang /bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Selama tahun 2025, 3 unit peralatan dan mesin membutuhkan pemeliharaaa

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												n
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	90%	89,81%	99,78	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang di koordinasikan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.							
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
2		Kecamatan Ampek Nagari		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	99%	99%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan yang di lakukan adalah pembayaran air dan listrik, sementara itu pembayaran internet tidak dilakukan tetapi di bayarkan oleh KOMINFO agam, tetapi secara kinerja, internet di Kecamatan Ampek Nagari telah hidup
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6 Unit	3 Unit	50	Tidak semua kendaraan yang	Akan di bayarkan pada tahun 2026	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				terbayarkan pajaknya			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dikecamatan	89%	91,51%	102	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Capaian indikator Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan yang melampaui target (realisasi 87,55% dari target 84,92%) didukung oleh komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan sesuai standar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												operasional prosedur, peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai, ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang memadai, serta koordinasi yang baik antar unit kerja dan dengan nagari, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggara An Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase kegiatan pembinaan dan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Desa	pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi							
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
3		Kecamatan Banuhampu		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	9 orang /bulan	11 orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya sebanyak 11 orang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran honorarium pengelola

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD							keuangan
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 Perse n	100 Perse n	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan instalansi listrik,
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan alat kebersihan, ATK dan Benda POS
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan bahan cetak foto kopi, Spanduk dan Cetak StopMap
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan biaya bbm, makan minum rapat, makan minum tamu, sppd dalam kota dan sppd dalam negeri

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Tidak Ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	42 Unit	100 persen	Tidak Ada	Tidak ada	-	Pengadaan Kursi Rapat 40 buah dan pengadaan Laptop 2 unit
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemenuhan tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran gaji THL, PTT, Penjaga Kantor dan Asuransi
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan pembayaran pajak motor dan mobil camat
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pemeliharaan n PC, Printer, Laptop dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Infocus
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	89 persen	75,02 Persen	84	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan PKK, Tim Ramadhan, MTQ, Bundo kandung, MUI/LKAAM
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Trantibum yang Dikoordinasikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan trantibdan PHBN
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang	2 Urusan	2 Urusan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dilaksanakan							
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran SPPD dan makan minum rapat jamuan tamu
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100 persen	100 persen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasiltasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembinaan keuangan dan aset nagari untuk nagari-nagari se kecamatan Banuhampu (7 nagari)
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkroniasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan
4		Kecamatan Baso		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi	Persentase pemenuhan	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Keuangan Perangkat Daerah	kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	13 orang/bulan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Penambahan 1 orang CPNS di bulan Juni 2025 dan Kasi Pemberdayaan bulan November
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Alat listrik dan elektronik
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Alat kebersihan, ATK dan Benda Pos
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan	Jumlah laporan	12	12	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	laporan					
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Sewa rumah dinas Camat 2025
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 laporan	6 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	4 orang PPPK Paruh Waktu 1 orang Tenaga Alih daya (outsourching)
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	75%	75	Masih ada barang milik daerah yang tidak ber kondisi baik	Perlu pemeliharaan barang milik daerah	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pemeliharaa n serta pembayaran pajak 1 kendaraan dinas roda 4

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												dan 2 kendaraan dinas roda 2
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pemeliharaan komputer/laptop
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	93%	89,7%	96	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	5 kegiatan	4 kegiatan	80	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	4 kegiatan	80	Tidak terlaksananya kegiatan jambore pkk	Tergantung pada instruksi kegiatan PKK dari TP PKK Kabupaten	-	Untuk 8 nagari dengan 6 kegiatan (PKK, Jambore PKK, Nagari Madani (Tim Ramadhan) , Paskibra, Bundo Kandung)
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Jumlah laporan Pelaksanaan	3 laporan	3 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pelaksanaan kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							Trantib, MUI dan LKAAM
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Kegiatan Forkopimca
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	9 kegiatan	9 kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	8 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Kegiatan Musrenbang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dengan Pembangunan Desa							
5		Kecamatan Canduang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	11 orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya sebanyak 11 orang pada triwulan IV Karena 1 orang pensiun dan 1 orang pindah ke OPD lain
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional unit Kerja Kecamatan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi	1 paket	1 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan Instalasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Listrik/Penerangan bangunan kantor	listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							Listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan Alat Kebersihan, ATK, Materai, Bendera Panjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan Cetak Spanduk dan Foto Copy
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan biaya BBM, makan minum tamu dan rapat , sppd dalam kota dan sppd dalam negeri
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemenuhan tagihan listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak 1 orang dan Outsourcing

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2 orang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	90%	90	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan dan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Peyediaan pajak dan pemeliharaan n 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan pajak 5 unit kendaraan dinas roda 2, dan asuransi kendaraan dinas
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	87%	88,52%	102	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	5 kegiatan	5 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	5 laporan	5 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan ini mengakomodir kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							pembinaan nagari madani dan memfasilitasi kegiatan PKK serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perangkat daerah lain.
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	3 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Trantib, Bundo Kandung, LKAAM, dan MUI
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang	12 urusan	12 urusan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan mendukung lancarnya pelaksanaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dilaksanakan							tugas dan kegiatan Forkopimca Kec. Canduang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Semua nagari di Kecamatan Canduang sudah patuh terkait Penyusunan LKPJ dan LPPN tepat waktu
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	6 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa untuk 3 Nagari Di Kecamatan Canduang 1) Canduang Koto Laweh 2) Lasi 3) Bukik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Batabuah Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan
6		Kecamatan Kamang Magek		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	94%	94	Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 94%. Capaian tersebut belum mencapai target optimal disebabkan adanya kebijakan pengurangan dan penyesuaian anggaran sebagai bagian dari efisiensi belanja daerah, sehingga tidak seluruh kebutuhan	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui prioritisasi kebutuhan operasional, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									operasional yang telah direncanakan dapat direalisasikan sepenuhnya. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran tersebut tetap dikelola secara efektif dengan memprioritaskan kebutuhan operasional yang bersifat strategis dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	100	Pada kondisi riil, terdapat 2 ASN di Kecamatan Kamang Magek yang pemenuhan gajinya belum dapat dipenuhi karena yang	Penyusun perhitungan gaji tidak hanya berdasarkan kondisi riil awal tahun, tetapi juga memperhitungkan potensi promosi dan mutasi pegawai,	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									bersangkutan memperoleh promosi jabatan pada pelantikan tanggal 1 November 2025, sementara alokasi gaji masih ditampung pada OPD sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada ketidaksesuaian antara perhitungan anggaran dengan kebutuhan aktual.	terutama pada OPD yang memiliki jabatan struktural kosong, agar penganggaran lebih antisipatif dan tidak menimbulkan kekurangan pemenuhan hak pegawai.		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	73%	92	Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD pada	Melakukan penyesuaian anggaran pada perubahan selanjutnya	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tercapai sebesar 73%. Rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja daerah, sehingga pemenuhan sebagian kebutuhan dasar operasional unit kerja belum dapat direalisasikan secara optimal.			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD Kecamatan Kamang Magek yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 73%, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui prioritas kebutuhan operasional, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta penyesuaian kembali target kinerja pada Perubahan RPKD	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									anggaran sehingga tidak seluruh kebutuhan operasional yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Beberapa pengadaan dan pemeliharaan sarana pendukung operasional ditunda atau dikurangi untuk memprioritaskan belanja yang lebih mendesak dan berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.	agar selaras dengan kondisi riil anggaran dan kebijakan efisiensi yang ditetapkan.		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	40	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan tidak mencapai target karena adanya	Melakukan evaluasi dan penyesuaian kembali penetapan target berdasarkan kebutuhan riil pada perencanaan berikutnya, serta meningkatkan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									kesalahan dalam penetapan target pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Target ditetapkan sebanyak 5 paket, sementara kebutuhan riil yang seharusnya hanya 2 paket, yaitu paket cetak dan paket penggandaan	ketelitian dalam penyusunan target kinerja pada Perubahan RKPD agar selaras dengan jenis dan volume kegiatan yang sebenarnya.		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	99%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	98%	98	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4 Laporan	40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak mencapai target karena adanya kesalahan dalam penetapan target kinerja. Target ditetapkan sebanyak 10 laporan, sementara realisasi kegiatan hanya menghasilkan 4 laporan sesuai dengan kebutuhan riil	Evaluasi terhadap penetapan indikator dan target kinerja agar lebih realistis dan berbasis kebutuhan, serta menyesuaikannya kembali pada perencanaan dan Perubahan RKPD	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	5 Laporan	83	Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyesuaian perencanaan dan penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar penyusunan laporan pada periode berikutnya dapat dilaksanakan secara	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Kantor ditargetkan sebanyak 6 laporan, namun realisasinya tercapai 5 laporan. Hal ini disebabkan oleh pengunduran diri 1 (satu) orang Tenaga Harian Lepas (THL)	optimal sesuai target yang ditetapkan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dikecamatan	89%	87,36%	98	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Capaian indikator melampaui target didukung oleh komitmen

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur, peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai, ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang memadai, serta koordinasi yang baik antar unit kerja dan dengan nagari, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	3 Kegiatan	3 Kgiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
7		Kecamatan Lubuk Basung		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	11 Orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												sebanyak 13 orang, pensiun 2 orang di bulan april dan Juli 2025
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah penyusunan Laporan Keuangan sebanyak 10 Laporan
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan alat/bahan kebersihan, alat tulis kantor dan benda pos
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	2 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan cetak map,disposisi, amplop dinas,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												spanduk dan Penggandaan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan bahan bacaan Koran rakyat sumbar
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan biaya BBM, makan minum tamu dan rapat (termasuk stunting), perijin dalam kota dan Perjalanan Dinas Biasa.
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pengadaan PC sebanyak 1 unit, Printer 1 Unit
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Sewa rumah dinas)	1 unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pengadaan Sewa Rumah Dinas Camat
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	3 laporan	3 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemenuhan tagihan listrik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					daya air, dan listrik yang disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah Tenaga Operator dan Administrasi dari Pegawai Kontrak 2 Orang. Petugas Jasa Tenaga Operator 6 Orang (THL), dan petugas K3 1 Orang TAD. Sopir 1 Orang TAD
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	5 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan pajak dan pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit pajak kendaraan dinas roda 2
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	17 Unit	55,5	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemeliharaan 3 unit laptop, 5 unit PC, 5 unit printer dan 4 unit AC

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemeliharaan Gedung kantor/Bangunan lainnya
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	86%	82,27%	95,66	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan PKK, dan Nagari Madani
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4 laporan	4 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan trantib, Bundo kanduang dan MUI/LKAM
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah urusan	2	2	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan					
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan forkopimca bersama Danramil dan Polsek
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	75 Kegiatan	75 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5 Dokumen	5 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembinaan keuangan dan aset nagari untuk nagari-nagari se-kecamatan Lubuk Basung (5 nagari)
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan
8		Kecamatan Malalak		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	97%	97%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kabupaten/Kota	kantor dan ASN							
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang /bulan	11 orang /bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya Sebanyak 11 orang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan instalansi listrik,
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan alat kebersihan, ATK, Benda Pos dan Perkakas Perkebunan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan bahan cetak foto kopi, materai, Spanduk dan Baliho
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan biaya BBM, makan minum rapat, makan inum tamu, SPPD dalam kota dan sppd dalam Negeri
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran gaji 3 THL dan 3 PTT
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	92,5%	92,5	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	5 Unit	71	Tidak Ada	Tidak Ada	-	1 Unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	12 unit aset yang diperbaiki
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	89%	85,19%	95,71	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan PKK, MUI, Bundo Kandung dan MTQ Kabupaten
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Trantibum yang Dikoordinasikan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan trantib, Bundo kandung dan MUI/LKAAM
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan Rakor

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				sesuai Penugasan Kepala Daerah	sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan							bersama Forkopimca
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	4 Nagari	4 Nagari	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasiltasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembinaan keuangan dan aset nagari untuk nagari-nagari se kecamatan Malalak (4 nagari)
9		Kecamatan Matur		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang /bulan	16 orang /bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												gajinya sebanyak 16 orang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran honorarium pengelola keuangan
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan instalansi listrik,
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan alat kebersihan, ATK dan Benda POS
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan bahan cetak foto kopi, Spanduk dan Cetak StopMap
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan biaya bbm, makan minum

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												rapat, makan minum tamu, SPPD dalam kota dan sspd dalam negeri
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemenuhan tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran gaji THL, PTT, Penjaga Kantor dan Asuransi
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	80%	80	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4 Unit	66,67	1 Kendaraan Sudah Dikembalikan ke BKAD untuk di musnahkan dan 1 Kendaraan beda nomor Mesin dengan STNK	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	-	Penyediaan pembayaran pajak motor dan mobil camat
				Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemeliharaa

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara							n PC, Printer, Laptop
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	89%	90,03%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	7 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan PKK, Tim Ramadhan, UMKM, Bundo kanduang, MUI/LKAAM
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Trantibum yang Dikoordinasikan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan trantibdan PHBN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 Urusan	1 Urusan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran SPPD dan makan minum rapat jamuan tamu
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembinaan keuangan dan aset nagari untuk nagari-nagari se-kecamatan Matur (6 nagari)
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasiltasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	18 Dokumen	18 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembinaan keuangan dan aset nagari untuk nagari-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pendayagunaan Aset Desa							nagari se-kecamatan Matur (6 nagari)
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkroniasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan
10		Kecamatan Palembang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	95%	95%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	95%	95%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	12 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	95%	95%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 paket	1 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	2 paket	2 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	5 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	95%	95%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 unit	5 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Dipelihara							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	86%	91,36%	106	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang di Koordinasikan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	3 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitas	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Trantibun yang di Koordinasikan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 laporan	6 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang di Fasilitas	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	12 urusan	12 urusan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang di Fasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang di Fasilitasi	6 kegiatan	6 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	12 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
11		Kecamatan Palupuh		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	99%	93,93%	94,87	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan	99%	99%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pengelolaan keuangan perangkat daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya sampai bulan mei adalah 11 orang dan dari bulan Juni sampai desember sebanyak 10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak ada	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	99%	95%	96	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	80	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	99%	99%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Pada akhir TA 2025, terjadi bencana, Mati lampu hampir 2 mingguan, jadi Biaya listrik sedikit berkurang dari biasanya
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 laporan	7 laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Adanya salah satu PTT yang menjadi ASN P3K
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dimiliki daerah yang ber kondisi baik	99%	82,7	83,5	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100	Tidak ada	Tidak ada	-	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya (1 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2)
				Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	26	17	65,4	Kemampuan	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit		Keuangan daerah yang rendah			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89%	88%	98,89	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	36 kegiatan	36 kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum	12 kegiatan	12 kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				sesuai Penugasan Kepala Daerah	sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan							
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	97 Kegiatan	97 Kegiatan	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 dokumen	10 dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak ada	Tidak ada	-	-
12	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang	Kecamatan Sungai Pua		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	97%	97%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Berkaitan dengan Unsur Kewilayahan											
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	5 Unit	31	Kemampuan Keuangan Daerah Rendah	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi							
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dikecamatan	84,92%	85,24%	94	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	2 Kegiatan	2 Kgiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah urusan	1	1	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan					
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
13		Kecamatan Tanjung Mutiara		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	13 Orang/Bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya sebanyak 14 orang sampai bulan Oktober 1 orang Meninggal
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan sebanyak 5 orang selama 10 Bln
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	93%	93%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan cetak spanduk dan fotocopy

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan biaya BBM, makan minum tamu dan rapat (termasuk stunting), SPPD biasa dan dalam kota.
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%	94%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Sewa Rumah Dinas Camat
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94%	94%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemenuhan tagihan listrik, air dan internet
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan	12	12	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan					Gaji P3K PW sebanyak 6 orang operator 1 orang, keamanan 1 orang, keberihan 1 orang,
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	94%	94%	58	Kemampuan keuangan daerah rendah	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	3 Unit	60	Penyediaan pajak dan pemeliharaan 1 unit untuk kendaraan dinas roda 4 dan pajak 4 unit kendaraan dinas roda 2 Terealisasi sebanyak 3 unit	Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8 Unit	57,14	kemampuan keuangan daerah rendah	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	89%	91,89%	103	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	1 Laporan	50	kemampuan keuangan daerah rendah	Tidak Ada	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Trantibum yang Dikoordinasikan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan trantib, Bundo kandung dan MUI/LKAM
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan forkopimca bersama Danramil dan Polsek
				Program Pembinaan Dan	Persentase kegiatan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari yang difasilitasi							
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembinaan keuangan dan aset nagari untuk nagari-nagari se Kecamatan Tanjung Mutiara (4 Nagari)
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan
14		Kecamatan Tanjung Raya		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor dan ASN	99%	101%	102	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelola keuangan perangkat daerah	99%	108%	109	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan	13 orang	15 orang	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Laporan	12	12	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Laporan					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit Kerja	99%	100%	101	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	3 paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	99%	100%	101	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang desedikan	12 Laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	99%	95%	96	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	6 unit	86	Kendaraan roda 2 yang rusak berat tidak dibayarkan pajaknya	Dalam proses penghapusan aset	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor/ bangunan yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	2 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	87%	87,89%	101	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program koordinasi	Persentase koordinasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ketentranman dan ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umumang dikoordinasikan							
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	3 Kegiatan	3 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	jumlah kegiatan pembinaan dan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi							
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan rekon keuangan dan aset nagari
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan
15		Kecamatan Tilatang Kamang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	97%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya sebanyak 14 orang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	12 laporan	12 laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					steran SKPD							
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemenuhan tagihan listrik, telpon dan internet
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang, Petugas Kebersihan sebanyak 1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												orang, Penjaga Kantor sebanyak 1 orang dan Sopir sebanyak 1 orang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	7 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran pemeliharaan untuk 1 unit kendaraan roda 4 beserta pajaknya dan pajak kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89%	89,57%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah kegiatan pemerintahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dikecamatan yang dikoordinasikan		n					
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan ini dilakukan Bundo Kandang, MUI, LKAM, PKK dan Tim Ramadhan
				Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tantibum yang dikoordinasikan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12	12	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Anggarannya tertampung pada Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					umum yang difasilitasi.							
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	18 Urusan	18 Urusan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan ini dilaksanakan bersama Camat Komandan Rayon Militer (Danramil), Polisi Sektor (Polsek)
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Semua nagari di Kecamatan Tilatang Kamang sudah patuh terkait Penyusunan LKPJ dan LPPN tepat waktu
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	3 Nagari Di Kecamatan Tilatang Kamang 1) Koto Tengah 2) Kapau 3) Gaduik
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pendayagunaan aset desa							
				Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
16		Kecamatan IV Koto		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	99%	99%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	9 orang /bulan	9 orang/ bulan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya sebanyak 9 orang/buan
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada		Pembayaran honorarium pengelola keuangan
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan	4 Paket	4 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan instalansi listrik,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan alat kebersihan, ATK dan Benda POS
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan bahan cetak foto kopi, Spanduk dan Cetak StopMap
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan biaya bbm, makan minum rapat, makan minum tamu, sppd dalam kota dan SPPD dalam negeri
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	100%	94,33%	94,33	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan PC, Speaker Potable
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemenuhan tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBI JAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembayaran gaji THL, PTT, Penjaga Kantor dan Asuransi
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Penyediaan pembayaran pajak motor dan mobil camat
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pemeliharaan n PC, Printer, Laptop
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	89%	86,19%	96,84	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Kegiatan PKK, Tim Ramadhan, UMKM, Bundo kanduang, MUI/LKAAM
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Secara kinerja, capaian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					difasilitasi							kinerja program tercapai dengan menggunakan pendanaan dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Trantibum yang Dikoordinasikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Secara kinerja, capaian kinerja Kegiatan tercapai dengan menggunakan pendanaan dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	4 Laporan	4 Laporan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan trantibdan PHBN,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan Tokoh Masyarakat							Secara kinerja, capaian kinerja Sub kegiatan tercapai dengan menggunakan pendanaan dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Secara kinerja, capaian kinerja program tercapai dengan menggunakan pendanaan dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum	1 Urusan	1 Urusan	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Secara kinerja,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				sesuai Penugasan Kepala Daerah	sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan							capaian kinerja Kegiatan tercapai dengan menggunakan pendanaan dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Secara kinerja, capaian kinerja Sub kegiatan tercapai dengan menggunakan pendanaan dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pembayaran SPPD dan makan minum rapat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												jamuan tamu
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	7 Nagari	7 Nagari	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasiltasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pembinaan keuangan dan aset nagari untuk nagari-nagari se-kecamatan IV Koto
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkroniasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sangat terkait erat dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kebijakan strategis yang ditetapkan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, dan diharapkan memiliki dampak pemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan strategis ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kebijakan strategis daerah yang ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Kebijakan strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40 Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Acuan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Pedoman dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
3	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Penyesuaian dalam pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyesuaian pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5	Rencana Tata Ruang Kecamatan Banuhampu	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Kecamatan Banuhampu	Acuan dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kecamatan Banuhampu
6	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025	Acuan dalam pelaksanaan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025
7	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyesuaian dalam pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
8	Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2025	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2025	Acuan dalam pelaksanaan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2025
9	Pemberian Insentif Fiskal	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal	Pedoman dalam Pemberian Insentif Fiskal
10	Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang	Pedoman dalam Penyelenggaraan Kios Pelayanan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Kependudukan Secara Daring Kepada Nagari	Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Kepada Nagari	Administrasi Kependudukan Secara Daring Kepada Nagari
11	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
12	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar BiayaPendapatan dan Belanja Nagari	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar BiayaPendapatan dan Belanja Nagari	Penyesuaian pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar BiayaPendapatan dan Belanja Nagari
13	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyesuaian pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
14	Rencana Kontijensi Tanah Longsor dan Tsunami Tahun 2025-2026	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kontijensi Tanah Longsor dan Tsunami Tahun 2025-2026	Adanya Dokumen pelaksanaan Rencana Kontijensi Tanah Longsor dan Tsunami Tahun 2025-2026
15	Pemanfaatan Penerimaan Retribusi badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung	Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung	Pedoman dalam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung
16	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan IV Koto Tahun 2025-2045	Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan IV Koto Tahun 2025-2045	Acuan dalam pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan IV Koto Tahun 2025-2045
17	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan	Penyesuaian pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan
18	Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan	Penetapan pelaksanaan Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
19	Sistem Kerja Dilingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Dilingkungan Pemerintah Daerah	Pedoman dalam pelaksanaan Sistem Kerja Dilingkungan Pemerintah Daerah
20	Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan	Acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan
21	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
22	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Penyesuaian dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
23	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
24	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Kepada Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Kepada Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025	Penyesuaian pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Kepada Setiap Nagari Tahun Anggaran 2025
25	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penyesuaian pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
26	Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pedoman teknis dalam Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27	Strategi Sanitasi Kabupaten Agam Tahun 2025-2027	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Agam Tahun 2025-	Pedoman teknis pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten Agam Tahun 2025-2027

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2027	
28	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
29	Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih	Pedoman teknis pelaksanaan Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih
30	Standar Harga Satuan	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga	Pedoman Penggunaan Standar Satuan Harga

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Agam Atas LKPJ Bupati Agam Tahun 2024

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan oleh Bupati Agam kepada DPRD Kabupaten Agam pada tanggal 17 Maret 2025. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Agam melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2024 telah melakukan pembahasan dan kajian lebih lanjut. Hasil pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Agam telah menerbitkan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Agam Tahun 2024, untuk ditindaklanjuti pada Tahun 2025.

Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Agam Tahun anggaran 2024 disampaikan pada rapat Paripurna DPRD pada tanggal 06 Mei 2025 yang dituangkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam Tahun Anggaran 2024. Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Agam Tahun 2024 secara rinci dijelaskan pada matrik di bawah :

Tabel 3.41 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Agam Tahun 2024

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Agar Pemerintah Daerah lebih serius dalam mengelola PAD, dengan cara lebih berani dan tegas menindak objek pajak yang tidak taat membayar pajak daerah seperti pada jenis pajak restoran/rumah makan, pajak sarang burung walet, pajak reklame dan jenis pajak lainnya.	BAPENDA	Belum optimalnya pengelolaan PAD serta pendataan objek pajak	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, Kami sangat sependapat dengan saran Saudara, Pemerintah Daerah lebih serius dan berani menindak objek pajak yang tidak taat bayar pajak, namun sebelum melakukan penindakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, seperti sosialisasi, edukasi atau penyuluhan, melakukan penagihan, melakukan pemeriksaan pajak sampai melakukan penyitaan aset. Adapun tahapan yang dilakukan selama Tahun 2024 selain melakukan sosialisasi, edukasi dan penagihan, sebagai media untuk memantau kebenaran transaksi pada objek pajak, dilakukan Pemasangan <i>Online walet Monitoring (OTM)</i> pada 20 objek pajak yang potensial, terutama pada restoran, rumah makan, dan hotel. Sistem ini memungkinkan pemantauan transaksi secara online dan real-time. Pada Tahun 2025, direncanakan penambahan 20 unit <i>tapping box</i> untuk memperluas cakupan pengawasan. Tujuan dari pemasangan ini adalah untuk memperkuat kontrol terhadap data transaksi wajib pajak, sekaligus menjadi alat pembanding terhadap pelaporan pajak yang dilakukan dengan sistem <i>self-assessment</i>. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga sudah mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan juru sita sebanyak 3 (tiga) orang dan pemeriksa pajak sebanyak 5 (lima) orang. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam melakukan pengujian kepatuhan perpajakan serta penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang lebih serius, berani, dan tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta menindak wajib pajak yang tidak patuh.
2	Pemerintah Daerah segera menyiapkan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang valid dan akurat, termasuk menyelesaikan <i>up-date data based</i>	BAPENDA	Perlunya Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah telah memiliki data makro potensi pajak daerah dan retribusi daerah, berdasarkan hasil kajian potensi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas untuk Tahun 2022 s/d 2027. Untuk data kajian potensi yang terbaru sedang dilakukan inventarisasi ke lapangan untuk mengetahui kapasitas dan potensi

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	PBB-P2. dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap alamat wajib pajak dan Objek Pajak.			riil yang dimiliki oleh wajib pajak. Untuk pemutakhiran <i>data base</i> PBB P2 terus kami lakukan setiap tahunnya sampai selesai seluruh kecamatan di Kabupaten Agam.
3	Agar Pemerintah Daerah membentuk Tim khusus/terpadu dengan melibatkan pejabat vertikal diantaranya kejaksan untuk menindak bagi objek pajak yang tidak taat membayar pajak.	BAPENDA	Perlunya optimalisasi pajak dengan Tim Terpadu yang melibatkan instansi vertikal	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sependapat bahwa sudah kami lakukan sejak Tahun 2023 dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Agam dan Polres Agam dalam melakukan optimalisasi pajak daerah, mulai dari sosialisasi dan penyuluhan bersama sampai dengan pendampingan hukum dalam menghadapi wajib pajak dalam penagihan piutang pajak.
4	Untuk meningkatkan kemampuan petugas baik di OPD dan Kecamatan pemungut pajak perlu dilakukan <i>training</i> dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.	BAPENDA	Belum optimalnya pelaksanaan training untuk petugas dan pelatihan pemungut pajak	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sependapat bahwa <i>Training</i> dan pelatihan kepada petugas pajak/pemungut pajak baik itu di OPD, Sekolah, Petugas Nagari, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik itu penggunaan aplikasi atau perubahan regulasi.
5	Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan PAD, segera menerapkan sistem teknologi informasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menerapkan teknologi digitalisasi dalam pelaporan retribusi.	BAPENDA	Belum optimalnya pengelolaan PAD menggunakan sistem teknologi informasi dan digitalisasi	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sepakat bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah Kabupaten Agam telah menerapkan berbagai sistem berbasis teknologi informasi dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mendorong digitalisasi dalam pelaporan retribusi. Beberapa sistem yang telah digunakan antara lain <i>Smartgov</i> , <i>Taxation Map</i> dan <i>Tax Survey</i> , <i>LapakAgam</i> , <i>InfoPBB</i> , <i>MonevPAD</i> , <i>e-Retribusi</i> . Langkah-langkah digitalisasi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PAD melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
6	Pemerintah Daerah segera	BAPENDA	Belum	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	membentuk UPT pemungutan Pajak disetiap Kecamatan.	dan Bagian Organisasi	terbentuknya UPT pemugutan pajak di kecamatan	sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, untuk menindaklanjuti pembentukan UPT pemungutan Pajak disetiap Kecamatan, saat ini Pemerintah Kabupaten Agam sedang melakukan kerja sama dengan Universitas Andalas dalam melaksanakan kajian akademis dan analisis rasio belanja pegawai. Setelah dokumen kajian akademis dan analisis rasio belanja pegawai selesai, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu konsultasi tertulis kepada Gubernur.
7	Pemerintah Daerah lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.	BAPENDA	Perlunya meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sependapat dengan saran Saudara, berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui digitalisasi sistem perpajakan, yang mencakup seluruh proses mulai dari pendataan, pemutakhiran data, hingga pembayaran pajak dan retribusi secara online. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data <i>real-time</i> , Pemerintah Daerah dapat memantau aktivitas transaksi objek pajak secara langsung, menganalisis kesesuaian antara data pelaporan dan realisasi pembayaran, mengidentifikasi potensi kebocoran atau ketidakpatuhan secara lebih cepat dan akurat, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerapan berbagai aplikasi seperti <i>Smartgov</i> , <i>Taxation Map</i> , <i>Monev PAD</i> , dan <i>e-Retribusi</i> , memungkinkan pelaporan dan pemantauan yang transparan serta memberikan dasar data yang kuat untuk evaluasi prosedur pemungutan. Sistem-sistem ini juga memungkinkan koordinasi Pemerintah Daerah dan pihak perbankan daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
				Kedepannya sistem pengawasan dan evaluasi ini akan lebih ditingkatkan dengan harapan optimalnya penerimaan PAD serta menghindari terjadinya kebocoran.
8	Perlu menyiapkan dan menambah tenaga PPNS pada OPD penegak peraturan dalam memaksimalkan pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah.	BAPENDA, BKPSDM, dan Satuan Polisi Pamong Praja	Belum maksimalnya ketersediaan tenaga PPNS pada OPD penegak peraturan	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sependapat bahwa terkait kebutuhan tenaga PPNS pada OPD penegak peraturan dalam memaksimalkan pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah akan dikaji oleh Pemerintah Daerah. Dapat diinformasikan dalam peningkatan PAD saat ini telah memiliki jabatan juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak. Dalam rangka memaksimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat membutuhkan penambahan PPNS penegak Perda dalam pengawasan dan penindakan terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang melanggar. Saat ini, SATPOL PP DAN DAMKAR memiliki 2 orang penyidik. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah kasus yang ditangani di Kabupaten Agam optimalnya memiliki 7 orang pada SATPOL PP DAMKAR. Pada Tahun 2024, telah diusulkan untuk diklat CPNS, namun tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran. Dalam rangka persiapan dan penambahan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pada Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah merencanakan pelaksanaan Diklat PPNS di Pusdiklat Reskrim Polri Megamendung bagi 3 (tiga) orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 (dua) orang dibiayai melalui anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sedangkan 1 (satu) orang lainnya biaya kontribusinya dianggarkan pada BKPSDM Kabupaten Agam.
9	Pemerintah Daerah memberlakukan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> (penghargaan dan hukuman) baik bagi wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh dan tidak patuh bayar pajak.	BAPENDA	Belum adanya reward dan punishment terhadap wajib pajak.	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sependapat bahwa untuk pemberian <i>reward</i> sudah kita rencanakan dilakukan pada tahun 2025 ini dalam bentuk pemberian piagam yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Kepala Daerah kepada Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam pembayaran pajak daerah.
10	Secara konsisten Pemerintah Daerah memberikan hak berupa Dana Bagi	BAPENDA dan	Belum terlaksananya	Kami sepakat dengan rekomendasi Saudara, pembayaran dana bagi hasil nagari harus dapat dilakukan tepat waktu, karena merupakan amanat Undang-Undang

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	Hasil tepat waktu kepada Nagari.	BKAD	penyaluran dana bagi hasil kepada Nagari secara tepat waktu	yang harus ditaati, namun pembayaran dana bagi hasil ini berkaitan erat dengan ketersediaan kas daerah. Pada Tahun 2024 Pendapatan Daerah tidak terealisasi sesuai target. Antara lain Pendapatan Asli Daerah tidak terealisasi sebesar Rp54.901.127.579 dan DBH Provinsi juga tidak salur ke kas daerah sebesar Rp38.242.821.676, hal ini berdampak tidak terealisasinya beberapa belanja yang telah dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024, salah satunya DBH ke Nagari. Kedepannya, pembayaran DBH menjadi komitmen kita bersama untuk dapat direalisasikan tepat waktu.
11	Kegiatan P1 Kecamatan Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, yang belum dilaksanakan di Tahun 2024 sebagaimana dijanjikan untuk dilaksanakan di Tahun 2025.	DPUTR	Belum Terealisasinya P1 Kecamatan Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, pada prinsipnya kami sangat sependapat untuk kegiatan P1 Kecamatan Tanjung Raya TA 2024 yaitu Rekonstruksi Jalan Sp. Kp Rambai – Koto Tinggi Nagari Paninjauan telah dianggarkan kembali pada APBD Tahun 2025, sedangkan P1 Kecamatan Tanjung Mutiara yaitu Rekonstruksi Jalan Labuhan Menuju Subang – Subang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620.357 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan menurut fungsi statusnya sebagai jalan provinsi dan akan diusulkan melalui Musrebang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 untuk dapat ditangani melalui APBD Provinsi 2027.
12	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 belum dibayarkan tunjangan fungsionalnya, kondisi sekarang Pemerintah Daerah masih memberikan tunjangan sesuai jabatan struktural sebesar Rp. 540.000, berdasarkan Perpres 50 Tahun 2022 tentang pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi tunjangan Jabatan Fungsional penyetaraan	BKAD dan BKPSDM	Belum diterimanya tunjangan fungsional penyetaraan yang dilantik pada tanggal 31 Desember 2021	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan dan penghitungan selisih pembayaran tunjangan fungsional yang diterima saat ini oleh pejabat fungsional, hasil penyetaraan disandingkan dengan tunjangan yang seharusnya diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti rekomendasi Saudara, hasil pemetaan tersebut dibahas melalui telaahan staf Kepala BKPSDM Nomor 824/186/BKPSDM-2025 tanggal 5 Juni 2025. Sebagaimana diketahui, pembayaran tunjangan fungsional penyetaraan juga telah dibayarkan pada Tahun 2025.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	dibayarkan sejak yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat fungsional (sejak Bulan Januari 2022) sebab Kota pariaman telah menjadi temuan Tahun 2023, supaya Bupati Agam mengeluarkan Keputusan tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional yang mengacu kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan fungsional.			
13	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN, motivasi kerja ASN, kualitas pelayanan kepada masyarakat, kinerja ASN, keadilan dan kesejahteraan, integritas ASN Daerah dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun pemberian TPP tersebut belum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri dimana	BKAD, BKPSDM, dan Bagian Organisasi	Perlunya Perhitungan TPP secara tepat bagi tenaga Kesehatan	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan pemberian tambahan penghasilan pegawai telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. Dasar pemberian TPP bagi tenaga kesehatan telah mempedomani PERMENDAGRI Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, bahwa apabila Perangkat Daerah atau jabatan tertentu yang telah menerima tambahan penghasilan yang masuk dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan, maka perlu dikaji kembali pemberian tambahan penghasilan dari kriteria lainnya seperti beban kerja, kondisi kerja, dll. Mengingat tenaga kesehatan telah menerima jasa pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh PERMENKES Nomor 6 Tahun 2022 maka pemberian TPP untuk tenaga kesehatan disesuaikan. Untuk meningkatkan profesionalitas dan mengoptimalkan pengelolaan BLUD secara mandiri, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem remunerasi pendapatan bagi pegawai BLUD secara proporsional dan berkeadilan.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	Tunjangan kinerja merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja. Tunjangan kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Instansi, Kondisi saat ini Kabupaten Agam memberikan TPP lebih rendah kepada tenaga kesehatan seharusnya pemberian tunjangan kinerja harus sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.			
14	Pemerintah daerah harus menyusun perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan dihitung secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi sekarang terjadinya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai belum proporsional. Demikian pula	BKPSDM dan Bagian Organisasi	Belum optimalnya perhitungan kebutuhan pegawai sehingga terjadi ketidaksesuaian kompetensi pegawai dan jabatan	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kabupaten Agam telah melakukan penyusunan ANJAB dan ABK yang menjadi dasar dalam penghitungan dan penyusunan kebutuhan ASN. Kami menyadari kondisi ASN tidak dalam kondisi ideal hal ini secara bertahap akan diatasi dengan langkah yakni komitmen evaluasi kompetensi pegawai, perbaikan pendistribusian PNS dan melakukan langkah strategis ke depan sebagai tindak lanjut. Selain langkah tersebut diatas, Pemerintah Daerah juga melakukan pemetaan ulang kompetensi seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah, Penyesuaian jabatan melalui mekanisme rotasi, mutasi, dan promosi berbasis <i>merit system</i> , penyusunan kembali kebutuhan formasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	pendistribusian PNS saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya.			
15	Pemerintah Daerah supaya melakukan kajian penetapan defisit pada APBD, supaya tidak berdampak kepada OPD dalam melaksana program kegiatan.	BKAD	Perlunya penetapan defisit APBD secara cermat	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa Penetapan Defisit APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah, yaitu sebesar 4,35% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024. Perhitungan kapasitas fiskal mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Selanjutnya Penetapan Defisit APBD disepakati bersama antara TAPD dengan BANGGAR DPRD pada saat Rapat pembahasan APBD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah untuk menutup defisit pada Perubahan APBD. Kedepan, hal ini akan menjadi perhatian dan komitmen kita bersama dalam Penetapan defisit APBD agar tidak berdampak terhadap belanja OPD. Atas rekomendasinya kami ucapkan terima kasih.
16	DBH Pajak Air Permukaan Danau Maninjau 2 tahun belakangan tidak disalurkan lagi ke Nagari sekitar danau maninjau, Pemerintah Daerah untuk menyalurkan kembali semenjak terhentinya penyaluran tersebut kepada OPD yang bersangkutan.	BAPENDA	Perlunya kepastian alokasi dana bagi hasil pajak permukaan air danau maninjau	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan pusat dan daerah menjelaskan pajak air permukaan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025 wajib mengalokasikan Dana Bagi Hasil dari pajak dan retribusi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah tidak dapat mengalokasikan Dana Bagi Hasil ke Nagari disebabkan tidak adanya regulasi yang mengamanatkan hal tersebut.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
17	Agar Pemerintah Daerah menyampaikan Kemampuan Keuangan Daerah dan Setiap tahun berupa peraturan Bupati tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.	BKAD	Perlunya pemberitahuan tentang kemampuan keuangan daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan setiap tahun anggaran yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk Perhitungan KKD Tahun 2025 akan disampaikan setelah hasil perhitungan disepakati bersama antara TAPD dengan Banggar DPRD.
18	Pansus merekomendasikan Pokir-pokir yang tidak terlaksana dapat di laksanakan di tahun-tahun berikutnya dengan menganggarkan kembali baik di perubahan anggaran maupun di APBD tahun berikutnya sehingga tidak ada pokir yang telah disepakati tidak dikerjakan, walaupun anggota DPRD tersebut sudah tidak menjabat lagi.	BAPPEDA dan BKAD	Belum terlaksananya beberapa pokir di Tahun 2024	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa Pengalokasian kembali Pokir DPRD dapat dilaksanakan dengan mempedomani hasil kesepakatan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD pada saat pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2025 ataupun pada Pembahasan RAPBD Tahun 2026, selanjutnya diakomodir pada perubahan RKPD dan RKPD tahun berikutnya.
19	Berdasar data LKPJ yang disampaikan realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp.155.560.100.788 dan tahun 2024, realisasi belanja modal hanya sebesar Rp139.007.975.111, melihat kondisi tersebut terjadi penurunan belanja modal seharusnya pemerintah daerah melakukan pemetaan supaya belanja modal tersebut sesuai dengan	BKAD	Perlunya solusi terhadap penurunan belanja modal	Sehubungan dengan rekomendasi ini, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengupayakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran belanja sesuai dengan aturan perencanaan dan penganggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan setiap tahunnya antara lain Belanja Pendidikan 20% Belanja Pegawai 30% Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 40%. Untuk belanja Pendidikan telah dipenuhi sedangkan untuk belanja pegawai, belanja infrastuktur dan pelayanan publik belum dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas dimana 89,16% total penerimaan Kabupaten Agam masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat, dimana penerimaan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 tahun 2024 dimana Belanja Pendidikan 20% Belanja Pegawai 30% Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 40%. Penurunan belanja modal harus dicarikan solusi oleh Pemerintah Daerah.			dana transfer ini sebagian telah ditentukan penggunaannya antara lain Dana DAU diarahkan, Dana Alokasi Khusus, Dana transfer ke Nagari, dan alokasi Mandatori lainnya. Sehingga alokasi belanja untuk infrastuktur dan pelayanan publik sangat terbatas. Selanjutnya, penurunan realisasi belanja modal disebabkan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, antara lain tidak ada alokasi DAK untuk konektifitas jalan dan DAK fisik bidang pariwisata, serta disebabkan oleh kondisi keuangan daerah tahun sebelumnya. Untuk kedepannya, ini akan menjadi perhatian dan kajian Pemerintah Daerah bersama dengan Tim BANGGAR DPRD dalam melakukan penyusunan anggaran yang lebih realistis sesuai dengan ketentuan.
20	Dalam penyampaian buku II LKPJ terdapat ketidakakuratan pelaporan data yang menyebabkan pembahasan jadi meragukan, seharusnya data dalam buku LKPJ sudah tidak terjadi kekeliruan seperti pada halaman I.35 tabel 1.17 ini menjadi catatan kinerja OPD tersebut.	BAPPEDA dan BKAD	Terdapat ketidakakuratan data pada buku LKPJ pada halaman I.35 tabel 1.17.	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa terhadap rekomendasi ini diucapkan terima kasih dan akan menjadi perhatian serta poin penting dalam rangka penyempurnaan penyusunan Buku LKPJ Bupati Agam berikutnya.
21	Rendahnya realisasi Anggaran pada tahun 2024 pada umumnya semua OPD disebabkan oleh pembatasan-pembatasan pencairan dana oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pencairan Ganti Uang Persediaan yang biasanya 80% menjadi 50%. seharusnya apa yang telah disepakati di APBD tidak bisa dilakukan pembatasan-pembatasan oleh Badan Keuangan dan Aset	BKAD	Belum optimalnya realisasi anggaran pada Tahun 2024 sehingga berdampak pada hutang belanja atau tunda bayar.	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami jelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran belanja pada tahun 2024, dapat disampaikan bahwa ini semua kembali pada kondisi keuangan daerah tahun 2024. Dengan tidak terealisasinya Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi, menyebabkan Kas Daerah yang seharusnya menampung pendapatan daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui APBD, secara otomatis tidak sanggup membayar kebutuhan belanja yang telah dianggarkan selama tahun anggaran 2024. Untuk menghindari ketekoran/kekurangan kas dalam tahun berjalan, maka pengeluaran melalui Kas Daerah perlu diatur melalui manajemen kas, salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan pembayaran Ganti Uang Persediaan sebesar 50%.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	Daerah, jika dana atau sumber pendapatan tidak mencapai target seharusnya di perubahan Anggaran dilakukan penyesuaian di APBD Perubahan jika sudah ada pada APBD wajib OPD untuk melaksanakan kegiatan, jika tidak dapat dibayarkan tentu akan menjadi hutang belanja atau tunda bayar.			Mengenai penyesuaian target pendapatan Tahun 2024 telah kita lakukan pada perubahan APBD Tahun 2024 dengan mempedomani peraturan terkait pengalokasian target masing-masing jenis penerimaan. Tidak terealisasinya pendapatan daerah seluruhnya mulai terdeteksi sejak bulan oktober Tahun 2024 pada saat APBD perubahan telah ditetapkan. Sehingga untuk mengantisipasi ketekoran/kekurangan kas perlu diatur melalui manajemen kas.
22	Dalam pelaksanaan belanja, pembangunan banyak yang tidak sesuai standar mutu namun pengawas proyek tidak tampak melakukan pengawasan di lokasi dan ini mengakibatkan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedepan supaya Pemerintah Daerah mengevaluasi konsultan pengawas yang tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya.	DPUTR	Perlunya pengawasan terhadap standar mutu proyek pekerjaan.	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sangat sependapat bahwa dalam pelaksanaan belanja, pembangunan banyak yang tidak sesuai standar mutu namun pengawas proyek tidak tampak melakukan pengawasan di lokasi dan ini mengakibatkan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedepan supaya Pemerintah Daerah mengevaluasi konsultan pengawas yang tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya, dapat kami sampaikan untuk peningkatan mutu dan pengawasan pekerjaan konstruksi ini akan terus kita tingkatkan dengan cara lebih selektif dalam proses pemilihan konsultan pengawas dan akan meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pengawas di lapangan.
23	Kabupaten Agam menempati peringkat ke-20 dalam hal risiko bencana di Indonesia tahun 2024 berdasarkan data tersebut Anggaran BPBD Kab Agam perlu ditingkatkan terutama untuk masyarakat di pinggir sungai terhadap ancaman buaya dan rambu-rambu bencana di kawasan wisata.	BPBD	Perlunya pengawasan lebih ketat terhadap masyarakat di pinggir sungai	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sangat sependapat bahwa untuk mengurangi resiko bencana terutama masyarakat yang berada di pinggir sungai terhadap ancaman buaya akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi kepada Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) karena merupakan kewenangan BKSDA. Sedangkan, terkait rambu-rambu bencana di kawasan wisata akan di tindaklanjuti dengan penambahan anggaran untuk pengadaan rambu-rambu evakuasi dan rawan bencana pada Kawasan wisata.
24	Capaian target kinerja di beberapa	BAPPEDA	Belum	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	OPD sangat baik, namun kondisi anggaran dan realisasi keuangan cukup rendah, kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya SiLPA di Akhir tahun anggaran, Kedepan dalam penyusunan Anggaran untuk memperhatikan tingkat capaian di tahun sebelumnya.	dan BKAD	maksimalnya penyusunan Anggaran dalam menentukan tingkat capaian sehingga mengakibatkan SiLPA	tahapan penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berdasarkan regulasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Hukum dan HAM dan Proyeksi keuangan daerah disusun berdasarkan perhitungan tren dan realisasi. Terkait SiLPA Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa SiLPA terdiri atas SiLPA di luar kas daerah dan SiLPA yang ada di kas daerah. Untuk SiLPA yang ada diluar kas daerah berjumlah sebesar 36,2 miliar yang bersumber dari sisa BLUD Puskesmas, sisa BLUD RSUD, sisa bantuan operasional sekolah (Dana BOS) dan sisa BOK puskesmas yang tidak dapat digunakan karena berada diluar kas daerah. Sedangkan SiLPA yang ada di kas daerah berjumlah 3,3 miliar yang merupakan kas yang tersedia pada 31 desember 2024.
25	Pegawai Honorer, PTT, Kontrak dan THL yang mengikuti seleksi tahap satu dan tahap dua jika tidak mendapatkan formasi atau tidak lulus seleksi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan masa kerja dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.	BKPSDM	Perlunya pertimbangan masa kerja dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan tentang pengangkatan PPPK Paruh waktu telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tanggal 30 desember 2025 di lapangan kantor Bupati Agam dan 31 desember 2025 di lapangan kantor camat kamang mamek dengan total sebanyak 1405 orang PPPK paruh waktu. Sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi PPPK bagi tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan Data BKN Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada DIKTUM KELIMA bahwa Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (<i>data base</i>) pegawai Non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
26	Agar Pemerintah Daerah memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan agar bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan.	BKAD	Perlunya memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk perencanaan yang matang dalam menyusun program dan kegiatan	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan ucapkan terima kasih. Kedepan hal ini akan menjadi perhatian dan komitmen kita bersama dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk pengalokasian target penerimaan daerah yang dapat dicapai terutama PAD, sehingga Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
27	Agar Pemerintah daerah mengevaluasi kinerja masing-masing OPD serta personal yang mampu dan sanggup melaksanakan tugas sebagaimana yang diembankan dalam melaksanakan kegiatan mulai dari eselon II sampai kepada jajaran paling bawah.	BKPSDM	Perlunya evaluasi kinerja dan pejabat struktural OPD	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan saat ini telah dilaksanakan Uji Kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Kemudian dilanjutkan penilaian kompetensi dan potensi ASN untuk Jabatan Eselon III, Fungsional, dan Administrator melalui ProASN 2025 di UPT BKN Padang sebanyak 386 orang pada bulan November dan Desember 2025.
28	Kedepannya agar Pemerintah daerah menyusun rencana kerja dan program kerja berdasarkan skala prioritas untuk melaksanakan kegiatan baik dalam keterbatasan keuangan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan semua kegiatan yang masuk Prioritas 1 (P1) Kecamatan dapat dilaksanakan sebagaimana yang disusun dan direncanakan pada saat penyusunan dan Penetapan APBD.	BAPPEDA	Perlunya penyusunan rencana kerja dan program kerja berdasarkan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan	Sehubungan dengan rekomendasi dapat kami ucapkan terima kasih, kedepan hal ini akan menjadi perhatian dan komitmen kita bersama dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan prioritas daerah.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
29	Agar Pemerintah Daerah kedepannya cepat tanggap dalam mengantisipasi pelaksanaan program dan kegiatan yang macet karena perubahan regulasi dan peraturan dalam pencairan anggaran, hingga dengan demikian penyerapan anggaran dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan kegagalan pelaksanaan program kegiatan.	BKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan	Perlunya perhatian khusus pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sepakat bahwa Pemerintah Daerah kedepannya cepat tanggap dalam mengantisipasi pelaksanaan program dan kegiatan yang macet karena perubahan regulasi dan peraturan dalam pencairan anggaran, sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan kegagalan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya, namun dapat kami jelaskan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana-dana yang telah ditentukan (DAK, DAU ditentukan, DBH sawit, dll) terlaksana sesuai jadwal, namun khusus untuk kegiatan yang bersumber dari Pendapatan yang bebas digunakan (PAD, DAU Bebas, DBH Provinsi, DBH pajak pusat, dll) sebagian tidak dapat dilaksanakan karena mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta memperhatikan temuan BPK atas Audit Kinerja pelaksanaan APBD 2023 dan Semester I tahun 2024, bahwa untuk realisasi belanja agar disesuaikan dengan ketersediaan dana di Kas Daerah.
30	Agar Pemerintah daerah mengantisipasi segala perencanaan dan penganggaran untuk semua program dan kegiatan jangan sampai terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak aparatur daerah baik struktural maupun fungsional guru dan medis.	BKAD, DINKES, DISDIKBUD	Perlunya pembayaran hak-hak kepegawaian terutama guru dan medis secara tepat waktu	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, Kami sependapat bahwa pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara baik itu pejabat struktural ataupun fungsional guru dan medis merupakan komitmen kita bersama untuk dapat merealisasikannya tepat waktu, karena ini juga merupakan salah satu prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran belanja daerah, kedepan hal ini akan terus tetap menjadi perhatian kita bersama.
31	Agar Pemerintah daerah melalui OPD terkait, bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan menghindari SiLPA yang besar karena SiLPA berarti OPD bersangkutan tidak mencapai target sesuai dengan rencana yang telah disusun.	BKAD	Perlunya optimalisasi perencanaan kegiatan dan menghindari terjadinya SiLPA	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disepakati adalah komitmen kita bersama, kita terus mengupayakan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai capaian target sehingga tidak ada sisa pagu dana akibat pekerjaan tidak terlaksana secara maksimal, untuk itu hal ini akan tetap menjadi perhatian kita bersama.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
32	Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk BPJS agar kita masuk kategori UHC dan dana sharing dengan provinsi, karena provinsi juga berkewajiban untuk mengayomi masyarakat.	DINKES dan BKAD	Perlunya perhatian khusus terhadap penganggaran BPJS kategori <i>Universal Health Community</i> (UHC)	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, kami sependapat bahwa terkait pemenuhan anggaran untuk BPJS agar mencapai kategori UHC, dengan cara mengoptimalkan sumber dana alternatif seperti pajak rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan mengembangkan skema pembiayaan inovatif yang menggabungkan dana APBD dengan investasi sektor swasta. Hal ini akan dibahas bersama antara TAPD dan BANGGAR DPRD pada saat pembahasan RAPBD Tahun 2026.
33	Dalam penyertaan modal di PDAM harapan kita disamping lancarnya saluran air ke masyarakat juga berharap agar pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dapat terealisasi sebagaimana mestinya, mengingat sampai saat ini air kemasan yang kita harapkan belum lagi menghasilkan. Seandainya kendala yang dihadapi begitu rumit mungkin alangkah baiknya kita serahkan pengelolaannya kepada swasta murni.	BKAD dan Bagian Perekonomian	Belum optimalnya penyertaan modal dan pengelolaan PDAM	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa penyertaan modal kepada PDAM yang saat ini sudah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, adalah bentuk investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyertaan modal ini dapat berupa uang atau aset daerah yang dialihkan menjadi kepemilikan saham atau modal pada PDAM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM, serta mendukung pembangunan infrastruktur air minum di daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini, perlu dilakukan kajian secara menyeluruh serta dukungan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap kelangsungan dan pengembangan PDAM sebagai satu-satunya BUMD yang kita miliki, dengan harapan agar PDAM nantinya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan PAD Kabupaten Agam. Berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam ke PERUMDA Air Minum Tirta Antokan, AMDK saat ini masih pada tahap pengurusan perizinan untuk beroperasi (SNI, Halal dan izin lainnya). Sedangkan untuk pengelolaannya yang diserahkan kepada pihak swasta perlu dilakukan kajian dan kesesuaian tata kelola dengan aturan yang menaungi Badan Usaha Milik Daerah.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
34	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun 2024 sebanyak Rp. 146,722.295.815,- (Seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) bagi kami sebagai Wakil Rakyat Angka Rp. 146 Milyar lebih sebuah SILPA yang cukup besar, karena dana Rp. 146 Milyar lebih itu bisa dioptimalkan untuk Pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat. Dibandingkan dengan jatah Pokir DPRD yang dijatahkan Rp. 1 (satu) Milyar per anggota saja masih bersisa dana sebesar Rp.100 Milyar. Sementara anggota DPRD sudah berbusa-busa menggaet dana Pokir yang diperuntukkan untuk rakyat, akan tetapi mirisnya Pemerintah daerah tidak telaten mengelola Belanja sehingga akhirnya Dana APBD masih bersisa Rp. 146 Milyar. Kami menyadari SILPA murni berada diangka Rp. 39.578.636.185,73 (Tiga puluh sembilan Milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan	BKAD	Terdapat SiLPA APBD dengan jumlah 146,722.295.815,- sehingga perlu pengelolaan belanja daerah secara tepat	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami jelaskan bahwa perhitungan SiLPA APBD berasal dari penerimaan Pendapatan Daerah yang dikurangi dengan Belanja Daerah dan ditambah dengan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan SiLPA tahun sebelumnya dan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Untuk tahun anggaran 2024, realisasi SiLPA adalah sebesar Rp.39.578.636.185,73, yang terdiri dari: - SiLPA di Kasda : Rp. 3.372.232.042,59 - SiLPA di Bendahara Penerimaan : Rp. 91.000,00 - SiLPA di Bendahara Pengeluaran : Rp. 78.059.123,00 - SiLPA di BLUD : Rp. 33.286.045.452,53 - SiLPA Dana BOSP : Rp. 466.489.210,61 - SiLPA Dana BOK Puskesmas : Rp. 2.375.719.357,00 Berdasarkan rincian SiLPA diatas, terlihat bahwa SiLPA di BLUD merupakan nilai SiLPA tertinggi dan seperti kita ketahui bersama bahwa SiLPA pada rincian pada huruf <i>d</i>, huruf <i>e</i> dan huruf <i>f</i> diatas dengan total sebesar Rp.36.128.254.020,14, hanya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana untuk membiayai kegiatan yang bersumber dari Dana BLUD, BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan serta Dana BOK Puskesmas. Untuk sisa anggaran belanja sebesar Rp.146.722.295.815,00, tidak bisa disebut sebagai SiLPA jika mengacu pada definisi yang telah disebutkan diatas. SiLPA juga memperhitungkan penerimaan pendapatan daerah. Untuk tahun anggaran 2024, sisa anggaran (target yang belum tercapai) atas Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp.107.280.154.159,29. Selanjutnya, penjelasan atas sisa anggaran belanja ini antara lain disebabkan oleh sisa perhitungan realisasi anggaran yang disandingkan dengan realisasi belanja berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan dalam penyusunan DPA OPD dan tidak bisa disesuaikan/dirobah berdasarkan realisasi belanja, karena SHS ini bersifat tetap untuk penyusunan DPA awal ataupun DPA Perubahan OPD dan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah). SiLPA sebanyak Rp. 39 Miliar ini pun sudah dapat mengecor jalan usaha tani sepanjang 39 KM. Kalau dirata-ratakan 1 KM seharga Rp. 1 Miliar dikonversi 100 Meter seharga Rp. 100 Juta.			berlaku umum untuk seluruh OPD. Sisa anggaran yang disebabkan oleh selisih realisasi anggaran dengan realisasi berdasarkan SHS, tidak dapat dialihkan dan digunakan untuk belanja yang lain. Disamping SHS, sisa anggaran belanja juga berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana.
35	Setelah didalami di beberapa OPD kenapa terdapat SiLPA di OPD yang bersangkutan kami berkesimpulan terdapat beberapa kelemahan dalam mengelola APBD sehingga banyak kinerja yang tersendat dan terlambat dalam mengelola waktu yang ada. a. Lemahnya koordinasi antar OPD karena OPD dalam merealisasi program tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga koordinasi tidak lancar akibatnya banyak penundaan jadwal kegiatan. Peran <i>TOP management</i> atau <i>middle management</i> kurang maksimal sehingga koordinasi antar OPD	BKAD	Lemahnya koordinasi antar OPD serta belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan ucapan terima kasih. Kedepan hal ini akan terus kita tingkatkan, koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang pada masing-masing perangkat daerah. Terkait SOP dalam pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan pengkajian dan evaluasi, agar <i>schedule</i> dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih terstruktur.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	tidak optimal. b. Sepertinya Pemerintah Daerah tidak memiliki atau tidak berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Sehingga banyak terkendala kebijakan dalam mengeksekusi dan memecahkan masalah yang timbul. Akibatnya kepala OPD tidak memiliki kepercayaan diri dalam bekerja. Hal yang rutin pun tidak bisa diatasi seperti kasus keterlambatan pencairan THR, dana bagi hasil untuk Nagari dan pencairan Honorarium. Untuk itu kami merekomendasikan kepada Pemerintah daerah untuk memperkuat jaringan Koordinasi antar lembaga dan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.			
36	Pokir Anggota DPRD adalah sebagian dari komitmen untuk masyarakat pemilih dan harus dipahami sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, maka harus ada kejelasan dalam proses perencanaan, pagu anggaran serta penganggaran dan eksekusi dilapangan, jangan sampai terjadi Pokir batal	BAPPEDA dan BKAD	Terkendalanya pelaksanaan pokir DPRD dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap hal tersebut	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan daerah, Pokir DPRD merupakan salah satu kegiatan prioritas daerah yang diakomodir pada perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari aspirasi masyarakat dan telah dimuat pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Penyusunan APBD telah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan proyeksi pendapatan dan pembiayaan. Terjadinya kegagalan belanja diakibatkan tidak salurnya dana DBH provinsi dan pendapatan lainnya.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	dilaksanakan dengan alasan administrasi penganggaran, atau letak Pokir dianggaran DAU arahan, DAU Umum atau pada PAD, apabila PAD tidak mencapai target hingga pokir tersebut batal dilaksanakan. Kalaupun ada regulasi baru yang mengakibatkan terkendalanya Pokir untuk dilaksanakan, maka secara moral pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menganggarkan kembali agar tidak menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang menciptakan suasana tidak kondusif antara DPRD, masyarakat pemilih dan Pemerintah Daerah.			Untuk mencegah penurunan status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akibat tunda bayar, maka Pemerintah Daerah harus mengambil kebijakan ganti uang (GU) 50% yang berdampak pada tidak terlaksananya sebagian Pokir DPRD.
37	Bupati sebagai pemimpin yang diamanahkan rakyat perlu melakukan pengevaluasian atau membedah kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan semua pejabat struktural lainnya. Mungkin sudah saatnya seluruh personil perlu disegarkan dan dilakukan penyesuaian dengan keahlian potensi dan prestasi. Bagaimanapun untuk tantangan kedepan tidak ringan dan lebih kompleks, maka diperlukan	BKPSDM	Perlunya evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan Uji Kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, yang menekankan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak atau pengalaman sesuai dengan posisi dan jabatan yang diembannya.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	sosok yang Kreatif, Inovatif, berani dan bertanggungjawab dalam bekerja, Figur yang bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi dengan DPRD selaku mitra, jangan memandang DPRD sebelah mata begitu juga mampu membangun komunikasi ke struktural di provinsi, Bagaimanapun keterbatasan anggaran menantang kita untuk harus bisa membuka komunikasi ke semua pihak, termasuk berkomunikasi dengan perantau atau anggota DPR RI, DPD RI sebagai mitra pemerintah pusat.			
38	Mengingat kondisi keuangan pemerintah daerah tidak makin membaik, ditambah kemampuan daerah menopang pembiayaan melalui PAD pun terbatas. Maka sudah perlu dievaluasi struktur organisasi perangkat daerah dilakukan evaluasi dan juga perlu efisiensi struktur agar tidak terjadi penggemukan pembiayaan pada struktur pemerintah saja. Jargon “hemat struktur dan kaya fungsi” perlu kembali dikuatkan. Apalagi kebijakan pemerintah untuk	BAPENDA, BKPSDM, dan Bagian Organisasi	Perlunya evaluasi dan perampingan struktur organisasi perangkat daerah	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, dapat kami sampaikan untuk melakukan perampingan struktur organisasi perangkat daerah, dapat diinformasikan bahwa saat ini Pemerintah Pusat sedang melakukan pembahasan perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sambil menunggu keluarnya PP yang baru, kita tetap melakukan evaluasi kelembagaan sehingga perangkat daerah dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Terkait sanksi dalam bentuk sanksi jabatan atau mutasi jabatan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	rekrutmen ASN, bahkan mengarahkan rekrutmen kepada pola <i>outsourcing</i> atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kalaupun pemerintah Daerah tetap akan mempertahankan struktur organisasi yang ada maka jalan keluarnya pemerintah daerah harus serius mencapai target PAD. Kapan perlu OPD yang tidak mencapai target PAD perlu diberikan sanksi dalam bentuk sanksi jabatan atau mutasi jabatan.			
39	Kurang optimal pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala regulasi pemungutan PAD, tidak jelas pendelegasian wewenang secara fokus untuk mengkoordinir pencapaian target PAD pada OPD. Sehingga banyak OPD yang tidak berhasil mencapai target kinerja PAD. Karena tidak jelas siapa yang didelegasikan khusus untuk itu. Sehingga akibatnya banyak potensi PAD yang tidak tergarap serius. Kalaupun ada Badan Pendapatan Daerah secara Psikologis badan ini se level dengan OPD lain, sudah dipastikan akan ada kendala psikologis untuk menggenjot OPD Lain untuk meningkatkan kinerja pada saat dievaluasi.	BAPENDA	Belum optimalnya Pemerintah Daerah Daerah dalam mengatasi penerapan regulasi dan kendala pemungutan PAD	Sehubungan dengan rekomendasi Saudara, Kami sependapat dengan rekomendasi Saudara, untuk meningkatkan capaian target PAD, saat ini Pemerintah Daerah sedang disusun kajian akademis pembentukan UPTD Pendapatan Daerah sebagai perpanjangan BAPENDA dilapangan. Dengan dibentuknya UPTD pendapatan daerah maka pengelolaan beberapa jenis pajak yang sebelumnya dilimpahkan kepada Camat akan dialihkan kepada UPTD sehingga pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien yang akan berdampak pada peningkatan jumlah PAD.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
	Sekretaris Daerah harus memahami masalah ini, minimal ada pendelegasian kepada asisten atau staf ahli sebagai aparatur senior dalam mengomandoi OPD penghasil PAD.			
40	Kelemahan lain yang terbaca dalam koordinasi dan pembahagian tugas adalah pada pengelolaan penghasil PAD. Banyak OPD yang tidak bisa optimal dalam mencapai target karena peran koordinasi serta <i>Problem Solving</i> terhadap kendala-kendala dalam memungut PAD tidak ada solusinya, seperti kendala pemungutan PAD pada izin-izin mendirikan bangunan, retribusi rumah makan, kedai-kedai/warung pecel lele yang jumlahnya puluhan di sepanjang Kecamatan Baso sampai ke Kecamatan Tanjung Mutiara. Sama juga dengan tidak terkoordinasinya antar OPD sehingga mengalami keterlambatan dalam membayarkan hak-hak pegawai, hak aparatur nagari, hak guru-guru apakah THR maupun honor-honor. Akibat keterlambatan ini memantik emosi dari perangkat nagari, dan para guru.	BKAD, BAPENDA, DISDIKBUD, dan DPMN	Belum optimalnya koordinasi OPD dalam pelaksanaan tugas	Sehubungan dengan Rekomendasi Saudara, kami sependapat bahwa belum optimalnya PAD berdampak pada belanja daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan, Pemerintah Daerah sedang melaksanakan inventarisasi wajib pajak dan memiliki sistem digitalisasi <i>Smartgov</i> serta Lapak Agam. Kedepan, pemerintah Daerah akan menerapkan pembayaran pajak secara online oleh wajib pajak dan pemasangan <i>online transaction monitoring</i> serta penerapan sanksi. Disamping itu, Penyaluran Alokasi Dana Nagari telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Nagari. Namun dikarenakan Transfer DAU dari pemerintah pusat mengalami penundaan akibat proses penyesuaian administrasi dan teknis di tingkat Kementerian Keuangan serta sinkronisasi data keuangan daerah dengan sistem pusat, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyaluran. Keterlambatan transfer DAU berimplikasi langsung pada kas daerah, sehingga pembayaran hak-hak aparatur nagari, termasuk gaji dan tunjangan mengalami penundaan. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi aparatur nagari yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat Besar harapan kami agar DPRD dapat memahami kondisi yang terjadi. Pemerintah Daerah akan terus berupaya memaksimalkan pengelolaan keuangan agar hak aparatur nagari dapat dibayarkan tepat waktu dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Selain itu kami juga perlu dukungan kita bersama DPRD untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran pajak dan retribusi, serta menjadi pelopor dan panutan dalam pembayaran pajak dan retribusi.

3.4 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

3.4.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan data terkait capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025:

Tabel 3.42 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026

No	Uraian	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	Skala Kinerja
Misi I : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71)	Data Capaian Belum Rilis	-	-
2	Nilai Sakip	BB (77)	B (67,45)	87,60	Tinggi
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik (84)	69,7 (B)	82,98	Tinggi
4	Nilai EPPD	3,50	Data Capaian Belum Rilis	-	-
5	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	46 (Tinggi)	40,14	87,26	Tinggi
6	Indeks Profesionalitas ASN	66 (Tinggi)	n.a (IP ASN tidak lagi dihitung sejak 2025)	-	-
7	Indeks SPBE	3,1 (Baik)	2,96	95,48	Sangat Tinggi
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 %	88,45 %	104,06	Sangat Tinggi
9	Persentase Nagari Dengan Katagori Cepat Berkembang	53,20 %	84,78 %	159,36	Sangat Tinggi
10	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	464,00	469,00	101,08	Sangat Tinggi
Misi II: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui obtimalisasi sumbedaya daerah dan pengembangan pariwisata					
11	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	3,98 %	6,75 %	169,49	Sangat Tinggi
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,89 %	2,99 %	61,15	Rendah
13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,75 %	2,33 %	84,73	Tinggi
14	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,60 %	18 %	692,31	Sangat Tinggi
15	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	2,00 %	n.a	-	-
16	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	8,56 %	2,64 %	30,84	Sangat Rendah
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	936.752	1.173.007	125,22	Sangat Tinggi
18	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	5,94 %	1,54 %	25,93	Sangat Rendah
19	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	60 %	58,37 %	67,87	Sedang
20	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian tahun dasar (2020)	43,50 %	-39,60 %	-91,03	Sangat Rendah
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana					
21	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	0,55	0,34	61,82	Rendah
22	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	87 %	100 %	114,94	Sangat Tinggi
23	Indeks kualitas lingkungan Hidup	76,87	78,96	102,72	Sangat Tinggi
24	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,98 %	99,98 %	100,00	Sangat Tinggi

No	Uraian	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	Skala Kinerja
Misi IV: Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter					
25	Indeks Pembangunan Manusia	75,75	76,04	100,38	Sangat Tinggi
26	Angka Harapan Lama Sekolah	14,39 Tahun	14,26 Tahun	99,10	Sangat Tinggi
27	Rata rata lama sekolah	9,75 Tahun	9,57 Tahun	98,15	Sangat Tinggi
28	Angka Harapan Hidup	74,51 Tahun	74,63 Tahun	100,16	Sangat Tinggi
29	Nilai Pertumbuhan Produktivitas Daerah (Juta/Kapita)	96,52 Juta	96,17 Juta	99,64	Sangat Tinggi
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,88 %	4,71 %	103,61	Sangat Tinggi
31	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	94 %	93,59 %	99,56	Sangat Tinggi
32	Jumlah cabang olah raga berprestasi	46	38,00	82,61	Tinggi
33	Indeks ketahanan pangan daerah	94,00	71,60	76,17	Sangat Tinggi
34	Indeks Kesejahteraan Rakyat	80,35	91,26	113,58	Sangat Tinggi
35	Status IDM	Mandiri : 34 Nagari	Mandiri : 54 Nagari	158	Sangat Tinggi
36	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,35 %	92,88 %	102,80	Sangat Tinggi
37	IPG	98,90	97,49	98,57	Sangat Tinggi
38	Indek perlindungan anak	72,00	68,21	94,74	Sangat Tinggi
39	Total Fertility Rate	2,27 %	2,41 %	94,21	Sangat Tinggi
Misi V : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK					
40	Indeks Keamanan	91,50	76,50	83,61	Tinggi
41	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	2,90	9,24	31,39	Sangat Rendah
42	Persentase kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan yang ditangani	100 %	100 %	100,00	Sangat Tinggi
43	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	100 %	91 %	91,00	Sangat Tinggi
44	Persentase nagari madani Level V	18,48 %	22,82 %	123,48	Sangat Tinggi
45	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100 %	100 %	100,00	Sangat Tinggi
46	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100 %	100 %	100,00	Sangat Tinggi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan tata kelola pemerintahan nagari. Pada tahun 2025, Persentase Nagari Cepat Berkembang mencapai 84,78 persen yang artinya sebanyak 78 nagari telah masuk dalam kategori cepat berkembang. Capaian ini menunjukkan percepatan peningkatan status nagari sebagai hasil pembinaan dan penguatan kapasitas pemerintahan nagari. Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari menunjukkan capaian sebesar 469 dari target 464. Capaian ini menggambarkan peningkatan signifikan dalam tata kelola administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan nagari. Sementara itu, Nilai SAKIP mencapai 67,45 atau masuk dalam kategori Baik. Walaupun capaian tahun 2025 belum mencapai target sesuai yang ditetapkan, namun capaiannya meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 67,11. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami penurunan capaian ditahun 2025, dari angka 74,03 menjadi 69,7. Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan penguatan. Secara umum, Misi I menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama pada penguatan tata kelola nagari, namun reformasi birokrasi dan akuntabilitas perangkat daerah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target optimal.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan program penguatan sektor UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan pariwisata dan infrastruktur pendukung ekonomi. Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikromeningkat dari 2,60 persen menjadi 18 persen ditahun 2025. Meningkatnya capaian kinerja usaha mikro didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang fokus dan berpihak pada pengembangan usaha mikro serta peran mitra yang optimal dan sinergis sehingga mendorong pelaksanaan program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Jumlah Kunjungan Wisatawan mencapai 1.173.007 orang, melampaui target yang ditetapkan sebesar 963.752. Kondisi ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Sementara Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap hanya mencapai 67,87% dari target, sehingga masih memerlukan perhatian dalam mendukung konektivitas ekonomi. Sementara realisasi investasi turun hingga minus 39 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional yang kurang baik, sehingga perusahaan menunda penambahan asset ditambah masih adanya pelaku usaha yang tidak melaporkan realisasi

investasinya. Secara umum, Misi II menunjukkan kinerja sangat baik pada sektor investasi dan UMKM, namun penguatan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang, serta penguatan sistem penanggulangan bencana. Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 78,96 yang menunjukkan kondisi lingkungan yang terjaga dengan baik. Indikator Ketaatan terhadap Tata Ruang mencapai 99,98 persen. Sementara Penanggulangan Bencana Terintegrasi mencapai 100 persen, menunjukkan efektivitas koordinasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana. Meskipun demikian, Kapasitas Ketahanan Daerah masih berada pada level yang perlu ditingkatkan guna memperkuat sistem mitigasi risiko secara komprehensif. Secara umum, Misi III menunjukkan kinerja baik dalam aspek lingkungan dan kebencanaan, namun penguatan kapasitas ketahanan daerah masih menjadi agenda penting ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan program peningkatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,04 yang menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Indikator Indeks Kesejahteraan Rakyat mencapai 91,26 menunjukkan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, Persentase PPKS Terlayani mencapai 92,88 persen yang menandakan peningkatan layanan perlindungan sosial. Namun demikian, Indeks Ketahanan Pangan turun mencapai 71,6 sehingga menjadi perhatian dalam penguatan pangan masyarakat. Secara umum, Misi IV menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun penguatan ketahanan pangan dan produktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan.

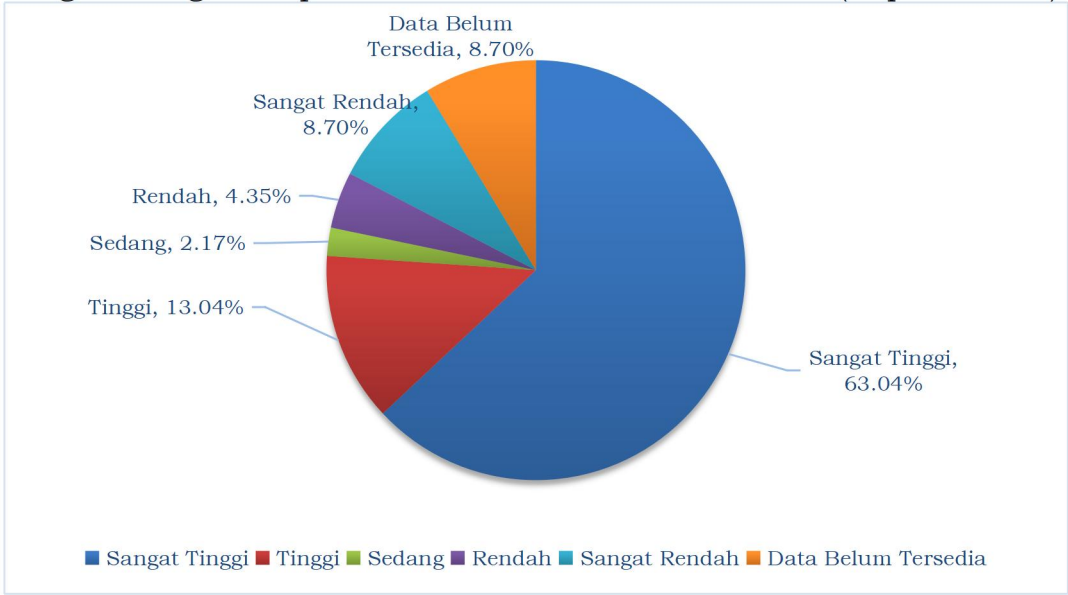
Dalam rangka menciptakan ketenteraman dan memperkuat kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan program peningkatan keamanan, penanganan kasus sosial, serta pelestarian adat dan budaya. Pada tahun 2025, Indeks Keamanan mencapai 91,50 yang menunjukkan kondisi keamanan yang relatif terkendali. Penanganan Kasus Kekerasan dan TPPO mencapai 100 persen, menunjukkan respons yang efektif terhadap kasus sosial. Di

bidang sosial budaya, indikator Nagari Madani Level V mencapai 22,82 persen serta Lembaga Adat Aktif dan Pelestarian Kesenian dan Cagar Budaya mencapai 100 persen. Namun Angka Kriminalitas ditahun 2025 meningkat dimana kejadian kriminalitas mencapai 9,24 per 10.000 penduduk. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam menjaga stabilitas sosial. Secara umum, Misi V menunjukkan kinerja baik dalam penguatan sosial budaya, namun aspek keamanan dan pengendalian kriminalitas perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Tabel 3.43 Skala Kinerja Capaian IKU RPJMD Tahun 2021-2026 (Capaian Tahun 2025)

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Uraian/Kriteria	Jumlah
91% ≤100%	Sangat Tinggi	29
76% ≤ 90%	Tinggi	6
66% ≤ 75%	Sedang	1
51% ≤ 65%	Rendah	2
≤ 50%	Sangat Rendah	4
-	Data Belum Tersedia	4
Jumlah Indikator		46

Grafik 3.2
Diagram Tingkat Capaian IKU RPJMD Tahun 2021-2026 (Capaian 2025)



Berdasarkan grafik 3.2 terlihat bahwa dari 46 indikator IKU pada RPJMD 2025-2029 terdapat 29 indikator (63,04%) dengan kategori nilai capaian yang sangat tinggi.

Tabel 3.44 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2025-2029

No	Indikator	Target 2025	Capaian 2025	Tingkat Capaian (%)	Skala Kinerja
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”					
1	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	18,48 %	21 %	113,64	Sangat Tinggi
2	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	76,53 %	77,04 %	100,67	Sangat Tinggi
3	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	63,70 %	62,42 %	97,99	Sangat Tinggi
4	Indeks Keamanan Daerah	79,45	64,63	81,35	Tinggi
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional					
5	Indeks Reformasi Birokrasi	79 (BB)	Data Capaian Belum Rilis	-	-
6	Maturitas SPIP	3,16	2,74	86,71	Tinggi
7	Nilai SAKIP	B (68,61)	B (67,45)	98,31	Sangat Tinggi
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77,50	69,7 (B)	89,94	Tinggi
9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,66	2,96	111,28	Sangat Tinggi
10	Indeks Sistem Merit	270,00	Data Capaian Belum Rilis	-	-
11	EPPD	3,581	Data Capaian Belum Rilis	-	-
12	Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,78 (B)	108,00	Sangat Tinggi
Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing					
13	IPM	75,75	76,04	100,38	Sangat Tinggi
14	Rata-rata Lama Sekolah	9,75 Tahun	9,57 Tahun	98,15	Sangat Tinggi
15	Harapan Lama Sekolah	14,40 Tahun	14,26 Tahun	99,03	Sangat Tinggi
16	Usia Harapan Hidup	74,51 Tahun	74,63 Tahun	100,16	Sangat Tinggi
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,33	Data Capaian Belum Rilis	-	-
18	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	61,62	53,92	87,50	Tinggi
Misi IV : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan					
19	Laju pertumbuhan ekonomi	4,41%	2,99%	67,77	Sedang
20	IDSD	3,64	3,70	101,79	Sangat Tinggi
21	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	82,61	88,51	107,14	Sangat Tinggi
22	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,44%	10,57	101,16	Sangat Tinggi
23	Rasio Kewirausahaan	3,89	5,23	134,45	Sangat Tinggi
24	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,96%	0,90	94,05	Sangat Tinggi
25	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0,93%	0,96	103,38	Sangat Tinggi

No	Indikator	Target 2025	Capaian 2025	Tingkat Capaian (%)	Skala Kinerja
26	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	30,02	Data Capaian Belum Rilis	-	-
27	Gini Rasio	0,248	0,232	106,8	Sangat Tinggi
28	Pendapatan per kapita (ribu)	57.850	52.370	91	Sangat Tinggi
29	Tingkat Kemiskinan	6,50%	5,97%	91,80	Sangat Tinggi
30	Indeks Ketahanan Pangan	86,93	71,60	82,37	Tinggi
31	Tingkat Pengangguran terbuka	4,71%	4,71%	100	Sangat Tinggi
32	Produktifitas tenaga kerja	98,35	96,17	97,78	Sangat Tinggi
33	Indeks Kesejahteraan Sosial	50,50	Data Capaian Belum Rilis	-	-
Misi V : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana					
34	Indeks Risiko Bencana	200,28	240,30	119,98	Sangat Tinggi
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	78,96	109,77	Sangat Tinggi
36	Indeks Ketahanan Daerah	0,55	0,34	61,82	Rendah
37	Indeks Pembangunan Infrastruktur	41,52	36,02	86,75	Tinggi
38	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,40	5,45	35,39	Sangat Rendah
39	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	19,25	13,35	69,35	Sedang
40	Jalan dalam kondisi mantap	60%	58,37%	97,28	Sangat Tinggi
41	Rasio Konvektivitas	69,00	68,50	99,28	Sangat Tinggi
42	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	73,75	65,82	89,25	Tinggi
Misi VI : Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat					
43	Persentase Nagari Mandiri (Indeks Desa)	46,37%	58,69%	126,57	Sangat Tinggi
44	Jumlah Nagari Mandiri	43 Nagari	54 Nagari	126	Sangat Tinggi

DOKUMENTASI

















PEMERINTAH KABUPATEN AGAM INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 4 Lubuk Basung

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, namun masih perlu penyempurnaan sesuai dengan hasil reviu.

Lubuk Basung, 31 Maret 2026

INSPEKTUR,



Drs. WELFIZAR, M.Si, CGCAE, FRMP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740606 199303 1 002